



PENDIDIKAN & BELA NEGARA



PENDIDIKAN & BELA NEGARA

Indri Arrafi Juliannisa - Tri Rizki Handayani - Rahmi - Maulana Riyan - Diah Ambarwati
Rifky Ramadhani - Pangesti Sekar Jati - Siti Mar'atus Sholekhah - Dimas Bagus M.A
Helmy Haliensah - Rizfan Bahardiansyah. N - Attifah Meita Rahmah - Charia Roswita
Chika Chairunnisa - Hikmah Nurain - Nadhifa Ramadanisa - Eka Yulia Ningsih - Reihana Anisa

PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

Tim Penulis:

Indri Arrafi Juliannisa, Tri Rizki Handayani, Rahmi, Maulana Riyan, Diah Ambarwati, Rifky Ramadhani, Pangesti Sekar Jati, Siti Mar'atus Sholekhah, Dimas Bagus M.A, Helmy Haliensah, Rizfan Bahardiansyah. N, Attifah Meita Rahmah, Charia Roswita, Chika Chairunnisa, Hikmah Nurain, Nadhifa Ramadanisa, Eka Yulia Ningsih, Reihana Anisa

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Reni Septiani

ISBN:

978-623-5811-82-6

Cetakan Pertama:

Januari, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami anugerah serta nikmat sehingga kami dapat menyelesaikan buku “Pendidikan dan Bela Negara” dengan baik. Buku “Pendidikan dan Bela Negara” ini terdiri dari lima bab yang memberikan penjelasan terkait pendidikan dan bela negara, sebagai bentuk berwujudan dari bentuk bela negara yang di Implementasikan di kampus UPN Veteran Jakarta dalam dunia pendidikan maka buku ini dapat digunakan sebagai bahan ajar yang dapat mendukung pendidikan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada keluarga serta teman-teman yang mendukung kami dalam menyelesaikan buku ini. Dengan bantuan serta dukungan keluarga dan teman-teman, kami sangat bersemangat dalam penyelesaian buku ini sehingga buku ini dapat dibaca oleh masyarakat Indonesia.

Kami menyadari jika masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam buku ini. Untuk itu, kritik serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna menyempurnakan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam memahami pentingnya pendidikan dan bela negara bagi Nusa, Bangsa, dan Negara.

Januari, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PERKEMBANGAN DAN PERAN PENDIDIKAN BAGI KEMAJUAN BANGSA	1
A. Abstrak.....	2
B. Pendahuluan.....	3
C. Pembahasan	4
BAB 2 MAKNA BELA NEGARA	59
A. Makna Bela Negara	60
B. Bela Negara dan Cara Menumbuhkan Rasa Cinta Terhadap Tanah Air.....	78
C. Konsepsi Bela Negara	95
BAB 3 PERAN UNIVERSITAS DALAM MEWUJUDKAN BELA NEGARA	119
A. Universitas	120
B. Program Pendukung Pendidikan Bela Negara di Universitas	124
BAB 4 MASALAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN PENGHAMBAT BELA NEGARA	165
A. Abstrak.....	166
B. Apa Itu Pendidikan?.....	167
C. Mengenal Bela Negara	178
D. Faktor Penghambat Bela Negara di Dunia Pendidikan.....	195
E. Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Dunia Pendidikan	219
BAB 5 PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA	229
A. Konsep Bela Negara.....	230
B. Definisi dan Peran Masyarakat Dalam Pendidikan dan Bela Negara.....	237
C. Definisi dan Peran Pemerintah Dalam Pendidikan dan Bela Negara.....	240

D. Sejarah Pendidikan dan Bela Negara di Indonesia	243
E. Pentingnya Pendidikan dan Bela Negara Dalam Kehidupan	248
F. Data Serta Permasalahan Pendidikan di Indonesia	252
G. Kebijakan Pemerintah Indonesia	258
H. Pendidikan dan Kondisi Bela Negara di Indonesia	260
I. Sinergitas Dalam Dunia Pendidikan dan Mewujudkan Bela Negara	268
J. Contoh Kasus	273
DAFTAR PUSTAKA	282
PROFIL PENULIS	296

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spektrum Bela Negara	98
Tabel 4. 1 Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Sekolah Tiap Provinsi, Tahun 2019/2020	196
Tabel 4. 2 <i>Snapshot of School Climate</i> (Cuplikan Iklim Sekolah)	205
Tabel 4. 3 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Data Diatas.....	210
Tabel 4. 4 Jumlah Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Pekerjaan.....	216

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Jumlah Perguruan Tinggi, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa di Bawah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi, 2020	199
Grafik 4. 2 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Indonesia Tahun 2016-2020	200
Grafik 4. 3 Ruang Kelas Menurut Status Sekolah dan Kondisi Kelas di Indonesia Tahun 2016-2020	201
Grafik 4. 4 Persentase Penduduk Buta Huruf Usia 15+ Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020	203
Grafik 4. 5. Pemakai Narkoba Dalam 1 Tahun Terakhir di Kalangan Pelajar/Mahasiswa Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (%) Tahun 2018.....	215
Grafik 5. 1 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Usia Tahun 2018-2020 di Indonesia (dalam persen)	253
Grafik 5. 2. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020 di Indonesia	256
Grafik 5. 3. Proporsi Sekolah dengan Akses Listrik dan Komputer Tahun 2016 -2018 di Indonesia (dalam persen).....	256

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Monumen Yos Sudarso Terkena Vandalisme Masyarakat	67
Gambar 2. 2 Bagan Konsep dan Prinsip Kepemimpinan Bela Negara	71
Gambar 2. 3 Ir. Soekarno dan Moh. Hatta Tokoh Proklamator Indonesia	77
Gambar 2. 4 Contoh sikap cinta tanah air	79
Gambar 2. 5 Contoh kegiatan belajar di sekolah	85
Gambar 2. 6 Perubahan Nama Pendidikan Kewarganegaraan	88
Gambar 2. 7 Contoh Seni Tari Saman di Indonesia	91
Gambar 2. 8 Contoh Festival Pekan Kebudayaan Aceh di Indonesia	93
Gambar 2. 9 Prinsip-Prinsip Penerapan <i>Good Governance</i>	106
Gambar 2. 10 Konsep Kebijakan Publik	115
Gambar 2. 11 Tujuan Bela Negara	116
Gambar 3. 1 <i>School tot Opleiding van Indische Artsen/ STOVIA</i> pada tahun 1916	120
Gambar 3. 2 Kampus TH Bandung dilihat dari IJzermanpark (Taman Ganesha), dengan latar belakang Gunung Tangkuban Parahu	121
Gambar 3. 3 Potret Kampus Bela Negara, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	122
Gambar 3. 4 Program-Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	124
Gambar 3. 5 Proses Program Pertukaran Pelajar	129
Gambar 3. 6 Proses Program Magang	135
Gambar 3. 7 Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	137
Gambar 3. 8 Proses Program Penelitian/ <i>Riset</i>	140
Gambar 3. 9 Proses Program Proyek Kemanusiaan	141
Gambar 3. 10 Proses Program Wirausaha	147
Gambar 3. 11 Proses Program Studi Independen	149
Gambar 3. 12 Proses Program KNNT	150
Gambar 3. 13 Ilustrasi Proses Berpikir Kritis	151
Gambar 3. 14 Nilai Dasar Pikir yang dilandaskan pada UPNVJ sebagai budaya kerja di lingkungan kampus	153
Gambar 3. 15 Pembentukan KOMCAD (Komponen Cadangan) di Indonesia	155

Gambar 3. 16 Potret Resimen Mahasiswa Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Tahun 2014.....	160
Gambar 3. 17 Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.....	163
Gambar 5. 1 Berita Terkait Program Bela Negara.....	273



PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

BAB 1: PERKEMBANGAN DAN PERAN PENDIDIKAN BAGI KEMAJUAN BANGSA

BAB 1

PERKEMBANGAN DAN PERAN PENDIDIKAN BAGI KEMAJUAN BANGSA

A. ABSTRAK

Pendidikan menjadi sebuah pokok yang wajib dipenuhi manusia sebagai penunjang kualitas hidup agar lebih baik di masa mendatang. Sejak manusia belum mengenal tulisan, sistem pendidikan sudah ada dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari awal manusia mengenal tulisan dan dapat komunikasi dengan dunia luar yang berperan bagi perkembangan sistem pendidikan. Pendidikan begitu banyak memberikan partisipasinya dalam pembangunan ekonomi, hal ini telah menjadi pertimbangan yang sifatnya absolut dan aksiomatis. Banyak kajian akademis dan empiris yang sudah memberikan bukti dari kebenaran tersebut.

Manusia yang berakhlak baik, yang mempunyai moral tinggi sangat dibutuhkan untuk dibentuk ataupun dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya mementingkan pentingnya mengenyam pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep dari pendidikan itu sendiri melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia secara terus-menerus dan merata di seluruh daerah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berisi tujuan pendidikan yaitu “.. *agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,*

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, buku ini membahas mengenai sejarah pendidikan yang ada di Indonesia, peran pendidikan bagi Bangsa Indonesia serta kondisi pendidikan Indonesia saat ini dan tantangan pendidikan Indonesia di masa depan yang harus kita hadapi untuk mewujudkan impian Bangsa.

B. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan gerbang awal menuju peradaban manusia yang lebih baik. Proses pembangunan manusia sangat bergantung pada kualitas pendidikan, oleh karenanya penting bagi sebuah bangsa untuk dapat menciptakan iklim pendidikan yang mumpuni. Bagus atau tidaknya kemajuan bangsa dapat ditinjau dari perkembangan ilmu pengetahuan di bangsa tersebut, baik dari segi proses yang terjadi maupun *output* yang dihasilkan.

Menjadi sebuah hal yang diketahui bersama bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang layak. Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menerangkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Negara harus dapat menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi warga negaranya. Dengan dibangunnya pendidikan bagi warga negara, maka selain melaksanakan kewajibannya secara tidak langsung negara juga menanamkan investasi pada modal manusia. Masyarakat yang berpendidikan mempunyai produktivitas yang lebih baik daripada yang kurang berpendidikan. Peran serta masyarakat sangat penting bagi kemajuan negara

Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia sudah termasuk dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam undang-undang tersebut berisi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa (Sujana, 2019). Dalam peraturan tersebut pendidikan disebutkan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Berkaca pada sejarah pendidikan di Indonesia, semestinya harus ada perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas pendidikan bangsa ini tidak selalu terbelakang. Lebih jauh lagi, tantangan yang muncul akibat perubahan zaman sudah menanti di depan, tentunya ini menjadi teguran keras bagi sistem pendidikan di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Sistem Pendidikan Indonesia

Pendidikan menjadi sebuah pokok yang wajib dipenuhi manusia sebagai penunjang kualitas hidup agar lebih baik di masa mendatang. Sejak manusia belum mengenal tulisan, sistem pendidikan sudah ada dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat dari awal manusia mengenal tulisan dan dapat komunikasi dengan dunia luar yang berperan bagi perkembangan sistem pendidikan. Terdapat ciri khas pada sistem pendidikan di masing-masing masa, adapun sistem pendidikan di Indonesia dibagi dalam enam masa (Susanto, 2019).

a. Sistem Pendidikan Masa Hindu Budha

Pada abad ke-5 Masehi, agama Hindu dan Budha mulai masuk ke Indonesia, dimana pendidikan mulai dikenalkan dengan landasan agama sebagai pedoman. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh agama seperti dibuatnya patung-patung, candi, bangunan kerajaan dan seni bela diri. Pengenalan pendidikan dimulai dari adanya Kerajaan Kutai yang menunjukkan penggunaan tulisan pallawa dan bahasa sanskerta yang terdapat pada prasasti yupa. Perkembangan pendidikan dilanjutkan dengan adanya sastra, sistem penanggalan, serta pengajaran untuk beternak dan bertani yang mulai pesat. Namun, pendidikan hanya ditunjukkan untuk golongan kasta tinggi saja. Sehingga rakyat biasa yang berada di kasta rendah tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, karena sistem pendidikan didasarkan pada kasta.

Perkembangan selanjutnya, adanya Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pendidikan agama Budha di Asia Tenggara. Hal ini membuat para pelajar yang akan ke India akan singgah terlebih dahulu untuk belajar di Sriwijaya. Dengan corak kerajaan maritim, pendidikan di Sriwijaya berkaitan dengan perniagaan dan menggunakan bahasa melayu kuno. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya mengirinkan pula para warganya untuk belajar ilmu pengetahuan dan agama ke India. Hal ini menghasilkan para pelajar yang dapat menguasai pengetahuan dan ahli pada bidang agama Budha (Djoened, 2008).

Pada abad ke-8 Masehi, di Kerajaan Mataram Kuno menunjukkan bukti perkembangan pendidikan dan pengajaran agama Hindu-Budha yang terlukis di Candi Borobudur. Dimana terdapat Brahmana sebagai seorang guru yang mengajari muridnya. Selain itu, agama Buddha yang diajarkan adalah Hinayana dan Mahayana. Berarti pendidikan telah diberikan untuk laki-laki dan perempuan dengan mengutamakan budi pekerti serta kesusilaan.

b. Sistem Pendidikan Masa Islam

Terdapat beberapa teori berkaitan dengan masuknya islam ke Indonesia, salah satunya teori Gujarat. Dalam teori Gujarat dikatakan bahwa islam datang ke Indonesia abad 13 M yang dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India. Dimana pedagang tersebut datang sekaligus berdakwah di bagian barat Indonesia, maka terbentuklah Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan islam pertama di Indonesia. Pendidikan mulai dikembangkan oleh para ulama dan guru agama melalui pembangunan pusat pendidikan seperti masjid dan pondok. Dasar pendidikan Islam terletak pada ajaran sesuai Al-Quran. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai pusat belajar agama Islam yang juga untuk tempat bertemu dan berkumpulnya ulama dari seluruh negeri untuk berdiskusi mengenai keterkaitan masalah agama dan duniawi.

c. Sistem Pendidikan Masa Penjajahan

Pada zaman penjajahan pendidikan hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, yaitu untuk golongan bangsawan dan petinggi negara. Dimulai pada abad ke 16 datanglah pedagang bangsa Eropa di Asia

Tenggara. Untuk pertama kalinya bangsa Portugis berlabuh di Asia Tenggara pada tahun 1509, tepatnya di kota kerajaan Malaka. Bangsa Portugis menyerang Malaka pada tahun 1511 dan selanjutnya menaklukkan Malaka dengan tujuan menguasai lada dan rempah-rempah yang bersumber dari kota kerajaan Malaka. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan De Abreu, bangsa Portugis menuju Maluku dan dalam perjalanannya, bangsa Portugis juga singgah di beberapa pelabuhan seperti Aceh, Sunda Kelapa, Banten, Cirebon, Demak, Gresik dan terakhir Ternate. Akan tetapi, dengan kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596 di Asia Tenggara, perdagangan Portugis segera terdesak dan akhirnya Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641, Portugis akhirnya tersingkir dari wilayah Maluku.

Pada abad ke-16, sebelum kedatangan orang Belanda, Bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan Timur-Barat dengan menemukan jalan laut menuju dunia Timur dan menguasai Bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai Perdagangan dan perniagaan menurut Mudyahardjo (Purba, 2018) Selain mencari kekayaan (*gold*) dan kejayaan (*glory*), bangsa Portugis datang ke Timur (termasuk Indonesia) bertujuan menyebarkan agama yaitu Katolik (*gospel*). Pedagang Portugis menetap di tempat rempah-rempah yang mahal dihasilkan, yakni bagian Timur Indonesia, biasanya mereka didampingi oleh misionaris. Untuk menyebarluaskan agama Katolik di Indonesia, para misionaris membangun sistem pendidikan berbentuk sekolah. Ide ini dicetuskan oleh seorang misionaris bernama Franciscus Xaverius, yang dianggap sebagai peletak batu pertama Katolik di Indonesia (Susanto, 2019).

Pada 1536, di Ternate berdiri sekolah yang mengajar dan membimbing bibit-bibit misionaris/pekerja agama. Pada 1536 juga, penguasa Portugis bernama Antonio Galvano membangun sekolah seminari untuk anak-anak dari petinggi pribumi di Maluku. Sekolah yang sama juga dibangun di Pulau Solor dan banyak muridnya mencapai 50 orang. Sekolah ini juga menggunakan bahasa Latin. Meskipun begitu, belum ditemukan secara nyata bahasa apa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah tersebut. Dapat dikatakan bahwa masalah bahasa pengantar merupakan salah satu kesulitan bahkan dalam sistem pendidikan di sekolah-sekolah yang dibangun oleh bangsa Portugis. Murid-murid yang bergolongan

pribumi yang dapat mengikuti studi dengan lancar serta ingin melanjutkan studi, dapat melanjutkan studinya di Goa, pusat kekuatan Portugis di Asia (Susanto, 2019).

Saat itu, penyelenggaraan pendidikan kurang mendapatkan suatu kemajuan yang berarti. Faktor penyebabnya yaitu karena hubungan Portugis dengan Ternate yang semakin kurang baik, di samping itu masyarakat dari kedua negara harus bersaing dan berperang melawan Spanyol dan Inggris. Hal ini menjadi sebuah kesempatan Belanda menguasai Ternate. Bangsa Belanda kemudian menggantikan kedudukan Portugis dengan strategi terencana dengan menerapkan pemakaian bahasa Belanda dan bahasa pada sekolah-sekolahnya. Dengan berakhirnya bangsa Portugis di Nusantara, maka sistem pendidikan Indonesia dikuasai Belanda, dengan tetap memakai basis keagamaan.

Sejak kehadiran Belanda selaku penguasa politik di Nusantara, berbagai kebijakan berbentuk imperialisme muncul sebagai kesatuan dalam semua aktivitas kolonial dengan keinginan menguasai wilayah kolonialnya secara sungguh-sungguh. Ambisi pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi daerah jajahan memerlukan sumber daya manusia yang terdidik. Oleh karena itu, muncul kebijakan dan usaha pemerintah kolonial untuk memperluas pendidikan dalam rangka menciptakan tenaga-tenaga kerja yang terdidik dengan upah murah. Dengan cepatnya perkembangan perekonomian Barat yang ada di Hindia Belanda, maka diselenggarakanlah pendidikan bagi rakyat pribumi oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk membina tenaga kerja yang terampil dan dapat dipekerjakan pada perusahaan dan bidang lainnya (Siregar, 2016).

Pada tahun 1899, artikel berjudul “Hutang Kehormatan” (*Een Eereschuld*) yang dibuat oleh bangsa Belanda yang bernama Van Deventer diterbitkan, artikel ini berisi tentang kekhawatiran kaum intelektual Belanda terhadap rasa perikemanusiaannya kepada penduduk nusantara. Artikel inilah yang memicu munculnya kebijakan Politik Etis (Politik Balas Budi) dilaksanakan di Nusantara pada tahun 1901 yang berakar dari dua kebijakan sebelumnya yaitu Sistem Tanam Paksa (1830-1870) dan Politik Liberal (1870-1900). Politik Etis mengakibatkan turunnya kesejahteraan pribumi, hal ini disebabkan karena banyak penyimpangan pada program penting *Trias Van Deventer* yang merangkum kebijakan politik etis itu

sendiri. Salah satu program yang termuat dalam *Trias Van Deventer* adalah edukasi atau pendidikan. Edukasi menjadi program yang sangat berpengaruh bagi masyarakat di nusantara. Pelaksanaan program ini diterapkan dengan pendidikan gaya Barat. Hal ini bisa diamati ketika status priyayi hanya dapat diperoleh karena faktor keturunan, tetapi setelah dilaksanakannya Politik Etis ini masyarakat pribumi yang bukan priyayi dapat menggunakannya melalui pendidikan yang tinggi. Sama halnya dengan tenaga kerja yang diperlukan khususnya di bidang industri sangat dibutuhkan dari orang-orang yang mempunyai pendidikan (Prayudi, 2015).

Politik pendidikan kolonial yang terlaksana di Indonesia terdiri dari beberapa ciri-ciri pokok. Ciri-ciri umum tersebut, yakni gradualisme, dualisme, kontrol sentral, keterbatasan tujuan, prinsip konkordinasi, dan tidak adanya rencana pendidikan. Gradualisme adalah sikap lamban pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan dinamika pendidikan. Dualisme adalah perbedaan pendidikan antara penduduk pribumi dengan bangsa Belanda. Kontrol sentral yang kuat adalah tindakan Gubernur jenderal dalam mengatur kebijakan pendidikan. Keterbatasan tujuan artinya tujuan dari sekolah itu sendiri hanya untuk menghasilkan pekerja rendahan. Prinsip konkordinasi yaitu Indonesia dan Belanda mempunyai kurikulum yang sama. Tidak ada perencanaan pendidikan sistematis berarti tidak ada hubungan antar sekolah sehingga tidak ada kesempatan untuk melanjutkan jenjang studi (Heru Sofyan, 2014).

Munculnya suatu sistem pendidikan tidak hanya datang dari suatu proses perencanaan belaka tetapi juga melalui tahapan dan proses yang sangat panjang dan didorong dengan kebutuhan yang mencakup beberapa aspek penting pada pemerintahan Belanda kala itu. Sistem pendidikan pada masa Belanda mencakup beberapa tingkatan yang didasarkan atas lapisan ataupun kelas suatu masyarakat. Tingkatan pendidikan di Indonesia pada zaman Belanda pada tahun 1900-1942 terdiri dari tiga, antara lain: Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*), Pendidikan Menengah (*Middelbaar Onderwijs*), dan Perguruan Tinggi (*Vakonderwijs*) (Wiranata, 2018).

Pendidikan rendah (*Lager Onderwijs*) dapat disebut sebagai sekolah dasar. Pada tahun 1892 terjadi penyusunan kembali pada kebijakan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam kebijakan tersebut memuat bahwa terdapat pendidikan dasar yakni yang pertama untuk bangsawan dengan bahasa pengantarnya bahasa Belanda yang dikenal dengan kelas satu, yang ke dua untuk rakyat jelata dengan bahasa pengantar daerah yang dikenal dengan kelas dua, dan yang ketiga adalah sekolah desa sebagai bentuk keinginan pemerintah untuk memperluas pendidikan dengan biaya serendah mungkin untuk penduduk Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pada pendidikan dasar kelas satu terbagi lagi menjadi HIS, HCS, dan ELS. HIS (*Hollands Inlandse School*) pertama kali didirikan pada tahun 1914, Sekolah ini disediakan untuk golongan bangsawan asli Indonesia. HCS (*Hollands Chinese School*) didirikan pada tahun 1908 diperuntukkan bagi orang timur asing khususnya keturunan Cina. ELS (*Europese Lagere School*) didirikan pada tahun 1818 untuk keturunan timur asing, orang Eropa, maupun bumi putra. Ketiga sekolah tersebut sama-sama mempunyai waktu sekolah selama tujuh tahun (Wiranata, 2018).

Pendidikan Menengah (*Middelbaar Onderwijs*) atau pendidikan lanjutan terbagi menjadi tiga yaitu MULO, AMS, dan HBS. MULO (*Meer Uitgebreid Lager School*) adalah sekolah lanjutan dari sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda yang didirikan pada tahun 1914 dengan waktu belajar tiga sampai empat tahun. AMS (*Algemene Middelbare School*) adalah sekolah menengah umum yang dibangun pada tahun 1915 sebagai sekolah lanjutan dari MULO yang menggunakan bahasa Belanda dan disediakan bagi golongan bumiputera dan Timur asing dengan waktu belajar selama tiga tahun. HBS (*Hogere Burger School*) adalah sekolah menengah yang didirikan pada tahun 1860 sebagai sekolah lanjutan dari ELS (*Europese Lagere School*) yang disediakan untuk golongan Eropa (Sultani, Z. I.M & Kristanti, 2020). Perguruan Tinggi (*Vakonderwijs*). Perguruan Tinggi (*Vakonderwijs*) terdiri dari tiga yakni Sekolah Teknik Tinggi (*Technische Hogeschool*), Sekolah Hakim Tinggi (*Rechtskundige Hogeschool*), dan Pendidikan tinggi kedokteran (Nasution, 2011).

d. Sistem Pendidikan Masa Orde Lama

Masa orde lama diawali dengan pasca kemerdekaan yang dipimpin oleh presiden pertama yaitu Ir. Soekarno. Pada masa itu, Pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Jepang dan menggunakan Bahasa pengantar Bahasa Indonesia. Media pembelajaran pada masa itu menggunakan buku-buku yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman Jepang (Fadli, 2019). Pembahasan pada masa ini dibagi menjadi dua periode yaitu 1945- 1950 dan 1950-1966.

Sistem pendidikan yang diterapkan pada 1945-1950 memberikan kesempatan belajar pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31, Ayat 1 yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap Warga Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pengajaran”. Pendidikan pada periode ini diharapkan mampu mendidik dan menghasilkan warga negara yang sejati serta sedia guna menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan masyarakat (Tim UNY).

Adapun sistem pendidikan yang berlaku pada periode 1945-1950 antara lain (Susanto, 2019):

a) Pendidikan Rendah

Awal kemerdekaan Indonesia pendidikan terendah diselenggarakan dengan sebutan Sekolah Rakyat (SR). Pada jenjang ini fokus untuk meningkatkan taraf pendidikan pada masyarakat dan memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sekolah rakyat ini memiliki waktu 3 tahun lama pendidikannya.

b) Pendidikan Guru

Dalam Periode 1945-1950 dikenal dengan tiga jenis pendidikan guru yang diselenggarakan yaitu Sekolah guru B (SGB), Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru A (SGA).

- 1) Sekolah Guru B lama pendidikan yang ditempuh yakni 4 tahun, Sekolah ini merupakan lanjutan dari tamatan sekolah rakyat. Pelajaran yang diselenggarakan bersifat umum diterima pada kelas I, II dan III. Sedangkan kejuruan diterima pada kelas VI.
- 2) Sekolah Guru C didirikan atas dasar dibutuhkannya tenaga pendidik untuk sekolah rakyat. Sekolah guru c ini dibangun untuk

menghasilkan pendidikan yang singkat karena dirasa perlu guna kebutuhan guru SR. Namun dalam pelaksanaannya dirasa kurang begitu bermanfaat Sekolah guru C ini ditutup.

- 3) Sekolah Guru A didirikan karena munculnya keraguan bahwa pendidikan yang diselenggarakan 4 tahun kurang menjamin kualitas dari taraf pendidikan guru. Kemudian dibukalah SGA yang ditempuh selama 3 tahun yang diselenggarakan guna pembelajaran yang lebih luas dan mendalam.

c) Pendidikan Umum

Terdapat dua jenis pendidikan umum yang diselenggarakan pada periode 1945-1950 yaitu:

- 1) Sekolah Menengah Pertama, sama seperti pendidikan pada zaman Jepang pada jenjang SMP ini menggunakan rencana pembelajaran yang sama pula. Namun terdapat perbedaan pada pembagian A dan B mulai kelas II. Sehingga terdapat pembagian kelas IIA, IIB, IIIA dan IIIB. Pada bagian A lebih difokuskan pelajaran bahasa dan praktek administrasi sedangkan bagian B lebih berfokus pada ilmu Alam dan ilmu pasti.
- 2) Sekolah Menengah Tinggi, merupakan pendidikan yang ditempuh setelah SMP dan lulusan dari SMT dapat melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi.

d) Pendidikan Kejuruan

Dalam Pendidikan awal kemerdekaan terdapat pendidikan Kejuruan yang di dalamnya dibagi menjadi pendidikan ekonomi dan pendidikan Kewanitaan.

- 1) Pendidikan Ekonomi ini ditempuh setelah lulus dari SR. Pendidikan Ekonomi ini muncul setelah dibukanya sekolah dagang. Pendidikan ini fokus untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi dan pembukuan.
- 2) Pendidikan kewanitaan ini muncul setelah kemerdekaan, Pada tahun 1947 didirikan Sekolah kepandaian Putri (SKP) lama pendidikannya ditempuh selama 4 tahun setelah SMP.

e) Pendidikan Teknik

- 1) Kursus Kerajinan Negeri (KKN), merupakan sekolah teknik terendah dan hanya membutuhkan waktu tempuh selama 1 tahun, KKN terdiri dari jurusan-jurusan: Kayu, anyaman, besi, batu, lasa dan perabotan rumah.
- 2) Sekolah Teknik Pertama (STP), pada STP ini menghasilkan tenaga tukang yang lebih terampil disertai pembelajaran teori di dalamnya.
- 3) Sekolah Teknik (ST), pada jenjang ini akan mendidkan pengawas bangunan dan lama pendidikan yang ditempuh selama 2 tahun setelah STP.
- 4) Sekolah Teknik Menengah (STM), merupakan jenjang pendidikan untuk menghasilkan tenaga ahli teknik dan pejabat teknik menengah dan lama pendidikan yang ditempuh selama 4 tahun setelah SMP atau ST.
- 5) Pendidikan Guru untuk sekolah-sekolah teknik, untuk menghasilkan guru-guru sekolah teknik.

f) Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Republik

Pada masa setelah kemerdekaan ini kesempatan guna mendapatkan pendidikan Tinggi terbuka lebar dan mampu dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat yang menginginkannya. Perguruan tinggi yang telah didirikan seperti Universitas Gajah Mada dan beberapa sekolah akademi di Jakarta. Terdapat lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Republik Indonesia seperti Di Klaten ada sekolah tabib (Kedokteran) Tinggi, Sekolah Tinggi Farmasi, Sekolah Tinggi Pertanian, Di Solo ada Sekolah Tabib (Kedokteran) Tinggi tingkat doktoral sebagai lanjutan dari sekolah tinggi yang berada di Klaten. Serta di Yogyakarta ada UGM dengan bermacam-macam Fakultas di dalamnya.

g) Pendidikan Tinggi di Daerah Pendudukan Belanda

Pada tahun 1946 atas dasar rancangan dari pemerintahan Belanda didirikan Universitas Darurat (*NOOD Universiteit*) yang terdiri dari beberapa fakultas antara lain Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, Filsafat dan pertanian serta Fakultas Teknik. Universitas Darurat ini didirikan bertujuan Namun pada tahun 1947 Universitas tersebut

resmi diubah namanya oleh pemerintahan Belanda menjadi Universitas Indonesia (*Universiteit Van Indonesie*) (Fadli, 2019).

Sistem pendidikan pada periode 1950-1966 dapat dibilang sebagai periode revolusi pendidikan. Saat itu kondisi politik Indonesia yang belum dan tidak stabil menyebabkan dunia pendidikan ikut terseret dalam tubuh propaganda politik. Pada prinsipnya pendidikan dijadikan sebagai indoktrinasi yang dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan Orde Lama. Namun, pendidikan pada masa ini terbilang sebagai pengembangan terhadap citra guru. Citra guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa mulai diperkenalkan dan dikembangkan pada masa ini. Guru harus disiplin dan tegas karena diharapkan mencetak peserta didik yang berkompeten dan mempunyai daya saing (Fadli, 2019).

Pada periode ini juga terdapat jenjang pendidikan perguruan tinggi yang bermutu dan banyak diminati oleh orang-orang. Pendidikan jenjang tinggi diadakan demi untuk mencetak orang-orang yang mampu meneruskan pembangunan bangsa. Pada masa ini juga lulusan terbaik atau guru-guru terbaik di ekspor ke negara tetangga. Banyak beasiswa yang diberikan kepada anak-anak yang mau belajar keluar negeri, dengan harapan kepulangan mereka ke Indonesia dapat membawa hal baru yang dapat diterapkan di negara Indonesia. Pendidikan semakin berkembang dengan adanya semboyan pendidikan yaitu *“ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”* yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara. Dalam hal ini tentu saja sudah terlihat bahwa keseriusan masa ini atau Orde Lama dalam mengembangkan pendidikan. Pendidikan sudah menuju ke arah kemajuan yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945 (Fadli, 2019).

e. Sistem Pendidikan Masa Orde Baru

Pendidikan merupakan aspek yang masuk dalam dampak adanya rezim baru yakni orde baru yang mana dulunya diakuisisi oleh rezim orde lama atau zaman Soekarno. Pada orde baru kegiatan pendidikan berfokus pada program Repelita yang mana terdapat unit yang menjurus pada hal tersebut yakni pengentasan melek huruf dan wajib belajar 12 tahun. Masa orde baru adalah pendidikan yang menjurus pada sebuah doktrinisasi

dimana segala aspek kebijakan pendidikan pada masa orde baru sehingga tidaklah heran bila banyak sekali kebijakan pendidikan yang berbau doktrinisasi di dalamnya hal ini didukung dengan pemerintahan orde baru memiliki karakteristik yang berupa kuat, dominan, represif dan militeris. Sehingga aspek pendidikan adalah hal utama yang terkena dampak terus berlanjut hingga masa kejayaan orde baru (Sulastomo, 2010).

Walaupun begitu pendidikan pada masa orde baru memberikan efek sasaran yang mereka tunjukan berupa segala aspek dan jenjang pendidikan dimana SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan Tinggi ada dalam aspek kebijakan orde baru, meski bentuk pendidikan pada masa ini berupa doktrinasi pada bentuk ideologis hal ini menyebabkan gagasan dan inovasi yang dilontarkan oleh seorang siswa zaman orde baru sangatlah minim. Pada awal Orde Baru kebijakan pendidikan Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Berdasarkan hal tersebut disebutkan secara umum tujuan pendidikan Orde Baru untuk membentuk manusia berjiwa Pancasila, cerdas, terampil serta berbudi pekerti kepribadian sesuai Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pembangunan (Muzammil, 2016). Tujuan pendidikan ini sesuai ideologi pembangunan yang dijadikan sebagai slogan atau jargon pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan masa ini disesuaikan dengan gerakan pembangunan pemerintah.

Kebijakan pendidikan pada 1972, yaitu pemerintah memberikan pendidikan Aksarawan fungsional, yang memberikan pelajaran membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan lain. Selain itu, kurikulum 1968 menekankan pendekatan pelajaran yaitu kelompok pembinaan Pancasila, kecakapan khusus dan pengetahuan dasar. Materi yang disampaikan lebih bersifat teoritis dan tidak mengaitkan aspek di lapangan. Tujuan penerapan kurikulum tahun 1968 ialah, pendidikan ditekankan pada penerapan Pancasila agar peserta didik menjadi pribadi yang kuat, sehat, cerdas, beragama, memiliki moral, dan berbudi pekerti. Kurikulum tahun 1975 diubah berdasarkan pengembangannya. Pada kurikulum ini pendidikan mulai menerapkan teknologi pendidikan. Model pengembangannya tidak difokuskan ke materi melainkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pengajaran ini disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertera pada Garis-garis Besar Haluan Negara

(GBHN). Kurikulum 1975 lebih menekankan tujuan, agar pendidikan diselenggarakan lebih efektif dan efisien berdasarkan *management by objective*.

Kurikulum tahun 1984 adalah kurikulum penyempurna dari kurikulum 1975. Kebijakan ini diterapkan karena adanya beberapa pertimbangan yang mendasarinya. Kurikulum ini menekankan pada sebuah proses belajar yang mengikuti perkembangan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah keterampilan proses yang pusatnya adalah peserta didik. Guru dituntut untuk membuat peserta didik mau berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena inti dari kurikulum ini adalah Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Kemudian kurikulum 1984 dirasa belum memenuhi mutu pendidikan oleh masyarakat. Sehingga dalam rapat kerja Badan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diganti menjadi kurikulum 1994.

Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan terdiri atas dua jenjang pendidikan yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). SLTP merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikannya ditempuh dalam 3 tahun. Sementara itu SLTA merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah pertama yang memiliki jalur umum atau SMA dan kejuruan atau SMK. Tujuan umum keduanya jelas berbeda, SMA memiliki tujuan agar dapat mencetak lulusannya yang menguasai pendidikan umum dan memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan SMK bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan pendidikan yang efisien dan siap kerja dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Hal itu sejalan dengan implementasi pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.

Pendidikan tinggi masa Orde Baru bertujuan untuk mempersiapkan tenaga profesional serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Kebijakan Pendidikan Tinggi masa Orde Baru antara lain ada Kuliah Kerja Nyata (KKN), Proyek Pendidikan Guru, Universitas Terbuka (UT), serta NKK BKK. Di antara kebijakan tersebut, NKK BKK merupakan program pendidikan tinggi yang menimbulkan kontroversi. NKK BKK menjadi simbol rezim orde baru yang melakukan pembungkaman terhadap kekuatan politik mahasiswa

serta pengekanan terhadap setiap gerakan mahasiswa (Andre Cahya, 2021)

f. Sistem Pendidikan Masa Reformasi-Sekarang

Tuntutan reformasi di berbagai bidang yang terjadi pada tahun 1998 mengakibatkan orde baru lengser dan dampaknya juga dirasakan hingga pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan yang baru sifatnya lebih reformatif dan revolusioner (Hartono, 2016). Sehingga, hal tersebut karena adanya ruang yang cukup besar untuk merumuskan hal yang demikian pada era reformasi. Sistem pemerintahan dan keadaan politik ikut mempengaruhi kebijakan pendidikan yang diambil dalam era reformasi ini.

Pada awal era reformasi, sistem pemerintahan yang super sentralistik kemudian diubah menjadi sistem yang desentralistik melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lengkap dengan perangkat PP, Kepres, dan Kepmen yang mengikutinya. Dengan dikeluarkannya UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, ditetapkan bahwa sekitar 80% dari jenis urusan pendidikan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi kemudian diserahkan pada pemerintahan kabupaten/kota. Dengan demikian, bentuk pelaksanaan pendidikan juga ikut berubah dari sentralistik menjadi desentralistik dan diarahkan pada pengembangan lokalitas yang memperhatikan keberagaman.

Pendidikan pada masa reformasi dijadikan sektor pembangunan yang desentralistik. Dalam pelaksanaan satuan pendidikan masyarakat dapat berperan aktif sebab Pemerintah mengenalkan model Manajemen Berbasis Sekolah. Untuk mengimbangi kebutuhan sumber daya manusia yang dituntut berkualitas, maka nantinya akan ditetapkan kurikulum berbasis kompetensi.

Sehingga, tiap-tiap daerah diberikan kewenangan untuk mengaktualisasikan dirinya namun setiap kebijakan yang diambil oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh pusat. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan

provinsi sebagai daerah Otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan (Hartono, 2016).

Pembaharuan dan reformasi pada sistem pendidikan serta pembelajaran kemudian dilaksanakan dengan paradigma baru memasuki tahun 2003. Hal tersebut dilakukan melalui dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 oleh Pemerintah tentang sistem pendidikan nasional, menggantikan UU No.2 tahun 1989.10 Pendidikan kemudian diketahui dan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Maka dapat dilihat bahwa terjadi usaha perbaikan kualitas pendidikan pada sistem pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan karakter untuk mengembangkan sumber daya manusia (Hartono, 2016).

Dalam Bab 1 Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003, juga disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun komponen-komponen yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana prasarana, sumber daya, serta masyarakat (Soetarno, 2003). Tujuan pendidikan yang dimaksud adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Berbagai perubahan kabinet yang ada ada kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil oleh Pemerintah pada perkembangan selanjutnya. Namun pada kenyataannya, secara garis besar pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional masih diselenggarakan secara sentralistik. Di mana tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, persyaratan penerimaan siswa, guru, dan karyawan hingga jenjang kenaikan pangkat hingga penilaiannya diatur oleh pemerintah pusat dan skalanya berlaku secara nasional. Meskipun dikatakan bahwa masyarakat berperan sebagai mitra pemerintah pada

penyelenggaraan pendidikan, dalam praktiknya pemerintah adalah pihak yang mengendalikan serta mengelola sistem pendidikan secara nasional. Pengawasan dan penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dilaksanakan oleh Pemerintah untuk pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang ada (Munirah, 2015). Dalam penyelenggaraan pendidikan, peran masyarakat di manifestasikan dalam penyelenggaraan sekolah, keluarga, dan unit-unit pendidikan non formal lainnya.

2. Peran Pendidikan di Indonesia

a. Peran Pendidikan Terhadap Ekonomi

Pendidikan begitu banyak memberikan partisipasinya dalam pembangunan ekonomi, hal ini telah menjadi pertimbangan yang sifatnya absolut dan aksiomatis. Banyak kajian akademis dan empiris yang sudah memberikan bukti dari kebenaran tersebut. Pendidikan merupakan sebuah proses keluar dari keterbelakangan dan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kegagalan dari pendidikan akan menimbulkan berbagai masalah besar, contohnya: peningkatan angka kriminalitas, peningkatan pengangguran, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, yang pada akhirnya akan tidak hanya berdampak pada aspek sosial namun juga berdampak pada aspek ekonomi yang akan menjadikannya beban yang akan ditanggung berbagai pihak, terutama pihak pemerintah.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah jarangnyanya ekuivalensi yang tinggi antara pendidikan dan pekerjaan yang dibutuhkan sehingga menimbulkan pengangguran terdidik dan terlatih. Oleh karena itu, pendidikan perlu menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, diharuskan untuk mampu meramal dan mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja. Ramalan ketenagakerjaan sebagai acuan dalam perencanaan pendidikan harus mengikuti arus pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan ekonomi dari pemerintahan. Keterlibatan pendidikan dalam ekonomi merupakan usaha untuk mempersiapkan pelaku ekonomi dalam menjalankan fungsi produksi, konsumsi, dan distribusi. Keterlibatan terhadap fungsi produksi yakni ketersediaan tenaga kerja untuk berbagai

tingkatan yaitu manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen rendah, atau secara ekstrim tenaga kerja berkerah putih dan tenaga kerja berkerah biru.

Keterlibatan dalam fungsi distribusi adalah dengan melalui penelitian dan pembangunan produk atau *research and development* yang selaras dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau konsumen. Keterlibatan dalam fungsi konsumsi adalah dengan melakukan pertambahan produktivitas kerja yang akan meningkatkan pendapatan. Pertambahan pendapatan akan menstimulasi pertambahan pada fungsi konsumsi, yang akan dicerminkan melalui peningkatan tabungan yang berasal dari pendapatan yang dipisahkan. Tabungan dapat menjelma sebagai investasi kapital yang akan menjadikan pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi lebih cepat (Widiansyah, 2017).

Saat ini ekonomi digital memiliki anggapan sebagai sektor yang mampu menyangga pertumbuhan ekonomi di masa depan. Di Indonesia sendiri, ekonomi digital sudah mulai melakukan perkembangan, terutama di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya dan lainnya. Dengan menimbang intervensi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan taktik untuk peningkatan ekonomi digital di setiap daerah. Hal ini berarti kondisi pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi digital di suatu daerah. Oleh karena itu, bidang pendidikan dapat dijadikan investasi yang merupakan sebuah komponen yang penting untuk mendorong perkembangan ekonomi digital. Dengan adanya investasi di bidang pendidikan maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpengalaman dan berketerampilan yang lebih baik.

Untung mengurangi kesenjangan regional yang terjadi dalam berkembangnya ekonomi regional maka perlu dilakukan langkah yang tepat dan jitu oleh daerah dengan penggunaan internet untuk kegiatan usaha agar wilayah yang tertinggal dapat menyusul dengan wilayah lainnya. Lalu untuk taktik jangka panjang dapat dilakukan usaha-usaha yang dapat mendorong pertambahan persentase penduduk yang sedang menempuh perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian bantuan berupa beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bagi lulusan SMA atau sekolah menengah atas

yang memiliki prestasi dan ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi namun terhambat masalah biaya. Juga perlu diperhatikan ketersediaan akses infrastruktur yang memadai bagi perguruan tinggi agar masyarakat lebih berminat untuk melanjutkan pendidikan yang ditempuhnya (Retno Hayati, 2019).

Pendidikan dapat menjadi investasi jangka panjang bagi perekonomian Indonesia, dan tidak hanya terbatas dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam praksis manajemen pendidikan modern, salah satu fungsi dari pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis yang berlaku dalam individu hingga tingkatan global. Fungsi teknis ekonomis menyatakan pada keterlibatan pendidikan itu sendiri untuk membantu perkembangan ekonomi. Sebagai contoh pendidikan mampu membantu para siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang bersaing.

Secara umum telah terbukti bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik pula tingkat pendapatannya. Hal tersebut merupakan kemungkinan dari orang yang berpendidikan lebih produktif jika dibandingkan dengan orang yang tidak menempuh pendidikan. Produktivitas yang dimiliki oleh orang berpendidikan dikarenakan keterampilan yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan yang ditempuh. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang ingin diraih dari pendidikan adalah pengembangan keterampilan hidup.

Para penganut teori *human capital* mengemukakan pendapat bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memberikan manfaat non moneter dan moneter. Manfaat non moneter yang diperoleh dari pendidikan adalah mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi konsumsi, kepuasan kerja, kepuasan dari menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter yang didapatkan dari pendidikan adalah manfaat ekonomis yang merupakan tambahan pendapatan seseorang yang telah mengenyam tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan tingkat pendidikan di bawahnya.

Sumber daya manusia yang berpendidikan dapat menjadi modal vital pembangunan nasional khususnya untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang berpendidikan maka semakin

memudahkan negara untuk membangun bangsanya. Hal tersebut karena telah dikuasainya teknologi, keterampilan dan ilmu pengetahuan oleh sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintah lebih mudah menggerakkan untuk pembangunan nasional. Pendidikan juga memberikan *rate of return* atau nilai balik yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik dari pendidikan merupakan perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah menempuh pendidikan dan memasuki dunia kerja.

Era globalisasi saat ini ditandai dengan menguatnya ekonomi neoliberal, keunggulan ilmu pengetahuan menjadi faktor yang dominan dalam mendorong percepatan suatu bangsa. Dinamika perkembangan ekonomi yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan secara teknis disebut *knowledge driven economic growth* yang menyebabkan lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi berada di tempat yang amat penting dan strategis karena menciptakan tenaga kerja terlatih, menciptakan ilmu baru dan inovasi, serta meningkatkan akses perkembangan ke level yang lebih tinggi (Haryati, 2009).

b. Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Bangsa

Pendidikan adalah usaha yang terintegrasi dalam proses pembelajaran dan perkembangan untuk individu agar tumbuh serta berkembang menjadi insan yang bertanggung jawab, berilmu, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia baik itu jika dilihat dari aspek rohani maupun jasmani. Manusia yang berakhlak baik, yang mempunyai moral tinggi sangat dibutuhkan untuk dibentuk ataupun dibangun. Bangsa Indonesia tidak hanya mementingkan pentingnya mengenyam pendidikan, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu merealisasikan konsep dari pendidikan itu sendiri melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia secara terus- menerus dan merata di seluruh daerah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berisi tujuan pendidikan yaitu “... *agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*”.

Jika dilihat kondisi yang sekarang dan masa depan, kapasitas sumber daya manusia yang memiliki karakter baik sangat amat dibutuhkan saat ini. Hal ini dilakukan guna mempersiapkan untuk menghadapi daya saing dan tantangan global. Memang sulit untuk menciptakan sumber daya manusia yang dikemukakan dalam undang-undang tersebut. Permasalahannya adalah sampai saat ini sumber daya manusia Indonesia masih belum bisa menggambarkan cita-cita pendidikan yang ingin diraih. Sebagai contoh kasus aktual, masih banyak ditemukannya siswa yang menyontek saat sedang ujian, perkelahian antar siswa, malas, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Disisi lain, ditemukan guru sebagai tenaga pendidik yang mencontohkan hal-hal tidak baik terhadap siswanya.

Kondisi ini sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia yang telah merdeka dari tahun 1945. Kondisi ini menggambarkan permasalahan moral yang memegang peran cukup besar yang seharusnya adanya tindakan untuk menanggulangnya. Jawaban paling kompleks terdapat pada pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal dan nonformal, sebagai sebuah usaha untuk menciptakan karakter sumber daya manusia yang memiliki moral sehingga mampu untuk menciptakan pribadi yang tangguh dan kuat untuk menghadapi persaingan yang semakin sulit di masa depan (Inanna, 2018).

Pembangunan karakter bangsa memiliki tujuan untuk membina dan melakukan pengembangan karakter warga negara yang berlandaskan Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki jiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan karakter bangsa dengan dasar Pancasila diharapkan dapat mewujudkan generasi muda yang berintegritas dan berkarakter sehingga bisa untuk menganalisis, memahami, dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini secara terus menerus dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ketakwaan dan akhlak mulia termasuk ke dalam budi pekerti luhur dan kepribadian yang unggul. Cerdas secara emosional yang artinya mengaktualisasi diri melalui adanya interaksi sosial yang (i)

demokratis, (ii) ceria dan percaya diri, (iii) empatik dan simpatik, (iv) membina dan memupuk hubungan timbal balik, (vi) memiliki wawasan kebangsaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, (vii) menghormati kebhinekaan dalam bernegara dan bermasyarakat. Cerdas secara intelektual yang artinya mengaktualisasikan diri melalui olah pikir untuk mendapatkan kemandirian dan kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif, imajinatif, kreatif, dan aktualisasi dari insan yang berintelektual kritis. Cerdas secara kinestetik yang dapat diartikan sebagai mengaktualisasikan diri dengan olahraga untuk menciptakan jiwa yang sehat, berdaya tahan, terampil, sigap, bugar, dan insan adiguna.

Insan Indonesia kompetitif yang artinya manusia yang memiliki kepribadian unggul dan kaya akan keunggulan, memiliki semangat berjuang yang tinggi, mandiri, tidak mudah menyerah, pembangun dan pembina jejaring, dinamis akan perubahan, inovatif, dan menjadi *agent of change* atau sebagai agen pembawa perubahan, produktivitas tinggi, berorientasi pada global, keinginan belajar selama hidupnya, berkualitas, dan menjadikannya rahmat bagi alam semesta (Rahmat, 2016).

Sumber daya manusia ialah komponen yang sangat penting untuk membangun bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Namun untuk mengejar tujuan tersebut, sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang berkarakter. Sumber daya manusia yang memiliki karakter dicerminkan oleh kejujuran, ketulusan, ketegaran, keberanian, kepercayaan, kekuatan dalam diri individu memegang prinsipnya, dan sifat lainnya yang ada pada pribadinya (Inanna, 2018).

Jika berbicara terkait pendidikan moral yang ada di Indonesia, maka pemerintah zaman orde baru, pendidikan moral disangkut pautkan dengan nilai dasar yang ada pada Pancasila. Hal tersebut diartikan bahwa sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai falsafah hidup dan landasan dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa. Untuk itu pendidikan moral ditanamkan pada para siswa melalui adanya mata pelajaran yang berjudul Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang saat ini namanya sudah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pentingnya pendidikan moral sehingga menjadikannya mata pelajaran yang istimewa di samping mata pelajaran pendidikan agama.

Pada zaman itu jika seorang siswa mendapatkan nilai yang kurang di dua mata mata pelajaran tersebut, hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menaikkan atau tetap tinggal kelas bagi seorang siswa. Bahkan hasil nilai dari pelajaran pendidikan moral ini tidak hanya dilihat dari aspek akademis saja.

Untuk melawan krisis moral yang sedang dialami Indonesia, maka pendidikan sudah seharusnya mengambil perannya sebagai tameng moral bangsa. Watak dan kepribadian dari seseorang diciptakan oleh nilai-nilai yang dicetuskan, diupayakan dalam setiap perilakunya. Dalam usaha untuk memperkenalkan dan menyadarkan betapa pentingnya penghayatan nilai-nilai moral, pendidikan moral harus berisi komponen penyampaian pengetahuan moral kepada siswa, serta mengembangkan pengetahuan moral yang sudah tertanam.

Pendidikan moral yang kini ada di sekolah seolah hanya menyampaikan informasi teori-teori dan konsep dari moral itu sendiri pada siswanya, sehingga pendidikan moral yang ada saat ini kurang mampu melakukan perubahan perilaku pada siswanya. Hal ini dibuktikan dari semakin banyaknya isu tentang moral yang kurang baik dari generasi muda dewasa ini. Pendidikan moral sangat perlu ditanamkan sejak dini untuk mengantisipasi berbagai permasalahan akibat dari adanya globalisasi yang semakin kompleks yang membuat semakin rendahnya perhatian dan kepedulian terhadap sekitar, rendahnya kepercayaan diri, tidak bertanggung jawab, dan lain-lain (Inanna, 2018).

Pendidik yang dimaksudkan dapat berupa guru, orang tua, bahkan siapa saja yang mempunyai andil untuk menciptakan pribadi dari peserta didik atau anak. Peran pendidik pada intinya adalah untuk membentuk masyarakat yang bermoral dan bermoral. Lickona, Lewis, dan Schaps serta Azra mengemukakan beberapa pendapat tentang andil peran pendidik, di antaranya:

- 1) Pendidik harus dikaitkan dalam proses pembelajaran, diskusi, dan mempunyai inisiatif sebagai usaha untuk membangun pendidikan karakter.
- 2) Pendidik memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh yang mempunyai nilai-nilai moral dan menggunakan kesempatan untuk mempengaruhi siswa yang dididiknya. Dalam artian pendidik di

lingkungan sekolah haruslah mampu menjadi “uswah hasanah” yang hidup untuk peserta didik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan kepada peserta didik mengenai berbagai nilai-nilai yang baik tersebut.

- 3) Pendidik perlu menanamkan pengertian bahwa karakter siswa tumbuh melalui bekerja sama dan partisipasi aktif dalam mengambil keputusan.
- 4) Pendidik perlu melakukan refleksi atas masalah moral berupa pertanyaan-pertanyaan rutin untuk kepastian bahwa siswa yang dididik mengalami perkembangan karakter.
- 5) Pendidik perlu menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara konsisten mengenai berbagai nilai yang buruk dan nilai yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka andil pendidik di setiap lembaga pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik. Dalam pendidikan formal dan non formal, pendidik (i) harus mampu andil dalam proses pembelajaran, yakni melalui interaksi dengan para siswa untuk mendiskusikan materi pembelajaran, (ii) mampu menjadi model tauladan kepada siswanya dalam berbicara dan berperilaku, (iii) harus mampu menjadikan siswa aktif di dalam pembelajaran dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, (iv) harus mampu mendorong dan melakukan perubahan sehingga kepribadian, keinginan, dan kemampuan guru dapat mewujudkan hubungan yang saling bersahabat dan saling menghargai dengan siswanya, (v) harus mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa agar siswa terbentuk untuk lebih bertakwa, menghargai makhluk lain, memberikan keindahan, dan mempelajari *soft skills* yang akan terpakai untuk kehidupan selanjutnya bagi siswa, dan (vi) mampu menunjukkan rasa kasih sayang kepada siswanya sehingga guru dalam melakukan bimbingannya kepada siswa yang sulit tidak mudah untuk putus asa (Syahbudin, 2018).

Pendidikan memiliki tujuan yang ingin diraih, yakni individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga memberikan manfaat untuk hidupnya sebagai seorang pribadi, maupun sebagai warga negara atau bermasyarakat. Untuk meraih tujuan tersebut, pendidikan

perlu untuk melakukan upaya yang disengaja dan terencana dalam memilih materi atau taktik kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Kegiatan yang dimaksudkan mampu diberikan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, berupa pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal. Jika dikaitkan dengan keberadaan dan kehidupan manusia, kegiatan pendidikan ditujukan kepada empat aspek dalam pembentukan kepribadian manusia yakni pengembangan manusia sebagai makhluk individu, makhluk susila, makhluk beragama (*religius*), dan makhluk sosial.

Pendidikan adalah gejala yang mengglobal, dimana ada manusia, maka di situ pula ada pendidikan. Gejala yang mengglobal ini bukanlah hanya sebuah gejala yang melekat pada manusia saja, melainkan merupakan sebuah upaya untuk memanusiakan manusia, yakni terkait untuk membudayakan manusia. Dengan demikian pendidikan merupakan kewajiban bagi manusia. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia timbullah tuntutan akan terciptanya pendidikan yang dilaksanakan dengan baik, lebih terarah, dan memiliki dasar atas pemikiran yang matang (Suyitno, 2012).

c. Peran Pendidikan terhadap Budaya

Pendidikan pada saat ini hanya mengedepankan penguasaan aspek ilmu pengetahuan dan kecerdasan peserta didik. Apabila peserta didik sudah meraih standar nilai untuk lulus atau telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), pendidikan dianggap telah berhasil. Pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa yang ada dalam diri peserta didik semakin tak terlihat. Betapa rapuhnya karakter dan budaya dalam kehidupan bernegara dapat membawa kemunduran peradaban bagi bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat mempunyai karakter dan budaya yang erat yang akan semakin mempererat eksistensi suatu negara dan bangsa.

Pengembangan pendidikan dengan basis karakter dan budaya bangsa perlu dijadikan sebagai program nasional. Dalam pendidikan, pembentukan karakter dan budaya bangsa pada peserta didik tidak harus masuk melalui kurikulum. Nilai-nilai yang dikembangkan dan ditumbuhkan dalam peserta didik berupa nilai-nilai dasar yang disetujui secara nasional.

Nilai-nilai yang dimaksud tersebut di antaranya adalah kepedulian pada orang lain, solidaritas, toleransi, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan kejujuran.

Untuk pengembangan pendidikan dengan basis karakter dan budaya bangsa, dibutuhkan masukan, antara lain, mengenai model-model pengembangan karakter sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Kebutuhan harus diartikan serius karena dibutuhkan banyak perjuangan. Kerinduan dan keresahan banyak pihak untuk mengembalikan kekuatan pendidikan karakter dan budaya bangsa ditanggapi dengan baik. Oleh karena itu, data akurat yang menyangkut model-model pengembangan karakter dan budaya bangsa perlu dikaji dan dilakukan melalui kajian empiris yakni dengan melakukan penelitian.

Syarat menghadirkan pendidikan karakter dan budaya bangsa di sekolah seharusnya dilakukan melalui holistik. Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dengan bentuk pendidikan yang memiliki sifat kognitif atau bersifat akademis. Konsep pendidikan tersebut harus diintegrasikan ke dalam kurikulum. Hal ini tidak dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter akan diterapkan secara teoritis, tetapi menjadi penopang kurikulum yang sudah ada sebelumnya, yakni dengan mengimplementasikannya dalam mata pelajaran dan keseharian peserta didik (Suyitno, 2012).

Dalam pendidikan dan budaya bangsa ini, segala sesuatu yang diperbuat oleh guru harus mampu memberikan pengaruh pada karakter peserta didik. Sebagai pembentuk karakter peserta didik, guru harus menampilkan keteladanan. Segala hal tentang perbuatan guru sepantasnya menjadi contoh bagi peserta didik. Sebagai contoh cara guru berbicara atau cara penyampaian materi, cara guru bertoleransi, dan berbagai hal lainnya yang terkait. Bertujuan untuk menjadikan kepribadian anak untuk menjadi insan yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.

Kriteria insan yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik dalam suatu masyarakat atau bangsa, secara universal memiliki dasar pada nilai-nilai tertentu dalam sosial, yang banyak terpengaruh oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dan budaya bangsa di dalam konteks

pendidikan adalah pendidikan nilai, yaitu pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya bangsa itu sendiri, dalam tujuan membina kepribadian generasi muda (Suyitno, 2012).

Dalam membangun dan menekankan budaya bangsa kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi *agent of change*. Guru tidak hanya kompeten, tetapi juga menjadi teladan baik dari sikap, perbuatan, dan perilaku, kreatif dan mudah beradaptasi. Demikian pula, terus mengusahakan untuk meningkatkan kualitas diri. Konselor harus yang benar profesional, yang selalu sigap untuk membantu pengembangan diri peserta didik secara optimal dalam melaksanakan aktualisasi diri. Kepala sekolah harus memiliki *principle leadership*, sebagai contoh, disiplin, dan *supervisonships skill*. Kinerja dari pustakawan dan teknisi harus memiliki jiwa dan sikap yang suka untuk menolong. Selain itu, dalam melakukan pelaksanaan pendidikan, harus ada ahli terkait dalam hal ini bisa psikolog maupun dokter yang suka menolong dan ramah.

Pengelolaan pendidikan perlu diusahakan prinsip keadilan, kebermaknaan, dan keramahmatan pada lingkungan. Pengelolaan pendidikan yang demikian dapat diusahakan dengan cara pendidikan yang memiliki basis sekolah dan basis bermasyarakat dengan kesadaran diri dengan mempertimbangkan *balanced centralization-decentralization* yang tetap menempatkan kepentingan daerah. Proses pendidikan dilakukan secara terpadu dengan menjadikan agama sebagai rohnya. Dalam pembelajaran, perlu melakukan penambahan durasi waktu efektif belajar sebagai konsekuensi logis dari orientasi *output* atau keluaran yang mahir. Selain itu, pengelolaan pendidikan perlu dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, proses pendidikan harus mengaitkan orang tua dan masyarakat, baik dalam aspek akademik, ataupun aspek non akademik khususnya aspek moral (Normina, 2017).

Dalam membangun karakter budaya bangsa, lingkungan pendidikan harus tertuju pada mewujudkan lingkungan keluarga yang erat dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya. Kehidupan pada lingkungan sekolah harus mengusahakan lingkungan dengan kondisi yang mendukung untuk perkembangan nilai. Dalam hal ini, sekolah dituntut mampu menciptakan kondisi lingkungan masyarakat dengan nilai-nilai yang baik

dan mengendalikannya melalui memainkan andilnya untuk memfilter nilai-nilai asing yang masuk. Selain itu, pemangku jabatan pendidikan harus dapat memberikan pengawasan terhadap isi media masa yang memberikan manfaat untuk persebaran nilai-nilai dan mengendalikan isi media masa yang memiliki potensi untuk merusak kepribadian anak dan bangsa.

Dalam pelaksanaan pendidikan dengan basis karakter dan budaya bangsa, strategi pengembangan pendidikan diperlukan mengkonseptualisasikan pribadi sebagai sebuah makhluk utuh dengan mengutamakan pentingnya aspek moral. Proses pendidikan harus diusahakan untuk pendidikan nilai seawal mungkin dan selama hidup. Program pendidikan dan kurikulum perlu dikembangkan secara terpadu sesuai dengan latar belakang sosial budaya melalui penempatan nilai moral sebagai rohnya. Aktivitas sehari-hari harus menempatkan pimpinan institusi dan pendidik menjadi acuan dan berperilaku amanah, kasih sayang, dan adil. Pembelajaran hendaknya dapat mewujudkan gerakan pendidikan nilai dan mengawasinya secara terus menerus, baik itu dalam konteks pendidikan nonformal, pendidikan formal, dan pendidikan informal. Proses pendidikan hendaknya memberikan orientasi peserta didik baru dan melepas lulusan tiap jenjang pendidikan dengan materi nilai-nilai yang mampu diterima oleh masyarakat luas. Supaya peserta didik tidak terhilang dari akar budayanya, pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat selama proses pembelajaran dan pendidikan melalui usahanya menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang menarik dan bersih (Normina, 2017).

Melalui pewarisan kebudayaan dan penanaman pada setiap individu, pendidikan datang dengan bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat dan memelihara hubungan timbal balik yang menjadi penentuan proses-proses perubahan tatanan dalam sosio-kultur masyarakat dalam tujuan memajukan peradaban. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk melakukan perkembangan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang terkait dengan tuntutan perubahan zaman. Era globalisasi telah menampilkan nilai-nilai baru, definisi-definisi baru serta perubahan di seluruh ruang lingkup kehidupan manusia yang waktu kedatangannya

tidak bisa diprediksi. Sebagai salah satu perangkat kebudayaan, pendidikan akan melakukan pekerjaan kelembagaan sesuai dengan hukum yang berkembang di masyarakat. Dari hal ini dapat diamati bersama bahwa sebuah alur pembahasan hubungan dialektika antara pendidikan dengan realitas perkembangan sosial faktual yang saat ini tengah menjadi gejala pada hampir seluruh lapisan masyarakat dunia.

Pendidikan selalu dinamis mengikuti perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cerminan dari nilai-nilai kebudayaan dan pendidikan bersifat refleksi dari kebudayaan. Pendidikan juga memiliki sifat progresif, yakni selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Dua sifat tersebut berkaitan akrab dan terintegrasi. Untuk itu pendidikan diperlukan baik dari formal maupun informal. Perbedaan kebudayaan menjadi gambaran bagi bangsa lainnya, membuat perbedaan sistem, isi dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadikannya gambaran tingkat pendidikan dan kebudayaan (Suyitno, 2012).

Aspek-aspek pendidikan merupakan arah sasaran atau tujuan yang harus dibina dan diperhatikan serta dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan segala kegiatan yang bersifat pendidikan yang selaras. Adapun interaksi pendidikan dengan kebudayaan adalah sebagai berikut:

Pendidikan merupakan sebuah proses pembinaan perilaku dan perbuatan supaya anak belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih baik dan hati-hati dari pada sebelumnya. Untuk menggapai tujuan tersebut maka pendidikan ditujukan pada seluruh aspek pribadi meliputi rohani, jasmani, dan moralitas. Sehingga akan menumbuhkan kesadaran pada individu dan bertanggung jawab akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Pendidikan diarahkan kepada setiap lapisan aspek kebudayaan dan kepribadian. Pendidik dan lembaga pendidikan harus membuat pengakuan kepribadian dan menggalang adanya kesatuan segala aspek kebudayaan.

Dalam hal ini manusia membutuhkan latihan untuk menggunakan kecerdasannya dan saling pengertian. Aspek intelek menciptakan manusia teoritis, estetis manusia seni, sosial manusia pengabdian, politik manusia kuasa, agama manusia kuasa dan ekonomi manusia serta sebagai nilai

tambah aspek keluarga yang membentuk manusia menjadi manusia yang berkasih sayang.

Pendidikan harus ditujukan ke pembinaan cita-cita hidup yang luhur. Jika pendidikan dimasukkan ke dalam tingkah laku perbuatan manusia, maka pendidikan harus mampu beradaptasi dengan tujuan hidup manusia, kemudian tujuan hidup tersebut dapat dipilih oleh filsafat hidup yang diyakini seseorang, maka tujuan pendidikan manusia harus berasal dari filsafat hidup individu yang melaksanakan pendidikan. Tujuan pendidikan manusia tidak lepas dari tujuan hidup dari manusia itu sendiri yang didasarkan oleh filsafat hidup tertentu.

Dalam melaksanakan pendidikan di zaman otonomi daerah pada saat ini, sudah sewajarnya pendidikan yang dilakukan memperhatikan aspek budaya, sebagai contoh aspek konsep *life skill* dalam pendidikan guna meningkatkan keterampilan siswa sesudah menamatkan jenjang pendidikan yang ditempuh. Pendekatan melalui budaya ialah cara yang benar untuk membina moral pendidikan bangsa yang mulai ronoj, hal ini dikarenakan budaya memuat berbagai aspek, seperti etika, lingkungan, agama, dan lainnya (Normina, 2017).

Pendidikan memiliki tujuan guna mewujudkan manusia agar dapat menampilkan perilakunya sebagai makhluk hidup yang memiliki budaya yang mampu untuk melakukan sosialisasi dalam bermasyarakat dan beradaptasi dengan lingkungannya dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat secara luas. Fungsi pendidikan budaya ialah (Normina, 2017):

1. Mengenalkan, menjaga, dan mengembangkan unsur-unsur yang ada pada budaya.
2. Pengembangan potensi yang ada pada peserta didik guna menjadi pribadi yang memiliki perilaku baik, hal ini berlaku bagi peserta didik yang sudah mempunyai kesiapan dan perilaku yang menggambarkan budaya bangsa.
3. Perbaikan dengan memperkuat sayap pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam upaya pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat.

4. Sebagai penyaring budaya bangsa sendiri serta budaya bangsa lain yang masuk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang berlaku dan bermartabat.
5. Menumbuhkembangkan semangat berkebudayaan bangsa.

Tujuan pendidikan budaya ialah:

- 1) Mengembangkan potensi nurani dari peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang mempunyai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
- 2) Menanamkan jiwa kepemimpinan serta tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
- 3) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik menjadi manusia yang terpuji dengan nilai budaya.
- 4) Mengembangkan kemampuan peserta didik dengan wawasan Kebangsaan.
- 5) Mengembangkan lingkungan sekolah sebagai sebuah lingkungan yang aman, jujur, penuh dengan kreativitas, dan keakraban, serta rasa kebangsaan yang erat.

3. Kondisi Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

a. Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh suatu wabah yang yang berasal dari Wuhan, China. Virus ini dikenal dengan COVID-19 (*Coronavirus Disease-2019*) virus ini memiliki kecepatan penyebaran yang tinggi dan telah menjadi pandemi global di seluruh negara, termasuk Indonesia. Sejak kasus pertama yang ditemukan di Indonesia pada awal Maret 2020, kasus positif terkonfirmasi sudah menyebar di 34 Provinsi Indonesia. Keadaan yang diluar prediksi ini telah mendesak perubahan pada berbagai sektor, pandemi yang mengakibatkan angka kematian akibat Covid-19 terus meningkat setiap harinya, memaksa Pemerintah untuk membuat kebijakan yang harus diterapkan demi menekan penyebaran Covid-19 (Satgas Penanganan Covid-19, 2021).

Covid-19 yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan,

pneumonia akut, sampai Kematian. Indonesia saat ini tengah menghadapi hari-hari melawan covid-19, Kasus Covid-19 di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Hingga saat ini, 10 September 2021, Indonesia telah melaporkan 4.153.355 kasus terkonfirmasi (Satgas Penanganan Covid-19, 2021).

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, seperti *social distancing*, *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan yang terakhir baru-baru ini adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari kerumunan, karena virus Covid-19 dapat menular melalui komunikasi yang berdekatan. Kebijakan tersebut juga tentunya memaksa dengan waktu yang cepat untuk melakukan pembelajaran dari rumah, karena kampus atau sekolah terpaksa harus ditutup karena jika di hari biasa sebelum pandemi sekolah dan kampus akan dipenuhi oleh siswa dan mahasiswa, hal ini akan memudahkan penyebaran virus Covid-19. Pembelajaran formal yang sebelumnya dilakukan secara konvensional di sekolah atau kampus pun terpaksa harus berubah melakukan pembelajaran dari rumah ketika adanya kondisi pandemi.

b. Kebijakan Pemerintah Terkait Pendidikan di Masa Pandemi

Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya agar para pelaku pendidikan baik peserta didik maupun tenaga pengajar dapat tetap menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sebaik mungkin meskipun melalui cara yang berbeda dari sebelum adanya Pandemi Covid-19. Kemendikbud membuat peraturan tentang pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang tetap diselenggarakan dengan sistem *Study From Home* (SFH), hal tersebut diatur sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 mengenai pencegahan *Coronavirus Disease* (Covid-19) pada satuan pendidikan dan Surat Sekjen Kemendikbud nomor 35492/A.A5/ HK/ 2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) (Salsabila, Sari, Lathif, Lestari, & Ayuning, 2020).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) poin ke 2 yaitu proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut (C, Amelia, Hasanah, & Rahman, 2020):

- a) Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/ jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
- b) Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
- c) Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
- d) Bukti atau proses aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Pendidikan merupakan tombak berkembangnya suatu negara. Untuk menciptakan generasi yang berakhlak dan memiliki intelektual yang tinggi serta akan mampu membangun negara, pendidikan merupakan kunci utama yang harus ditanamkan dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan yang dilakukan secara tepat manusia akan mendapatkan perubahan positif dalam hidupnya, walaupun pendidikan di Indonesia belum dapat dikatakan tepat dikarenakan problem pendidikan yang dihadapi Indonesia saat ini mengenai pemerataan pendidikan karena masih terdapat beberapa kalangan masyarakat Indonesia yang belum dapat mengakses pendidikan dengan layak, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang kini sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia menambah tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia agar dapat menjalankan pembelajaran dengan baik dan tepat ditengah banyaknya permasalahan yang didapatkan dampak dari adanya situasi pandemi.

Berbagai *platform* yang digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh agar tetap bisa melakukan transfer pendidikan seperti *face-to-face* walaupun dari tempat yang berbeda dengan menggunakan *google meet*, *google classroom*, *edmodo*, dan *zoom meeting*, melalui platform tersebut lah proses pembelajaran seperti pemberian materi, presentasi, dan pemberian tugas dapat dilaksanakan. Dalam hal ini kemandirian belajar para peserta didik juga dilatih, karena tenaga pendidik tidak bisa terjun langsung melihat bagaimana progres pembelajaran yang dilakukan oleh para peserta didik karena kondisi ini sangat memerlukan ketertiban dan kedisiplinan dari dalam diri peserta didik, seperti mendengarkan presentasi yang diberikan, mencermati materi yang diberikan, serta mengumpulkan informasi dan tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik.

c. Manfaat dan Peluang Pembelajaran Daring di Masa Pandemi

Kebijakan *social distancing* maupun *physical distancing* guna meminimalisir penyebaran Covid-19 mendorong semua elemen pendidikan untuk mengaktifkan kelas meskipun sekolah tutup. Penutupan sekolah menjadi langkah mitigasi paling efektif untuk meminimalisir penyebaran wabah pada anak-anak. Solusi yang diberikan yakni dengan memberlakukan pembelajaran di rumah dengan memanfaatkan berbagai fasilitas penunjang yang mendukung. Berbagai kekurangan dan tantangan dalam pembelajaran di masa pandemi, susunan strategi pendidikan yang berorientasi pada kemajuan jangka panjang yang dimulai dari kualitas pengajar, kelengkapan sarana prasarana di setiap unit pendidikan, ketersediaan fasilitas jaringan internet, sampai persoalan bantuan untuk para peserta didik perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebaik mungkin. Selain tantangan dan permasalahan yang terjadi, pembelajaran jarak jauh atau daring juga menciptakan berbagai manfaat dan peluang dalam dunia pendidikan, antara lain:

a) Pembelajaran yang lebih memanfaatkan teknologi

Dengan adanya pandemi, kegiatan pembelajaran di berbagai jenjang akan terbiasa menggunakan teknologi sehingga menjadikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi lembaga pendidikan berbasis IT yang berkualitas, serta penyediaan perlengkapan sarana IT yang berkualitas dan memadai.

- b) Melalui pembelajaran jarak jauh peserta didik dan pengajar dapat mengatur waktu perkuliahan dengan lebih fleksibel. Pembelajaran daring menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi wali yang bekerja di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk mendampingi siswa belajar. Dalam hal ini diharapkan pembelajaran jarak jauh dapat menimbulkan kemandirian para peserta didik walaupun tidak diawasi secara langsung oleh para pengajar.
- c) Adaptasi teknologi
Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, baik para peserta didik dan pengajar mulai beradaptasi dengan teknologi sehingga tidak lagi terjadi ketertinggalan teknologi, hal ini sangat bagus di masa revolusi industri 4.0 dimana teknologi merupakan kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat mencapai tujuan.
- d) Pembelajaran daring lebih praktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat, penyampaian informasi lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa lewat *WA Group*. Lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan terutama bila memakai *Google Form*, jika menggunakan *Google Form*, nilai bisa langsung diketahui sehingga siswa lebih tertarik dalam mengerjakan tugas. Selain itu siswa juga memudahkan dalam mengerjakannya. Siswa tinggal memilih pilihan jawaban yang dianggap benar dengan mengklik pilihan jawaban yang dimaksud.

d. Permasalahan dan Tantangan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi

Pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya hampir tidak pernah dilakukan, terpaksa harus dilakukan secepat mungkin dan secara serempak. Hal ini tentunya memberikan tantangan baru bagi semua elemen pendidikan yakni peserta didik, guru, hingga orang tua. Sebagaimana pembelajaran jarak jauh menyebabkan permasalahan besar dari segi waktu, lokasi, dan jarak. Para tenaga pendidik harus menciptakan suasana kelas yang tetap aktif meskipun sekolah di tutup. Pembelajaran secara daring telah terjadi hampir di seluruh dunia selama Pandemi Covid-19 (Herliandry, Nurhasanah, Suban, & Kuswanto, 2020). Tentunya pembelajaran jarak jauh ini didukung oleh perkembangan teknologi yang

tidak terbatas pada era revolusi industri 4.0 saat ini, dengan adanya teknologi pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif meskipun para tenaga pendidik dan peserta didik berada di tempat yang berbeda.

Kondisi seperti ini memaksa semua elemen pendidikan untuk beradaptasi dengan teknologi yang berkaitan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, karena dalam pembelajaran jarak jauh dibutuhkan keterampilan untuk bisa mengoperasikan aplikasi yang digunakan agar tetap dapat berinteraksi dari jarak jauh dengan menggunakan berbagai *platform* aplikasi, jejaring sosial, *E-learning*. Hal ini mungkin belum terlalu familiar di kalangan tertentu, ada beberapa orang yang mengalami *shock culture* akibat dari adanya migrasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pembelajaran tradisional melalui tatap muka, menjadi pembelajaran yang serba menggunakan akses teknologi.

Pembelajaran yang dilakukan dari rumah, tentunya menambah beban tersendiri bagi para orang tua peserta didik dan keluarga peserta didik untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Perubahan yang terjadi perlu disikapi sebaik mungkin dengan kemampuan beradaptasi para orang tua terhadap perubahan ini, karena hal itulah yang menjadi kunci keberhasilan anak dalam meraih pendidikannya. Orang tua dituntut untuk dapat melakukan pendidikan sedemikian rupa dengan kemampuan penyesuaian diri yang baik, sehingga anak dapat menyesuaikan diri dengan baik pula. Keluarga yang belum menjalankan perannya dengan baik akan memberikan dampak terhadap buruknya kemampuan adaptasi anak, dan akhirnya akan menyebabkan anak kesulitan menghadapi perubahan yang terjadi. Dalam hal ini para orang tua juga berlatih untuk menjadi fleksibel dalam menghadapi berbagai hal yang terjadi baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang di mana kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi.

Pembelajaran jarak jauh memberikan berbagai tantangan dan kendala bagi sektor pendidikan di Indonesia, antara lain:

a) Penurunan permintaan terhadap akses pendidikan

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah

banyaknya orang yang di PHK karena perusahaan yang usahanya mengalami penurunan. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan penghasilan keluarga dan mereka tidak memiliki biaya untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya.

b) Masalah dalam pembelajaran secara daring

Bagi para orang tua peserta didik, penghasilan keluarga yang berkurang di tengah tengah pembelajaran yang dilakukan secara daring, maka kebutuhan akan kuota dan akses internet menjadi bertambah maka biaya tersebut memberatkan para orang tua, munculnya kesulitan para civitas akademika dalam menggunakan metode pembelajaran secara daring karena belum dilatih sebelumnya dikarenakan penguasaan teknologi yang terbilang masih rendah. jaringan internet yang kurang memadai atau lambat di daerah tertentu sehingga timbul kesenjangan perbedaan kecepatan internet di berbagai daerah; sebagian pengajar atau tenaga pendidik yang belum memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran daring seperti *handphone* yang masih jadul, kejenuhan dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah yang jika tidak segera diatasi akan menimbulkan tidak optimalnya proses belajar mengajar yang memberikan hasil kurang memuaskan.

Bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan dalam pembelajaran belum mampu menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka karena metode interaksi tatap muka konvensional masih jauh lebih efektif dibanding dengan pembelajaran secara daring. Selain itu, banyaknya keterbatasan dalam pembelajaran daring seperti keterbatasan aksesibilitas internet, perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), serta pembiayaan sering menjadi hambatan dalam memaksimalkan sumber-sumber belajar daring. Namun, pembelajaran daring masih menjadi solusi yang harus terus dilakukan mengingat pandemi Covid-19 yang belum usai khususnya di Indonesia.

Bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) misalnya, di mana praktek sangat diperlukan dalam proses pembelajarannya, pembelajaran daring sangat menghambat proses belajar mereka. Maka dari itu pembelajaran tatap muka menjadi sangat penting guna mengasah kemampuan mereka

yang tidak mungkin dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, terdapat harapan- harapan pendidikan dari masyarakat baik siswa maupun orang tua dengan kondisi yang dialami saat pandemi covid sekarang ini. Siswa berharap sekolah tatap muka segera dilaksanakan agar mereka dapat menerima ilmu dan belajar dengan baik. Selain itu, mereka juga ingin bersosialisasi kembali dengan teman-teman mereka secara langsung sehingga dapat membentuk perilaku mereka.

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini sebenarnya tidak mudah dilakukan, berbeda hampir 80 derajat dengan pembelajaran tatap muka (*face to face*). Perbedaan yang paling mendasar tentu siswa tidak bisa melakukan interaksi langsung dengan guru sehingga komunikasi yang terjalin sangatlah terbatas. Keterbatasan komunikasi menyebabkan terjadinya pemerolehan informasi dan instruksi dari guru sangatlah terbatas. Memang pembelajaran jarak jauh sebaiknya menitik beratkan pada kemandirian siswa kemandirian inilah yang nantinya harus dipupuk di dalam masa pandemi ini.

e. Kebijakan Strategis Pemerintah Untuk Mengatasi Permasalahan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi

Berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh ditengah pandemi Covid-19 harus segera ditangani sebaik mungkin mengingat pendidikan merupakan hal penting yang harus didapatkan oleh semua anak, dalam hal ini Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi atas kendala dan tantangan yang terjadi. Maka dari itu Pemerintah pun membuat berbagai kebijakan strategis demi meminimalisir permasalahan yang dihadapi dari pembelajaran jarak jauh, agar pembelajaran dapat dilakukan dengan efektif. Kebijakan yang dibuat sebagai solusi dari kesulitan para orang tua peserta didik untuk membayar biaya pendidikan dan biaya pulsa internet. Dikti memberikan pemotongan biaya pendidikan dan subsidi bantuan kuota internet untuk koneksi pembelajaran daring, bantuan logistik serta bantuan kesehatan bagi peserta didik yang membutuhkan, antara lain (Sekretariat Guru dan Tenaga Kependidikan, 2020):

- a) Sejak Maret 2020, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan, serta menyediakan inisiatif dan solusi di masa pandemi Covid-19. Pada bulan Maret, terdapat pembatalan ujian nasional, ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum, sekolah yang belum melaksanakan ujian dapat menggunakan nilai lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa, mekanisme PPDB tidak mengumpulkan siswa dan orang tua, PPDB jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor dan prestasi lain.
- b) Kemendikbud melakukan penyediaan kuota gratis, alokasi anggaran Pendidikan Tinggi sebesar Rp 405 M untuk Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, alokasi anggaran Kebudayaan Rp 70 M untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI, peluncuran portal Guru Berbagi, relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, serta pembelajaran *daring*.
- c) Kemendikbud memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 410 ribu mahasiswa, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta (bukan hanya sekolah negeri). Pada bulan Juli s.d. Agustus 2020, sekolah di zona hijau dan kuning diperbolehkan melakukan pembukaan kembali, zona lain masih dilarang, peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus, dan Pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD.
- d) Kemendikbud juga akan memberikan bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan (September s.d. Desember 2020). Besaran bantuan, siswa 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Kepala satuan pendidikan harus melengkapi nomor telepon seluler (*handphone*) peserta didik yang aktif melalui aplikasi dapodik.

Keberhasilan pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh peran teknologi internet saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia pula. Karena secanggih apapun teknologi internet tidak akan berpengaruh signifikan apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka dari itu pemahaman mengenai teknologi menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran *daring*. Peran yang

diberikan dari teknologi internet dalam pembelajaran *daring* berperan penting karena tanpa adanya teknologi internet pembelajaran secara *daring* tidak dapat dilakukan, teknologi internet juga berguna bagi siswa untuk mencari sumber bahan pelajaran yang kurang mereka pahami. Kehidupan pasca pandemi Covid-19 tentu tidak akan sama dengan kehidupan sebelum adanya Covid-19, kebiasaan baru yang akan menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat nantinya seperti menjalani kehidupan yang bersih, melek teknologi, dan fleksibel menghadapi tantangan yang akan ada di masa depan.

Sejak awal tahun 2021, dunia pendidikan mulai mendapatkan titik terang, Kemendikbud melakukan program Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan sudah memenuhi daftar periksa. Daftar periksa tersebut terdiri dari ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, seperti kondisi medis komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif covid-19, dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah tentang Kesiapan PTM terbatas, tata letak duduk siswa, ventilasi, dan lain sebagainya (Berpikir Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Sejak awal Juli 2021, ketika kasus Covid-19 semakin memuncak dikarenakan adanya varian baru yaitu varian Delta yang disebut lebih ganas daripada varian Covid sebelumnya, Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM Darurat akan membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya, Sehingga diharapkan aktivitas masyarakat yang berpotensi memperluas penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir. Terbukti selama proses diberlakukannya PPKM, grafik penyebaran Covid-19 di Berpikir mengalami penurunan, hal ini tentunya merupakan keberhasilan dari kebijakan PPKM yang diterapkan Pemerintah.

Setelah berpikir grafik yang menurun, Pemerintah pun berencana untuk mulai melakukan pembelajaran tatap muka pada akhir Agustus 2021 untuk sekolah yang sebelumnya sudah melaksanakan uji coba PTM sebelumnya dengan kapasitas maksimal 50% bagi daerah yang berada

pada PPKM level 3. Menanggapi hal ini, epidemiology Griffith University Dicky Budiman mengatakan, posisi sekolah dalam masa wabah sangat unik. Ia menyebutkan, saat wabah memburuk, sekolah merupakan sektor paling akhir ditutup. Ketika membaik, sekolah harus menjadi yang pertama pula untuk dibuka.

Namun, pembukaan sekolah tentu saja harus disertai dengan aturan-aturan ketat, mengingat pandemi belum berakhir, dan virus masih berkeliaran di sekitar kita. Protokol kesehatan yang harus tetap dijalani dan diawasi dengan ketat, pembatasan jumlah peserta didik dalam satu ruangan, ventilasi dan sirkulasi udara yang harus diperhatikan dengan baik. Untuk hal ini sekolah diharapkan dapat bekerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat untuk membantu dan memantau kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Berikut adalah strategi yang harus dilakukan sekolah demi menciptakan lingkungan yang aman untuk melakukan pembelajaran tatap muka (Dzulfaroh, 2021) :

- 1) Pada aktivitas yang berpotensi menimbulkan peningkatan pernafasan, seperti berteriak, band, atau olahraga, diwajibkan memindahkan aktivitas di luar ruangan atau ke ruang yang luas dan berventilasi baik
- 2) Pindahkan furnitur yang tidak penting, sehingga memperluas tata letak kelas untuk memaksimalkan jarak antar siswa
- 3) Tambahkan kipas angin di dalam ruangan untuk sirkulasi udara yang baik
- 4) Hilangkan atau kurangi interaksi tatap muka tidak penting di antara guru dan staf sekolah selama rapat, makan siang, dan situasi lain yang dapat menyebabkan risiko penularan
- 5) Untuk siswa dan tenaga pendidik yang sedang tidak sehat, dilarang pergi ke sekolah dan harus tinggal di rumah serta melaksanakan tes untuk mengetahui apakah orang tersebut terpapar virus Covid atau tidak

Pembelajaran tatap muka yang telah direncanakan juga tidak terlepas dari izin orang peserta didik, bahwa orang tua peserta didik harus setuju dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan menandatangani surat pernyataan. Namun berdasarkan keadaan di lapangan, respon orang tua terkait pembelajaran tatap muka sangat positif dan setuju, karena

selama melaksanakan pembelajaran daring orang tua merasa terbebani karena harus menggantikan peran guru di rumah. Namun, protokol kesehatan masih menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang harus selalu diperhatikan. Para orang tua peserta didik ikut senang jika sekolah kembali dibuka, karena mereka juga khawatir karena anak-anak mereka sudah terlalu lama belajar dari rumah dan jenuh, maka para orang tua pun menyetujui dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk anak-anak belajar tatap muka di sekolah. Surat pernyataan tersebut dibuat oleh lembaga pendidikan diatas materai sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Dengan mulai diberlakukannya pembelajaran tatap muka walaupun masih terbatas 50% atau belum bisa *full*, hal ini tentu menjadi kabar yang menyenangkan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka dianggap lebih efektif dibanding pembelajaran daring, karena banyaknya keterbatasan yang dihadapi jika melaksanakan pembelajaran daring. Meskipun masih terdapat perasaan khawatir akan Covid-19 yang belum usai, orang tua tetap menyetujui pembelajaran tatap muka agar anak-anak mereka bisa kembali bersekolah dengan efektif sambil berusaha untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar.

Pemaduan penggunaan sumber belajar tradisional (*offline*) dan *online* adalah suatu keputusan demokratis untuk menjembatani derasnya arus penyebaran sumber belajar elektronik (*e-learning*) dan kesulitan melepaskan diri dari pemanfaatan sumber-sumber belajar yang digunakan dalam ruang kelas. Artinya, *e-learning* bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan belum mampu menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka karena metode interaksi tatap muka konvensional masih jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran online atau *e-learning*. Selain itu, keterbatasan dalam aksesibilitas Internet, perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), serta pembiayaan sering menjadi hambatan dalam memaksimalkan sumber-sumber belajar daring.

Wabah Virus Covid-19 yang belum mereda, memaksa pembelajaran secara daring tetap dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan, walaupun ditemui banyak kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dari

rumah. Berbagai pihak di dunia pendidikan baik peserta didik, pengajar, maupun orang tua yang merasakan berbagai kendala imbas dari pembelajaran secara *online*, yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya mutu pembelajaran bagi peserta didik serta mutu pengajaran bagi tenaga pendidik. Dalam hal ini, semua masyarakat dunia pastinya mengharapkan kondisi pandemi segera berakhir mengingat banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan, semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan juga masih mengharapkan pandemi berakhir agar kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di sekolah secara penuh, agar pembelajaran dan pengajaran dapat dilakukan seefektif mungkin.

Dalam hal ini, peran orang tua menjadi lebih bertambah, selain menjadi wali peserta didik, orang tua pun harus dapat sekaligus menjadi guru di rumah, karena anak-anak tidak pergi ke sekolah. Kesuksesan seorang anak dalam menghadapi pembelajaran dari rumah juga bergantung pada peran orang tua, dengan berbagai cara agar anak dapat fokus untuk menjalani pembelajaran daring tanpa didampingi pengajar atau guru di sampingnya. Posisi orang tua menjadi partner yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan anak-anaknya sehingga perlu dibekali dengan panduan-panduan yang sesuai dengan kebutuhan anak saat ini. Seperti misalnya, panduan mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, keterampilan menyelesaikan masalah, berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi, literasi informasi media dan teknologi, kreativitas dan inovasi serta ICT yang merupakan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Tentu saja proses pendampingan orang tua terhadap anak selama melaksanakan BDR akan membantu pencapaian perkembangan optimal putra putrinya.

Inilah momentum yang baik bagi semua pihak, baik guru dan orang tua untuk mengembangkan pendidikan karakter anak. Saat ini 24 jam anak berada di rumah, sehingga sangat tepat guru dan orang tua berkolaborasi mendesain pola pendidikan karakter yang baik selama pembelajaran jarak jauh di rumah ini. Kualitas komunikasi orang tua dan anak yang semakin baik akan meningkatkan kepercayaan anak terhadap orang tuanya. Dalam hal ini seharusnya orang tua mengambil peran sebagai pendidik karakter yang handal. Pendidikan karakter di lingkungan keluarga harus bisa dioptimalkan dalam kondisi ini. Jangan dibiarkan terlewat begitu saja.

Inilah momentum yang baik untuk menebar benih karakter tersebut. Wadah atau tempat penyemaian sudah cukup baik tinggal bagaimana cara menanamnya. Tentu tidak semua orang tua paham akan hal itu. Di samping itu, sangat diperlukan bantuan guru di sekolah untuk tetap melakukan sinergitas dengan para orang tua selama pandemi ini.

4. Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa Depan

Perubahan akan selalu ada seiring dengan berjalannya waktu. Di berbagai lini kehidupan tak akan luput dari pengaruh-pengaruh perubahan. Bentuk perubahan yang paling kentara dewasa ini adalah globalisasi. Pengaruh arus globalisasi pada masa kini sangat berdampak pada semua lini kehidupan. Keadaan ini terjadi di seluruh belahan dunia termasuk bangsa Indonesia. Globalisasi merupakan sinyal perubahan besar kehidupan umat manusia yang mana masyarakatnya merupakan masyarakat transisi. Bagi bangsa kita hal tersebut secara nyata memperlihatkan transisi dari masyarakat yang berbasis pola kehidupan agraris ke arah masyarakat yang berbasis industri dan informasi dengan pola-pola kehidupan yang berbeda (Istiarsono, 2016).

Perkembangan dunia di zaman globalisasi ini amat banyak mendorong perubahan sistem pendidikan nasional ke arah yang lebih baik dan berkompeten dalam persaingan di segala bidang. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan zaman mendorong bidang pendidikan untuk selalu bergerak. Tentunya fenomena ini akan melahirkan beragam tantangan. Pendidikan di Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat membuat negara ini tertinggal dari negara lain dalam berbagai bidang. Diperlukan langkah nyata guna memperbaiki kondisi tersebut. Salah satu langkah yang harus ditempuh bangsa Indonesia agar tidak semakin hanyut tertinggal dengan negara-negara lain yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Peningkatan kualitas pendidikan mengimplikasikan bahwa mutu sumber daya manusia (SDM) yang terbentuk semakin baik serta akan mampu membawa negara ini bersaing di segala bidang dalam lingkup internasional.

Founding father bangsa ini ternyata telah menyadari betul akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang sekaligus termasuk dalam tujuan negara tersebut mengandung makna mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang siap dan mampu bersaing dengan masyarakat internasional di era globalisasi ini (Sugiyono, Aman, Kumalasari, Sutopo, & Nuryanto, 2015). Dalam mempersiapkan persaingan globalisasi tersebut urusan pendidikan amatlah penting guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang dapat menghadapi arus perubahan zaman.

Pergeseran sudah dirasakan dalam dunia pendidikan meskipun abad ke- 21 baru berjalan dua dekade, dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan kemajuan ilmu tersebut disebabkan oleh adanya sains dan teknologi komputer. Salah satu ciri yang paling menonjol pada abad ke-21 adalah dunia ilmu pengetahuan semakin bertautan satu sama lain, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Telah terbukti semakin menyempitnya dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. (Wijaya, Sudjimat, & Nyoto, 2016).

Saat ini Indonesia masih berjuang dengan kemelut dunia pendidikan yang semakin kompleks. Apalagi pada 2030-2040 nanti, Indonesia diproyeksikan akan mendapat bonus demografi, yaitu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15 sampai 64 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode ini, penduduk usia produktif diprediksi menyentuh angka 64 persen dari total jumlah penduduk yang diprediksi sebesar 297 juta jiwa (Kemenperin, 2019). Supaya Indonesia dapat mengambil manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan.

Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tentu akan mendatangkan keuntungan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Namun, momentum emas ini bisa berbalik menjadi masalah serius apabila persiapan menyambut bonus demografi ini tidak dimatangkan (Purwana, 2017). Oleh sebab itu, pendidikan saat ini sangat krusial karena menentukan keadaan bangsa ini di masa yang akan datang. Apabila Indonesia masih belum bisa menangani masalah sekarang ini, maka mungkin saja akan kewalahan mengatasi kompleksitas tantangan yang timbul beberapa masa kemudian.

Pendidikan yang sebaiknya menjadi pencerahan sudah berubah menjadi tempat yang menyeramkan dengan tingkat kompetisi peringkat yang tinggi dengan menghiraukan pemberdayaan anak didik sebagai individu. Tradisi ranking yang ada dalam sistem sekolah negeri nyatanya justru menimbulkan rasa individualis yang mengkhianati nilai kebersamaan dan gotong royong. Alhasil kebanyakan siswa yang dinyatakan lulus tak lebih dari sekadar mendapatkan ijazah saja. Sementara itu, pada kenyataannya ijazah hanya berguna untuk proses administrasi saja dalam mencari pekerjaan atau membuka lapangan kerja. Hal yang sesungguhnya diperlukan adalah jiwa kepemimpinan, daya kreasi, kemampuan menciptakan visi dan misi dalam hidup, kemampuan bersosialisasi dan adaptasi. Pada gilirannya hal itu disebut dengan karakter dan sistem pendidikan nasional dengan berbagai kurikulumnya yang silih berganti belum mampu mencetak siswa dengan karakter tersebut. Sekolah yang notabene menjadi tempat untuk mengembangkan potensi diri justru menjadi tempat menyeramkan yang menjadi sumber penyakit seperti stress, cemas dengan laku atau tidaknya ijazah, mendapat peringkat atau tidak dan lain sebagainya (Sugiyono, Aman, Kumalasari, Sutopo, & Nuryanto, 2015). Keadaan ini tidak boleh diabaikan dan dibiarkan bertambah besar, harus ada langkah nyata guna melindungi penerus bangsa.

Beragam tantangan yang muncul di kemudian hari, mulai dari kualitas pendidikan itu sendiri, kemudian kualitas pengajar atau guru sebagai motor penggerak pendidikan. Hal lain yang tak kalah penting yaitu

kurikulum dari pendidikan serta pemerataan pendidikan di Indonesia. Berikut adalah tantangan yang harus diatasi oleh bangsa Indonesia:

a. Masalah Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum bisa dibilang mumpuni. Menurut UNESCO, mutu pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang, hal ini berdasarkan data dalam *Global Education Monitoring (GEM) Report 2016*. Di lain hal, kualitas guru sebagai komponen penting dalam pendidikan, berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Faktanya, memang 75 persen sekolah di Indonesia belum bisa dikatakan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan (Yunus, 2020). Masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya taraf pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Pada akhirnya hal tersebutlah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan SDM yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang (Ihsanul, 2019).

Abad ke-21 dikenal pula dengan zaman pengetahuan (*knowledge age*), di mana semua alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan dalam era ini. Upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan (*knowledge based education*), pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economic*), pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based social empowering*), dan pengembangan dalam bidang industri pun berbasis pengetahuan (*knowledge based industry*) (Mukhadis, 2013).

Dewasa ini bidang pendidikan nasional amat banyak menerima kritikan terkait dengan sistem pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM yang dihasilkan. Salah satu kritik tajam yang terlontar yaitu bahwa sekarang ini proses belajar mengajar yang berlangsung di dunia pendidikan formal lebih banyak hanya sekadar mengejar target pencapaian kurikulum yang telah ditentukan. Sehingga dalam prakteknya, peserta didik dipaksa mampu menerima semua informasi yang diberikan, tanpa diberikan kesempatan untuk merenungkan ataupun mengkritisi materi yang diberikan (Istiarsono,

2016). Setiap siswa memiliki hak untuk sistem pengajaran yang baik guna mendapat *output* yang maksimal. Dalam pandangan tradisional, sistem pendidikan di Indonesia sudah diterapkan dari masa lampau hingga sekarang, dan hasilnya pun tidak seburuk apa yang disangkakan, sehingga tidak ada salahnya untuk melanjutkan konsep-konsep pembelajaran yang sudah ada.

Paulo Freire dalam (Istiarsono, 2016) menamai konsep ini dengan istilah konsep pendidikan “gaya bank” dan Freire mengkritiknya sebagai praktik pendidikan yang menjauhkan dari misi ke arah pembebasan dan pemberdayaan. Menurutnya, dengan model pendidikan gaya bank ini, pengetahuan, nilai serta keterampilan diperlakukan sebagai anugerah yang diberikan oleh pendidik yang berperan sebagai orang yang mempunyai kelebihan pengetahuan kepada seorang murid yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Sehingga pendidikan tidak lebih dari kegiatan menabung, di mana murid sebagai tempat menabung (bank) dan guru sebagai penabungnya. Dalam proses pendidikan gaya ini tidak ada dialog, yang ada guru memberikan pelajaran, peserta didik menerima, mengulang, menghafal dan mengikuti semua petunjuk guru

Secara umum, gambaran konsep pendidikan gaya bank menurut Paulo Freire adalah sebagai berikut:

- 1) Guru mengajar, sedangkan murid diajar.
- 2) Guru mengetahui segala sesuatu, sedangkan murid tidak mengetahui apa-apa.
- 3) Guru berpikir, sedangkan murid dipikirkan.
- 4) Guru bercerita, sedangkan murid patuh mendengarkan.
- 5) Guru menentukan peraturan, sedangkan murid diatur.
- 6) Guru memilih dan memaksakan pilihannya, sedangkan murid menyetujui.
- 7) Guru berbuat, sedangkan murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya.
- 8) Guru memilih bahan dan isi pelajaran, sedangkan murid (tanpa diminta pendapat/ persetujuannya) menyesuaikan diri dengan pelajaran itu.

- 9) Guru mencampuradukkan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya, yang ia lakukan untuk menghalangi kebebasan murid, dan
- 10) Guru adalah subyek dalam proses belajar, sedangkan murid adalah obyek belaka.

Pendidikan sebagai suatu proses tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Sektor pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat *double tracks* menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan. Dengan *double tracks* ini sistem pendidikan akan mampu mencetak profil lulusan yang mempunyai kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk beradaptasi dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan cepat (Yuliana, 2014).

Beragam permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya ketimpangan antara kualitas pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja merupakan refleksi adanya kelemahan yang mendasar dalam dunia pendidikan kita. Setiap usaha untuk memperbaharui pendidikan akan sia-sia, kecuali menyentuh akar filosofis dan teori pendidikan. Yakni, pendidikan tidak bisa dilihat sebagai suatu dunia tersendiri, melainkan pendidikan harus dipandang dan diberlakukan sebagai bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, proses pendidikan harus memiliki keterkaitan dan kesepadanan secara mendasar serta berkesinambungan dengan proses yang berlangsung di dunia kerja (Yuliana, 2014).

b. Kualitas Kompetensi Guru

Guru sebagai tenaga pendidik merupakan pemegang peran utama dalam konteks pembangunan sektor pendidikan. Kebijakan pembaharuan pendidikan sebaik dan sebagus apa pun tidak akan ada apa-apanya tanpa peran aktif guru. Apabila tanpa guru yang berkualitas, sebagus apapun dan semodern apapun sebuah kurikulum dan rancangan rencana strategis pendidikan, tidak akan menghasilkan hasil optimal. Maknanya, kondisi mutu tenaga pendidik merupakan syarat mutlak untuk meraih pendidikan yang baik dan unggul. Di antara beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas guru yaitu sertifikasi guru, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, adanya asosiasi profesi, dan upaya-upaya lain seperti pemberian beasiswa, pemberian penghargaan, dan peningkatan kesejahteraan (Diana, 2016). Dalam upaya memajukan mutu tenaga pendidik perlu mendapat perhatian serius. Seperti yang telah disinggung di atas, potret guru sebagai penggerak pendidikan di bangsa ini masih harus ditingkatkan lagi.

Upaya pembenahan kualitas guru harus segera. Pada umumnya guru-guru yang mengajar dengan pola *top-down*. Sehingga siswa menjadi sulit belajar untuk mengeksplorasi potensi dirinya. Sudah jelas bahwa pendidikan bukan hanya soal kecerdasan, tapi soal mentalitas dan keteladanan. Belajar bukan hanya pengetahuan, tapi juga soal pengalaman. Supaya kita terbebas dari perdebatan. Guru menyalahkan kurikulum, lalu kurikulum menyalahkan guru. Cara berpikir itu tidak ada habis-habisnya. Pada intinya pendidikan itu hal sederhana, utamanya guru harus kompeten dan siswa bersemangat dalam belajar, sehingga pendidikan menjadi menarik dan menyenangkan (Yunus, 2020). Dalam praktiknya, sangat sulit merubah pola pemikiran yang selama ini berkembang.

Peran guru tidak dapat dipisahkan dari karakteristik pekerja profesional. Ini berarti profesi guru akan dapat dikerjakan dengan baik dan benar apabila seseorang sudah melewati sebuah alur pendidikan yang sudah dirancang untuk itu. Sudah menjadi keharusan kemampuan guru perlu ditingkatkan terus. Meskipun andaikan tidak, guru tetap akan dapat melaksanakan tugas memenuhi standar minimal. Peningkatan mutu guru dengan mendasarkan pada kemauan dan usaha para guru sendiri. Maknanya, guru tidak harus didikte dan diberi berbagai arahan dan

instruksi. Hal yang penting adalah perlu disusun standar profesional guru yang akan dijadikan acuan pengembangan mutu guru dan pembinaan guru diarahkan pada sosok guru pada era globalisasi ini (Sugiyono, Aman, Kumalasari, Sutopo, & Nuryanto, 2015).

Sosok guru ini penting karena guru merupakan salah satu bentuk *soft profession* bukanlah *hard profession* seperti tenaga kesehatan. Sudah pasti pendidikan serta pembinaan guru akan lain dengan profesi lainnya. Karena hakikat kerja bentuk profesi guru berbeda. Rendahnya kualitas guru, selain diberikan solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru (Sugiyono, Aman, Kumalasari, Sutopo, & Nuryanto, 2015). Rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa tonggak awal pembangunan bangsa berada di pundak guru. Karena berawal dari pendidikanlah pemikiran-pemikiran hebat dimulai.

Konsep belajar bersama merupakan perubahan dari yang sebelumnya konsep guru mengajar. Dengan konsep ini guru memposisikan dirinya sebagai lawan belajar yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Siswa tidak usah tunduk terpaksa pada kurikulum atau silabus yang diterapkan guru. Siswa bersama dengan guru menetapkan dengan bersama apa yang hendak dikupas dalam pembelajaran dan membahas juga *linkage* antara materi yang dipelajari dengan kenyataan sehari-hari. Dengan metode seperti ini siswa terbukti lebih nyaman belajar dan menghasilkan berbagai macam prestasi nyata seperti novel, album lagu, lukisan, dan masih banyak lainnya. Dengan metode ini maka siswa menjadi pribadi manusia merdeka yang mampu merencanakan dan meraih apa yang diinginkan (Sugiyono, Aman, Kumalasari, Sutopo, & Nuryanto, 2015).

c. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum ibarat paru-paru pendidikan, jika paru-parunya baik maka tubuhnya juga akan baik. Di masa depan, kurikulum pendidikan harus kurikulum yang memiliki citra Indonesia, yaitu kurikulum yang melandaskan pada budaya bangsa. Namun hal tersebut bangsa tidak berarti bahwa kurikulum harus bersifat eksklusif. Hal ini bertolak belakang

dengan realitas globalisasi. Oleh sebab itu, kurikulum yang berakar pada budaya bangsa harus pula memahami globalisasi yang dapat dikaji berdasarkan perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Pembaharuan kurikulum pendidikan nasional harus disandarkan pada paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan nasional yang tepat, sesuai dengan realitas masyarakat dan kultur bangsa sendiri. Di masa depan penyelenggaraan pendidikan harus semakin lebih mengedepankan aspek moral atau karakter. Penekanan terhadap moral dirasa perlu karena bangsa ini akan hancur jika hanya dengan sikap kreatif dan profesional saja, hal ini dapat dilihat pada keterpurukan moral para wakil rakyat yang korupsi sampai triliunan rupiah (Sugiyono, Aman, Kumalasari, Sutopo, & Nuryanto, 2015).

Dalam perkembangannya sampai sekarang ini, pendidikan Indonesia belum mengalami adanya kemajuan yang berarti dari waktu ke waktu, justru terkesan semakin berantakan. Padahal sudah banyak para pemangku kebijakan pendidikan di negara ini yang telah menghasilkan berbagai kebijakan mereka untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Begitu pula halnya dengan kurikulum pendidikan nasional di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa setiap pergantian menteri pendidikan, pasti ada perombakan kurikulum. Niat pergantian kurikulum tersebut sebenarnya memang bertujuan baik, yaitu untuk mendorong kemajuan dunia pendidikan Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, akan tetapi yang terjadi di lapangan malah bertolak belakang (Sugiyono, Aman, Kumalasari, Sutopo, & Nuryanto, 2015). Perubahan menuju ke arah yang lebih baik adalah sebuah awal dari kemajuan. Namun dalam konteks kurikulum di bangsa ini, sesuatu yang semestinya belum siap untuk berubah janganlah terlalu memaksakan diri untuk berubah. Adapun jika dirasa kurikulum lama sudah tidak kompatibel dengan perkembangan zaman, ada baiknya untuk melakukan perbaikan di beberapa segmen kurikulum terlebih dahulu. Tindakan ini juga tergolong sebagai langkah yang efektif dalam rangka memajukan sistem pendidikan yang ada.

Untuk diketahui, setidaknya sejak awal bangsa ini berdiri hingga sekarang, Indonesia telah merubah kurikulum sebanyak 11 kali pergantian. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut (Khamis, 2021):

- 1) Kurikulum Rencana Pelajaran pada tahun 1947
- 2) Kurikulum Rencana Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1964
- 3) Kurikulum Sekolah Dasar di tahun 1968
- 4) Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan pada tahun 1973
- 5) Kurikulum Sekolah Dasar di tahun 1975
- 6) Kurikulum 1984
- 7) Kurikulum 1994
- 8) Revisi Kurikulum 1994 di tahun 1997
- 9) Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di tahun 2004
- 10) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006
- 11) Kurikulum 2013.

Dengan anggaran pemerintah untuk pendidikan sebesar 500 triliun, serta dengan peningkatan kesejahteraan guru saat ini, masih belum mampu juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional bangsa kita. Ditambah lagi apabila kita melihat langsung realita di lapangan, di mana masih banyak sekolah di pelosok daerah yang letaknya cukup jauh dari perkotaan, yang seharusnya menjadi tumpuan harapan anak-anak bangsa dalam menempuh pendidikan, yang kondisi dan keberadaannya masih sangat jauh dari standar kelayakan. Dengan kondisi pendidikan formal Indonesia yang seperti ini, seperti ini kurikulum-kurikulum yang pernah maupun yang sedang berjalan saat ini harus dikaji ulang serta perlu disiapkan guru-guru yang berdedikasi serta mempunyai kapabilitas yang cukup memadai sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi era globalisasi yang terus berjalan. Harapannya adalah dari pendidikan formal kita dapat melahirkan sumber daya manusia yang siap pakai dan mampu bersaing di era globalisasi ini serta era-era berikutnya (Istiarsono, 2016). Kedepannya tantangan dalam hal kurikulum pasti akan datang, untuk itu dengan bekal kurikulum Indonesia saat ini, rasanya kita harus berjuang ekstra agar tidak goyah dalam menahan gempuran perubahan.

d. Tantangan Revolusi Industri 4.0

Selain era globalisasi, sekarang ini juga sedang hangat-hangatnya mengenai era industri 4.0. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang

menghadirkan lini lapangan kerja baru, usaha baru, serta bidang profesi baru yang belum tersedia sebelumnya. Akan tetapi pada saat yang sama juga terdapat lini usaha yang terancam hilang atau bergeser, serta bidang profesi dan lapangan kerja yang tergantikan oleh mesin kecerdasan buatan dan robot (Sulistiawati, 2020). Revolusi digital dan era disrupsi teknologi merupakan istilah lain dari industri 4.0. Dikatakan sebagai revolusi digital karena komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang marak terjadi. Otomatisasi dan konektivitas di satu bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Salah satu karakteristik istimewa dari industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (Tjandrawinata, 2016). Di era ini, sama halnya dengan negara lainnya, Indonesia juga sedang mempersiapkan transisi di beberapa bidang. Namun, tidak semua strategi pemerintah dapat berjalan sesuai target, adakalanya meleset bahkan tidak dapat terealisasi.

Penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia adalah salah satu bentuk pengaplikasian revolusi digital, sehingga lebih hemat, efektif, dan efisien. Sebagai tahap revolusi teknologi, industri 4.0 mengubah cara beraktivitas manusia dalam ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian global, oleh karenanya manusia dituntut memiliki kemampuan untuk memperkirakan perubahan masa mendatang yang sangat cepat. Setiap negara harus menanggapi perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang (Dewo, 2019).

Pendidikan Indonesia masa depan harus dibawa dalam rangka mengoptimalkan kemampuan peserta didik untuk memiliki sifat kreatif, kritis dan tanggap terhadap permasalahan kehidupan. Hal ini sesuai dengan rumusan dari UNESCO sebagai lembaga yang mengurus masalah pendidikan di bawah naungan PBB telah merumuskan empat pilar pendidikan dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk masa sekarang dan masa depan, pilar tersebut antara lain (Sugiyono, Aman, Kumalasari, Sutopo, & Nuryanto, 2015):

- 1) *learning to know* (belajar untuk mengetahui),
- 2) *learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu)
- 3) *learning to be* (belajar untuk menjadi seseorang)
- 4) *learning to live together* (belajar untuk menjalani kehidupan bersama)
- 5) *learn how to learn* (belajar menggunakan metode yang tepat)
- 6) *learning through our life* (belajar sepanjang hayat)

Pembangunan suatu bangsa, terlebih negara berkembang sangat membutuhkan pemikiran dan pengkajian sekaligus perencanaan yang matang karena perubahan zaman mengakibatkan banyak perubahan yang datangnya tiba-tiba dan bertubi-tubi. Pengkajian masa depan yang memperhitungkan kekuatan-kekuatan global dilakukan secara mendalam agar visi suatu bangsa yang telah terkristalisasi dalam ideologi suatu bangsa dapat sejalan dengan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan terburuk akibat globalisasi. Visi masa depan sangat mempengaruhi cara berpikir, tingkah laku, perumusan pembangunan masyarakat dan pengembangan nasional agar dapat sejalan dengan kekuatan global yang tidak mungkin untuk dihindari (Istiarsono, 2016). Tantangan global dan revolusi 4.0 adalah hal yang tak mungkin dihindarkan. Berbagai langkah dan persiapan harus ditempuh guna meminimalkan kerugian serta diharapkan dapat meraih keuntungan dari keadaan yang ada.

Mempersiapkan diri sebaik mungkin adalah sikap yang paling bijaksana menghadapi globalisasi, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya. Sektor pendidikan teramat penting untuk mencetak produk sumber daya manusia Indonesia yang dapat menghadapi arus perubahan zaman (Istiarsono, 2016). Tantangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 pada dunia pendidikan yaitu penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Pada realitasnya, semakin deras arus teknologi justru siswa-siswa semakin terlena dan memiliki sikap yang enggan bertanggung jawab, degradasi moral dan meningkatnya kasus kejahatan di kalangan siswa. Dengan adanya aplikasi media sosial yang mempermudah dalam mengakses informasi dan komunikasi mengakibatkan maraknya kejahatan di media internet. Kurangnya pendidikan nilai dan tantangan bagi pendidik untuk menguatkan karakter moral siswa menjadi pemicunya. Perbaikan dilakukan agar tidak

terjerumus dan terlena dengan pesatnya teknologi industri 4.0 (Ridlo, 2020).



PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

BAB 2: MAKNA BELA NEGARA

BAB 2

MAKNA BELA NEGARA

A. MAKNA BELA NEGARA

1. Latar Belakang Bela Negara

Indonesia memiliki sejumlah peristiwa sejarah dalam mencapai kemerdekaannya, mulai dari peristiwa kebangkitan nasional, sumpah pemuda, hingga peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dalam meraih kemerdekaan, banyak tokoh pahlawan yang berjuang keras untuk membebaskan negara Indonesia dari belenggu penjajah. Hal tersebut menjadikan bangsa Indonesia selalu menghargai perjuangan pahlawan yang telah menjadikan Indonesia negara yang merdeka. Salah satu peristiwa sejarah yang penting dalam memberikan sumbangsih untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih sadar untuk bersatu membela negara adalah peristiwa 19 Desember 1948 yaitu peristiwa di mana Indonesia sedang menghadapi situasi genting yang membuat Ibu Kota yang bermula di Yogyakarta pindah ke Bukittinggi dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Pada peristiwa tersebut, sistem pemerintahan Indonesia yang telah tersusun pada kemerdekaan tahun 1945 kembali diusik kembali oleh Belanda dan Kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh mereka. Pada peristiwa tersebut pula, Soekarno dan Moh. Hatta yang saat itu menjabat sebagai presiden RI dan wakil presiden RI pertama ditangkap oleh pihak Belanda. Hal tersebut yang menjadikan kondisi Indonesia semakin tidak stabil, sehingga dibentuklah PDRI untuk menstabilkan sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun kondisi Indonesia saat itu sedang tidak stabil, pembentukan PDRI sangat membantu sistem pertahanan dan

pemerintahan Indonesia dapat dijalankan. PDRI membuat Indonesia dapat menjalankan perjuangan gerilya dan politik, PDRI juga menjadi pemersatu dari semua perjuangan yang dilakukan (Usmaya, Wakidi, & Syaiful, 2014).

Dari peristiwa sejarah PDRI tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 19 Desember 1948 menjadi Hari Bela Negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa tersebut memberikan pandangan luas kepada bangsa Indonesia bahwa dalam menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara kita perlu menanamkan rasa bela negara terhadap diri kita. Banyak bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Mulai dari hal sederhana yang biasa dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yaitu melakukan upacara bendera setiap hari senin pagi, memperingati hari kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, dan menggunakan baju batik ketika hari-hari tertentu di setiap minggu. Dari kebiasaan umum tersebut bisa menjadi dasar untuk membentuk kepribadian yang sadar akan bela negara.

Namun meskipun sudah melaksanakan kebiasaan umum dalam menjaga keberlangsungan negara, masih ada ancaman, hambatan, maupun gangguan dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Contoh ancaman eksternal adalah arus globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara satu dengan yang lain menjadi transparan. Arus globalisasi saat ini membuat satu negara dengan negara lain saling terhubung, ditambah dengan adanya teknologi yang membantu antar negara dalam memudahkan mendapat informasi. Masyarakat yang menyerap langsung informasi yang diterima tanpa mempertimbangkan baik buruknya informasi tersebut dapat membuat hilangnya rasa bela negara. Contohnya adalah pergaulan bebas yang biasa dilakukan oleh negara barat, dan masyarakat Indonesia yang menerima budaya itu menyebabkan hilangnya identitas budaya masyarakat. Hal tersebutlah yang menyebabkan tergerusnya rasa bela negara karena hilangnya identitas moral budaya yang baik yang menjadi dasar masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat.

Arus globalisasi tidak melulu memberikan dampak buruk terhadap perilaku masyarakat dalam melaksanakan bela negara. Banyak pula dampak positif atau dampak baik bagi masyarakat, khususnya dalam

berbela negara. Teknologi yang membantu menyebarkan informasi tidak hanya informasi yang masuk ke Indonesia, melainkan juga informasi yang keluar dari Indonesia. Hal ini karena masyarakat yang cinta akan budaya Indonesia dapat memberikan informasi terhadap budaya Indonesia ke orang asing, sehingga orang asing dapat mempelajari budaya-budaya Indonesia yang menyebabkan budaya Indonesia dapat dikenal di masyarakat luas. Maka untuk meningkatkan rasa bela negara di arus globalisasi modern ini, dibutuhkan penyaringan baik dan buruknya informasi yang diterima.

2. Pengertian Bela Negara

Bela negara merupakan salah satu indikator untuk seseorang warga negara dapat dikatakan memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara. Menurut Azhar dalam (Kemhan, 2018) menyatakan bahwa bela negara bisa diartikan sebagai suatu tekad, sikap, serta tindakan dari warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjut yang juga dilandasi pada kecintaan terhadap negara, kesadaran akan kebangsaan dan bernegara Indonesia juga keyakinan terhadap kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara serta keikhlasan dalam memberikan kesadaran untuk berkorban untuk meniadakan berbagai ancaman, baik ancaman yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri dan dapat membahayakan kemerdekaan serta kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara sendiri merupakan bentuk kecintaan, dan kebanggaan dari individu terhadap negaranya.

Bela negara menurut UU RI Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih menyampaikan bahwa bela negara adalah sikap serta perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan dari Pancasila yang sebagai dasar negara dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

(Siadari, 2017) menjelaskan pengertian bela negara menurut para ahli:

- a. Pengertian Bela Negara Menurut Ahli Darji Darmodiharjo, 1991: 67. Di negara Indonesia, bela negara dilandaskan pada doktrin keamanan nasional dan berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya.
- b. Pengertian Menurut Ahli Sunarso, 2008: 42 bela negara berisi 4 hal yang esensial yang mesti dibela, yaitu: 1) kemerdekaan dan kedaulatan negara,
- c. kesatuan dan persatuan bangsa, 3) keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, serta 4) nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.
- d. Menurut Purnomo Yusgiantoro (2010, 39) bela bangsa dan negara dapat dibangun melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) sebab bela negara adalah sikap dari perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI berlandaskan pada Pancasila dan UU Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan contoh untuk menimbulkan rasa bela negaranya adalah dengan melakukan pelatihan yang berkala.
- e. Menurut Ahli Sutarman, 2011: 82 bela negara ada 2 jenis yaitu secara fisik dan non fisik. Bela negara fisik adalah untuk warga negara yang berada di garis depan dengan memakai senjata. Sedangkan bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang berada di belakang garis depan, di mana dalam melakukan bela negaranya memiliki berbagai macam cara, mulai dari pendidikan kewarganegaraan, pengabdian, dan lain sebagainya sesuai dengan profesi masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada Pasal 9 ayat 1 huruf a menjelaskan bahwa “Upaya Bela Negara” yaitu “sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara”. Upaya bela negara, yang dilakukan oleh warga negara selain sudah

menjadi kewajiban dasar sebagai anggota negara, juga merupakan kehormatan untuk warga negara yang melaksanakan bela negara dengan penuh rasa tanggung jawab, kesadaran dan ikhlas dalam berkorban untuk mengabdikan kepada negeri tercinta. Menurut (BKBPP Banten, 2020) Bela Negara sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- 2) Kewajiban dasar sebagai warga negara; dan
- 3) Kehormatan kehormatan untuk warga negara yang melaksanakan bela negara dengan penuh rasa tanggung jawab, kesadaran dan ikhlas dalam berkorban untuk mengabdikan kepada negeri tercinta, yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi “Upaya Bela Negara”.

3. Kesadaran Bela Negara

Sebagai masyarakat suatu negara kita memiliki kewajiban yang sama untuk masalah pembelaan negara. Tokoh proklamator Indonesia yaitu Moh. Hatta pernah berkata, “Hanya ada satu yang pantas menjadi tanah airku yaitu Indonesia. Ia bangkit dan maju karena usaha. Usaha itu adalah aku.” Dan presiden ke 35 Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy berkata dengan makna yang sama yaitu “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, namun tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negara” (Prasetyo, M, & Riyanti, 2021). Dari pendapat tokoh hebat tersebut dapat ditekankan hal yang sama, yaitu pentingnya kontribusi warga negara untuk memberikan hal yang positif terhadap keberlangsungan negara. Setiap warga negara harus dan wajib memiliki sikap patriotisme, nasionalisme dan bela negara. Di Indonesia sendiri rasa bela negara tidak hanya bentuk jiwa nasionalisme maupun patriotisme, lebih dari itu, bela negara merupakan bentuk rasa terima kasih, dan syukur atas pemberian negara terhadap kita. Kekayaan negara, kenikmatan yang diberikan oleh Indonesia.

Pada dasarnya pada diri setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang menjadi keniscayaan yang mencakup individunya masing-masing sebagai bagian dari sebuah negara yang berdaulat. Wuryan dan Syaifullah (2015) dalam (Adhari & Suntara, 2020) menjelaskan mengenai hak dan kewajiban, yaitu hak merupakan suatu kekuasaan ataupun wewenang yang secara resmi dimiliki oleh individu, baik atas dirinya pribadi, atau atas diri orang lain maupun atas harta dan benda di luar dirinya. Sementara kewajiban yaitu suatu yang harus dilaksanakan sebagai suatu tugas dengan tujuan untuk mempertahankan dan membela hak-hak yang dimiliki. Makna yang diberikan dari penjelasan tersebut adalah setiap individu dalam suatu negara punya kebebasan dalam melakukan hal-hal yang diinginkan selama tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, individu dalam suatu negara juga memiliki kewajiban yang mengharuskan individu tersebut untuk melaksanakan sehingga ia dapat mempertahankan hak yang dimilikinya.

Hak dan kewajiban mengenai bela negara sudah di atur oleh pemerintah melalui Undang-undang. Tujuan pemerintah membuat undang-undang ini yaitu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam melaksanakan bela negara. Pemerintah memiliki 3 aturan dasar hukum mengenai bela negara yang mewajibkan warga negara Indonesia untuk diketahui. 3 Dasar hukum tersebut yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 pemerintah menyampaikan bahwa: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Artinya sebagai warga negara Indonesia, semuanya berhak untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembelaan negara. Terdapat hak yang akan didapat oleh warga negara yaitu mendapatkan atau menerima suatu yang semestinya diterima dari negara. Contohnya seperti menerima hak atas hidup dan mempertahankan kehidupan di negara Indonesia, hak atas kelangsungan hidup, dll. Untuk mendapatkan hak tersebut, warga negara Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dalam upaya pembelaan negara, contoh sederhananya adalah menghormati peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan menghormati dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka warga negara bisa mendapatkan haknya.

2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 ini mengamanatkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dalam amanat undang-undang ini memberikan pandangan bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak yang akan didapat dari pasal ini yaitu mendapatkan hak hidup damai di negara Indonesia. Sehingga, untuk mendapatkan hak kehidupan yang damai, warga negara harus menghindari konflik untuk membantu pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara agar pertahanan tidak mudah runtuh.

3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.” Sama seperti 2 peraturan dasar yang sebelumnya, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajibannya dalam melaksanakan upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sehingga, untuk mendapatkan haknya, warga negara Indonesia perlu menyelesaikan kewajibannya.

3 dasar hukum tersebut yang menjadi dasar untuk warga negara Indonesia harus sadar akan kewajiban berbela negaranya. Hal ini karena dengan melaksanakan kewajiban tersebut, hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa didapatkan. Keikutsertaan warga negara Indonesia untuk melaksanakan kewajiban bela negara tersebut dapat dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian kepada negara Indonesia secara sukarela maupun wajib, dan juga pengabdian sesuai dengan profesi kerja masing-masing warga negara. Namun ancaman dan gangguan internal maupun eksternal akan selalu ada. Salah satu contoh ancaman internal yang terkadang timbul karena kurangnya kesadaran dari individu warganya yaitu kegiatan vandalisme yang dilakukan oleh oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab yang merusak patung pahlawan maupun fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah.



Gambar 2. 1 Monumen Yos Sudarso Terkena Vandalisme Masyarakat
Sumber: Panturapost.com (Setyadi, 2020)

Dari gambar 1 di atas, terlihat bahwa aksi vandalisme masih sering terjadi. Patung monumen yang dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk bela negara dari pemerintah untuk memperingati para pahlawan yang telah berjuang untuk negeri. Dampak dari vandalisme ini menjadikan fasilitas publik rusak, dan monumen nasional sebagai tempat mengenang pahlawan menjadi rusak dan kotor. Vandalisme terjadi karena kurangnya rasa hormat serta kesadaran akan bela negara dari oknum masyarakat yang merusak fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, masyarakat Indonesia dalam pandangan masyarakat asing terkesan tidak mencintai dan menghormati negaranya sendiri.

**Kasus *Entertainment* Indonesia yang Menyebutkan Sila Ke-5
adalah Bebek Nungging**

Pada Tahun 2016 silam Indonesia dihebohkan oleh seorang artis perempuan berinisial ZG yang menyebutkan bahwa Pancasila Sila ke-5 adalah “bebek nungging.” Menurut perkataan tersebut adalah salah satu unsur bercandaan. Namun kasus berujung pelik akibat banyak masyarakat geram dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian Polda Metro Jaya sebagai kasus pelecehan langang negara Indonesia. Pada awalnya hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saja yang melaporkan, namun masyarakat Indonesia yang paham akan bea negara akhirnya geram bahwa ZG sudah melecehkan dasar negara yang selalu dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia.

Akhirnya ZG mengikuti prosedur penyelidikan oleh polisi dan memenuhi panggilan kepolisian, Rabu (30/3/2016) silam. Selain memenuhi panggilan polisi dan meminta maaf kepada publik, ZG juga memberikan surat permohonan maafnya kepada presiden RI yaitu Joko Widodo karena sadar telah menghina hal terkait negara.

(Pratomo, 2016)

Dari kasus yang terjadi di atas, seorang *entertainment* yang merupakan pengaruh untuk publik melakukan kesalahan saat melontarkan bercandaannya. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan identitas nasional bangsa. Dan sudah menjadi kebiasaan dengan kesadaran penuh untuk membela negara ketika dasar negara dilecehkan. Kasus tersebut memiliki sisi positif untuk masyarakat Indonesia, yaitu sebagai pengingat bahwa hal-hal terkait identitas negara tidak boleh dilecehkan, ataupun menjadi bahan bercandaan yang bisa mencoreng nama baik negara. Selain itu, kasus tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terkait bela negara sangat tinggi. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang melapor kepada pihak berwajib untuk menangani permasalahan pelecehan dasar negara tersebut. Masyarakat Indonesia memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air, dan menghormati negara.

Kesadaran masyarakat dalam menjaga nama baik negara, serta menghormati dan rela berkorban untuk negara merupakan hal yang biasanya muncul atas keinginan individu masing-masing.

4. Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air Dalam Berbela Negara

Dalam berbela negara banyak macam bentuk dan cara mengimplementasikannya. Implementasi bela negara berbeda-beda berdasarkan profesinya, misalnya seperti profesi siswa ataupun mahasiswa bentuk pengimplementasi bela negara bisa dilakukan dengan berprestasi untuk mengharumkan nama baik negeri, melakukan pengabdian terhadap negara, dan lain sebagainya. Namun secara umum, bentuk pengimplementasian bela negara sendiri yaitu :

➤ Menghargai dan Menghormati Jasa Pahlawan

Menghargai serta menghormati jasa-jasa pahlawan merupakan dasar dalam berbela negara. Pahlawan negara telah berjuang serta berkorban demi memerdekakan bangsa dari belenggu penjajahan agar bangsa Indonesia dapat memiliki kesejahteraannya sendiri. Cara untuk menghargai serta menghormati jasa pahlawan adalah dengan mengingat sejarah pahlawan, mempelajarinya serta meneladani sejarah perjuangan bangsa. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui betapa sulitnya para pahlawan dalam meraih kemerdekaan negara. Kita sebagai warga negara Indonesia yang paham akan sejarah akan senantiasa memiliki rasa cinta kepada negara Indonesia, dan akan secara sadar menjaga ketentraman dan kedamaian untuk negeri.

➤ Memiliki Sikap Rela Berkorban

Sikap rela berkorban merupakan sikap warga negara yang perlu dilakukan oleh masyarakat di suatu negara. Sikap rela berkorban artinya ikhlas dan rela untuk berpartisipasi aktif dalam membela negara dan mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara. Contohnya seperti seorang guru yang rela mengabdikan dirinya untuk mengajar siswa untuk kepentingan masa depan negara. Contoh lainnya adalah Tentara Nasional Indonesia yang rela menjaga keamanan di garis terdepan untuk menjaga kedaulatan serta perdamaian negara. Selalu mendoakan untuk kebaikan serta kemajuan bagi bangsa dan negara.

Selain itu menjalankan tugas dan pekerjaan sebaik-baiknya sesuai dengan profesinya merupakan salah satu bentuk bela negara karena dapat mendukung pembangunan nasional juga.

➤ **Berpartisipasi Aktif Menjaga Kedaulatan NKRI**

Partisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI bisa dengan cara menjaga ketertiban, keamanan, serta ketentraman dan perdamaian di lingkungan tempat tinggal. Dengan menjaga hal-hal tersebut, membantu negara untuk menjadi negara yang aman dan damai. Partisipasi aktif tidak hanya menjaga keamanan dan perdamaian sekitar lingkungan saja, melainkan juga taat terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak melakukan tindakan serta perbuatan yang mencoreng nama baik negara dan tindakan yang melawan hukum serta etika sosial. Selain itu, ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga merupakan wujud dari partisipasi aktif dalam negara demokrasi. Sebagai pelajar, ikut mengharumkan nama bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa melalui prestasi merupakan salah satu bentuk peran aktif dalam berbela negara.

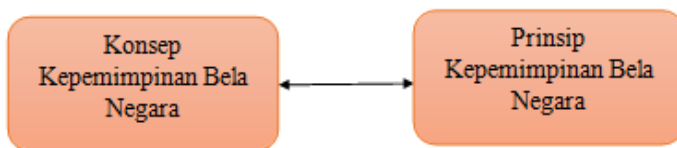
➤ **Bangga Akan Budaya dan Bahasa**

Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang beraneka ragam dari berbagai macam daerah. Dengan bangga akan hal itu merupakan salah satu bentuk dari bela negara. Karena dengan menghormati budaya dan bahasa daerah lain membuat kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Meskipun Indonesia memiliki bahasa yang berbeda setiap daerahnya, kita juga harus bangga terhadap bahasa Indonesia untuk percakapan formal ataupun bahasa sehari-hari. Bukan hanya budaya dan bahasanya saja yang harus dibanggakan oleh warga negara Indonesia, namun bendera, simbol, serta semboyan negara perlu kita banggakan. Bendera kita adalah merah putih yang melambangkan keberanian dan kesucian. Simbol negara kita adalah burung garuda dengan bulunya dapat dihitung sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu pada sayap terdapat 17 bulu, pada ekor terdapat 8 bulu, dan pada pangkal ekor terdapat 19 serta bulu pada leher terdapat 45 bulu, hal ini melambangkan tanggal 17-8-1945 yang mana proklamasi

kemerdekaan dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno. Lalu semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana Indonesia memiliki bermacam-macam suku, budaya, dan bahasanya namun tetap menjadi satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia.

5. Kepemimpin Berwawasan Bela Negara

Dalam meraih tujuan nasional, pada setiap era pergantian kepemimpinan diharapkan adanya perubahan-perubahan baru yang lebih baik dari sebelumnya secara berlanjut, agar NKRI di masa yang akan datang akan dapat meraih tujuan nasionalnya yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk meraih tujuan nasional tersebut, diperlukan kepemimpinan yang dapat diandalkan baik tingkat nasional maupun daerah yang memiliki visi serta misi yang berwawasan bela negara. Kepemimpinan berwawasan bela negara sangat penting dan dibutuhkan dalam memimpin suatu negara ataupun daerah, hal ini karena situasi serta kondisi yang dihadapi mengalami perubahan yang cepat akibat pengaruh perkembangan globalisasi yang membawa segala macam ancaman, gangguan, serta tantangan yang kompleks yang dapat menimbulkan efek negatif bagi bangsa. Di mana nilai kebangsaan serta ketahanan nasional dapat senantiasa rapuh dan menyebabkan degradasi nasionalisme, kemiskinan, kebodohan, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), dan lemahnya penegakan hukum serta permasalahan mengenai isu-isu global, regional maupun nasional. Prinsip dan konsep berkaitan sangat erat, karena pemahaman berada dalam konsep dan pelaksanaan melalui prinsip yang dipegang dengan tetap menggunakan pemahaman dari konsep kepemimpinan bela negara dengan baik.



Gambar 2. 2 Bagan Konsep dan Prinsip Kepemimpinan Bela Negara

a. Konsep Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara

Kepemimpinan bela negara merupakan kepemimpinan yang berlandaskan keteladanan dalam menerapkan nilai-nilai bela negara dalam diri, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, sadar akan berbangsa dan bernegara, rela berkorban demi negara, dan yakin bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Nilai-nilai bela negara tersebut sudah menjadi atribut tanda menjadi warga negara yang baik, dan juga menjadi karakter dalam menentukan kualitas kepemimpinan. Menurut Warsito Hadi dalam (Edhi, 2020) menjelaskan bahwa kepemimpinan dengan wawasan Bela Negara Kepemimpinan (*Leadership*) adalah salah satu seni serta keahlian untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain hingga muncul keinginan, kepercayaan, taat serta hormat dalam mencapai tujuan yang telah di rencanakan. Dalam konsep kepemimpinan bela negara, keteladanan sudah menjadi karakter dasar pada pembentukan bela negara. Karakter sudah ditandai sebagai jiwa kepemimpinan yang sangat penting. Sebagai salah satu jiwa kepemimpinan, karakter dilihat lebih menentukan dibandingkan dengan otak, ataupun sekurang-kurangnya pendidikan formal, untuk menentukan apakah seorang pemimpin berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya.

Keteladanan pada kepemimpinan bela negara, muncul dari integritas moral serta etika pemimpin. Integritas moral merupakan koherensi antara pikiran, perkataan serta tindakan berdasarkan pada kebenaran moral umum. Seperti kalimat yang disampaikan Becker (19980) dalam (BKBPP Banten, 2020) integritas *“is 19 commitment in action to a morally justifiable set of principles and values”*. penjelasan dari kalimat tersebut yaitu integritas merupakan sebuah komitmen untuk mendasarkan setiap tindakan pada prinsip maupun nilai moral secara konsisten. Kesesuaian pemikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang dalam memimpin menjadi contoh yang baik bagi pengikutnya. Konsistensi dari keteladanan tersebut yang menjadi dasar untuk menggerakkan pengikutnya dalam mencapai misi serta tujuan organisasi tanpa kenal lelah. Hal ini dikarenakan bahwa integritas merupakan salah satu perangkat prinsip dan nilai moral yang menjadi acuan bagi setiap orang atau kelompok untuk mengatur perbuatannya. Nilai itu berasal dari percampuran antara nilai budaya,

agama, dan ideologi bangsa, maka dari itu menjadi pedoman dan patokan secara bersamaan untuk melaksanakan suatu tindakan.

Pemimpin yang berintegrasi akan dapat mewujudkan empat ciri, yaitu:

- 1) Konsistensi pada prinsip yang dipegang
Dengan berkonsistensi pada prinsip yang dipegang menjadikan pemimpin untuk tetap yakin terhadap pilihan yang dipilihnya. Sehingga ketika mengambil keputusan, pemimpin dapat memutuskannya berdasarkan prinsipnya.
- 2) Berpegang teguh pada nilai moral yang berlaku di masyarakat
Dengan berpegang teguh pada nilai moral di masyarakat, pemimpin dapat menyesuaikan perilakunya. Sehingga, tidak ada penyimpangan sosial yang dilakukan jika mengikuti aturan norma di masyarakat.
- 3) Mampu menjadi contoh yang baik bagi yang lain
Menjadi teladan yang baik menjadikan sebuah organisasi ataupun kelompok menjadi lebih baik juga. Karena, acuan dalam berperilaku mengikuti pemimpin suatu organisasi maupun kelompok.
- 4) Mempunyai daya juang yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan misi serta tujuan organisasi.

Integritas sendiri merupakan hal yang menjadi satu pada bagian dalam budaya relativisme tata susila, yang mana pemahaman dan pengertian perilaku sopan santun dan kesetiaan bisa bermacam rupanya di tengah-tengah kebudayaan, antipati zaman, serta perbedaan prinsip dan nilai. Oleh karena itu, integritas moral tampil sebagai komitmen dalam berpegang teguh pada prinsip moral universal, serta melawan untuk mengubahnya walaupun kondisi dan situasi sangat pelik, dan banyak pula tantangan yang bertenggang menyurutkan prinsip-prinsip tata susila atau norma dan kultur yang dipegang teguh. Pribadi yang berintegritas tidak mudah keok dalam iklim moral yang berantakan, dan tidak akan tersekap pada desakan kepentingan jangka pendek. Perubahan politik serta kepemimpinan nasional sudah memberikan perubahan pada banyak hal. Perubahan tersebut mencakup struktur, budaya, dan praktiknya. Arus perubahan tersebut bukan hanya mencapai aspek fisik saja, namun juga sistem dalam berpikir dan berperilaku. Menghadapi perubahan bertujuan

untuk penggalan konsep, prinsip serta aktualisasi dari kepemimpinan bela negara yang diyakinkan dapat menjadi solusi yang baik. Keyakinan tersebut didasarkan oleh fakta bahwa bela negara sudah menjadi konsep yang menyatukan kekuatan bangsa dan negara dalam mencapai Indonesia merdeka, mempertahankan diri dari *power* asing yang bertujuan untuk mengganggu ketentraman bangsa, dan menjadi kekuatan dalam mendorong peran partisipasi masyarakat untuk pembangunan serta pemerataan hasil- hasilnya.

Menurut (BKBPP Banten, 2020) Makna konseptual kepemimpinan bela negara sendiri dapat diartikan secara historis, yuridis, maupun sosiologis. Secara historis, kepemimpinan bela negara bisa dipandang dari sejarah panjang perjuangan para pahlawan serta seluruh rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Kemerdekaan yang telah dicapai dengan banyak berkorban, mulai dari harta, jiwa, serta raga tersebut dilaksanakan atas dasar kecintaan terhadap tanah air Indonesia demi menciptakan Indonesia yang sejahtera dan terbebas dari penjajahan. Secara yuridis, kepemimpinan bela negara dapat diartikan sebagai aktualisasi bela negara, yang mana telah ditaruh pada UUD NKRI Tahun 1945 dan ketentuan undang-undang lainnya. Pemahaman kepemimpinan bela negara berimplikasi terhadap perluasan orientasi kepemimpinan. Kepemimpinan tidak berorientasi secara jangka pendek, partisipan, atau sektoral, melainkan dalam bentuk partisipasi kontribusi fungsional warga negara terhadap Nusa, Bangsa, dan Negara.

Makna secara sosiologis dari kepemimpinan bela negara merupakan kontekstualisasi keteladanan dalam menerapkan nilai bela negara yang disesuaikan dengan perkembangan zaman di dalam bermasyarakat. Dalam menghadapi perubahan serta pengembangan zaman, nilai dasar dari kepemimpinan bela negara tidak boleh diubah sejauh tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Contoh yang jelas dapat diambil dari peristiwa sumpah pemuda. Seperti yang kita ketahui bahwa peristiwa sumpah pemuda ke dua pada tanggal 28 Oktober menciptakan ikrar Sumpah Pemuda yang di gelar dengan memakai Bahasa Indonesia. Pada zaman itu, banyak pemuda Indonesia yang tidak fasih bercakap dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Bahkan pemimpin sidang yaitu Soegondo, terlihat tidak pandai berbicara menggunakan Bahasa dengan baik. Berikut

isi dari ikrar sumpah pemuda yang dibacakan saat sumpah pemuda dilaksanakan.

SUMPAH PEMUDA				
Pertama	KAMI	PUTRA	PUTRI	INDONESIA
	MENGAJU BERTUMPAH DARAH YANGSATU, TANAH INDONESIA			
Kedua :	KAMI	PUTRA	DAN	PUTRI INDONESIA
	MENGAJU BERBANGSA YANG SATU, BANGSA INDONESIA.			
Ketiga :	KAMI	PUTRA	DAN	PUTRI INDONESIA
Jakarta, 28 Oktober				

Ikrar sumpah pemuda tersebut menjadikan warga negara Indonesia saat itu semakin bersemangat dalam mencapai kemerdekaannya. Bahasa Indonesia yang sedikit demi sedikit hilang pada saat itu, kembali digunakan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Sumpah pemuda sendiri mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia yang diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yaitu kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, serta pendidikan dan kepandaian. Tokoh lain yang saat itu tidak fasih berbahasa, antara lain adalah Sri Soendari (adik Dr. Soetomo). Tapi kecintaannya terhadap Indonesia dan Bahasa Indonesia menjadikan Sri Soendari belajar keras, hingga dua bulan kemudian saat berpidato pada Kongres Perempuan Indonesia tepatnya Desember 1928, Sri Soendari sudah dapat menggunakan Bahasa Indonesia dengan fasih dan jelas.

Selain kecintaannya terhadap bangsa dan negara, yang memotivasi Sri Soendari untuk bisa mahir berbahasa Indonesia dengan baik yaitu karena sebagai penggerak atau pemimpin aktivis perempuan Indonesia, maka harus bisa meyakinkan perempuan Indonesia untuk terus berjuang membebaskan bangsa dan negara. Dengan keteladanan serta kekuatan Sri

Soendari dalam memimpin aktivis perempuan, maka perempuan Indonesia saat itu kembali mengobarkan semangatnya untuk berjuang melawan penjajah. Dalam contoh konteks kecil pada perjuangan aktivis di masyarakat saat ini yaitu, sebagai mahasiswa ataupun aktivis mahasiswa, untuk menunjukkan kemandiriannya dalam melakukan pendanaan dengan jujur untuk kegiatan organisasi biasanya mahasiswa menjual makanan dengan berlandaskan kejujuran. Di mana barang tersedia di tempat namun untuk membeli, mahasiswa lain harus dengan jujur membayar melalui kotak kejujuran. Hal ini selain memenuhi kebutuhan organisasi dalam hal pendanaan, juga meningkatkan rasa kejujuran dalam bermasyarakat. rasa jujur dalam bermasyarakat juga merupakan bentuk dasar dari bela negara. Karena praktik ketidakjujuran masih sering di temukan di masyarakat luas. Meskipun konteks kepemimpinan berubah, namun nilai dasar yang menjadi acuan kepemimpinan bela negara tidak berubah. Karena kepemimpinan bela negara berlandaskan pada integritas moral bangsa serta perilaku baik yang bisa membuat seorang pemimpin organisasi atau kumpulan orang bisa tampil sebagai teladan.

b. Prinsip Dalam Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara

Bela negara merupakan integritas moral serta aturan. Banyak sosok pemimpin di Indonesia yang menjadi teladan. Keteladanan tersebut yang memberikan legitimasi moral untuk mengarahkan serta menciptakan rasa cinta warga negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integritas moral sang pemimpin berwawasan bela negara memunculkan pemimpin yang dapat memberikan pengaruh terhadap anggotanya, tidak hanya memerintah, tajam mengkritik, dan selalu mencari kesalahan anggotanya. Namun, pemimpin yang baik dapat memberikan pengaruh positif karena tindakannya tidak buruk dan daya juangnya yang tak kenal lelah. Integritas moral dan etika sendiri merupakan prinsip dasar kepemimpinan berwawasan bela negara yang dapat menciptakan suasana di mana orang bisa terbiasa dalam melakukan berbagai hal dengan baik dan benar, bukan hanya membenarkan segala hal. Integritas juga bisa dikonsepsikan sebagai *skill* dalam memegang teguh prinsip moral. Sikap pemimpin yang berintegritas bisa dipastikan sesuai dengan nilai maupun prinsip yang dipegangnya. Sehingga kepemimpinan berwawasan bela

negara pada dasarnya merupakan kepemimpinan yang mampu memberikan pengaruh baik kepada anggotanya, tidak hanya memarahi atau memerintah saja. Karena perilaku yang baik akan memberikan suasana yang baik kepada anggota maupun masyarakat.



Gambar 2. 3 Ir. Soekarno dan Moh. Hatta Tokoh Proklamator Indonesia

Sumber: (CNNIndonesia, 2021)

Berdasarkan sejarah Indonesia, kepemimpinan presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno, lahir karena kepekaan jiwanya terhadap kondisi yang menimpa masyarakat Indonesia saat zaman penjajahan. Kepekaan tersebut yang membuat Ir. Soekarno akhirnya memiliki pemikiran yang visioner dalam menembus batas kemampuan dan memimpikan bahwa Indonesia dapat merdeka serta lepas dari belenggu penjajahan. Konsistensi pemikiran Ir. Soekarno dalam memimpin memberikan semangat masyarakat dan mempengaruhi elemen bangsa yang membuat masyarakat bergerak bersama dalam melakukan perlawanan atas penjajahan demi kemerdekaan Indonesia. Selain Ir. Soekarno, Moh. Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia juga merupakan sosok yang memiliki pemikiran yang konsisten dalam memimpin, dan kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta memberikan kestabilan bagi sistem perekonomian bangsa Indonesia. Pada saat itu kondisi masyarakat Indonesia yang sebelumnya masih terbelakang, Moh. Hatta memunculkan ide serta serangkaian kebijakan untuk mencerdaskan serta memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat Indonesia dengan gerakan koperasi. Kepemimpinan bela negara yang dibutuhkan sekarang ini bisa digambarkan sebagai pemimpin yang konsisten dengan prinsip serta keyakinan moralnya, selain itu mampu bertanggung jawab dan berani, serta bisa diandalkan dalam memaksimalkan penampungan aspirasi masyarakat. Karena mendengar pendapat serta keluhan masyarakat maupun anggota merupakan salah satu indikator sebagai pemimpin yang baik dan dapat diandalkan.

Masyarakat menjadi media pengabdian bagi kepemimpinan bela negara, hal ini arena peran pemimpin harus dapat mempengaruhi dan menggerakkan kecintaan masyarakat terhadap NKRI. Hal tersebut sesuai dengan dasar moral dalam sebuah kepemimpinan yang baik, yaitu bisa menyebarkan pengaruh positif terhadap lingkungan masyarakat ataupun anggotanya. Kepemimpinan bela negara bukan hanya melakukan kompetensi, melainkan juga keberpihakan terhadap kepentingan dan kebaikan bersama.

B. BELA NEGARA DAN CARA MENUMBUHKAN RASA CINTA TERHADAP TANAH AIR

1. Pengertian Cinta

Dalam membangun moral bangsa maka diperlukan kesepakatan nilai-nilai di masyarakat. Bagi bangsa Indonesia sendiri, nilai-nilai tersebut terdapat dalam isi Pancasila. Nilai-nilai tersebut yang telah disepakati harus dihayati oleh masing-masing individu, karena dengan penghayatan nilai tersebut dapat berfungsi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, selain itu dengan adanya penghayatan ini dapat menciptakan karakter dalam diri masing-masing individu. Salah satu nilai yang terdapat dalam diri Pancasila adalah rasa cinta tanah air.

Cinta adalah satu bagian terpenting dalam hidup. Cinta mengangkat dan meresapi setiap jiwa dan mempersiapkan perjalanan menuju keabadian. Cinta adalah anugerah dari Tuhan kepada hamba-Nya, sehingga ia selalu bersimpati pada dirinya, masyarakat atau negara. Jika seseorang tidak memiliki cinta, maka dia tidak dapat naik ke cakrawala sempurna umat manusia, karena manusia penuh dengan cinta. Peduli terhadap sesama adalah sikap mulia manusia, dan sumbernya adalah cinta kasih. Mereka yang mengorbankan hidup mereka untuk orang lain adalah

pejuang pemberani. Sama seperti ibu yang melahirkan anak, pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa tumbuh karena cinta (Bahiyah, 2015).

2. Pengertian Tanah Air

Tanah air adalah istilah yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh daratan Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep pengetahuan nusantara, yang terbentuk dari status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Istilah ini membedakan Indonesia dengan bangsa lain, yang sering menyebut wilayahnya dengan sebutan *motherland* atau *fatherland*. Negara Indonesia juga dikenal sebagai tanah air dan kepulauan (Wikipedia, 2021).

3. Pengertian Cinta Tanah Air

Di Indonesia, cinta tanah air memiliki arti yang berbeda dengan nasionalisme atau patriotisme. Cinta tanah air memiliki arti umum, sedangkan nasionalisme dan patriotisme memiliki arti khusus. Patriotisme adalah semacam perasaan bahwa seseorang menganggap tanah air sebagai tanah airnya dan diri sendiri sebagai tempat berlindungnya sendiri. Nasionalisme berarti semacam pemahaman, dalam pemahaman semacam ini, status bangsa di atas segalanya, ini hanya manifestasi cintanya pada tanah air. Patriotisme merupakan salah satu bentuk bela negara yang mengandung nilai pengorbanan dan cinta tanah air.



Gambar 2. 4 Contoh sikap cinta tanah air

Sumber: Kompas.com, 2021

Mencintai tanah air berarti mencintai tanah air sejak lahir hingga akhir hayat, mencari nafkah dan mengalami hidup di wilayah tersebut. Patriotisme adalah sikap yang dilandasi kejujuran, yang tercermin dalam tindakan yang dilakukan demi kejayaan tanah air dan kebahagiaan bangsa. Patriotisme adalah sikap terhadap negara. Pembentukan negara itu sendiri harus memenuhi beberapa unsur, yaitu (Bahiyah, 2015):

a. Adanya rakyat

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam pembentukan negara, karena rakyat adalah orang yang pertama kali ingin mendirikan suatu negara. Rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan orang luar yang secara hukum diakui sebagai warga negara, sehingga rakyat adalah masyarakat yang termasuk penduduk asli atau orang asing. Leacock menyebutkan bahwa “Suatu Negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami kawasan tersebut”. Plato menjelaskan bahwa syarat mendirikan suatu Negara membutuhkan 5040 penduduk. Seperti yang kita ketahui, rakyat terdiri dari penduduk dan bukan penduduk, di mana penjelasannya yaitu penduduk adalah orang yang ingin menetap di suatu wilayah atau Negara. Namun, apabila mereka berada dalam suatu wilayah atau Negara namun tidak ingin menetap maka tidak dapat disebut sebagai penduduk. Seperti contohnya orang yang ingin berkunjung karena suatu urusan bisnis atau liburan (Leni, 2018).

b. Adanya wilayah

Wilayah adalah kawasan yang digunakan sebagai tempat bermukim bagi rakyat dan menjadi tempat penyelenggaraan pemerintahan. Wilayah juga merupakan unsur negara yang harus dipenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas wilayah yang jelas. Secara umum, suatu wilayah terbagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional (Leni, 2018):

- Wilayah formal adalah wilayah yang memiliki definisi secara umum, yaitu suatu daerah atau wilayah di bumi yang mempunyai karakteristik yang unik sehingga dapat menjadi perbedaan dari wilayah lainnya.

- Wilayah fungsional adalah suatu wilayah yang terdiri dari beberapa pusat wilayah yang memiliki perbedaan di setiap fungsinya. Contohnya seperti wilayah perkotaan.

c. **Adanya pemerintahan**

Pemerintahan merupakan instrumen bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan warganya dan menjadi alat dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang telah diberikan kuasa dalam memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan peraturan serta hukum di suatu Negara.

4. **Unsur-unsur Bela Negara**

Unsur-unsur Bela Negara di antaranya:

a. **Cinta tanah air.**

Cinta adalah kasih sayang (perasaan), yang lahir dari lubuk hati setiap warga negara kepada tanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi:

- Pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia
- Potensi sumber daya alam
- Potensi sumber daya manusia, serta
- Posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Dengan memahami keberadaan Indonesia secara utuh, kita dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai pejuang bangsa, rasa memiliki sebagai generasi penerus, dan nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seiring dengan semakin kuatnya rasa cinta setiap warga negara Indonesia terhadap negara, sikap bela negara yang kuat akan menjadi modal dasar kekuatan nasional dan negara rela berkorban untuk pemeliharaan, perlindungan dan

pembangunan negara. Dan negara sedang bergerak ke arah mewujudkan cita-cita nasional.

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.

Rasa cinta tanah air yang tinggi setiap warga negara perlu ditunjang dengan sikap kesadaran kebangsaan yang senantiasa menciptakan nilai yang dapat bersatu di lingkungannya sendiri serta sikap menjunjung tinggi kesadaran kebangsaan. Prinsip dasar persatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat di negara-negara lain di dunia, perlu dipahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kebangsaan, antara lain:

- Wawasan Nusantara
- Ketahanan Nasional
- Kewaspadaan Nasional
- Dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Melalui pemahaman konsep kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan atas dasar nasionalisme dan patriotisme dapat dihasilkan sikap bela negara yang mempertahankan persatuan bangsa dan nilai-nilai persatuan bangsa, sehingga memperkuat ketahanan nasional dan wawasan nusantara. Ketahanan nasional yang kuat dan kokoh dapat menjadi pendorong negara dan potensi besar negara dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.

Pancasila selaku pandangan hidup bangsa serta negeri, sudah teruji dalam menjamin kelangsungan hidup Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada bertepatan pada 17 Agustus 1945. Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, sudah terjalin kesekian kali kejadian sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, tetapi berbagai wujud ancaman tersebut bisa diatasi, berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Untuk membangun kesetiaan setiap

masyarakat negeri terhadap ideologi Pancasila, butuh menguasai bermacam aspek yang ikut mempengaruhi berkembangnya pengalaman nilai- nilai Pancasila tersebut selaku bagian dari nilai- nilai dasar bela negeri yang meliputi:

- Penegakkan disiplin
- Pengembangan etika politik, dan
- Sistem demokrasi, serta
- Menumbuhkan taat akan hukum

Kesetiaan masing-masing masyarakat negeri kepada Pancasila selaku pandangan hidup negeri serta sekalian selaku dasar negeri, butuh lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, ialah jaminan untuk kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila serta UUD NKRI Tahun 1945.

d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini tidak terlepas dari tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Tindakan pengorbanan diri telah menjadi fakta sejarah, kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang tulus dan tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan penjajah Belanda dan kelompok revolusioner anti Indonesia. Pejuang nasional berbaris ke medan perang dengan semangat gigih dan meraih kemenangan dalam perang militer dan diplomatik.

Untuk membentuk perilaku rela berkorban bagi bangsa dan negara, setiap masyarakat perlu menguasai beberapa aspek, antara lain:

- Konsepsi jiwa;
- Semangat dan nilai juang 45 (JSN 45);
- Tanggung jawab etik;
- Moral dan konstitusi; serta
- Sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Tindakan rela berkorban untuk bangsa dan negara harus mampu membangun kekuatan bangsa atas dasar membangun pertahanan negara yang kokoh, tangguh dan profesional serta keberhasilan pembangunan negara.

e. Semangat untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur

Semangat mewujudkan cita-cita nasional adalah sikap dan tekad bangsa yang dilandasi oleh tekad untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama. Kesamaan sikap dan tekad merupakan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia. Pada dasarnya bangsa Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan dan keadilan, menghilangkan kemiskinan dan kebodohan, serta mendambakan perdamaian dunia yang damai.

Nilai dasar yang terkandung dalam semangat nasionalisme adalah potensi besar bangsa Indonesia, jika dibarengi dengan semangat kebangsaan maka persatuan dan kesatuan akan berperan tanpa membedakan suku, ras, agama atau golongan. Dengan semangat yang tinggi berdasarkan sikap dan tekad yang kuat, ia akan mampu memanfaatkan sepenuhnya potensi sumber daya nasional dan kearifan lokal, serta dengan sungguh-sungguh memperhatikan berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang mengikuti perkembangan zaman. Kearifan lokal merupakan acuan nilai-nilai peradaban Indonesia dan dapat digunakan untuk mendorong dan mempercepat pembangunan ketahanan nasional dan keberhasilan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

5. Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Seperti yang kita ketahui bersama, kita sekarang berada di era revolusi 4.0 kemajuan teknologi, semuanya menjadi lebih rumit, dan individu dapat

dengan mudah mengakses internet tanpa batasan waktu. Kemajuan teknologi tersebut tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif di berbagai bidang dan mengubah kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi ini, manusia harus dapat beradaptasi dengan kehidupan baru, karena kemajuan teknologi ini tidak dapat dihindari oleh siapa pun dan siapa pun. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk menumbuhkembangkan warga negara yang unggul yang dapat memahami nilai dan norma yang berlaku pada suatu negara, serta menjadi warga negara yang cerdas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Syahla, dkk, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi, yang bertujuan untuk membudayakan warga negara untuk melakukan pemikiran kritis dan tindakan demokratis. Melalui kegiatan untuk menanamkan pada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang dapat menjamin hak-hak warga negara dengan sebaik-baiknya. (Zamroni 2001 dalam Syahla, dkk., 2021) Sementara itu, menurut Kansil (1994: 84 dalam Syahla, dkk., 2021), pendidikan kewarganegaraan adalah disiplin ilmu yang berfungsi sebagai alat untuk pengembangan dan pemeliharaan nilai-nilai luhur yang berakar pada moralitas budaya nasional Indonesia dan diharapkan diwujudkan dalam bentuk berikut: perilaku. Siswa bukan hanya individu, tetapi juga anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.



Gambar 2. 5 Contoh kegiatan belajar di sekolah

Sumber: Bongkah.id, 2020

Hak adalah kebebasan untuk menerima atau melakukan apa yang harus diterima seseorang, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapa pun kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh mencampuri hak orang lain, dan hak tersebut harus dilindungi oleh negara. Namun, suatu negara juga harus membatasi hak-hak rakyatnya, karena harus sesuai dengan pandangan hidup, kemajuan budaya, dan landasan negara yang bersangkutan. Hak-hak yang harus diperoleh warga negara meliputi hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk berkeluarga dan kelangsungan generasi yang akan datang, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak untuk merdeka, hak atas kebebasan informasi, hak untuk keamanan dan kesejahteraan. (Syahla, dkk., 2021)

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dipenuhi oleh seseorang yang tidak dapat digantikan oleh pihak mana pun yang mengejar tujuan tertentu, adalah warga negara yang baik, dan mematuhi aturan yang wajib kita patuhi dan yang kita hormati kewajibannya. (Syahla, dkk., 2021). Adapun kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara, yaitu menghormati hak asasi orang lain, kita berkewajiban untuk mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi pertimbangan etika, keamanan dan partisipasi universal dalam masyarakat demokratis, Persyaratan keadilan, harus berpartisipasi dalam upaya bela negara, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan pemerintahan, setiap warga negara berkewajiban untuk mengenyam pendidikan dasar, dan setiap warga negara berkewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan, hukum perundang-undangan dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Indonesia.

Kemajuan teknologi telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari kemajuan teknologi ini adalah mudahnya budaya asing masuk sehingga menyebabkan generasi penerus suatu bangsa mudah terpengaruh oleh budaya asing. lebih mau mengikuti budaya sendiri daripada budaya sendiri, budaya asing. Apalagi di era sekarang ini tidak jarang banyak anak muda yang terpengaruh budaya asing, semakin banyak anak muda yang meniru budaya asing tanpa

melihat kualitas budayanya. Generasi saat ini tidak memahami budaya negara mereka. Pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, proses pendidikan Kewarganegaraan termasuk ke dalam pembelajaran untuk semua orang dari tingkat pendidikan dasar hingga Universitas. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu bentuk individual dari suatu bentuk dukungan dan dapat menciptakan dampak positif di suatu negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu nilai-nilai dari setiap individu atau warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga komitmen dari Bhineka Tunggal Ika dan juga persatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan negara saat ini, hal tersebut menjadi pendorong pelajar untuk mempelajari pengetahuan mengenai kehidupan demokratis dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kurikulum Center yang dikutip oleh Sunarso, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengasah kemampuan sebagai berikut: (Zulfikar & Dinie, 2021).

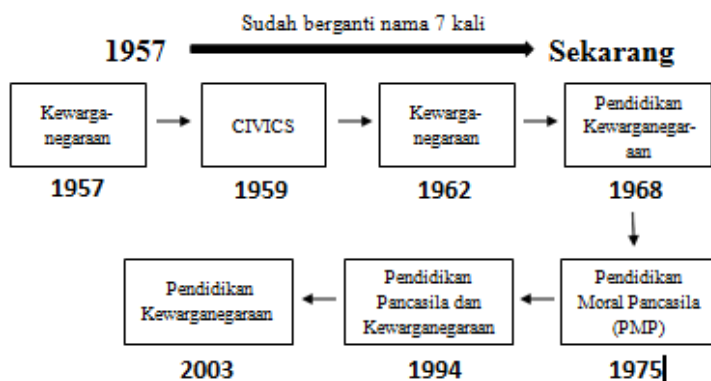
Memiliki pemikiran yang kritis, kreatif dan nasional terhadap masalah kewarganegaraan:

- a. Memiliki kualitas yang tinggi dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang berada di masyarakat, nasional dan kewarganegaraan.
- b. Memiliki perkembangan secara positif dan demokratis sehingga dapat membentuk diri menjadi karakter bangsa Indonesia dan memungkinkan untuk dapat hidup bersama warga negara asing.
- c. Dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan warga negara asing.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional pada awal alinea keempat dan menjadi suatu teori bagi tujuan bernegara. Salah satu tujuan bernegara dapat diperjelas melalui pernyataan tentang “pendidikan kehidupan bangsa”. Apabila berdasarkan ketiga kata tersebut, memiliki arti yang sangat dalam dalam kehidupan. Kehidupan pendidikan dalam suatu negara mengandung informasi mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara. Undang- Undang Nomor 20 Tahun

2003 mengenai penggunaan sistem pendidikan nasional sebagai dasar dan informasi bagi dunia usaha yang berkaitan erat dengan pendidikan kewarganegaraan. Dalam pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan negara dijelaskan bahwa peran pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan dan membentuk suatu karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam kehidupan suatu negara yang bertujuan untuk membangun bangsa (Zulfikar & Dinie, 2021).

Perkembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pembinaan warga negara berdasarkan hak serta kewajibannya. Dimulai sejak didirikan pada tahun 1957, nama dan program tersebut telah berubah selama enam puluh tahun terakhir.



Gambar 2. 6 Perubahan Nama Pendidikan Kewarganegaraan
Sumber: slideshare.net, 2015

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa perubahan nama Pendidikan Kewarganegaraan sudah berganti nama sebanyak 7 kali sejak didirikan pada tahun 1957. Pada awal pendiriannya, Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan nama Kewarganegaraan, lalu kemudian berganti menjadi “Civics”, penerapan Civics sebagai mata pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dimulai pada tahun 1959 dan kemudian berganti nama menjadi Kewarganegaraan kembali pada tahun 1962. Pada tahun 1968, berganti kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dan resmi masuk ke dalam kurikulum sekolah yang ada

di Indonesia. Saat pergantian tahun ajaran masuk pada tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan kembali diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Namun mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kembali diubah pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dan pada akhirnya pada masa reformasi, PPKn diubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai kata dalam Orde Baru.

Menurut Somantri (1969), menjelaskan bahwa mata pelajaran kewarganegaraan pada dasarnya terdiri atas pengalaman belajar pada saat itu, di mana pengalaman belajar tersebut berasal dari sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia (HAM) dan pengetahuan mengenai persatuan bangsa (Zulfikar&Dinie, 2021). Di mana dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan dapat mempersiapkan pelajar menjadi warga negara yang tegas dan konsisten dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air Melalui Budaya

Pada awalnya Indonesia memiliki banyak peninggalan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, hal yang demikian seharusnya membuat bangsa Indonesia merasa bangga, namun kini budaya Indonesia sedikit menurun dari sosialisasi negara tersebut, sehingga banyak orang yang kini lupa dan tidak mengetahuinya. apa itu Indonesia. Budaya adalah. Semakin dalam proses globalisasi, semakin berkurang rasa cinta terhadap budaya yang berdampak besar bagi eksistensi budaya lokal dan masyarakat asli Indonesia. Saat ini Indonesia lebih giat mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional, terbukti bahwa orang asing lebih mengenal budaya Indonesia daripada budaya Indonesia, misalnya batik merupakan produk budaya Indonesia dan terdaftar di UNESCO pada 2 Oktober 2009 yang didaftarkan sebagai warisan budaya Indonesia (Hildigarmis, 2019).

Ada banyak kekuatan yang mendorong perkembangan masyarakat dan budaya Indonesia. Pada dasarnya, ada dua kekuatan yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Pertama, kekuatan dari masyarakat itu

sendiri (faktor internal), seperti perubahan generasi dan berbagai penemuan dan modifikasi lokal. Kedua, adanya kekuatan di luar masyarakat (faktor eksternal), seperti kontak lintas budaya (*cultural contact*) dan distribusi budaya (elemen) serta dampak langsung dari perubahan lingkungan, yang dapat merangsang perkembangan masyarakat dan budaya. untuk mengatur ulang kehidupan mereka orang (Koentjaraningrat (2015) dalam Hildigarmis, 2019).

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya yang merupakan salah satu ciri khas dan sekaligus menjadi aset bagi bangsa Indonesia. Pada saat ini, banyak generasi muda yang sudah melupakan kebudayaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, padahal generasi muda akan menjadi harapan di masa yang akan datang yang nantinya akan melanjutkan warisan-warisan maupun kebijakan di negara ini. Sebagian besar generasi muda saat ini sudah tidak berpegangan maupun melestarikan budaya negaranya sendiri dan cenderung lebih memilih budaya luar yang negatif dan bahkan tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Pada akhirnya, generasi-generasi muda penerus bangsa banyak yang terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti tawuran, memakai obat terlarang, minum-minuman keras dan bahkan seks bebas. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga di masa yang akan datang para penerus bangsa dapat mempertahankan nilai-nilai budaya kita. Hal tersebut yang akan menjadikan generasi muda di masa depan memiliki budaya warga negara Indonesia memiliki sifat gotong royong, senang menolong sesama, bertanggung jawab dan memiliki sopan santun yang akan diterapkannya di kehidupan sehari-hari.

Rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh setiap warga negara akan tercermin dari perilaku ketika mereka membela, melindungi serta rela berkorban terhadap tanah air dan kepentingan bangsa dan negaranya. Mencintai adat dan budaya serta melestarikannya juga merupakan salah satu wujud rasa cinta tanah air yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Rasa cinta tanah air inilah yang mendorong perilaku untuk membangun negaranya menjadi maju dengan penuh perjuangan. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri yaitu dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui seni

tari. Rasa bangga tersebut akan tumbuh dengan cara menggali ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang telah dimiliki. Seni tari merupakan salah satu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi ke generasi yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta akan budaya yang ada di Indonesia.

Selain dari munculnya rasa cinta akan tanah air, akan ada rasa bangga juga yang akan muncul yang dapat kita terapkan dengan melakukan kreativitas pada seni tari. Seperti contohnya dengan mengombinasikan gerakan seni tari tradisional dengan gerakan seni tari modern atau bahkan bisa menciptakan gerakan baru. Kreativitas akan muncul kepada individu yang memiliki rasa ingin tahu, motivasi yang tinggi dan suka berimajinasi. Seseorang yang kreatif pasti akan selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya. Melalui seni tari, para generasi muda dapat menumbuhkan atau memberikan inovasi terhadap gerakan-gerakan di seni tari. Oleh karena itu, sangat penting adanya penanaman karakter yang kreatif dan cinta pada tanah air pada seni tari.



Gambar 2. 7 Contoh Seni Tari Saman di Indonesia
Sumber: mapel.com, 2017

Selain melalui seni tari, kita dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui budaya dengan mengadakan festival-festival kebudayaan yang bertujuan untuk mengenalkan pada para generasi-generasi muda maupun

wisatawan mancanegara yang sedang berada di Indonesia. Hingga sampai saat ini, kegiatan mempertunjukkan produk-produk maupun budaya menjadi salah satu produk wisata yang digemari oleh masyarakat. Kekayaan akan seni dan budaya memiliki nilai dan keunikan tersendiri yang dapat menarik untuk dikunjungi dan bahkan dapat menjadi suatu pengalaman serta dapat mengedukasi bagi setiap orang yang ingin mempelajari seni dan kebudayaan dari suatu daerah tertentu. Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh daerah-daerah di Indonesia untuk dapat menarik minat wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar.

Seperti contohnya pada daerah Aceh yang memiliki ragam seni budaya yang juga mempunyai sebuah festival budaya yang dapat menarik minat masyarakat yang disebut dengan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA). Pekan Kebudayaan Aceh Merupakan suatu festival seni budaya yang di dalamnya terdapat seluruh suku, wilayah dan seluruh lapisan masyarakat dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Aceh untuk dapat menampilkan segala bentuk atraksi baik dalam seni budaya, adat istiadat, permainan rakyat, pameran-pameran benda sejarah serta diadakan promosi pada berbagai destinasi wisata dari daerah masing-masing. Sebagai festival budaya, PKA berpotensi menjadi kegiatan wisata, jika berdasarkan konsep pariwisata yang diungkapkan oleh Yoeti (dalam Dewiyanti et al., 2017) meyakini bahwa konsep kegiatan pariwisata memiliki tiga faktor, yaitu: 1) Memiliki suatu yang dapat dilihat, terkait dengan pemandangan suatu daerah tujuan wisata. 2) Hal-hal yang dapat dilakukan; terkait dengan kegiatan di tempat wisata. 3) Hal-hal yang dapat dibeli; wisatawan dapat membeli oleh-oleh dan jajanan khas masyarakat Aceh. Jika Pekan Budaya Aceh menyediakan tiga komponen tersebut, potensi lain produk wisata yaitu PKA dapat menciptakan banyak seniman di masa depan. Para pemangku kepentingan dan komunitas juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diharapkan mampu mendukung terciptanya dua keseimbangan.



Gambar 2. 8 Contoh Festival Pekan Kebudayaan Aceh di Indonesia
Sumber: Triptrus.com, 2018

7. Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air Melalui Kehidupan Sosial

Setiap harinya kita selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, baik untuk melakukan bisnis, bercengkrama dengan teman, maupun melakukan pekerjaan lainnya. Proses interaksi atau komunikasi antara satu dengan yang lainnya terkadang menimbulkan simpati ataupun empati, dan juga pertukaran informasi. Sehingga dengan adanya proses komunikasi tersebut, sering kali terdapat informasi yang bisa mempengaruhi pemikiran kita. Komunikasi antar masyarakat bisa disebut dengan interaksi sosial dalam berkehidupan sosial. Terkadang kehidupan sosial dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air karena faktor interaksi. Adapun beberapa hal yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kehidupan sosial, antara lain :

1) Lingkungan Sosial yang Mendukung Cinta Tanah Air

Dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, lingkungan kehidupan sosial sangat berpengaruh terhadap pandangan kita terhadap tanah air. Jika kita berada di lingkungan yang tidak memiliki rasa cinta tanah air, mungkin kita akan terpengaruh jika tidak memiliki prinsip yang teguh. Begitu pula sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang tepat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air maka kita akan senantiasa semakin memiliki bangga terhadap tanah air sebagai wujud rasa cinta kita. Contohnya seperti lingkungan sekolah, kita mempelajari pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan yang memberikan pengetahuan mengenai negara kita Indonesia, selain itu di lingkungan sekolah pun selalu mengadakan upacara bendera setiap hari senin dalam rangka mewujudkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Di lingkungan perumahan yang baik pun juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, seperti pada setiap tanggal 17 Agustus selalu merayakan kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama di lingkungannya.

2) Menanamkan Rasa Toleransi Terhadap Keberagaman

Indonesia memiliki berbagai macam budaya, bahasa, serta agama, sehingga dalam berkehidupan sosial kita harus memiliki rasa toleransi. Toleransi dalam konteks sosial budaya serta agama memiliki arti siap dan perbuatan yang menolak diskriminasi kepada kelompok yang memiliki perbedaan ataupun tidak bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat suatu wilayah (Digdiyo, 2018). Sehingga, dengan memiliki rasa toleransi pada kehidupan sosial, artinya kita mencintai salah satu karakteristik negara kita yaitu memiliki macam-macam budaya, bahasa, serta agama. Karena kita memiliki semboyan yang selalu digunakan yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti bahwa meskipun memiliki perbedaan yang beragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Dengan menerapkan rasa toleransi di kehidupan sosial, kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air.

3) Tidak Menyebarkan Ujaran Kebencian Antara Warga Negara

Dalam berbangsa dan bernegara selain memiliki rasa toleransi, kita juga harus menghormati pendapat orang lain. Dengan memiliki rasa hormat terhadap pendapat maupun pandangan orang lain, kita dapat menghindari adanya perdebatan yang akan mendatangkan permusuhan. Menyebarkan ujaran kebencian dapat memicu perpecahan, sehingga dalam kehidupan sosial kita harus memiliki tutur kata yang sopan sesuai dengan moral dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Dengan memiliki tutur kata yang sopan, maka kita akan dihormati pula oleh orang lain, dengan begitu kita akan mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang aman dan damai. Maka dengan adanya rasa aman dan damai

kita bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air karena kita tidak merasa ada ancaman-ancaman lain di dalam negeri.

4) Mengikuti Peraturan dan Hukum yang Berlaku di Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan diperlukan adanya aturan dan hukum yang diterapkan, hal ini untuk menghindari adanya kekacauan yang akan terjadi. Peraturan dalam kehidupan sosial tidak hanya peraturan tertulis, ada pula peraturan yang tidak tertulis, sehingga saat berinteraksi kita juga harus mematuhi peraturan dan hukum adat setempat sebagai rasa hormat. Contoh lainnya adalah saat berkendara di jalan, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, maka akan menyebabkan ketertiban di jalan. Mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan wujud nasionalisme karena menghormati aturan dan hukum pemerintah. Dengan adanya rasa nasionalisme tersebut, maka dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa cinta tanah air.

5) Mempelajari Budaya dan Kesenian Daerah

Banyak sekali budaya serta kesenian lokal daerah yang dapat dipelajari. Mulai dari tari, wayang, lagu, hingga permainan. Jika mempelajari salah satu yang kita senangi dari budaya dan kesenian lokal, maka kita akan merasa bahwa negara kita memiliki warisan budaya dan kesenian yang sangat menyenangkan dan kita akan merasa bahwa kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan budaya dan kesenian daerah tersebut ke anak dan cucu kita kelak. Mempelajari budaya dan kesenian daerah akan menumbuhkan rasa cinta terhadap negara dan warisan budaya negara kita.

C. KONSEPSI BELA NEGARA

1. Makna Bela Negara Masyarakat dan Negara

Setiap individu yang berdomisili di suatu wilayah negara harus memiliki sikap nasionalisme, patriotisme serta bela negara. Siapa pun individu yang hidup di Indonesia secara moral harus ikut mempertahankan tanah airnya sebagai bentuk rasa syukur, dan terima kasih atas kekayaan dan kenikmatan yang telah mereka peroleh dari tanah air nusantara. Seiring dengan perkembangan zaman, perwujudan bela negara selalu terbuka, berubah dan mengikuti perkembangan. Ketika, pada masa

penjajahan, kolonial, perang dunia, bela negara membutuhkan kemauan dan partisipasi yang lebih besar dalam perang untuk mengangkat senjata dalam melawan apa yang disebut dengan musuh yang jelas di depan mata.

Terlepas dari terminologi yang digunakan, pertahanan negara mengalami tuntutan zaman, baik dalam definisi maupun dalam praktiknya. Mahfud MD menyampaikan bahwa bela negara merupakan bentuk pertahanan yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dan masa yang akan datang (Sholikah, 2020). Wujud bela negara dewasa ini lebih luas dan sangat beragam. Bela negara tidak dipahami hanya sebagai kegiatan atau partisipasi di medan perang. Persaingan waktu, kemajuan teknologi dan budaya menuntut berbagai bentuk pertahanan negara. Perang bukan lagi bentuk perjuangan yang harus diperjuangkan di medan perang melainkan di dunia maya *psywar*. Terlebih letak geografis Indonesia yang sangat strategis, pengaruh serta intervensi dari negara lain tidak dapat dihindarkan. Pendapat yang sama ditegaskan Soepanji dan Farid, menurut keduanya, Indonesia secara geopolitik sangat strategis, sehingga selama Indonesia ada tidak akan pernah lepas dari *global extraordinary networks* (Soepandji, 2018). Hal ini disebabkan karena keterkaitan Indonesia dengan negara lain seiring dengan kemajuan teknologi, juga karena posisi Indonesia yang strategis, yaitu diantara dua benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, secara eksplisit mengatakan bahwa bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) “Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat (1) “Bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Selain dasar tersebut, bela negara dikuatkan dalam Undang-Undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 kembali ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dari sini, negara dapat mewajibkan seseorang untuk dapat melakukan kegiatan bela negara sesuai dengan kondisi yang ada dan kegiatan tersebut diatur dengan undang-undang. Kata hak berarti setiap warga negara dengan aturan yang

berlaku dapat berpartisipasi dalam definisi kebijakan negara dan tidak ada orang atau kelompok yang dapat melarangnya. Kata wajib berarti bahwa negara berhak memaksa warga negaranya untuk membela negara dalam keadaan darurat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No.3/2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 disebutkan bahwa (1) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun bentuk-bentuk bela negara disebut dalam ayat (2) dalam pasal yang sama yakni (2) keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- Pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan ini ditanamkan kepada para pelajar untuk cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga mereka akan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.
- Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Hal ini banyak dilakukan oleh beberapa negara kepada warga negaranya yang menyelesaikan studi agar siap dalam kondisi darurat. Di Indonesia hal ini belum atau tidak dilaksanakan.
- Pengabdian sebagai prajurit dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, secara sukarela menjadi anggota TNI dan Polri adalah salah satu bentuk keikutsertaan dalam bela negara.
- Pengabdian sesuai profesi. Di Indonesia hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Ditjen Potensi Kemhan RI) mengatakan, setidaknya ada dua spektrum pertahanan negara, yaitu lunak dan keras, yang tentunya memiliki bentuk bela negara yang berbeda (Supandji, 2012). Lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Spektrum Bela Negara

SPEKTRUM BELA NEGARA	
LUNAK (<i>SOFT</i>)	KERAS (<i>HARD</i>)
Psikologis: 1. Memahami ideologi Pancasila serta UUD NRI 1945 2. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia 3. Wawasan kebangsaan 4. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam bentuk kehidupan sehari-hari 5. Kesadaran bela negara	Ancaman Militer: 1. Komponen Utama 2. Komponen Cadangan 3. Komponen Pendukung

Fisik: 1. Pelaksanaan tugas sehari-hari dalam rangka mengisikemerdekaan 2. Pengabdian sesuai profesi 3. Menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia Internasional (kesenian, olah raga, penelitian, dsb) 4. Penanganan bencana dan ancaman non-militer lainnya (meluasnya narkoba, <i>hoax</i>, perang dagang, dsb)	
---	--

Sumber: (Supandji, 2012)

Jika mengacu pada 2 spektrum di atas, semua WNI pada tataran lunak (*soft*) bela negara lebih merupakan kewajiban, sedangkan pada spektrum keras (*hard*) mereka lebih condong pada hak-hak warga negara yang harus menunggu kewajiban lain dari pemerintah. Oleh karena itu, bela negara bersifat hak sekaligus kewajiban lebih didasari rasionalisasi, urgensi dan kompleksitas bentuk-bentuk bela negara. Sehingga, bela negara tidak selalu mengandaikan, mengharuskan, atau mengondisikan pihak lain karena merupakan kewajiban. Maka dari itu, setiap orang berkewajiban untuk membela negara setiap saat dan dengan cara apapun. Warga negara juga memiliki hak untuk membela negara, sehingga pemerintah harus menjamin dan memfasilitasi hak-hak warga negara tersebut.

Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat dipahami bahwa bela negara dapat bermakna fisik/militer dan non-fisik/ non-militer. Adapun bela negara mempunyai berbagi makna antara lain:

1) Makna dari Bela Negara Bagi Warga Negara

Bela Negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang terorganisir dan memahami serta terintegrasi secara individu atau kelompok sebagai bagian dari cinta tanah air, hati nurani bangsa Indonesia dan negara Indonesia, kepercayaan Pancasila di era reformasi dan globalisasi, serta kesediaan berkorban untuk rakyat dan negara. Oleh karena itu, bela negara yang dimaksud di sini dalam perang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia tidak selalu dalam bentuk fisik. Namun, dapat berupa apa saja yang dilakukan warga negara untuk membantu kemajuan bangsanya, membantu warga negara lainnya, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Hakikat bela negara dalam pengertian ini dapat berupa kerja nyata, ikut serta dalam pembangunan negara sesuai dengan profesinya masing-masing (arsitek, dokter, nelayan, petani, guru, dll) dan berkontribusi dalam pembangunan. terciptanya lingkungan yang tentram dan damai di lingkungannya masing-masing serta patuh dalam membayar pajak.

2) Makna dari Bela Negara Bagi TNI

Bela negara adalah sikap setiap individu, disertai dengan semangat yang tak tergoyahkan terhadap seluruh prajurit TNI, sesuai janji Sapta

Marga yang dilandasi iman dan takwa serta tekad berkorban untuk bangsa dan negara. Bela negara di sini berarti komitmen seluruh prajurit TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Angkatan Darat, yang telah dilatih militer untuk itu. Mereka yang memiliki keterampilan harus siap secara fisik terhadap ancaman eksternal dan internal di garis depan perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Untuk itu, prajurit TNI juga dilatih untuk memantau situasi dan kondisi di manapun berada dan sekaligus menjaga ketertiban umum. Contoh bela negara dengan contoh patriotisme yang dilakukan oleh prajurit dari Sapta Marga berjuang di garis depan, menjaga perbatasan darat dan laut Indonesia dan negara lain, dan siap menjaga ketertiban umum tanpa memihak kelompok siapa pun.

3) Makna dari Bela Negara sebagai Wajib Militer

Makna bela negara secara umum adalah wajib militer. Wajib militer ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh individu yang telah cukup dari segi usia atau sudah menyelesaikan pendidikannya (sesuai aturan suatu negara) terhadap negaranya dalam bentuk fisik. Pelayanan tersebut dapat dilakukan secara sukarela (atas kemauan pribadi individu) dan atau dipaksa / kewajiban. Wajib militer yang dilakukan secara terpaksa atau dipaksakan kepada seseorang oleh negara, biasanya dilakukan apabila suatu negara dalam kondisi darurat perang. Biasanya kewajiban ini berlaku kepada setiap laki-laki warga negaranya dengan syarat tertentu, kecuali individu yang mengalami gangguan fisik / mental atau alasan khusus keagamaan).

Di beberapa negara wajib militer tetap diberlakukan meskipun negara dalam kondisi damai. Contohnya negara Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, dan Inggris yang melaksanakan pelatihan militer kepada warganya yang datang secara sukarela selama sepekan dalam satu bulan. Di negara Republik China / Taiwan, Korea, dan Israel wajib militer berlaku bagi setiap warga negaranya yang telah menyelesaikan dinas sosial selama beberapa tahun. Di Indonesia sendiri, meskipun sudah ada wacana akan bela negara dalam bentuk wajib militer ini, sampai saat ini belum ada belum ada unsur-unsur terbentuknya negara yang dialami di negara kita.

4) Makna dari Bela Negara Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 yang menjadi salah satu landasan hukum bela negara, Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen yang penting. Bersama TNI, Polri ikut mempertahankan negara dari segala ancaman nyata yang mengganggu kedaulatan negara dari luar maupun dari dalam. Dan salah satu fungsi Polri dalam bela negara yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat dari berbagai tindakan kejahatan. Kepolisian ikut juga memberantas individu dan kelompok yang secara nyata dan sembunyi-sembunyi berniat mengganggu kedaulatan Bangsa Indonesia.

5) Makna dari Bela Negara Bagi Pelajar dan Generasi Muda

Pelajar dan generasi muda adalah harapan sebuah bangsa di masa yang akan datang, termasuk Bangsa Indonesia. Karena di tangan pelajar dan generasi mudalah ke depannya bangsa ini akan menggantungkan dirinya. Oleh karena itu, makna dari bela negara bagi pelajar dan generasi muda tidak kalah penting untuk dipahami, terutama bagi generasi itu sendiri. Sama halnya dengan makna bela negara bagi warga negara, bagi pelajar dan generasi muda, bela negara tidak sekedar berupa mempertahankan negara dalam bentuk fisik. dalam penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hamkamnas), bela negara adalah bagaimana cara generasi muda mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan memajukan bangsa.

Tahap awal pendidikan bela negara, dapat dicapai dengan Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah yang di dalamnya terdapat pendidikan bela negara. Dengan Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan pelajar dan generasi mudah lebih mencintai tanah airnya, menyadari arti penting berbangsa dan bernegara, dan mempunyai semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Selain itu diharapkan generasi muda akan menjauhi segala bentuk kegiatan yang negatif dan merusak. Contoh perwujudan bela negara yang dapat dilakukan pelajar dan generasi muda, di antaranya menjauhi penyalahgunaan narkoba, tidak melakukan tindakan kriminal, belajar dengan giat sesuai kemampuannya, ikut mengharumkan nama Bangsa Indonesia di segala bidang (bidang sains dan matematika, teknologi, pertanian, budaya), dan lain-lain.

2. Bela Negara Dalam Pembangunan Nasional

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah suatu bentuk perjuangan terus menerus setiap warga negara, berdasarkan profesinya, dengan prestasi terbaiknya, untuk mencapai kesejahteraan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Bagi masyarakat Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia, setidaknya beberapa isu penting harus diperhatikan dalam konteks pembangunan nasionalnya, yaitu persolan Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, lingkungan hidup, demokratisasi dan globalisasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan mendasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negara-negara dewasa ini. Bagi masyarakat Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengutamakan prinsip desentralisasi kekuasaan dan kewenangan kepada daerah, juga merupakan isu yang diharapkan dapat meningkatkan proses pembangunan nasional melalui penguatan pemberdayaan masyarakat.

Dasar hukum pembangunan nasional adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan nasional menjadi dasar bagi pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Adapun tujuan nasional negara terkandung dalam pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Globalisasi merupakan persoalan sosialisasi dalam kehidupan manusia, yang kemudian berpengaruh besar terhadap corak dan arah pembangunan masing-masing negara. Globalisasi dapat digambarkan sebagai proses integrasi antar negara, yang dapat dilihat dari proses saling ketergantungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang

berkembang di antara negara-negara di dunia. Tren globalisasi saat ini ditandai dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang semakin cepat serta persaingan yang semakin ketat. Dinamika ini telah menjadi fenomena baru dalam pembangunan suatu bangsa untuk mencapai kemakmurannya. Dalam proses globalisasi terdapat beberapa ciri, antara lain perkembangan teknologi informasi, perdagangan, transnasionalisasi keuangan dan investasi serta reformasi politik; yang membuat persaingan semakin ketat dalam perdagangan internasional. Setiap negara memiliki kepentingan ekonomi, politik sosial, budaya dan lingkungan. Berdasarkan kepentingan yang berbeda tersebut, berbagai kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.

Dalam penyelenggaraannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional timbul dan bermuara pada dasar ideal konsepsi kehidupan dan konstitusi UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh interaksi dan keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya, baik regional maupun internasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia membutuhkan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak goyah dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu asas penuntun bangsa Indonesia adalah visi nasional yang dibentuk dalam bentuk nusantara, oleh karena itu disebut dengan visi nusantara. Kepentingan nasional dasar bangsa Indonesia merupakan upaya untuk menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan seluruh aspek kehidupan nasionalnya. Oleh karena itu, perspektif nusantara adalah geopolitik Indonesia, yang dipahami dari pemahaman bahwa terdapat konsepsi geopolitik Indonesia dalam perspektif nusantara, yaitu elemen ruang, yang kini berkembang tidak hanya fisik dan geografi, tetapi secara keseluruhan.

Ketahanan nasional adalah keadaan dinamis suatu bangsa, yang mengandung keuletan dan ketangguhan, yang memuat kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa. integritas. jati diri,

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional Indonesia (Suradinata, 2005). Dalam perkembangan dan pertumbuhan negara, sebenarnya tidak ada negara yang terbelakang, melainkan negara yang tidak dikelola dengan baik atau tidak dikelola dengan baik (*mismanagement, mismanagement*). Ada beberapa bukti sebagai akibat dari kesalahan dalam kebijakan publik atau dalam tata kelola dan manajemen pembangunan. Misalnya, terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, penyebab utamanya bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain terkait dengan masalah internal seperti kondisi sosial politik dan keamanan yang tidak stabil, biaya ekonomi yang tinggi akibat proses produksi yang tidak efisien, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta sistem ekonomi yang tidak berdasar. Faktor eksternal yang terkait dengan lembaga internasional, seperti pinjaman yang dikucurkan terutama utang jangka pendek yang terbukti menjadi jebakan, membebani negara debitur dengan utang dan bunga utang yang meningkat menyusul fluktuasi mata uang asing, khususnya dolar US.

Hakikat pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya, baik fisik maupun non fisik, jasmani dan rohani, material dan spiritual, sehingga pembangunan non fisik, rohani atau spiritual menunjukkan kecepatan yang sangat lambat bahkan cenderung memburuk. Munculnya kemerosotan moral dan penyakit sosial di masyarakat dapat disebabkan oleh masalah ekonomi, ketidakamanan hukum, kurangnya panutan atau kontrol yang buruk atas konsumsi informasi oleh orang-orang dalam pembangunan, transisi atau modernisasi. Peradaban mengglobal, akal tidak rasional, maka nilai-nilai luhur lenyap. Jika ingin belajar dari pengalaman bahwa tekanan ekonomi yang terus menerus, penegakan hukum dan disiplin yang lemah, kejujuran yang lemah, dan nilai-nilai moral adalah masalah mendasar yang akan menyebabkan keruntuhan. Untuk menghadapi pengaruh global, masih terdapat kontroversi antara pemikiran ekonomi pasar murni (liberalisasi perdagangan) dan intervensi negara (proteksionisme). Secara umum, intervensi negara atau ketertiban umum harus berfungsi untuk membangun kapasitas, menciptakan keadilan, menciptakan kondisi yang stabil, atau membuat proses lebih efektif dan efisien. Di antaranya adalah alasan pemberian insentif khusus

untuk produksi barang-barang tertentu yang masih diimpor (substitusi impor), perluasan kesempatan kerja, penggunaan sumber daya dan investasi; serta untuk alasan non ekonomi seperti keamanan nasional dan distribusi pendapatan atau pemerataan.

a. Pemerintahan yang Berlandaskan Bela Negara

Bela negara merupakan salah satu bagian yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyusun strategi nasional bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan dari dalam maupun luar negara. Maka dari itu, pemerintah yang baik, akan menerapkan bela negara dalam membuat strategi dan kebijakannya. Karena, seiring dengan perkembangan teknologi yang dibarengi dengan globalisasi, menyebabkan terjadinya pola pikir serta sikap masyarakat yang dapat menjadi ancaman ideologi, antara lain seperti terorisme, radikalisme, peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba (Eko, 2017). Sehingga untuk menghindari ancaman dalam negeri tersebut, maka pemerintah yang baik akan memberlakukan penerapan bela negara bagi setiap kegiatan sosial maupun di setiap institusi.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang berbela negara, maka pemerintah Indonesia dalam kehidupan politik menerapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan perundang-undangan. Sehingga, warga negara dengan bebas dapat berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Hak politik lainnya adalah, seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dalam memilih calon pemimpin negara maupun daerah dengan mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu). Karena, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga pemerintahan yang baik akan memberikan warga negaranya kesempatan dalam memilih calon pemimpin yang baik menurut warga negara. Pemberian hak politik bagi warga negara merupakan bentuk pemerintahan yang baik. Bentuk pemerintah dan pemerintahan yang baik dapat disebut juga dengan *“good government and good governance.”*

Kebebasan berpolitik dalam bernegara pun harus diupayakan supaya dalam keadaan yang kondusif untuk menciptakan soliditas serta solidaritas antara warga negara Indonesia, maka dari itu kebebasan demokrasi di Indonesia harus lebih dimanfaatkan untuk digunakan secara mutual dalam mewujudkan pemerintahan yang memiliki legitimasi politik tinggi serta

tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) (Nuryanti, 2017). *Good governance* sendiri merupakan bentuk kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Duarmas, Rumapea, & Rompas, 2016). Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance*, maka pemerintah harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance* sehingga pemerintahan yang baik yang berlandaskan bela negara dapat terwujud.



Gambar 2. 9 Prinsip-Prinsip Penerapan *Good Governance*

Pada gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan *good governance* ada 9 prinsip. Yaitu:

1) Partisipasi

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh penting. Sehingga, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat warga negara sangat penting dalam mewujudkan *good governance*.

2) Kepastian Hukum

Penegakkan hukum secara merata dan adil dan tidak mendiskriminasikan salah satu pihak merupakan hal yang diperlukan

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memiliki kejelasan terhadap hukum.

3) Transparansi

Kebebasan informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun APBN kepada publik merupakan bentuk kepercayaan warga negara terhadap tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk meningkatkan rasa percaya, maka transparansi merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Karena rasa kepercayaan akan menimbulkan rasa bela negara bagi warga negara.

4) Tanggung jawab

Tanggung jawab dilakukan pemerintah untuk merespon aspirasi masyarakat, sehingga ketika terjadi permasalahan akibat keputusan pemerintah yang dapat merugikan salah satu pihak, maka pemerintah dapat membantu serta bertanggung jawab terhadap keputusannya.

5) Berorientasi pada kesepakatan

Pemerintah dapat menjadi perantara terhadap masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga pemerintah dapat menentukan dan memutuskan pilihan yang terbaik bagi semuanya.

6) Keadilan

Pemerintah yang baik berlandaskan bela negara harus memiliki peran keadilan yang tinggi. Sehingga dengan keadilan dan kesetaraan yang diterapkan, dapat memberikan kesempatan kepada semua masyarakat dan *stakeholders* yang ada.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Efektifitas serta efisiensi dalam pemerintahan yang baik artinya pemerintah dapat dengan bijak mengelola sumber daya yang baik secara efektif dan efisien. Sehingga pengeluaran serta pendapatan yang digunakan oleh pemerintah secara harus dipakai efektif dan efisien tanpa merugikan salah satu pihak.

8) Akuntabilitas

Pemerintahan yang baik jika memiliki kesalahan dalam menjalankan pemerintahannya harus siap dalam bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut dan memberikan pertanggung jawabannya terhadap publik serta *stakeholders*.

9) Visi Strategik

Pemerintah yang baik harus memiliki perspektif dan rencana yang jelas dan jauh ke masa depan, sehingga tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pemerintah yang baik berlandaskan bela negara tidak hanya memikirkan bagaimana keberlangsungan pemerintah di masa depan, melainkan harus memikirkan pula 9 (Sembilan) prinsip yang terdapat pada *good governance* agar keseimbangan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

b. Pemimpin Dalam Kepemimpinan yang Baik

Kepemimpinan adalah usaha mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Ini termasuk bagaimana mempengaruhi orang dengan instruksi atau perintah, tindakan yang mendorong orang lain untuk bertindak dan bereaksi, dan membawa perubahan positif. Dalam kepemimpinan, kekuatan dinamis penting untuk memotivasi dan mengoordinasikan organisasi untuk mencapai tujuan. Kemampuan untuk menanamkan kepercayaan dan dukungan di antara bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Faktor kepemimpinan yang paling penting adalah: "sikap dan integritas". Integritas berarti keadaan integritas, kesatuan, atau satu-satunya kata dengan tindakan. Jadi berbeda dengan "*Image*", yang berarti apa yang orang lain pikirkan tentang kita, sementara "integritas" adalah siapa kita sebenarnya. Jadi integritas bisa berarti membangun kepercayaan, berdampak tinggi, membangun reputasi baik, menjalaninya sendiri sebelum memimpin orang lain. Kepemimpinan berwawasan Bela negara adalah seni dan kemampuan untuk membangkitkan kesadaran segenap elemen masyarakat bangsa dan negara yang diwujudkan menjadi suatu sinergi yang kuat dan utuh guna melindungi negara dari segala macam AGHT berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur (Dewan Ketahanan Nasional, 2019).

Beberapa pendapat tentang pemimpin yang ideal yang pada hakikatnya masih relevan dan sesuai untuk dipedomani para pemimpin masa kini, yaitu:

- a) George Terry menyatakan bahwa seorang pemimpin harus; 1. Penuh energi dan sehat jasmani rohani, 2. Punya stabilitas dalam perasaan (dapat mengendalikan emosi. 3. Keinginan memimpin timbul dari dalam nuraninya. 4. Cakap dalam berkomunikasi, 5. Memiliki kecakapan teknis dalam perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan, pengawasan dlsb. 6. Menghargai pendapat orang lain.
- b) Keith Davis berpendapat bahwa seorang pemimpin harus; 1. Punya tingkat kecerdasan yang lebih dari yang dipimpin. 2. Memiliki kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. 3. Punya dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi, 4. Mau mengakui harga diri dan kehormatan anggotanya serta berpihak kepadanya.
- c) Fayol menyatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya; 1. Memiliki jasmani yang sehat dan giat, 2. Memiliki rohani yang prima, 3. Memiliki moral yang tegas mau menerima tanggung jawab, berinisiatif, setia, bermartabat, bijaksana, 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang luas baik yang berhubungan dengan fungsinya atau tidak.

Untuk membentuk pemimpin yang berwawasan kebangsaan (yang sekaligus berwawasan bela negara), perlu pemahaman dan penghayatan empat kompetensi serta dilandasi dengan azas-azas dan teori kepemimpinan. Bila para pemimpin dan kader pemimpin tersebut telah memahami dan menghayati hal-hal tersebut, maka secara otomatis memiliki integritas nasional dan jati diri bangsa. Menurut (Maxwell, 1995) Pemimpin terkemuka dilahirkan dengan kualitas kepemimpinan, telah melihat model kepemimpinan sepanjang kehidupannya, telah mempelajari tambahan kepemimpinan melalui latihan, dan mempunyai disiplin pribadi untuk menjadi pemimpin besar. Wawasan seseorang sangat berkaitan dengan kualitas kepemimpinan. Dalam hal inilah, betapa pentingnya peranan dan tumbuh kembang anak, pemuda dan orang tua, peranan orang tua dalam keluarga, guru dan masyarakat, maupun aparat

pemerintah dalam membangun wawasan melalui ketauladanan dan pendidikan formal.

Aktualisasi pemimpin dapat berupa menciptakan keadilan, menciptakan kondisi yang stabil, proses yang lebih efektif dan efisien, memberikan rangsangan lebih produktif, memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan sumber daya dan investasi, pemerataan dalam distribusi pendapatan, meningkatkan persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Hal tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Kewirausahaan yang Menunjang Kesadaran Bela Negara

Pertahanan hidup terletak pada keinginan dan kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan kualitas hidup, baik kehidupan maupun kehidupan individu dan kelompok orang, bangsa dan negara. Di sinilah pentingnya peran jiwa wirausaha yang harus dimiliki oleh semua orang dengan profesi yang berbeda, karena jiwa wirausaha berarti kemampuan untuk selalu mendorong kreativitas dan inovasi dalam mengatasi berbagai permasalahan, dan tidak terikat dengan berbagai kekurangan. Di Indonesia, sumber daya alam yang melimpah membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk kemakmuran rakyat, selalu membangun keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Kewirausahaan yang mendukung kesadaran bela negara merupakan salah satu kunci penentu kemajuan suatu bangsa. Beberapa manfaat berwirausaha antara lain: kesempatan untuk mengendalikan nasib Anda sendiri, kesempatan untuk melakukan perubahan, kesempatan untuk mencapai potensi penuh Anda, kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang tidak terbatas, kesempatan untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan. kesempatan untuk melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang.

Shefsky (dalam Nugroho 2015) menyatakan bahwa *entrepreneurs are made, not born*. Jadi *entrepreneur* dapat dipelajari dan diajarkan serta dididik menjadi *entrepreneur* tidak memandang latar belakangnya, hal ini menjadikan kita optimis bahwa setiap orang dapat menjadi *entrepreneur*. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan membedakan dari yang sudah ada (inovasi), dengan tujuan mencapai kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.

Kewirausahaan akan tumbuh dan berkembang apabila mampu mengembangkan organisasi, mengembangkan kelembagaan, yang artinya mampu bekerja sama dengan membangun sinergi dalam kemitraan (asosiasi). Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ini sangat penting untuk kemajuan bisnis karena daripada berlomba-lomba membunuh, lebih baik bersatu dan bekerja sama untuk saling melengkapi dan menguntungkan. Membangun jaringan berarti menciptakan sinergi. Membangun jaringan berarti memenuhi kebutuhan masyarakat melalui keteraturan dan integrasi ke dalam masyarakat. Ini berfungsi sebagai panduan untuk bertindak, menjaga integritas dan kohesi masyarakat, dan menjadi dasar untuk sistem pemantauan atau kontrol.

Dalam hal kesejahteraan finansial, jenis pendapatan yang berbeda memerlukan sikap yang berbeda, keterampilan teknis yang berbeda, pendidikan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Betapa pentingnya dalam proses pembelajaran mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, rasional dan kreatif sebagai warga negara, untuk menanamkan sikap nasionalisme dalam rangka membangun dan memelihara keutuhan bangsa dan negara; Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan masyarakat, nasional dan pemerintah, serta dalam memerangi korupsi, narkoba, kenakalan remaja dan perilaku tidak pantas lainnya, dan bertindak dengan kecerdasan; menciptakan lingkungan akademik yang menawarkan kesempatan untuk berkembang secara positif dan demokratis, membentuk diri sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, sehingga dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain; berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia, secara langsung atau tidak langsung, melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; Memotivasi siswa untuk menggunakan etika dan sopan santun; Memungkinkan siswa untuk mengajar dan mencontohkan penerapan karakter kepada siswa lain.

d. Pengembangan Pembinaan dan Pembudayaan Kesadaran Bela Negara

Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, dinamisme pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kepentingan rakyat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan,

terencana maupun tidak terencana, tumbuh dan berkembang, sehingga menambah kompleksitas permasalahan. Beberapa penyimpangan dapat diamati dalam berbagai aspek, seperti: Upaya penggantian dasar ideologis bangsa, separatisme (politik), persaingan ketat dalam liberalisasi ekonomi, hedonisme (sosial budaya), kurangnya infrastruktur pertahanan dan keamanan, kepastian hukum yang lemah, ketergantungan pada teknologi di negara-negara industri, efek sistem informasi dan komunikasi, masalah rasial, ketergantungan dan ketidakamanan, dan sebagainya. Ini adalah contoh kuatnya pengaruh dari luar negeri atau sekaligus karena kondisi internal negara yang lemah.

Pengembangan nilai dan kebudayaan bela negara. Setiap negara memiliki kepentingan. Oleh karena itu, dalam menyikapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, serta berbagai dampak globalisasi, diperlukan pemikiran bersama, yaitu memikirkan kepentingan nasional (ke dalam) dan komitmen terhadap kepentingan dunia. Untuk menghindari dampak lebih lanjut dalam menghadapi ketidakpastian global, perlu segera dilakukan perluasan dan pendalaman wawasan sebagai warga negara Indonesia pejuang bangsa dalam usaha menciptakan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional, memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral (terpadu) dalam rangka ketahanan nasional.

Sebagai salah satu upaya strategis untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, yang akan menumbuhkan literasi kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan akan memperkuat visi kebangsaan yang menanamkan kebanggaan sebagai bangsa pejuang, menjadikan Pancasila sebagai acuan kritis dan etika politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan mempertahankan kedaulatan rakyat dan menata nilai-nilai spiritual yang fundamental seluruh komponen bangsa melalui pengakuan terhadap kebhinekaan bangsa. Oleh karena itu, diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik intelektualitas, mentalitas, moralitas maupun fisik/jasmani yang kuat; meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan diri dan akhirnya mengembalikan kedaulatan negara setara dengan negara

maju, meningkatkan integritas dan mewujudkan satu kesatuan sistem pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam implementasinya, maka kebijakan pemerintah sebagai fasilitator, melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun organisasi profesi dan sebagainya mengambil peran aktif untuk mensosialisasikan Pendidikan Kewarganegaraan melalui jalur formal (pendidikan formal), non formal (ketauladanan), sistem pendidikan, efektivitas komunikasi yang integratif. Dengan *good governance* maka akan mengarahkan pada terciptanya masyarakat madani, sistem politik yang lebih demokratis, lebih menghargai HAM, peraturan dan hukum, serta integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang meliputi intelektualitas, mentalitas, moralitas maupun fisik/ jasmani yang sehat kuat akan menjadi penentu utama keunggulan bangsa dan negara dalam percaturan politik bangsa-bangsa di dunia. Pelembagaan nilai-nilai Pancasila khususnya melalui Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian maupun mata kuliah lainnya menjadi kebutuhan yang bersifat segera dari setiap warga negara, penyelenggara pemerintahan, dan seluruh kekuatan nasional.

3. Bela Negara dalam Perspektif Kebijakan Publik

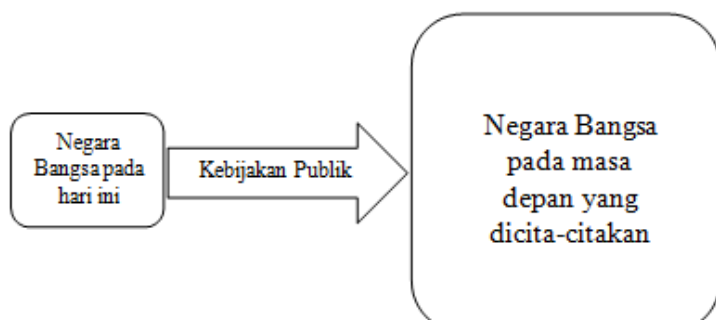
Cita ke 8 dari Nawa Cita, atau sembilan agenda prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyebutkan bahwa pemerintah memberikan prioritas melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti memberikan pengajaran tentang sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dan berkehendak untuk terus merdeka dan berdaulat. Maka, mempunyai kebijakan bela negara adalah sebuah keharusan. Pada tahun 2015, Menteri Pertahanan menerbitkan sebuah Permenhan No19/2015 tentang penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 dengan berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 Ayat (3).

Secara khusus, bela negara dinyatakan pada bagian “Pembangunan Karakter Bangsa” yang menyatakan bahwa pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Pembangunan Karakter Bangsa tersebut dilaksanakan dengan:

- a) Penyusunan disain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dijadikan acuan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN oleh K/L dan Pemda;
- b) Pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan bela negara untuk membentuk kader bela negara dan membantu K/L dan Pemda dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki, dan atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara;
- c) Pembentukan kader bela negara dengan mengikutsertakan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi;
- d) Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa;
- e) Mendorong K/L terkait dalam perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi sebagai salah satu dorongan yang kuat bagi terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses *nation and character building*.

Kebijakan publik adalah strategi dari Pemerintah untuk mengarahkan kehidupan bangsa untuk mencapai cita-cita bersama, di mana cita-cita jangka panjang atau selamanya ada pada konstitusi dan cita-cita jangka terbatas ada pada visi Presiden atau Kepala Pemerintahan. Strategi dimaksud mencakup strategi politik-ideologi, ekonomi-bisnis, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Jadi, kebijakan publik adalah

pekerjaan pertama dan utama dari setiap Pemerintah sebagai penyelenggara negara. Karena itu, perlu disadari bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Demikian juga berkenaan dengan kebijakan bela negara. Setidaknya ada tiga agenda yang perlu dicermati agar kebijakan ini menjadi berhasil.



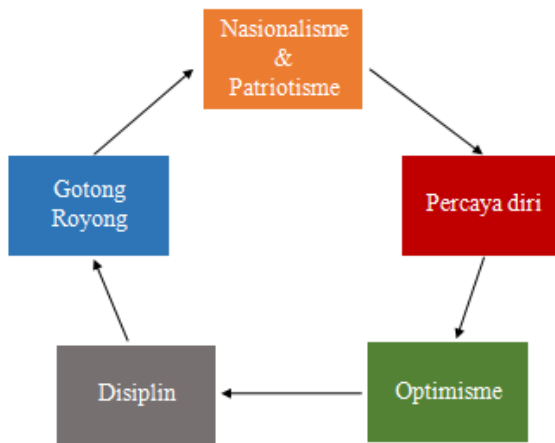
Gambar 2. 10 Konsep Kebijakan Publik

Sumber: www.kemhan.go.id. 2016

Konsep bela negara saat ini harus memiliki paradigma dan pendekatan yang baru dan tidak diartikan sebagai wajib militer. Menurut Presiden Jokowi, pendekatan pemahaman bela negara saat ini yaitu bagaimana mengubah pola pikir dari semula berpandangan pesimis menjadi optimis. Beliau mengatakan bahwa selain untuk menumbuhkan rasa percaya diri, optimisme, gotong royong, nasionalisme, hal ini juga menyangkut mengubah pola pikir bangsa. Maka, bela negara berfungsi untuk mengalahkan pesimisme dalam melihat masa depan. Bela negara bertujuan untuk mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan dan juga nasionalisme serta jiwa patriotisme. Dengan demikian, mengikuti Presiden Jokowi, terdapat lima pemahaman tentang tujuan bela negara yang harus dijadikan acuan:

- 1) Menumbuhkan rasa percaya diri
- 2) Menumbuhkan optimisme
- 3) Membangun disiplin
- 4) Menumbuhkan semangat gotong royong
- 5) Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme

Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan juga menyampaikan hal yang sama bahwa bela negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan bukanlah dengan wajib militer. Salah satu bentuk bela negara di dalam pendidikan adalah dikembangkannya kurikulum bela negara mulai TK hingga perguruan tinggi dengan komponen inti adalah mengenal sejarah Indonesia, khususnya sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Program bela negara merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan. Menurut Menhan, bela negara bukan wajib militer, namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban negara yang perlu disiapkan.



Gambar 2. 11 Tujuan Bela Negara
Sumber: www.kemhan.go.id. 2016

Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan Negara. Ayat 5 pasal 30 tersebut juga dijelaskan, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.” Kebijakan bela negara diatur dengan kebijakan Menteri Pertahanan menerbitkan Permenhan No19/2015 tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Indonesia memilih model hukum “non-self-implemented”, maka pasal di dalam UUD 1945 tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum ada kebijakan turunannya

yaitu UU, PP, Perpres, hingga Permen. Ini merupakan salah satu “kecelakaan sejarah” di mana secara sadar kita memilih sistem kontinentalis yang membuat kita bertele-tele dalam melaksanakan setiap kebijakan “makro”, “meso”, “mikro”, bahkan mungkin “sub-mikro”.

Program bela negara merupakan salah satu dari upaya kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan pertahanan negara yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Untuk melaksanakan suatu kebijakan, maka dari Konstitusi (UUD 1945), perlu diturunkan menjadi UU, menjadi PP, Perpres, dan kemudian Kepmen. Agenda kebijakannya adalah bahwa belum ada UU yang secara khusus menerjemahkan bela negara, kemudian PP dan Perpresnya.

Bela negara adalah sebuah keharusan bagi setiap warga negara Indonesia. Kebijakan bela negara adalah sebuah konsekuensi logis bagi keharusan tersebut. Tantangan terkini adalah bagaimana membangun kebijakan bela negara yang berhasil, sejak pada taraf gagasan, rumusan hingga pelaksanaannya. Dari diskusi di depan, secara gagasan tentang bela negara sudah final. Semua warga, semua umur, semua profesi, semua strata wajib menjadi bagian dari bela negara dalam bentuk tumbuhnya rasa percaya diri, optimisme, disiplin, semangat gotong royong, dan jiwa nasionalisme-patriotisme. Itu pun masih ditambah dengan pengetahuan dan pemahaman yang mantap akan empat pilar negara, sistem pertahanan semesta, lima nilai cinta tanah air, sadar bangsa, rela berkorban, dan Pancasila sebagai dasar negara. Namun demikian, bukan berarti masalah menjadi selesai. Menyamakan persepsi harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga penyamaan persepsi tentang bela negara tetap menjadi pekerjaan rumah kita yang pertama.

Pekerjaan rumah bersama ke dua adalah merapikan kebijakan bela negara. Untuk itu, perlu di segerakan pembuatan UU Bela Negara, atau karena segera bisa dalam bentuk Perpu, atau setidaknya dalam bentuk PP. Dengan demikian, persyaratan legal dari kebijakan bela negara yang ada pada saat ini dapat diselesaikan. Pekerjaan rumah ke tiga, adalah merumuskan rencana implementasi kebijakan bela negara. Tetap dapat dilaksanakan dengan baik dengan mencermati syarat-syarat teknis, empati, dan etis. Dalam kerangka kehidupan bersama bangsa Indonesia

yang menyongsong abad 21, maka kebijakan bela negara harus berhasil, sejak gagasan, kebijakan, dan pelaksanaannya.



PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

BAB 3: PERAN UNIVERSITAS DALAM MEWUJUDKAN BELA NEGARA

BAB 3

PERAN UNIVERSITAS DALAM MEWUJUDKAN BELA NEGARA

A. UNIVERSITAS

1. Sejarah Universitas

Universitas dalam bahasa Latin asli secara umum berarti “orang-orang yang terasosiasi dengan sebuah badan, masyarakat, perusahaan, komunitas, kelompok pekerja, korporasi, dan lainnya” (Lewis, 1966). Dalam perkembangannya, arti Universitas pada akhirnya berevolusi menjadi “asosiasi siswa dan guru dengan hak legal kolektif yang biasanya dipersetujui dalam sebuah pakta yang dikeluarkan oleh pangeran atau pemimpin kota mereka”. (Marcia L., 1997). Di masa modern ini, pengertian Universitas semakin berubah menjadi “sebuah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pengajaran dalam bidang-bidang non vokasi dan biasanya memiliki kekuasaan untuk memberikan gelar”. (OED, 2021)



Gambar 3. 1 School tot Opleiding van Indische Artsen/ STOVIA pada tahun 1916

Di Indonesia sendiri, Universitas atau Perguruan Tinggi diawali dengan perintisan yang hanya di bidang Kesehatan. Pada tahun 1902 di Batavia didirikan *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen/ STOVIA* (atau dikenal sebagai *Sekolah Dokter Bumi Putera*) kemudian NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen School*) pada 1913 di Surabaya. Pada 1927 didirikan sekolah tabib tinggi GHS (*Geneeskundige Hooe School*) setelah STOVIA tidak lagi menerima murid. GHS ini merupakan embrio kedokteran Universitas Indonesia. (FKUI, 2006)



Gambar 3. 2 Kampus TH Bandung dilihat dari IJzermanpark (Taman Ganesha), dengan latar belakang Gunung Tangkuban Parahu

Universitas berikutnya yang berdiri di Indonesia adalah *Technische Hooe School* (THS) pada 3 Juli 1920 di Bandung dan berhasil menjadi perguruan tinggi negeri pertama dan Jurusan Teknik menjadi fokus utama dari *Technische Hooe School*, dilanjutkan pada 28 Oktober 1924 dengan didirikannya *Rechtshooeschool* (RHS atau Sekolah Tinggi Hukum) yang menjadikan institusi pendidikan tinggi kedua yang ada di Jakarta/Batavia dan sebagai gagasan Fakultas Hukum di Indonesia, dan pada 16 Agustus 1927 *Geneeskundige Hoogeschool* (GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran) sebagai institusi pendidikan ketiga yang ada di Jakarta/Batavia.

Tahun 1941 didirikan sekolah tinggi pertanian (*Landsbouwkundige Faculteit*) di Bogor yang sekarang dikenal sebagai Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada zaman Jepang sampai awal kemerdekaan, GHS ditutup dan

dijadikan satu dengan NIAS dengan nama baru yaitu Ika Dai Gakko (Sekolah Tinggi Kedokteran) atas inisiatif pemerintahan militer. Pada 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Balai Perguruan Tinggi RI yang memiliki Perguruan Tinggi Kedokteran dan diresmikan pada 1 Oktober 1945. Pada 8 Juli 1945, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta didirikan dan menjadikan perguruan tinggi swasta pertama dan tertua di Indonesia

Perguruan Tinggi Kedokteran sempat dipindahkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur (Klaten dan Malang) saat masa perjuangan revolusi fisik melawan Belanda pada 1946 sampai 1949. Hal ini menjadikan gagasan Universitas Gajah Mada yang didirikan atas kerja sama pemerintah RI di Yogyakarta dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 dengan hanya ada 2 Fakultas yaitu Hukum dan Kesusasteraan. Tahun 1949 muncul gagasan untuk menunjang tinggi ilmu pengetahuan tanpa membedakan warna kulit dan ras. Pada 2 Februari 1950 didirikan Universiteit Indonesia, *Fakulteit Kedokteran* yang saat ini dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

1. Sejarah Berdirinya Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional Veteran



Gambar 3. 3 Potret Kampus Bela Negara, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dari sejarah di atas, Universitas menjadi bagian penting dalam bela negara dikarenakan pendidikan itu sendiri menjadi hal terpenting dalam perjalanannya baik sebelum sampai kemerdekaan hingga saat ini.

Universitas berperan penting dalam bela negara dengan menjadikan *output* dari para mahasiswanya yang menjadi gagasan bagi negara Indonesia. Bela negara terus dibawa sampai saat ini baik di dalam sekolah formal maupun universitas yang ada di Indonesia.

Bentuk bela negara itu sendiri bermacam-macam, baik dari adanya sebuah kelompok diskusi fokus yang membahas dan menghasilkan gagasan bagi Republik Indonesia, sampai dalam bentuk kreativitas mahasiswa dengan inovasi-inovasi barunya. Salah satunya adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang mengusung dirinya sebagai Kampus Bela Negara.

Pada 15 Desember 1958 di D.I. Yogyakarta, dengan adanya pemufakatan beberapa pejuang kemerdekaan mendirikan sebuah Akademi yang dinamakan Akademi Pembangunan Nasional "Veteran" dengan membuka jurusan-jurusan:

- a) Tata Perusahaan;
- b) Pertanian;
- c) Teknik Kimia; dan
- d) Geologi Pertambangan.

Selanjutnya Akademi mengembangkan dirinya menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional "Veteran" dengan adanya 6 fakultas, di antaranya:

- a) Fakultas Teknik Geologi;
- b) Fakultas Perminyakan;
- c) Fakultas Tambang;
- d) Fakultas Teknik Kimia;
- e) Fakultas Pertanian; dan
- f) Fakultas Ekonomi.

B. PROGRAM PENDUKUNG PENDIDIKAN BELA NEGARA DI UNIVERSITAS



Gambar 3. 4 Program-Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

1. Latar Belakang

Seperti yang kita tahu, belakangan ini menjadi tahun yang sulit untuk semua negara di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya Covid-19 menghantam berbagai macam sektor, salah satunya sektor Pendidikan. Keadaan ini membuat seluruh sektor yang terdampak harus dapat beradaptasi dengan situasi yang ada, beradaptasi dan berkembang di tengah situasi yang sangat sulit merupakan tantangan bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di dunia Pendidikan. Bagaimana tidak, masyarakat harus dapat beradaptasi dengan teknologi dan jaringan agar dapat tetap terhubung dengan satu sama lain. Di satu sisi fasilitas yang ada belum mumpuni yang mengakibatkan tidak semua masyarakat dapat mengakses fasilitas tersebut khususnya pada dunia Pendidikan tingkat universitas. Sejatinya di dunia tidak ada yang gratis untuk menikmati segala suatu hal, tidak harus ada usaha dibalik itu semua. Mahasiswa di perguruan tinggi sekarang dituntut agar dapat terus beradaptasi untuk meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* agar dapat menghadapi dunia kerja nantinya. Pemerintah menggunakan peristiwa covid-19 ini sebagai langkah atau kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk sama-sama

berkembang melalui program-program yang dibuat oleh KEMENDIKBUD salah satunya yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan di berbagai macam instansi negara guna mendukung Pendidikan bela negara yang belum terlaksana secara maksimal di beberapa universitas. Karena ketika sudah membicarakan bela negara tidak melulu pikiran kita mengenai perang seperti jaman penjajahan. Sebagai civitas akademika banyak cara yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan dan memberikan kontribusi bagi tanah air tercinta.

Program MBKM ini salah satu cara bagi para civitas akademika dalam memberikan kontribusi dalam mewujudkan perilaku bela negara di lingkungan kampus. Karena pada dasarnya kegiatan MBKM ini terfokus pada mahasiswanya itu sendiri, semakin aktif mahasiswanya maka akan semakin banyak manfaat yang diperoleh. Seperti persiapan pembekalan atau pengalaman untuk bekerja di dunia industri dan pemerintahan, pengembangan kemandirian menjadi kunci utama untuk bisa beradaptasi di berbagai situasi.

2. Pelaksanaan Program Bela Negara

Pada dasarnya pelaksanaan program bela negara ini tanpa kita sadari sudah kita lakukan ketika kita beranjak menempuh pendidikan dasar, namun yang membedakan pada kali ini adalah skala dan tindakan yang akan kita kerjakan atau lalui. Bela negara pada lingkungan kampus biasanya dikenalkan pertama kali pada masa orientasi bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang memiliki semangat menggebu-gebu karena biasanya mahasiswa akan lebih tertarik terhadap hal-hal baru yang sebelumnya belum mereka dapatkan ketika di tingkat pendidikan sebelumnya. Rasa penasaran dan haus akan pengetahuan harus dibekali dengan bela negara agar dapat memberikan kontribusi untuk negeri.

Meskipun akan terdapat kendala dalam pengimplementasian bela negara, pemerintah dan pihak universitas akan terus memperbaiki sistem, prosedur serta fasilitas agar kedepannya mahasiswa/i dapat dengan mudah mempelajari dan mengimplementasikan apa yang sudah didapat dan diterima. Seperti yang kita tahu, masyarakat awam mungkin hanya mengetahui jika wujud bela negara mahasiswa hanya sebatas turun ke jalan dan berdemo yang terkadang membuat *image* mahasiswa itu sendiri

menjadi buruk karena adanya beberapa oknum yang membuat kegiatan demo menjadi ricuh atau rusuh sehingga aspirasi serta poin-poin yang ingin diluapkan tidak tersampaikan.

Memang perlu diakui tanpa adanya mahasiswa yang kritis dan berani bersuara mungkin pemerintahan Indonesia akan menjadi bobrok karena bertindak seenaknya tanpa adanya kritik. Di satu sisi ternyata sekarang ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku bela negara terutama pada saat pandemi sekarang. Beberapa organisasi mahasiswa berbondong-bondong melakukan kegiatan aksi sosial untuk membantu lingkungan sekitar yang terdampak pandemi *covid-19*, memberikan santunan dan bantuan kepada Yayasan yang membutuhkan serta lain sebagainya.

Pada intinya kesadaran bela negara pada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, dan kemampuan awal bela negara. (Rahayu, Farida, & Apriana, 2019)

Dengan adanya bela negara, maka negara akan kuat dan tidak mudah mendapat ancaman dari manapun. Pendidikan bela negara kepada anak muda saat ini sangat penting untuk diterapkan mengingat kesadaran akan bela negara yang semakin menurun dan memudar serta dengan bebasnya budaya asing masuk ke Indonesia. (Az Zahro, 2020)

3. Bentuk atau Wujud dari Bela Negara

Belakangan ini, pemerintah baru meluncurkan kebijakan baru mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang di mana pengimplementasiannya merupakan wujud dari bentuk bela negara bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Berikut bentuk atau wujud bela negara dari program MBKM:

a. Pertukaran Pelajar

Program pertukaran pelajar memungkinkan siswa untuk belajar di luar negeri di salah satu lembaga mitra universitas mereka. Namun pada program pertukaran pelajar yang diadakan oleh pemerintah yaitu KEMENDIKBUD melakukan pertukaran pelajar antar universitas di seluruh Indonesia. Bagi banyak siswa, prospek belajar di kampus atau universitas akan menyenangkan sekaligus menakutkan. Namun, pastinya akan

mengalami budaya baru, bertemu orang baru, dan tumbuh sebagai pribadi yang lebih terbuka. Pengalaman belajar setiap siswa di setiap universitas berbeda-beda, tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah pengalaman yang tak terlupakan bisa berkesempatan belajar di kampus impian.

Istilah "pertukaran" berarti bahwa lembaga mitra menerima siswa, tetapi tidak berarti bahwa siswa harus mencari mitra dari lembaga lain yang akan ditukar. Siswa pertukaran tinggal bersama keluarga angkat atau di tempat yang ditentukan seperti asrama, apartemen, atau penginapan siswa. Biaya untuk program ini bervariasi menurut negara dan institusi. Peserta mendanai partisipasi mereka melalui beasiswa, pinjaman, atau pendanaan sendiri.

Pertukaran pelajar menjadi populer setelah Perang Dunia II, dan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi peserta terhadap budaya lain, serta meningkatkan kemampuan bahasa mereka dan memperluas cakrawala sosial mereka. Pertukaran pelajar juga meningkat lebih jauh setelah berakhirnya Perang Dingin. Seorang siswa pertukaran biasanya tinggal di negara tuan rumah untuk jangka waktu 6 sampai 12 bulan; namun, siswa pertukaran dapat memilih untuk tinggal selama satu semester pada satu waktu. Pelajar internasional atau mereka yang mengikuti program studi di luar negeri dapat tinggal di negara tuan rumah selama beberapa tahun. Beberapa program pertukaran juga menawarkan kredit akademik.

Meskipun pertukaran pelajar pada program pemerintah hanya berskala nasional namun manfaat yang diterima tidak kalah jauh dengan pertukaran pelajar ke luar negeri. Berikut beberapa manfaat yang akan diperoleh apabila kita mengikuti program pertukaran pelajaran:

1) Melihat Kebiasaan cara hidup yang berbeda

Belajar di luar negeri akan memungkinkan kita untuk mengalami budaya dan perspektif yang berbeda, termasuk tradisi dan kebiasaan baru dan bertemu orang baru. Merangkul sepenuhnya budaya baru ini adalah kesempatan untuk keluar dari zona nyaman kita dan mengalami situasi yang tidak biasa. Sepenuhnya terjun ke dalam pengalaman ini, misalnya mengikuti kegiatan lokal, mencoba makanan lokal dan berteman dengan berbagai orang, akan memberi Kita pemahaman dan apresiasi yang lebih

baik terhadap sejarah bangsa dan masyarakatnya. Namun pada skala nasional kalian akan menemukan teman baru dan budaya bagaimana mereka melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas yang pastinya akan sangat berbeda dengan proses belajar di tempat asal kampus kita. Karena kita memperoleh budaya baru bisa jadi kebiasaan kita akan berubah, mana tahu yang tadinya kita sedikit malas atau tidak bersemangat menjadi semangat karena lingkungan dan suasana belajar sangat mendukung kita untuk lebih berusaha maksimal dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus.

2) Belajar di universitas lain akan memperluas kesempatan kerja

Belajar di Universitas lain tidak hanya merupakan cara yang bagus untuk memperluas perspektif kita, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan kerja kita. Di dunia yang semakin mengglobal, semakin banyak perusahaan mencari siswa dengan banyak pengalaman. Kenapa demikian? Belajar di tempat lain menunjukkan kepada pemberi kerja bahwa kita dapat beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah dan bahwa kita adalah pemecah masalah yang baik. Hal ini juga memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang budaya yang berbeda, yang sangat dihargai di tempat kerja, terutama di perusahaan internasional. Banyak siswa yang berkesempatan untuk bekerja di luar negaranya sendiri dan memutuskan untuk tinggal dan menetap di sana.

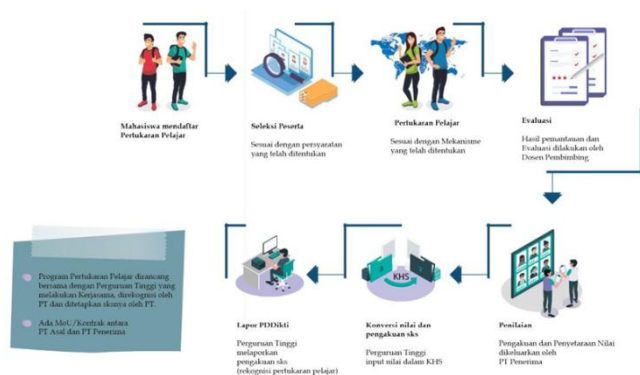
3) Mengalami gaya pendidikan yang berbeda

Belajar di universitas lain bisa berbeda dengan gaya mengajar yang biasa kita lakukan, terutama jika kita baru pertama kali belajar di kampus orang. Gunakan momen ini sebagai kesempatan untuk mengalami berbagai metode pengajaran dan cari tahu jenis pembelajaran apa yang paling cocok untuk kita. Ini adalah cara yang bagus untuk membenamkan diri kita dalam lingkungan akademik baru dan melihat sisi gelar kita yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya.

4) Memiliki lebih banyak teman

Karena kita pindah dan memulai sesuatu hal yang baru, maka kita dituntut harus dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar salah satunya

mencari teman yang sekiranya dapat memberi kita manfaat di masa depan nanti. Bertemu dengan teman baru merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi diri kita. Berikut gambaran singkat proses pertukaran pelajar.



Gambar 3. 5 Proses Program Pertukaran Pelajar
Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

b. Magang (Praktik Kerja)

Magang adalah pengalaman kerja jangka pendek yang ditawarkan oleh perusahaan dan organisasi lain bagi orang-orang biasanya mahasiswa, tetapi tidak selalu untuk mendapatkan paparan tingkat awal pada industri atau bidang tertentu. Ini adalah pengalaman belajar seperti halnya bekerja. Idealnya, pekerja magang menghabiskan waktu mereka untuk mengerjakan proyek yang relevan, belajar tentang lapangan, membuat koneksi industri, dan mengembangkan keterampilan keras dan lunak. Magang terkadang bahkan mengarah pada tawaran pekerjaan penuh waktu.

Magang musim panas biasanya 40 jam seminggu selama 10 hingga 12 minggu. Magang musim gugur dan musim semi bervariasi, tetapi hampir selalu paruh waktu. Beberapa dibayar, beberapa tidak.

Sebagai pekerja magang, Kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja berdampingan dengan profesional industri yang ulung dan mendapatkan ide yang cukup bagus tentang peran tingkat pemula yang mungkin diperlukan. Kita tidak hanya akan mendapatkan pengalaman

kerja yang nyata, tetapi juga bertemu dan belajar dari para profesional. Dan Kita akan mulai membangun jaringan Kita sendiri, mulai dari rekan magang hingga pemimpin berpengalaman.

Satu lagi manfaat magang yang kurang jelas tetapi sama pentingnya adalah kesempatan untuk mengetahui apa yang tidak ingin Kita lakukan. Sering kali sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai ketika harus mencari pekerjaan. Magang memberi Kita kesempatan untuk mencoba beberapa hal tanpa berkomitmen. Jika Kita beruntung, Kita akan menemukan sesuatu yang Kita sukai. Dan jika tidak, Kita setidaknya akan tahu apa yang tidak cocok untuk Kita. Ketika sampai pada sesuatu yang rumit seperti menemukan karier yang tepat, semakin banyak informasi yang Kita miliki, semakin baik.

Karena magang semakin umum, majikan berharap untuk melihatnya di *resume*. Pelamar dengan pengalaman kerja sebelumnya jauh lebih kompetitif daripada mereka yang hanya memiliki kursus yang relevan. Magang menawarkan Kita kesempatan untuk tidak hanya membangun keterampilan yang relevan dan belajar tentang lapangan, tetapi untuk menunjukkan keterampilan dan ketajaman industri di tempat kerja. Bagi sebagian besar pemberi kerja, bahkan mereka yang sangat mahir dalam mempekerjakan lulusan baru, tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman kehidupan nyata.

Perusahaan juga menggunakan magang sebagai saluran bakat untuk mengisi posisi penuh waktu mereka sendiri. Bagi pemberi kerja, magang adalah banyak hal: wawancara yang sangat diperpanjang, program pelatihan, dan (sering kali) cara cerdas untuk merekrut peran terbuka. Ini berarti beberapa mahasiswa dapat memasuki tahun-tahun senior mereka dengan tawaran pekerjaan di tangan (dan karena itu memiliki tahun lalu yang jauh lebih sedikit stres di sekolah).

Singkatnya, magang dapat membantu Kita mengetahui apa yang ingin Kita lakukan dengan karir Kita dan kemudian mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan penuh waktu pertama Kita di industri itu.

Berapa banyak pekerja magang yang dibayar sangat bervariasi menurut industri. Teknologi dan keuangan cenderung membayar di ujung yang lebih tinggi, sementara jurnalisme, mode, dan organisasi nirlaba di bidang apa pun sering membayar di ujung bawah (atau tidak sama sekali).

Menurut *National Association of Colleges and Employers (NACE)*, 56,7% lulusan senior pada tahun 2017 baru-baru ini memiliki pengalaman magang atau kerja sama berbayar naik dari 53,7% pada tahun 2014 sementara 43,3% tidak dibayar. Sarjana yang dibayar pada tahun 2018 menghasilkan rata-rata sekitar \$18,50 per jam. Mahasiswa pasca sarjana dibayar sedikit lebih banyak, dengan mahasiswa doktoral menghasilkan rata-rata \$32,35 per jam.

Sebagai pekerja jangka pendek, pekerja magang biasanya tidak menerima kesehatan atau tunjangan lain yang didapatkan oleh karyawan penuh waktu. Tetapi tergantung pada industri dan ukuran perusahaan, itu dapat menawarkan fasilitas mulai dari menawarkan beberapa acara sosial atau hari libur hingga mencakup relokasi dan bahkan perumahan.

Itulah magang berbayar. Mari kita bicara tentang yang belum dibayar. Sikap yang cukup tidak kontroversial adalah bahwa orang harus dibayar untuk pekerjaan mereka. Untungnya, undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Stkitar Buruh Adil AS (FLSA) setuju. Biasanya.

Lalu mengapa ada magang yang tidak dibayar? Secara teori, magang yang tidak dibayar sebagian besar merupakan pembelajaran daripada pengalaman kerja. Departemen Tenaga Kerja memiliki pengadilan uji tujuh poin yang telah digunakan untuk membedakan antara karyawan (atau pekerja magang berbayar) dan pekerja magang yang tidak dibayar secara hukum di perusahaan nirlaba. Pada dasarnya, agar magang yang tidak dibayar menjadi halal, Kita harus mendapat manfaat lebih dari perusahaan. Menurut lembar fakta FLSA, umumnya sektor publik dan organisasi nirlaba juga boleh memiliki pekerja magang yang tidak dibayar yang “sukarelawan tanpa mengharapkan kompensasi.”

Semua yang dikatakan, beberapa organisasi, apakah untuk mencari laba atau tidak, menawarkan magang tanpa bayaran yang, eh, mendekati batas (atau melewatinya). Beberapa industri terkenal karena tidak membayar magang mereka (atau membayar mereka dengan buruk), sementara juga membutuhkan magang untuk mendapatkan kaki di pintu untuk pekerjaan *entry-level* penuh waktu. Tentu saja, itu berarti bahwa orang-orang yang tidak mampu untuk mengambil magang yang tidak dibayar tidak hanya kehilangan pengalaman belajar yang berharga itu,

tetapi juga mengalami lebih banyak kesulitan untuk terjun ke lapangan secara keseluruhan.

Jika Kita tertarik pada industri di mana magang yang tidak dibayar adalah hal biasa, tetapi menghabiskan musim panas atau semester dengan bekerja secara gratis bukanlah pilihan, jangan menyerah! Hubungi kantor karir universitas Kita serta departemen akademik, institut, dan pusat yang relevan di kampus mereka mungkin memiliki hibah dan program lain yang dapat Kita lamar untuk membantu Kita mendukung diri sendiri sambil mendapatkan pengalaman kerja yang Kita butuhkan.

Kita juga dapat mencari pendanaan dari luar sekolah Kita untuk mendukung pengalaman magang. Beasiswa Internasional Benjamin A. Gilman, misalnya, memberikan penghargaan hingga \$5,000 untuk mahasiswa sarjana dengan “keuangan terbatas” yang ingin belajar atau magang di luar negeri. Organisasi lain menjalankan program yang sangat spesifik, seperti *Association for Women in Sports Media*, yang mencocokkan mahasiswi dengan magang berbayar dan memberi peserta beasiswa tambahan \$ 1,000.

Mungkin perlu beberapa penggalan untuk menemukan yang cocok untuk Kita, tetapi ada baiknya mencari program di kampus atau di luar yang dapat membantu mendanai pengalaman kerja yang kita cari. Setelah mengetahui apa itu magang mungkin yang dipikirkan oleh mahasiswa sekarang adalah bagaimana cara kita mengikut dan mendapatkan tempat magang yang kita inginkan.

Pertama kita bisa menggunakan fasilitas kampus, Gunakan Sumber Daya Kampus, jika kita seorang mahasiswa, pergilah ke pusat karir kampus kita dan cari tahu cara menghadiri pameran karir dan ambil bagian dalam perekrutan di kampus. Mungkin juga ada papan pekerjaan untuk mahasiswa di universitas kita. Mitra atau beberapa perusahaan secara khusus mencari siswa dari sekolah kita. Manfaatkan koneksi universitas itu sebaik-baiknya dan manfaatkan betapa nyamannya memiliki mitra yang sangat membantu karir kita.

Kedua adalah dengan *online* (daring) seperti yang mungkin Kita duga, ada banyak sumber daya *online* juga, seperti aplikasi *Linkedin*, yang menampilkan posting pekerjaan dan magang bersama dengan profil perusahaan untuk membantu Kita mempelajari organisasi dan budaya

mereka. Menelusuri secara *online* bisa sangat melelahkan, jadi yang terbaik adalah memasukkan gagasan tentang apa yang Kita cari, seperti "magang manajemen produk" atau "magang editorial". Ini berlawanan dengan intuisi, tetapi semakin Kita mempersempit pencarian Kita, semakin mudah dikelola. Kita selalu dapat tetap terbuka terhadap peluang lain saat prosesnya berlangsung, tetapi mulailah dengan tujuan yang jelas.

Ketiga menelusuri perusahaan atau organisasi favorit kalian, setiap orang memiliki beberapa perusahaan impian. Jika Kita tidak yakin persis jenis magang apa yang ingin Kita kejar, arah lain yang dapat Kita tuju adalah memeriksa perusahaan terlebih dahulu. Buka langsung situs web perusahaan target Kita dan lihat program dan peluang magang seperti apa yang ditawarkannya. Jika Kita menemukan satu yang mungkin cocok, terapkan! Lagi pula, manfaat utama magang adalah membantu Kita mengetahui apa yang ingin Kita lakukan setelah lulus.

Kalau tadi kita membicarakan cara bagaimana mencari tempat magang, lalu di sini ada beberapa tips bagi para pembaca agar diterima di tempat perusahaan magang yang kalian ingin *apply*.

Pertama adalah Mulailah Mencari Lebih Awal, cari tahu kapan industri Kita merekrut. Secara umum, semakin besar perusahaan, semakin awal musim gugur mereka mungkin memulai proses untuk kelas magang musim panas berikutnya. Jika sekolah Kita mengadakan pameran karir musim gugur, itu adalah tempat yang bagus untuk memulai pencarian Kita. Perusahaan yang lebih kecil memiliki waktu yang lebih sulit untuk memproyeksikan jumlah karyawan dan karena itu cenderung mempekerjakan lebih dekat ketika mereka membutuhkan seseorang untuk memulai. Itu bisa berarti aplikasi jatuh tempo kapan saja antara Januari dan Maret untuk magang musim panas, jadi pastikan Kita memeriksa jadwal di musim gugur, bahkan jika Kita menargetkan organisasi yang lebih kecil. Jika Kita mencari magang musim gugur atau musim semi, usahakan untuk memulai pencarian Kita setidaknya satu semester penuh sebelum tanggal mulai target Kita.

Kedua Dapatkan *Resume* dan Surat Lamaran, membuat *resume* atau cv yang menarik merupakan salah satu kunci kita agar berpeluang diterima di tempat magang yang kita inginkan. Mencari referensi bagaimana menulis cv dan resume dengan menarik dan benar agar dilirik oleh

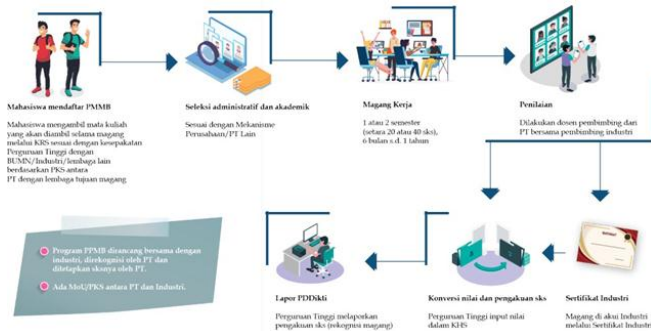
perusahaan. Apabila kita memiliki banyak pengalaman organisasi atau kegiatan di dalam maupun di luar kampus akan menjadi lebih baik lagi.

Ketiga melakukan persiapan ketika *interview*, mungkin tergoda untuk melakukannya, terutama karena undangan wawancara sering kali membuatnya terdengar seperti obrolan biasa. Jangan jatuh untuk itu, tinjau pertanyaan wawancara magang umum dan praktikkan menjawabnya dengan lantang. Kita tidak perlu mengingat tanggapan Kita, tetapi pasti melatihnya. Pastikan Kita melakukan riset tentang perusahaan apa yang dilakukannya, apa yang sedang dikerjakannya, dan seperti apa budayanya. Jika Kita ingin lebih siap, gali lebih dalam untuk melihat seperti apa praktik wawancara mereka dan pertanyaan apa yang mereka ajukan (jika Kita memiliki kontak di organisasi tersebut, hubungi). Terakhir, jika memungkinkan, cobalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pewawancara spesifik Kita di situs *web* perusahaan, LinkedIn, atau halaman profesional lainnya. Gunakan semua penelitian Kita untuk menghasilkan pertanyaan yang relevan untuk ditanyakan di akhir wawancara Kita.

Keempat adalah menggunakan jaringan atau relasi kalian, jika Kita seorang mahasiswa, hubungi profesor, alumni, dan pusat karir Kita. Beri tahu orang-orang magang seperti apa yang Kita cari. Mereka tidak dapat membantu kecuali mereka tahu apa yang Kita cari. Saya tidak bermaksud pergi dan meminta seorang alumni yang belum pernah Kita temui sebelumnya untuk memberi Kita magang. Sebaliknya, beri tahu mereka apa yang Kita minati dan mintalah saran mereka tentang cara mencapainya.

Agar lebih bertarget dengan jaringan Kita, buat daftar perusahaan yang Kita minati dan mulailah mencari orang untuk dihubungi melalui *LinkedIn* atau *data base* alumni sekolah Kita. Daftar *online* juga untuk memastikan Kita tidak melewatkan tenggat waktu, tetapi tetap bertemu dengan orang-orang dan lakukan wawancara informasi untuk mendapatkan saran tentang pencarian Kita. Kita bahkan mungkin menemukan diri Kita dalam wawancara dadakan dan mendapatkan magang impian Kita.

Jaringan sering kali merupakan pendekatan yang lebih padat karya, tetapi juga cenderung menghasilkan kesesuaian yang lebih baik daripada hanya menerapkan secara acak. Bahkan jika itu tidak langsung terbayar dalam pencarian magang Kita, suatu hari Kita akan senang Kita mulai mengembangkan jaringan kita di awal karir. (Zhang, 2021)



Gambar 3. 6 Proses Program Magang

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Asisten mengajar di lingkungan kampus biasa kita kenal adalah asisten dosen/profesor, Asisten profesor bertanggung jawab untuk mengajar, melakukan penelitian dan mempublikasikan hasilnya, memberi nasihat kepada mahasiswa sarjana dan pascasarjana, dan menyediakan layanan publik, departemen, perguruan tinggi, dan universitas. Tugas yang diberikan dapat bervariasi di antara asisten profesor dekan dan ketua departemen atau direktur sekolah, pusat, lembaga atau program membuat penentuan tanggung jawab akademik dengan berkonsultasi dengan anggota fakultas tetapi tanggung jawab harus mencakup upaya yang signifikan dalam penelitian (atau prestasi, dalam seni) dan baik pengajaran atau penyuluhan/ penjangkauan. Contoh kasus seperti di Cornell University, Posisi asisten profesor bukanlah penunjukan lanjutan di Cornell. Anggaran Rumah Tangga Cornell University menyatakan bahwa seseorang dapat berada di peringkat ini tidak lebih dari enam tahun akademik pada layanan setara penuh waktu (atau delapan tahun untuk Johnson *Graduate School of Management*). Pengecualian hanya

dimungkinkan jika rektor menganggap kelanjutan sementara dibenarkan. Jika asisten profesor ditinjau untuk masa jabatan dan tidak dipromosikan, janji temu terminal dua semester akan ditawarkan, yang mungkin merupakan waktu dalam peringkat di luar ketentuan Anggaran Rumah Tangga. Asisten profesor tidak boleh memegang jabatan.

Asisten profesor baru dapat ditunjuk dalam status masa percobaan, biasanya untuk jangka waktu tiga tahun (atau empat tahun di Johnson *Graduate School of Management*). Menjelang akhir masa jabatan awal ini, individu tersebut dievaluasi untuk diangkat kembali untuk masa jabatan tiga tahun (empat tahun di Johnson *Graduate School of Management*). Kandidat yang gagal untuk pengangkatan kembali harus diberikan janji temu terminal dua semester. Mereka yang diangkat kembali dan dipertahankan dalam status masa percobaan dievaluasi untuk masa jabatan di bagian akhir tahun kelima atau tahun keenam (tahun ketujuh atau kedelapan di Johnson *Graduate School of Management*), sesuai dengan prosedur kepemilikan stkitar.

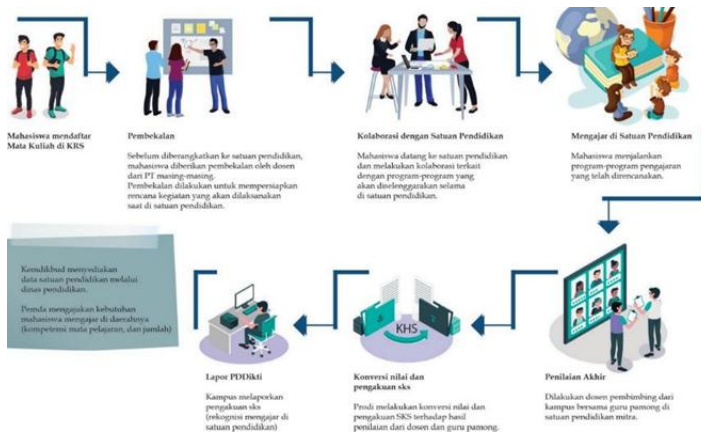
Penunjuk jalur masa jabatan yang tidak menerima masa jabatan tidak dapat ditunjuk untuk gelar akademik lainnya. Namun, seseorang dapat meminta transfer ke jabatan dosen atau status gelar lainnya sebelum tinjauan kepemilikan; baik ketua maupun dekan tidak wajib merekomendasikan tindakan ini kepada rektor.

Seorang individu yang memenuhi syarat dapat ditunjuk sebagai asisten profesor tidak dalam status masa percobaan. Ini dapat terjadi, misalnya, ketika kebutuhan staf atau program suatu departemen atau dana untuk posisi tersebut bersifat sementara. Penunjukan semacam itu dapat berlangsung hingga empat tahun dan dapat diperpanjang hingga tahun keenam.

Asisten profesor adalah anggota *voting* dari universitas dan fakultas perguruan tinggi. Dekan Sekolah Pascasarjana menganugerahkan keanggotaan pada fakultas pascasarjana setelah nominasi oleh perwakilan fakultas pascasarjana bidang dan persetujuan oleh Komite Umum.

Asisten professor maupun dosen memberikan kesempatan bagi para individu dalam menyalurkan minat dan bakat dalam bidang Pendidikan untuk turut serta berkontribusi dalam menyebar luaskan ilmu apa yang sudah mahasiswa tersebut dapat. Karena pada dasarnya tidak semua

orang pintar dapat menjadi guru, akan tetapi yang menjadi guru sudah pasti orang pintar. (Cornell University, 2021)



Gambar 3. 7 Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

d. Penelitian/Riset

Penelitian atau riset sangat disarankan bagi kalian mahasiswa yang memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu hal. Mencari tahu suatu hal yang baru merupakan kegiatan yang sangat menantang dan menyenangkan bagi beberapa orang. Kebiasaan meneliti ini membuat mahasiswa dapat lebih berpikir kritis terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar.

Penelitian didefinisikan sebagai pertimbangan studi yang cermat mengenai perhatian atau masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut sosiolog Amerika Earl Robert Babbie, “penelitian adalah penyelidikan sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena yang diamati. Ini melibatkan metode induktif dan deduktif.”

Metode penelitian induktif menganalisis peristiwa yang diamati, sedangkan metode deduktif memverifikasi peristiwa yang diamati. Pendekatan induktif dikaitkan dengan penelitian kualitatif, dan metode deduktif lebih sering dikaitkan dengan analisis kuantitatif.

Bagi kalian para pembaca yang belum tahu apa si tujuan adanya penelitian itu, pada dasarnya bisa bagi menjadi tiga tujuan yaitu yang pertama adalah eksploratif, seperti namanya, peneliti melakukan studi eksplorasi untuk mengeksplorasi sekelompok pertanyaan. Jawaban dan analitik mungkin tidak menawarkan kesimpulan untuk masalah yang dirasakan. Hal ini dilakukan untuk menangani area masalah baru yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Proses eksplorasi ini meletakkan dasar untuk pengumpulan dan analisis data yang lebih konklusif.

Yang kedua adalah deskriptif, ini berfokus pada perluasan pengetahuan tentang isu-isu saat ini melalui proses pengumpulan data. Penelitian deskriptif menggambarkan perilaku populasi sampel. Hanya satu variabel yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Tiga tujuan utama studi deskriptif adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah para pemimpin manajemen tingkat atas di abad ke-21 memiliki hak moral untuk menerima sejumlah besar uang dari laba perusahaan.

Terakhir adalah penjelasan, penelitian kausal atau penjelasan dilakukan untuk memahami dampak perubahan spesifik dalam prosedur stkitar yang ada. Menjalankan eksperimen adalah bentuk yang paling populer. Misalnya, penelitian yang dilakukan untuk memahami pengaruh rebranding terhadap loyalitas pelanggan.

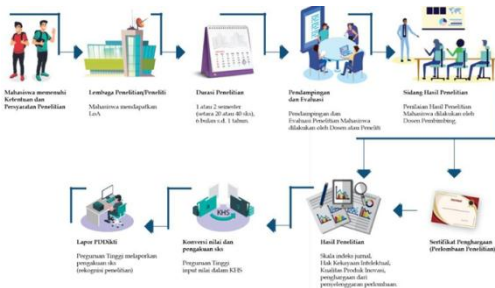
Lalu masuk ke bagian berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan riset atau penelitian tersebut, berikut terbagi menjadi dua metode yaitu kuantitatif dengan kualitatif. Bagi mahasiswa yang kurang suka dengan hitung-hitungan bisa memilih jalan dengan metode penelitian kualitatif di mana penelitian kualitatif adalah metode yang mengumpulkan data dengan menggunakan metode percakapan, biasanya pertanyaan terbuka. Tanggapan yang dikumpulkan pada dasarnya non-numerik. Metode ini membantu peneliti memahami apa yang dipikirkan partisipan dan mengapa mereka berpikir dengan cara tertentu. Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah Metode yang berhubungan dengan angka dan bentuk yang dapat diukur. Ini menggunakan cara sistematis untuk menyelidiki peristiwa atau data. Ini menjawab pertanyaan untuk

membenarkan hubungan dengan variabel terukur baik untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol fenomena.

Setelah kita mengetahui apa itu penelitian dan bagaimana cara melakukannya, hal yang perlu kita tahu selanjutnya adalah bagaimana agar penelitian yang kita lakukan nantinya dapat akurat agar hasil penelitian kita dapat dipakai sebagai sumber data oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan biasanya digunakan sebagai referensi oleh pihak lain sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Berikut beberapa tips yang perlu kita ketahui agar penelitian yang kita lakukan dapat lebih akurat:

- Identifikasi tren dan masalah utama, peluang, dan masalah yang Kita amati. Buatlah kalimat yang menjelaskan masing-masing.
- Pantau frekuensi kemunculan masing-masing temuan utama.
- Buat daftar temuan Kita dari yang paling umum hingga yang paling tidak umum.
- Mengevaluasi daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasi dalam analisis SWOT.
- Siapkan kesimpulan dan rekomendasi tentang studi Kita.
- Bertindak berdasarkan strategi Kita
- Cari celah dalam informasi, dan pertimbangkan untuk melakukan penyelidikan tambahan jika perlu
- Rencana untuk meninjau hasil dan mempertimbangkan metode yang efisien untuk menganalisis dan membedah hasil untuk interpretasi.

Tinjau tujuan Kita sebelum membuat kesimpulan tentang penelitian Kita. Ingatlah bagaimana proses yang telah Kita selesaikan dan data yang telah Kita kumpulkan membantu menjawab pertanyaan kita. Tanyakan pada diri Kita sendiri apakah apa yang diungkapkan analisis kita memfasilitasi identifikasi kesimpulan dan rekomendasi kita. (QuestionPro, 2021)



Gambar 3. 8 Proses Program Penelitian/Riset
 Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

e. Proyek Kemanusiaan

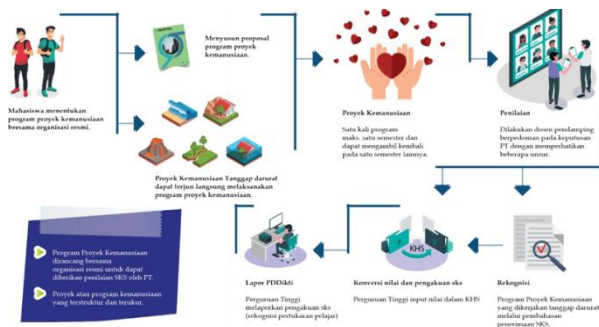
Proyek kemanusiaan memberikan bantuan material atau logistik kepada sekelompok orang atau negara yang membutuhkan bantuan. Proyek bervariasi antara yang diperlukan oleh bencana buatan manusia, bencana alam, kemiskinan dan pembangunan bantuan. Dengan demikian, fokus setiap proyek berbeda. Ada banyak organisasi kemanusiaan seperti Program Pangan Dunia yang bekerja untuk menyediakan makanan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. (Brush, 2016)

Kemiskinan, proyek-proyek kemanusiaan sering kali berfokus pada daerah-daerah yang dilanda kemiskinan. Daerah-daerah ini akan berada dalam kemiskinan untuk waktu yang lama dan kondisi kehidupan serta kualitas hidup biasanya akan sangat rendah. Beberapa daerah yang paling miskin di dunia terletak di Afrika, di negara-negara seperti Liberia, Somalia, Sudan dan Angola. Daerah-daerah miskin lainnya termasuk negara-negara Amerika Latin seperti El Salvador dan Nikaragua dan sejumlah negara Asia. Proyek-proyek kemanusiaan ke belahan dunia ini biasanya mengirimkan bantuan seperti uang, alat pertanian, obat-obatan dan bahan bangunan. (Withers, 2017)

Bencana alam, proyek-proyek kemanusiaan ada di daerah-daerah yang pernah mengalami bencana alam seperti gempa bumi 2011 di Jepang dan Selandia Baru, tsunami di Asia Tenggara dan serangkaian gempa bumi di Pakistan. Kelompok-kelompok kemanusiaan mengirimkan bahan bangunan dan makanan serta peralatan medis karena ini adalah kebutuhan paling penting dan mendesak bagi orang-orang di zona bencana.

Bencana buatan manusia, bencana buatan manusia termasuk kejahatan, terorisme, perang dan kekacauan sipil. Bantuan kemanusiaan dikirim ke daerah-daerah ini dalam berbagai bentuk. Misalnya, pekerja sosial biasanya dikirim ke daerah kejahatan untuk mencoba mendorong orang menjauh dari kehidupan narkoba, kejahatan atau kehidupan geng. Prajurit atau staf polisi biasanya akan dikirim ke daerah-daerah yang mengalami gangguan sipil dan akan membawa persediaan untuk orang-orang yang terkena dampak buruk dari gangguan sipil tersebut. *New Orleans* adalah contoh daerah kekacauan sipil setelah badai Katrina. Zona perang sulit diakses oleh lembaga kemanusiaan karena tingkat bahaya yang tinggi. Biasanya bantuan dikirim dengan, atau sering disertai dengan cabang militer seperti tentara, penjaga pantai atau penjaga nasional.

Bantuan pengembangan, di negara-negara berkembang, bantuan kemanusiaan sering dikirim untuk membantu meningkatkan ekonomi dan pembangunan bantuan lebih lanjut. Misalnya, India menerima banyak bantuan pembangunan dari negara lain dan sekarang memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia. Brasil dan Republik Irlandia adalah contoh lain dari negara-negara yang menerima bantuan pembangunan dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar sebagai hasilnya. Ini biasanya bantuan pemerintah yang bertentangan dengan kelompok amal kemanusiaan karena volume uang yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara umumnya terlalu besar untuk dikelola sendiri oleh organisasi mana pun. (Quigley, 2017)



Gambar 3. 9 Proses Program Proyek Kemanusiaan
Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

f. Kegiatan Wirausaha

Wirausahawan adalah individu yang menciptakan bisnis baru, menanggung sebagian besar risiko dan menikmati sebagian besar imbalan. Proses mendirikan bisnis dikenal sebagai kewirausahaan. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator, sumber ide, barang, jasa, dan bisnis/ atau prosedur baru.

Pengusaha memainkan peran kunci dalam ekonomi apa pun, menggunakan keterampilan dan inisiatif yang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan membawa ide-ide baru yang bagus ke pasar. Kewirausahaan yang terbukti berhasil dalam mengambil risiko menciptakan *startup* dihargai dengan keuntungan, ketenaran, dan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Kewirausahaan yang gagal menghasilkan kerugian dan berkurangnya prevalensi di pasar bagi mereka yang terlibat. (Hayes, Drury, & Munichello, 2021)

Cara Kerja Kewirausahaan, kewirausahaan adalah salah satu sumber daya ekonomi mengategorikan sebagai bagian integral dari produksi, tiga lainnya adalah tanah/sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Seorang pengusaha menggabungkan tiga yang pertama untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa. Mereka biasanya membuat rencana bisnis, mempekerjakan tenaga kerja, memperoleh sumber daya dan pembiayaan, dan memberikan kepemimpinan dan manajemen untuk bisnis.

Pengusaha umumnya menghadapi banyak kendala ketika membangun perusahaan mereka. Tiga yang banyak disebut-sebut sebagai yang paling menantang adalah sebagai berikut:

- Mengatasi birokrasi
- Mempekerjakan bakat
- Mendapatkan pembiayaan

Para ekonom tidak pernah memiliki definisi yang konsisten tentang "pengusaha" atau "kewirausahaan" (kata "pengusaha" berasal dari kata kerja Prancis *entreprendre*, yang berarti "menjalankan"). Meskipun konsep wirausahawan ada dan dikenal selama berabad-abad, para ekonom klasik dan neoklasik meninggalkan wirausahawan dari model formal mereka: Mereka berasumsi bahwa informasi yang sempurna akan diketahui oleh aktor yang sepenuhnya rasional, tanpa meninggalkan ruang untuk

pengambilan risiko atau penemuan. Baru pada pertengahan abad ke-20 para ekonom secara serius berusaha memasukkan kewirausahaan ke dalam model mereka.

Tiga pemikir merupakan inti dari masuknya wirausahawan: Joseph Schumpeter, Frank Knight, dan Israel Kirzner. Schumpeter menyarankan bahwa pengusaha bukan hanya perusahaan bertanggung jawab atas penciptaan hal-hal baru dalam mencari keuntungan. Knight berfokus pada pengusaha sebagai pembawa ketidakpastian dan percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas premi risiko di pasar keuangan. Kirzner menganggap kewirausahaan sebagai proses yang mengarah pada penemuan.

Bagaimana kita yang mahasiswa ini dapat menjadi *entrepreneur*, Setelah pensiun dari sepatu dansa profesionalnya, Jadi Sheppard Missett menjadi pengusaha dengan mengajar kelas dansa kepada warga sipil untuk mendapatkan uang tambahan. Tetapi dia segera mengetahui bahwa wanita yang datang ke studionya kurang tertarik untuk mempelajari langkah-langkah yang tepat daripada menurunkan berat badan dan mengencangkan. Sheppard Missett kemudian melatih instruktur untuk mengajarkan rutinitasnya kepada massa, dan lahirlah Jazzercise. Sebuah kesepakatan waralaba diikuti. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 8.300 lokasi di seluruh dunia.

Mengikuti kursus korespondensi pembuatan es krim, dua pengusaha, Jerry Greenfield dan Ben Cohen memasang tabungan \$8.000 dengan pinjaman

\$4.000, menyewa pompa bensin Burlington, Vt., dan membeli peralatan untuk membuat es krim rasa unik untuk pasar lokal. Saat ini, Ben & Jerry's menghasilkan jutaan pendapatan tahunan.

Meskipun "pria mandiri" (atau wanita) selalu menjadi tokoh populer di masyarakat Amerika, kewirausahaan telah menjadi sangat romantis dalam beberapa dekade terakhir. Pada abad ke-21, contoh perusahaan Internet seperti Alphabet, sebelumnya Google (GOOG), dan Meta (FB), sebelumnya Facebook, yang keduanya telah membuat pendiri mereka sangat kaya, telah membuat orang terpicik dengan ide menjadi pengusaha.

Tidak seperti profesi tradisional, di mana sering kali ada jalan yang pasti untuk diikuti, jalan menuju kewirausahaan sangat membingungkan bagi kebanyakan orang. Apa yang berhasil untuk satu pengusaha mungkin tidak berhasil untuk pengusaha berikutnya dan sebaliknya. Yang mengatakan, ada tujuh langkah umum yang sebagian besar, jika tidak semua, pengusaha sukses telah mengikuti:

Pastikan Stabilitas Keuangan, langkah pertama ini bukanlah persyaratan yang ketat tetapi sangat dianjurkan. Sementara para wirausahawan telah membangun bisnis yang sukses sementara secara finansial kurang lancar (pikirkan Facebook, sekarang Meta, pendiri Mark Zuckerberg sebagai mahasiswa), memulai dengan persediaan uang tunai yang memadai dan memastikan pendanaan berkelanjutan hanya dapat membantu calon wirausahawan, meningkatkan pribadi mereka. landasan pacu dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk bekerja membangun bisnis yang sukses, daripada mengkhawatirkan menghasilkan uang dengan cepat.

Bangun Keahlian yang Beragam, setelah seseorang memiliki keuangan yang kuat, penting untuk membangun serangkaian keterampilan yang beragam dan kemudian menerapkan keterampilan tersebut di dunia nyata. Keindahan langkah kedua adalah dapat dilakukan bersamaan dengan langkah pertama.

Membangun keahlian dapat dicapai melalui belajar dan mencoba tugas-tugas baru dalam pengaturan dunia nyata. Misalnya, jika calon wirausahawan memiliki latar belakang keuangan, mereka dapat beralih ke peran penjualan di perusahaan mereka yang ada untuk mempelajari keterampilan lunak yang diperlukan untuk menjadi sukses. Setelah keahlian yang beragam dibangun, itu memberi wirausahawan perangkat yang dapat mereka andalkan ketika mereka dihadapkan pada situasi sulit yang tak terhindarkan.

Banyak yang telah dibahas tentang apakah kuliah diperlukan untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Banyak pengusaha terkenal yang terkenal karena putus kuliah: Steve Jobs, Mark Zuckerberg, dan Larry Ellison, untuk beberapa nama.

Meskipun kuliah tidak perlu untuk membangun bisnis yang sukses, hal itu dapat mengajari banyak orang muda tentang dunia dengan banyak cara lain. Dan putus sekolah yang terkenal ini adalah pengecualian daripada norma. Perguruan tinggi mungkin bukan untuk semua orang dan pilihannya bersifat pribadi, tetapi itu adalah sesuatu untuk dipikirkan, terutama dengan label harga tinggi untuk pendidikan perguruan tinggi di AS. (VentureWell, 2019)

Tidak benar bahwa jurusan kewirausahaan diperlukan untuk memulai bisnis. Orang-orang yang telah membangun bisnis yang sukses telah mengambil jurusan dalam banyak mata pelajaran yang berbeda dan melakukannya dapat membuka mata anda untuk cara berpikir yang berbeda yang dapat membantu anda dalam membangun bisnis anda.

Konsumsi Konten di Berbagai Saluran, sama pentingnya dengan membangun beragam keahlian, kebutuhan untuk mengonsumsi beragam konten juga sama pentingnya. Konten ini bisa dalam bentuk podcast, buku, artikel, atau kuliah. Yang penting adalah kontennya, apa pun salurannya, harus bervariasi dalam cakupannya. Seorang calon wirausahawan harus selalu membiasakan diri dengan dunia di sekitar mereka sehingga mereka dapat melihat industri dengan perspektif baru, memberi mereka kemampuan untuk membangun bisnis di sekitar sektor tertentu.

Identifikasi Masalah untuk dipecahkan, melalui konsumsi konten di berbagai saluran, calon wirausahawan dapat mengidentifikasi berbagai masalah untuk dipecahkan. Satu pepatah bisnis menyatakan bahwa produk atau layanan perusahaan perlu memecahkan masalah tertentu; baik untuk bisnis lain atau untuk kelompok konsumen. Melalui identifikasi masalah, calon wirausahawan mampu membangun bisnis di sekitar pemecahan masalah itu.

Penting untuk menggabungkan langkah tiga dan empat sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah untuk dipecahkan dengan melihat berbagai industri sebagai orang luar. Hal ini sering memberi calon wirausahawan kemampuan untuk melihat masalah yang mungkin tidak dilihat orang lain.

Penyelesaian Masalah, *startup* yang sukses memecahkan masalah khusus untuk perusahaan lain atau untuk publik. Ini dikenal sebagai "nilai tambah dalam masalah". Hanya melalui penambahan nilai pada masalah atau titik nyeri tertentu, seorang wirausahawan menjadi sukses.

Katakanlah, misalnya, Anda mengidentifikasi proses membuat janji dengan dokter gigi rumit bagi pasien, dan akibatnya dokter gigi kehilangan pelanggan. Nilainya bisa untuk membangun sistem janji temu *online* yang memudahkan untuk membuat janji temu.

Perluas Relasi atau hubungan, Kebanyakan pengusaha tidak dapat melakukannya sendiri. Dunia bisnis adalah dunia yang kejam dan mendapatkan bantuan apa pun yang Anda bisa akan selalu membantu dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bisnis yang sukses. Jaringan sangat penting untuk setiap pengusaha baru. Bertemu dengan orang yang tepat yang dapat memperkenalkan Anda pada kontak di industri Anda, seperti pemasok, pemodal, dan bahkan mentor yang tepat dapat menjadi perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan.

Menghadiri konferensi, mengirim email, dan menelepon orang-orang di industri, berbicara dengan saudara laki-laki teman sepupu Anda yang memiliki bisnis serupa, akan membantu anda keluar ke dunia dan menemukan orang-orang yang dapat membimbing anda. Setelah Anda memiliki kaki di pintu dengan orang yang tepat, menjalankan bisnis menjadi jauh lebih mudah.

Melihat contoh, setiap pengusaha harus menjadi pemimpin dalam perusahaan mereka. Hanya melakukan persyaratan sehari-hari tidak akan membawa kesuksesan. Seorang pemimpin perlu bekerja keras, memotivasi, dan menginspirasi karyawannya untuk mencapai potensi terbaik mereka, yang akan mengarah pada kesuksesan perusahaan.

Lihatlah beberapa perusahaan terbesar dan paling sukses; semuanya memiliki pemimpin yang hebat. Apple dan Steve Jobs, Bill Gates dan Microsoft, Bob Iger dan Disney, dan seterusnya. Pelajari orang-orang ini dan baca buku mereka untuk melihat bagaimana menjadi pemimpin yang hebat dan menjadi pemimpin yang dapat diikuti oleh karyawan anda dengan contoh yang anda berikan.



Gambar 3. 10 Proses Program Wirausaha

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

g. Studi Independen

Dalam studi independen, kita pada dasarnya membuat kursus kita sendiri tentang topik pilihan Kita, bekerja sama dengan penasihat fakultas Kita atau anggota fakultas COE lainnya.

Jika Kita mencari sesuatu yang berbeda - pengalaman lapangan khusus, kesempatan untuk mencoba penelitian, atau sekadar menjelajahi topik secara lebih mendalam, kita harus mempertimbangkan untuk melakukan studi independen di bawah pengawasan fakultas. Dalam beberapa kasus, anggota fakultas bersedia membantu kita dengan proyek penelitian mereka atau akan memandu studi kita tentang topik yang menjadi minat bersama. Kita harus membawa banyak hal dalam mempersiapkan Studi Independen kita, tetapi manfaatnya mencakup perhatian satu lawan satu, eksplorasi topik yang lebih terfokus yang menarik minat Kita, dan penjadwalan yang lebih fleksibel. Beberapa program bahkan mengizinkan dua atau tiga siswa untuk melakukan studi mandiri bersama jika Kita mau. Anggota fakultas akan berbeda dalam cara mereka melakukan pertemuan, tetapi sebagian besar fakultas mengharapkan siswa untuk memimpin dalam diskusi. Mereka akan mengajukan pertanyaan untuk membantu Kita mengklarifikasi apa yang mereka pikirkan dan jenis masalah apa yang ingin mereka diskusikan. Sebuah studi independen juga merupakan kesempatan besar untuk mengeksplorasi cara belajar yang mungkin berbeda dari budaya mapan di *College of Education*. Idealnya, studi independen melengkapi dan melengkapi apa yang sudah ditawarkan

kurikulum program Kita. Beberapa anggota fakultas juga mengizinkan Kita menggunakan studi independen untuk membahas topik yang tidak sesuai dengan jadwal Kita, karena beberapa kursus mungkin hanya ditawarkan setiap tahun atau bahkan lebih jarang.

Merencanakan Studi Independen, mulailah berpikir lebih awal tentang apa yang mungkin ingin Kita pelajari. Cakupan studi independen bisa luas atau mendalam, tetapi tingkat keterlibatan Kita dengan topik harus cukup banyak untuk menyamai kursus sekitar. Konsultasikan dengan topik potensial penasihat fakultas Kita untuk memastikan bahwa apa yang ingin Kita pelajari belum tercakup oleh kursus dalam *College of Education*. Kita akan ingin mulai berpikir setidaknya seperempat sebelumnya sehingga Kita dapat menemukan anggota fakultas yang cocok yang keahliannya sesuai dengan topik Kita. Kita biasanya harus menulis proposal, yang dapat mencakup:

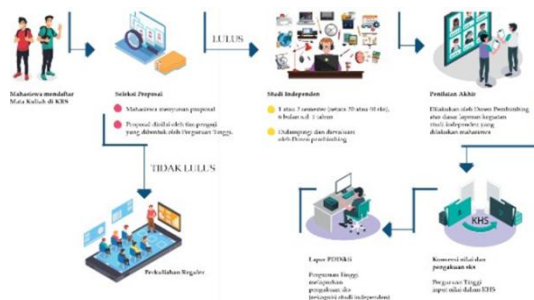
- Topik studi yang diusulkan;
- Alasan untuk fokus;
- Daftar bacaan awal;
- Deskripsi dokumen pembelajaran yang akan kita hasilkan.

Dokumen-dokumen ini secara tradisional merupakan kertas informal dan formal, tetapi jadilah kreatif! Pikirkan bukti yang menambahkan Kita dalam tujuan akademis atau profesional masa depan Kita. Kita dapat melakukan presentasi poster kepada anggota fakultas atau kelompok teman sebaya Kita. Kita dapat menyusun bibliografi beranotasi. Kita dapat membuat proyek pembelajaran layanan dengan organisasi lokal. Kita mungkin membuat situs *web*.

Hal yang Perlu Dipertimbangkan, seperti namanya, studi independen menempatkan banyak tanggung jawab untuk belajar mandiri. Jangan menunggu penasihat fakultas Kita memberi tahu Kita apa yang harus dilakukan. Apakah mencari dia atau nasihatnya, meskipun. Jika Kita tersesat dalam materi atau bingung bagaimana melanjutkannya, jangan takut untuk mengatakannya. Pastikan Kita memiliki hubungan baik dengan penasihat fakultas Kita. Kita tidak ingin menderita melalui seperempat pertemuan yang canggung atau sulit! Tentukan seberapa sering Kita berencana untuk bertemu dan kapan. Fakultas mungkin berbeda dalam

hal seberapa dekat mereka ingin terlibat dengan Kita selama studi independen. Beberapa ingin bertemu setiap minggu, dan yang lain akan berkata, "Kembalilah di akhir kuartal". Kemungkinan besar ada di antara keduanya. Sebaiknya Kita dan pembimbing (atau dosen pembimbing) menjelaskan hal ini dengan jelas sebelum memulai. Tanyakan sekitar untuk melihat studi independen apa yang mungkin dilakukan rekan Kita (tentang topik apa dan dengan fakultas mana). Penasihat fakultas Kita mungkin juga mengizinkan Kita untuk melihat proposal yang telah diajukan orang lain di masa lalu. Perlu diketahui juga bahwa anggota fakultas umumnya mengambil studi independen di atas dan di luar kewajiban pengajaran, penelitian, dan layanan mereka yang biasa dan mereka mungkin atau mungkin tidak diberi kompensasi untuk pekerjaan ekstra. UW memiliki harapan untuk berapa banyak waktu yang diharapkan siswa untuk dihabiskan untuk kursus secara umum; jika kursus 3 kredit, maka 3 jam di kelas ditambah dua jam di luar kelas untuk setiap kredit, dengan total 9 jam per minggu, atau sekitar satu hari penuh. (University of Washington, n.d.)

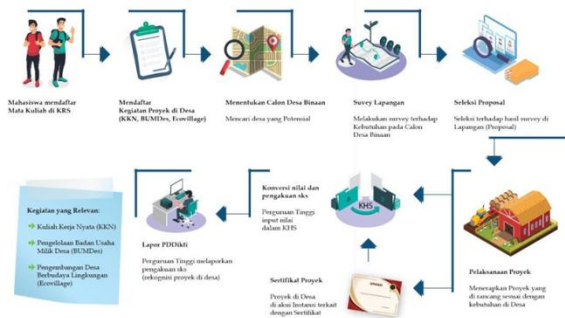
Manfaat yang mungkin kita akan dapatkan adalah kesempatan untuk mempelajari apa yang ingin Kita pelajari. Kita dapat menunjukkan kemampuan Kita untuk bekerja secara mandiri dan proaktif, sesuatu yang pasti akan disukai oleh calon majikan Kita. Kita dapat menanggapi secara mendalam topik yang sangat menarik yang mulai Kita pikirkan dari kelas sebelumnya. Kita bisa mulai menjelajahi literatur untuk topik yang ingin Kita tulis untuk tesis atau disertasi kita.



Gambar 3. 11 Proses Program Studi Independen
 Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

h. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Kuliah Kerja Nyata Tematik merupakan media yang efektif dan edukatif dengan proses menjatuhkan mahasiswa ke tengah-tengah masyarakat untuk menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat (LP3M, n.d.). Arif Satria, Rektor IPB University mengatakan KKN-T akan mengajarkan mahasiswa bagaimana berkolaborasi, memecahkan masalah, dan lebih peka terhadap masalah masyarakat. Senada dengan Rektor IPB University, Dr. Ir. Aji Hermawan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University mengatakan, dalam kegiatan KKN-T ini mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan menawarkan inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat (IPB University, 2019).



Gambar 3. 12 Proses Program KNNT

Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020

4. Kebijakan Program Bela Negara di Universitas

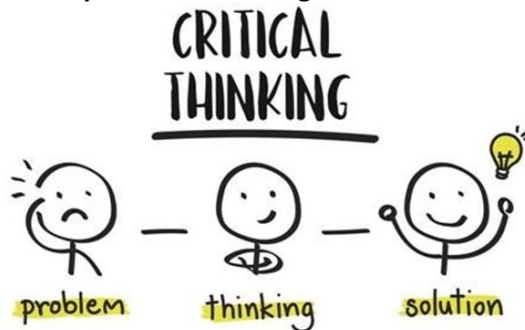
Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam pasal 6 ayat (3) dijelaskan, setiap warga negara berhak terlibat dalam usaha bela negara dengan cara, salah satunya, mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan. Sementara dalam Pasal 8 disebutkan bahwa pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud,

Nizam, menjelaskan bahwa ruang tersebut terbuka, termasuk dalamnya juga (mahasiswa) mengambil haknya mengikuti pendidikan militer untuk menjadi Komponen Cadangan. Beliau kembali meyakinkan bahwa program itu tak lain sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara oleh pemerintah. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menjadi anggota. (Dwiastono, 2020)

Selain UU No. 23 Tahun 2019, berikut adalah landasan/ dasar hukum dari kebijakan bela negara:

- 1) Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 2) Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 68: "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- 5) UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

5. **Output yang Diharapkan dari Bela Negara dalam Universitas**



Gambar 3. 13 Ilustrasi Proses Berpikir Kritis

Sumber: pewe.id

Dalam pelaksanaannya Bela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi sebagai mahasiswa kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita *Hoax* dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Mahasiswa juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara Indonesia agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. (Khalid, 2021)

Diharapkan mahasiswa ketika lulus dari perguruan tinggi nanti dapat mengembangkan jiwa bela negaranya di kalangan masyarakat dan membuat dampak yang baik untuk lingkungan baik secara lingkungan kecil (keluarga) maupun secara luas (dalam Rukun Tetangga atau Rukun Warga) bahkan dalam skala nasional. Mahasiswa yang mendapatkan pembelajaran bela negara juga harus percaya diri dan percaya bahwa kemampuan dari pembelajaran bela negaranya bisa mengubah keadaan NKRI saat ini ke arah yang lebih baik lagi.

Universitas sebagai wadahnya pun diharapkan terus menerus meningkatkan kuantitas bahkan kualitas pembelajaran bela negaranya di dalam lingkungan. Mulai dari pemberian contoh yang berlaku hingga membimbing mahasiswa yang punya potensi menjadi mahasiswa berprestasi dan membuat nama universitas maupun negara menjadi lebih baik di telinga negara lain.

Selain persiapan untuk keberadaannya di masyarakat, diharapkan dengan adanya pendidikan bela negara di universitas menjadikan mahasiswa kritis dan mampu membenahi keadaan yang ada di sekitarnya. Kritis di sini dimaksudkan adalah cara berpikir manusia untuk merespon sesuatu dan menganalisis fakta dalam bentuk penelitian. Sehingga hal tersebut bisa membantu penyaringan terhadap hal-hal berbau *hoax* dan sara di masyarakat yang marak terjadi di Indonesia saat ini dan menyajikan fakta-fakta yang aktual bagi masyarakat sehingga tidak terjadinya mispersepsi terhadap suatu berita yang ada di publikasi.

Bela negara dalam mahasiswa sendiri pun bisa berupa prestasi yang membanggakan bagi universitasnya, maka dari itu peran universitas dalam implementasi bela negara adalah memberi dukungan kepada mahasiswa agar menciptakan prestasi, baik akademik maupun non akademik, secara nasional bahkan internasional. Dukungan prestasi juga harus diikuti dengan minat dan bakat mahasiswanya, jika mahasiswa yang ada di universitas tersebut tidak ada keinginan bisa saja jadi sulit bagi universitas untuk memberikan sebuah dukungan ke mahasiswanya. Maka dari itu, tingkat kemauan dari diri mahasiswanya sendiri harus ditingkatkan dan diiringi dengan kesiapan pihak universitas dalam memberikan dukungan. Sehingga membuat jiwa bela negara dalam diri mahasiswa semakin menggebu-gebu dan ingin selalu memperbaiki keadaan di lingkungan sekitarnya.

Diharapkan juga para mahasiswa baru yang masih berada di lingkungan baru (kampus) bisa mendapatkan sebuah ide-ide yang cemerlang bagi lingkungan rumah, kampus, bahkan nasional jika memungkinkan. Mahasiswa secara keseluruhan mempunyai peran penting dan posisi yang ideal untuk mengeluarkan usul kebijakan-kebijakan dari dalam universitas dan diimplementasikan sebagai bela negara di masyarakat sekitar.



Gambar 3. 14 Nilai Dasar PIKIR yang dilandaskan pada UPNVJ sebagai budaya kerja di lingkungan kampus

Sumber: https://www.upnvj.ac.id/uploads/files/2020/Renstra_2020-2024.pdf

Peran universitas dalam bela negara diharapkan membuat *output* mahasiswa yang paham akan revitalisasi patriotisme dan dapat menjadikan negara semakin aman dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Mahasiswa seharusnya berpikir untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini menjadi negara ideal dan mampu bersaing. Perubahan sangat diperlukan untuk tercapainya keidealisme di dunia ini, namun, dengan tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sopan, ramah, bermoral dan memiliki akhlak yang mulia. Mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan dinamika pemerintahan yang sedang berjalan. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan penguasa harus dikritik. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Mahasiswa harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. (WANTANNAS RI, 2017)

6. Program Komponen Cadangan (KOMCAD)

Para mahasiswa harus disiapkan menjadi generasi yang terampil, inovatif, ulet, dan pejuang serta pemimpin sejati. Kebutuhan ini disadari betul oleh berbagai elemen pemerintahan dan pemimpin pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah diluncurkannya Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Sinergi dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan mempunyai kebijakan-kebijakan terutama yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara (termasuk para mahasiswa) dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memberikan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara, terutama generasi muda, maka Kementerian Pertahanan meluncurkan Kebijakan Komponen Cadangan (KOMCAD). Kebijakan ini 2 dirancang dalam Peraturan Menteri Pertahanan No.4

Tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan.



Gambar 3. 15 Pembentukan KOMCAD (Komponen Cadangan) di Indonesia
Sumber: *cnnindonesia.com*

Bentuk pembelajaran Program Pelatihan Dasar Militer Komponen Cadangan-Bela Negara (Latsarmil Komcad-Bela Negara) adalah Pendidikan yang dikemas dalam Kurikulum Pelatihan Dasar Militer Komponen Cadangan. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar, yaitu mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar di luar kampus selama 2 (dua) semester di mana kegiatan tersebut diakui oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari kurikulum masing-masing prodi. Lama Pendidikan dilakukan selama 12 minggu atau setara dengan 600 Jam Pelajaran (JP). Program Pelatihan Komponen Cadangan-Bela Negara dilaksanakan di Satuan atau Lembaga Pendidikan TNI. (Humas UPNVJ, 2021)

7. Peran dan keterlibatan mahasiswa pada gerakan anti korupsi

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peran penting mahasiswa tersebut tidak terlepas dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dalam konteks gerakan anti korupsi mahasiswa juga diharapkan tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi yang mereka miliki diharapkan mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi *watch dog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus terdapat dua bagian yaitu individu mahasiswanya sendiri dan komunitas mahasiswa. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah dirinya tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Dan dalam konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah anggotanya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti nyontek dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab dan kemandirian. Contohnya kantin kejujuran contoh lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab

8. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, serta SK dirjen DIKTI nomor 43/DIKTI/Kep/2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Cakupan materi Mata kuliah pendidikan Kewarganegaraan meliputi identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan rule of law, Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) Juga mewajibkan mata kuliah Kewarganegaraan disampaikan di Perguruan Tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat (3), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Numan Somantri dalam dikti (2014:7), pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Namun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan indoktrinasi melainkan dengan metode yang memungkinkan daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Kurikulum Berbasis Kompetensi, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 5 1945. Dalam hal ini, PKn berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), menumbuhkan partisipasi warga negara (*civic participation*) dan mengembangkan tanggungjawab warganegara untuk bela negara (*civic responsibility*). Warga negara yang cerdas diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan bangsanya. Melalui partisipasi warga negara akan membawa kemajuan

negara, karena tidak ada satu negara pun di dunia maju tanpa partisipasi aktif dari warga negaranya. Begitu pula dengan tanggung jawab warga negara atas persoalan yang dihadapi negara dan bangsanya akan berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsanya.

Setiap mata kuliah tentu memiliki tujuan agar mahasiswa memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sedangkan standar kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan intelektual ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat (*long live learning*), menjadi ilmuwan profesional yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Menurut UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional No. Pasal 35 UU Nomor 12/2012 tentang pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, menurut Abdul Azis Wahab dan Sapriya (2012:311) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Menurut SK Dirjen Dikti Nomor 43/2006, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Menurut Martini, dkk (2013:3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi dan keahliannya serta berpartisipasi dalam kehidupan yang bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia. Selain itu, membantu mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratis berkeadaban, bertanggung jawab, dan menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan tinggi adalah (a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan 6 bangsanya. (b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (UU Nomor 12 Tahun 2012) Berdasarkan beberapa kutipan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi ilmuwan yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan melainkan juga memiliki sikap, keterampilan dan kesadaran bernegara yang tinggi sehingga akan membawanya menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negaranya. (Jamaludin, Damanhuri, Setiawan, & Raharjo, 2017)

9. Pembentukan Resimen Mahasiswa



Gambar 3. 16 Potret Resimen Mahasiswa Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Tahun 2014

Sumber: <https://upnvj.ac.id/id/fasilitas-layanan/unit-kegiatan-mahasiswa/resimen-mahasiswa.html>

Resimen Mahasiswa (disingkat menwa) adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Markas komando Menwa bertempat diperguruan tinggi di kesatuan masing-masing yang anggotanya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berkedudukan di kampus tersebut. Menwa merupakan komponen cadangan pertahanan negara yang diberikan pelatihan dasar militer seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjun payung, bela diri militer, senam militer, penyamaran, navigasi dan sebagainya.

Anggota menwa (wira) di setiap perguruan tinggi atau kampus membentuk satuan-satuan yang merupakan salah satu bagian organisasi mahasiswa / mahasiswi di unit kegiatan mahasiswa (UKM). Menwa diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan UKM lain dan berada langsung di bawah rektorat.

Selain itu dalam pembentukan Resimen Mahasiswa diperkuat dengan berbagai undang-undang dan beberapa keputusan, di antaranya:

- 1) UUD'45 Pasal 27 ayat 3 tentang kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara.
- 2) UUD'45 Pasal 30 ayat 2 tentang usaha HANKAMNEG yang dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA.
- 3) Keputusan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI, No: KB/14/M/X/2000 ; nomor : 6/U/KB/2000 ; No. 39 A tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa.
- 4) Proja Skomenwa Jayakarta Ta.2010 Bidang Pendidikan dan Latihan. Surat Perintah Pangdam Jaya Nomor: Sprin/1594/II/2011 tanggal 17 Juli 2011 tentang perintah melaksanakan PPBN Resimen Mahasiswa Jayakarta tahun 2011.

Adapun tugas pokok dan fungsi Resimen Mahasiswa, di antaranya:

Tugas:

- 1) Sebagai komponen pertahanan Negara bertugas merencanakan, mempersiapkan dan menyusun seluruh potensi mahasiswa pada setiap propinsi daerah tingkat I, untuk melaksanakan fungsi sebagai komponen cadangan negara;
- 2) Sebagai komponen perlindungan masyarakat bertugas merencanakan, mempersiapkan dan menyusun seluruh potensi mahasiswa pada setiap propinsi daerah tingkat I, untuk melaksanakan fungsi sebagai linmas;
- 3) Sebagai UKM Khusus di perguruan tinggi, membantu terlaksananya pembinaan kesadaran Bela Negara serta kelancaran kegiatan dan program lainnya di perguruan tinggi.

Fungsi:

1. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau seni, serta wawasan bela negara yang mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia.
2. Sebagai Komponen Pertahanan Negara Menwa Ikut mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Membantu menumbuhkan dan meningkatkan sikap Bela Negara dan nilai-nilai cinta tanah air di masyarakat;
4. Membantu satuan TNI dalam melaksanakan pembinaan keamanan tertentu sesuai dengan aturan undang-undang;
5. Membantu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi Linmas;
6. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
7. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
8. Bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan yang tenteram dan tertib;
9. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program perguruan tinggi dan program kemahasiswaan lainnya;
10. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi, Pangdam atau Danrem serta Gubernur.



Gambar 3. 17 Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Sumber: <https://upnvj.ac.id/id/fasilitas-layanan/unit-kegiatan-mahasiswa/resimen-mahasiswa.html>

Kehidupan dunia pada era globalisasi di mana setiap peristiwa di suatu negara menjadi perhatian dan konsumsi Internasional yang telah meresap dalam kehidupan masyarakat, demikian halnya dengan Indonesia tidak luput dari pantauan dunia Internasional. Untuk menjaga tetap tegaknya NKRI pada era globalisasi sekarang ini, kesadaran bela negara serta jiwa nasionalisme merupakan materi yang lebih tepat dibina serta dikembangkan karena merupakan kunci perekat antar masyarakat, antar agama, antar budaya serta antar daerah. Oleh karena itu dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesadaran bela negara bagi setiap komponen masyarakat salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kesadaran bela negara khususnya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa.

Peningkatan Kesadaran Bela Negara merupakan bagian penting dari Ketahanan Nasional yang berfungsi untuk meningkatkan motif moral. Motif moral menjadi gambaran kecerdasan sosial dalam wujud kemampuan mengamati dan mengawasi secara komprehensif. Kemampuan ini berguna untuk menumbuhkan kemampuan partisipatif

warga negara dalam wujud kemampuan melakukan kontrol sosial yang dilandasi nilai moral kebangsaan.

Resimen Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta sebagai salah satu wadah yang berperan dalam membentuk jiwa dan karakter generasi bangsa yang handal, berwawasan kebangsaan, penuh kreativitas dan dedikasi untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Kesadaran bela negara lebih terfokus dan bersifat universal serta penerapannya lebih fleksibel sesuai kepentingan Nasional dan perkembangan jaman yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat, sehingga terwujud warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara, berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air.



PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

BAB 4: MASALAH DALAM DUNIA
PENDIDIKAN PENGHAMBAT BELA
NEGARA

BAB 4

MASALAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN PENGHAMBAT BELA NEGARA

A. ABSTRAK

Bela negara merupakan hal penting karena telah menjadi kebutuhan legal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Bela negara dilakukan tidak hanya dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga oleh masyarakat sebagai kekuatan pendukung yang membantunya. Hal yang dapat dilakukan untuk bela negara tidak hanya angkat senjata di medan perang tetapi bisa dari aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan profesinya dan memiliki dampak baik untuk negara. Masyarakat Indonesia masih belum maksimal dalam melakukan bela negara, bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu akan arti bela negara tersebut.

Dunia pendidikan yang menjadi pedoman dan tempat yang memberikan pengetahuan akan pentingnya bela negara serta pengimplementasiannya, namun memiliki berbagai permasalahan yang bertentangan dengan bela negara tersebut. Tindakan *bullying* dan kekerasan antar pelajar di sekolah yang ada di Indonesia sangat tinggi, di mana seharusnya sekolah merupakan tempat aman dan damai untuk pelajar mendapatkan ilmu. Penggunaan narkoba di tingkat sekolah juga harus menjadi perhatian pemerintah dikarenakan tingkatnya yang tinggi dan dapat merusak moral bangsa. Permasalahan tersebut sangat bertentangan terhadap arti bela negara di mana pelajar yang seharusnya

belajar dengan sungguh-sungguh untuk membangun negara menjadi lebih baik malah melakukan tindakan yang terbaliknyanya.

Dengan itu, buku ini membahas tentang pendidikan yang ada di Indonesia, arti bela negara, permasalahan yang ada di dunia pendidikan yang menghambat bela negara serta solusi meningkatkan kesadaran bela negara di dunia pendidikan seperti pendidikan bela negara sejak dini di sekolah untuk menumbuhkan kecintaan akan negara dan rasa rela berjuang untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

B. APA ITU PENDIDIKAN?

Pendidikan adalah kegiatan belajar yang berkaitan dengan pengetahuan, kebiasaan, dan keterampilan yang diturunkan sekelompok orang dari generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian (Nurany, Sugandi, & Anarys, 2021). Di mana pendidikan ini biasanya dilakukan di bawah bimbingan orang lain, tetapi belajar sendiri juga dimungkinkan.

Definisi pendidikan juga disebutkan dalam pasal 1 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Adapun fungsi dari pendidikan nasional pun disebutkan juga dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Adapun pandangan lainnya mengenai pengertian pendidikan ini dijelaskan oleh (Ali, 2019) yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan disiplin ilmu yang menyangkut peradaban, peradaban dan proses pendewasaan manusia. Pelatihan semacam ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk pembangunan manusia yang dibutuhkan oleh negara untuk pembangunan dan bagi pelajar sendiri bisa bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan potensinya.

Jalur pendidikan yang bisa ditempuh berdasarkan pasal 13 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan kegiatan pendidikan yang umumnya diselenggarakan di sekolah. Pendidikan ini memiliki sifat yang formal sehingga adanya lulusan yang lahir dari sistem pendidikan ini maka akan diakui baik secara nasional dan internasional. Pendidikan sekolah ini ditujukan agar sekolah dapat meningkatkan potensi akademik atau intelektual peserta didik (Dewi, 2017)

Menurut (Ardela, 2019) pendidikan formal memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kurikulum yang jelas.
- b. Terdapat syarat tertentu yang diberlakukan untuk peserta didiknya.
- c. Materi pembelajaran yang bersifat akademis.
- d. Adanya kegiatan pendidikan yang cukup terbilang lama.
- e. Tenaga pendidik harus bisa memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan.
- f. Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- g. Adanya ujian formal yang diikuti oleh peserta didik,
- h. Terdapat pemberlakuan administrasi yang diterapkan secara seragam.
- i. Kredensial seperti ijazah memiliki peran, khususnya yaitu saat penerimaan peserta didik pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan formal di Indonesia sendiri terdiri dari tiga jenjang pendidikan. Hal ini merujuk dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan formal di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun penjelasan dari masing-masing pendidikan ini

juga dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan jenjang pendidikan yang pertama, pendidikan dasar merupakan pendidikan umum yang dilakukan selama sembilan tahun. Di mana enam tahun pertama dilakukan di sekolah dasar dan tiga tahun selanjutnya dilakukan di sekolah menengah pertama. Pendidikan dasar ini dapat berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat.

Selanjutnya jenjang pendidikan menengah, menurut jenjang pendidikan menengah ini dilakukan oleh lulusan dari pendidikan dasar. Di mana pendidikan menengah ini dapat menjadi wadah dalam mempersiapkan peserta didik yang mampu menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan berhubungan dengan sesama baik lingkungan sosial budayanya hingga hubungan mereka kepada alam sekitarnya serta peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya lebih lanjut di dunia kerja nantinya atau jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan menengah ini terdiri dari atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Adapun bentuk dari pendidikan menengah ini yaitu Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lainnya yang sederajat.

Terakhir jenjang pendidikan tinggi, ini merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan menengah. Adanya jenjang pendidikan tinggi dapat bermanfaat dalam menyiapkan peserta didik yang mampu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional. Di mana peserta didik ini mampu menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, kesenian dan teknologi. Pendidikan tinggi ini mencakup yaitu program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang berada di luar jalur pendidikan formal yang dilakukan terstruktur dan berjenjang. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 menyebutkan bahwa :

“Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan yang berfungsi sebagai penambah, pengganti, dan atau sebagai pelengkap dari pendidikan formal yang bisa mendukung terlaksananya pendidikan sepanjang hayat.”

Dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan secara lengkap terkait fungsi, macam-macam pendidikannya, satuan pendidikannya hingga ke hasil dari pendidikan nonformal itu sendiri seperti apa. Fungsi dari pendidikan nonformal ini adalah bisa mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan memberikan mereka dorongan dalam penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta bisa mengembangkan sikap dan kepribadian profesional setiap peserta didik.

Pendidikan nonformal ini meliputi pendidikan yang berkaitan dengan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan yang berkaitan dengan kepemudaan, pendidikan terkait pemberdayaan perempuan, pendidikan literasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan yang berkaitan dengan kesetaraan dan pendidikan terkait lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik.

Terkait satuan pendidikan nonformal ini terdiri dari lembaga pelatihan, lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat, kelompok belajar, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis dengannya. Pendidikan nonformal ini bisa meliputi Paket A, B, dan C, juga meliputi pendidikan lainnya yang bisa bertujuan dalam pengembangan kemampuan peserta didik. Hasil pendidikan nonformal ini dapat dikualifikasikan setara dengan hasil pendidikan formal setelah mengkaji beberapa proses penelitian untuk menentukan kesepadanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah terkait dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

3. Pendidikan Informal

Menurut Pasal 27 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan informal merupakan pendidikan keluarga dan lingkungan sekitarnya yang bisa berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri yang diselenggarakan secara sadar dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hasil pendidikan informal ini bisa diakui setara

dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ditetapkan.

Pendidikan informal ini erat kaitannya dengan pembentukan kecakapan hidup peserta didik (anak) agar bekal dari pendidikan ini bisa menjadi dasar hidup mereka kedepannya. Jika dalam manfaat dari pendidikan dalam hal kecakapan hidup ini tertanam pada setiap anak maka pengembangan diri si anak dalam lingkungan sekolah pun tidak akan menjadi sulit. Seperti yang kita ketahui, karakter dan kepribadian diri peserta didik ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitar peserta didik tersebut. Keluarga menjadi gerbang utama dan pertama yang harus dilalui peserta didik dalam membentuk karakter dan kepribadiannya. Hal ini dikarenakan keluarga mampu berfungsi dalam menjaga, melatih, merawat, serta mendidik sang anak baik secara mental spiritual. Di mana tujuan utama dari pendidikan ini adalah memberikan pendidikan karakter si anak serta membentuk nilai-nilai kepribadiannya (Dewi, 2017).

Sedangkan menurut jenisnya pendidikan berdasarkan Pasal 15 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencakup:

1) Pendidikan Umum

Menurut (Habe & Ahiruddin, 2017) pendidikan umum ini terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengkhususkan pada pemberian pengetahuan yang luas bagi peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuk dari pendidikan umum ini adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan dari pendidikan umum ini yaitu agar terjadinya pengembangan kepribadian seseorang berkaitan dengan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

2) Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang memiliki tujuan dalam mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja di bidang tertentu. Pendidikan kejuruan ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Di mana dengan adanya pendidikan kejuruan ini bisa membuat peserta didik siap bekerja di bidang tertentu, sehingga kedepannya

mampu menciptakan tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan berkompetisi sejak dini (Habe & Ahiruddin, 2017).

Menurut (Darmadi, 2018) pendidikan kejuruan ini terdapat tujuan yang dibagi menjadi tujuan umum dan khusus. Adapun tujuan umum menurutnya adalah terdiri dari:

- a. Siapnya peserta didik yang bisa menjalani kehidupannya dengan layak kedepannya.
- b. Bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan peserta didik.
- c. Siapnya peserta didik yang bisa memahami dan menghargai keragaman budaya dan bangsa Indonesia.
- d. Siapnya peserta didik yang mampu menerapkan serta memelihara hidup sehat hingga bertambahnya wawasan peserta didik terkait pengetahuan, lingkungan dan seni.
- e. Siapnya peserta didik yang mampu memelihara, menerapkan dan melestarikan budaya kearifan lokal.

Sementara untuk tujuan khusus adanya pendidikan kejuruan yaitu sebagai berikut ini:

- a. Bisa menciptakan lahiran lulusan peserta didik yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan yang ada di dunia kerja maupun dunia industri baik secara tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- b. Dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan profesional dalam program pengalaman teknis, memiliki keterampilan dan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja dan lembaga profesional teknis terkait lainnya, serta mampu bersaing di pasar global.
- c. Dapat menghasilkan berbagai jenis produk penelitian dan program inovatif di bidang disiplin ilmu Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) dan disiplin ilmu teknik lainnya yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.
- d. Dapat menjadi pusat informasi dan diseminasi di bidang pendidikan teknologi dan pelatihan kejuruan serta di bidang teknik.

- e. Bisa menciptakan *trainer/* pelatih yang berjiwa wirausaha di bidang teknologi profesional/ kejuruan.

3) Pendidikan Akademik

Berdasarkan pendapat dari (Habe & Ahiruddin, 2017) ia mengatakan bahwa pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diharapkan agar peserta didik dapat menguasai dan melakukan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu. Pendidikan akademik sendiri mencakup program pendidikan sarjana dan pascasarjana. Adapun pendidikan akademik meliputi program pendidikan sarjana (S1), magister atau master (S2), dan doktor (S3). Pendidikan akademik ini lebih ditujukan dalam menghasilkan seorang ilmuwan, pengkaji, dan pengembangan ilmu. Oleh karena itu, pelatihan akademik ini memfokuskan perhatiannya pada bidang ilmu, teori atau konsep. Sedangkan dalam pendidikan profesi penekanannya adalah pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik. Hal ini karena pendidikan profesi lebih fokus untuk menciptakan profesional yang memiliki keterampilan, kemampuan, dan kinerja standar.

4) Pendidikan Profesi

Menurut (Habe & Ahiruddin, 2017) pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi yang dapat menciptakan peserta didik agar mampu menjadi pekerja dengan memiliki syarat keahlian khusus. Pendidikan profesi ini sendiri merupakan suatu sistem pendidikan tinggi yang dilakukan setelah peserta didik telah melakukan program pendidikan sarjana. Di mana ini bertujuan agar peserta didik menguasai keahlian khusus dan ketika mereka lulus mereka akan mendapatkan suatu gelar profesi tertentu sesuai dengan apa yang mereka tempuh.

5) Pendidikan Vokasi

Menurut (Ningsih, 2020) pendidikan vokasi ialah pendidikan tinggi yang diarahkan dalam penguasaan dan pengembangan keahlian terapan, beradaptasi di bidang pekerjaan tertentu dan bisa kedepannya menciptakan lapangan pekerjaan. Pendidikan vokasi ini sendiri berorientasi pada kecakapan kerja yang dimiliki para peserta didik dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. Adapun waktu menempuh pendidikan vokasi ini berbeda-beda, mulai yang ada hanya satu semester saja, hingga sampai beberapa tahun. Di mana ini tergantung pada program pendidikan yang diminati.

6) Pendidikan Keagamaan

Pada Pasal 30 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan secara jelas bahwa pendidikan keagamaan bisa diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Di mana pendidikan agama ini berfungsi agar peserta didik siap menjadi anggota masyarakat yang dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai harian agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan ini bisa diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Adapun bentuknya pendidikan keagamaan ini bisa berbentuk pesantren, pendidikan diniyah, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis. Manfaat dari adanya pendidikan keagamaan ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan sebagai pembentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya.

7) Pendidikan Khusus.

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami masalah fisik, emosional, mental, sosial, ataupun kesulitan lainnya dan/atau bagi mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat khusus. Pelayanan pendidikan khusus untuk jenis pendidikan luar biasa ini dapat diselenggarakan secara inklusif atau dalam bentuk satuan pendidikan khusus pada pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu, pendidikan khusus ini hanya diperuntukkan bagi jenjang SD dan SMP serta SMA, sehingga pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia. Kesimpulannya pendidikan khusus ini mengikutsertakan anak yang berkebutuhan khusus agar bisa belajar bersama dengan anak seusianya di sekolah reguler yang tidak jauh dengan tempat tinggalnya. Adapun semangat dari penyelenggaraan pendidikan ini ialah agar terciptanya

kesempatan memperoleh pendidikan bermutu yang luas bagi seluruh anak sesuai dengan kebutuhannya tanpa adanya diskriminasi (Herawati, 2016).

Dari penjelasan yang sudah dilakukan di atas maka menyimpulkan bahwa banyak sekali program pendidikan sangat luas dan banyak sekali jenis dan macamnya. Masing-masing pendidikan ini memiliki peran yang berbeda-beda tapi satu tujuan yaitu demi meningkatkan pengetahuan dan pengembangan karakter peserta didik. Oleh sebab itu pendidikan menjadi suatu elemen penting yang harus ditingkatkan perkembangannya di suatu negara. Adanya pendidikan dapat memberikan manfaat terbukanya segudang informasi ataupun pengetahuan yang bisa mengembangkan kemampuan atau kualitas diri seseorang. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pendidikan yang mempunyai peranan dalam pembentuk indeks pembangunan manusia atau yang disingkat IPM. Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh (Ariani & Juliannisa, 2021) menyebutkan bahwa dengan adanya pembangunan manusia baik secara mental dan fisik yang memiliki arti peningkatan kapasitas mendasar masyarakat dapat meningkatkan kesempatan berpartisipasi penduduk dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pendapat dari (Sujana, 2019) menunjukkan kesamaan pandangan dengan penelitian di atas dalam pentingnya sebuah pendidikan, di mana ia mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki peran penting untuk mengembangkan masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mentransformasikan budaya, terciptanya tenaga kerja, serta dapat menjadi alat kontrol sosial, dll. Oleh karena itu, pengembangan manusia dapat berjalan secara berkelanjutan.

Upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri selalu dilakukan setiap negara di dunia. Indonesia yang terkenal sebagai negara kepulauan memiliki jumlah populasi penduduk yang tergolong besar di seluruh dunia yaitu menempati urutan keempat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan laporan (BPS, 2021) mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dapat mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya manusia pun juga semakin besar. Apabila terciptanya sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam mengembangkan kualitas diri mereka semakin banyak dan merata di seluruh pelosok negeri maka akan

membuka peluang terjadinya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Indonesia sendiri mewajibkan bagi seluruh penduduk mengikuti program wajib belajar pendidikan selama 12 tahun. Hal ini terjadi karena pada tahun 2010 pemerintah melakukan peningkatan status wajib belajar dari 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Kondisi ini dilakukan merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan sebagai wujud langkah maju yang diambil pemerintah karena telah berhasil dalam program wajib belajar 9 tahunnya. Kelanjutan dari program wajib 9 tahun ini disebut dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program wajib belajar 12 tahun ini memberikan suatu persyaratan bahwa secara umum warga negara Indonesia diwajibkan menyelesaikan jenjang pendidikan yang minimal ijazah dengan kualifikasi SMU sederajat (Ningsih, 2020).

Berdasarkan Permendikbud No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal menyebutkan dalam pasal 1 bahwa Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah program pendidikan yang bisa memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk dapat ikut serta mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Adapun yang tertera dalam pasal 2 menyebutkan sasaran dari penyelenggaraan PMU ini sendiri. Di mana sasaran dari program PMU ini adalah setiap warga negara Indonesia berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97% pada tahun 2020.

Oleh sebab itulah maka diharapkan dengan adanya program tersebut menjadi suatu langkah maju yang dilakukan pemerintah agar masyarakatnya bisa memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi suatu jenjang pendidikan dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan yang semakin luas. Pengetahuan menjadi suatu bekal bagi seseorang agar dapat meningkatkan kemampuan dirinya masing-masing. Semakin seseorang tersebut memiliki kekayaan non material ini, maka sejatinya seseorang ini akan mampu menambah kekayaan materialnya. Suatu pengetahuan yang diamalkan secara baik akan memberikan suatu

hasil yang baik bagi orang tersebut atau bahkan bermanfaat bagi orang lain juga.

Indonesia menjadi negara yang mempunyai banyak keragaman, baik dari banyaknya suku, adat, dan budaya dan lainnya yang merupakan suatu kekayaan yang ternilai harganya. Agar kita bisa menjadi warga negara yang baik maka kita harus menjaga kekayaan tersebut agar tidak punah atau hilang karena tergerus oleh adanya globalisasi. Pemerintah sebagai pengatur jalannya negara harus bisa mencerminkan dan mendorong agar setiap masyarakatnya mencintai negaranya. Adapun kaitannya dengan pendidikan, pemerintah memiliki peran sebagai pembuat regulasi terkait permasalahan dan mekanisme pendidikan yang diselenggarakan negaranya. Langkah-langkah konseptual dan strategis sangat diperlukan untuk mentransmisikan nilai-nilai dan melakukan sosialisasi sehingga terbangun kesadaran bela negara.

Dampak adanya globalisasi jika tidak kita pilah mana yang harus diikuti dan mana yang tidak boleh maka akan menimbulkan pengaruh negatif bagi pertahanan Indonesia. Berdasarkan penelitian (Gredinand, 2017) globalisasi yang bisa menyebabkan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi dapat mempengaruhi tindakan dan sikap penerus bangsa yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Maraknya pergaulan yang bebas dilakukan oleh generasi muda bisa membuat ketahanan negara semakin menurun. Kondisi penerus bangsa sekarang dapat menggambarkan bagaimana kelanjutan negara itu sendiri. Generasi muda yang memiliki peran agar bisa memajukan dan mengharumkan nama bangsa sangat diperlukan. Pembentukan sikap dan perilaku inilah yang memerlukan peran pendidikan sebagai alat yang bisa mewujudkan hal itu. Sayangnya dalam pendidikan ini sendiri masih terdapat masalah-masalah yang sering terjadi dan berkaitan dengan wujud penegakan bela negara itu sendiri, contoh kecilnya yaitu masih banyak anak putus sekolah. Kondisi anak yang putus sekolah ini bisa membuat anak tersebut tidak bisa mendapatkan pengetahuan dan pendidikan terkait upaya yang bisa mendorong bela negara. Parahnya lagi jika anak putus sekolah ini malah berbuat menyimpang atau dengan kata lain berbuat kriminalitas atau menggunakan narkoba.

C. MENGENAL BELA NEGARA

Cinta tanah air tidak hanya dikatakan dengan lisan saja. Bentuk apresiasi kita sebagai rakyat yang lahir, menjadi dewasa, dan menghabiskan masa tua di negeri Indonesia tercinta tentunya memerlukan peran aktif dan sikap kita dalam merealisasikan bentuk kecintaan kita terhadap negara ini. Bentuk realisasi cinta tanah air memang beraneka ragam, yang salah satunya adalah melalui tindakan bela negara. Bela negara dewasa ini memang bukan lagi dalam bentuk peperangan, melainkan lebih mengarah pada membangun, memajukan, serta mengharumkan nama bangsa di kancah Internasional. Selaras dengan tujuan yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan dalam alinea ke 4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Demi mewujudkan tujuan yang mulia inilah dibutuhkan tindakan, sikap, dan pengabdian masyarakat Indonesia untuk ikut mewujudkannya dengan peran sertanya masing-masing. Peran yang berlandaskan atas niat memajukan, menjaga, membela, dan mengharumkan nama bangsa inilah yang diartikan sebagai bentuk dari bela negara. Tidak hanya melindungi negara dari ancaman negara lain demi menjaga eksistensi negara Indonesia di dunia Internasional, membela negara juga dilakukan demi menjaga kemakmuran warga negara dan mencerdaskan kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Hal inilah yang membuat bela negara menjadi kewajiban serta tanggungan bagi setiap generasi, terutama generasi muda yang kelak menjadi penerus bangsa dan pemimpin negara.

Pengertian bela negara menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 27 ayat (3) yaitu mewajibkan melaksanakan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, diatur pula dalam Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 yang membahas tentang Pertahanan Negara, tepatnya pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan setiap

warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan mempertahankan negara. Berdasarkan Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan tanpa terkecuali, tanpa memandang agama, suku, budaya, ras, maupun gender, seluruhnya berhak dan berkewajiban membela negara Indonesia ini. Hal ini membuktikan bahwa bela negara bukan merupakan suatu pilihan melainkan suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sudah sebuah keharusan baginya untuk membela negara dengan berbagai cara yang sesuai dengan perannya masing-masing. Melaksanakan bela negara dengan penuh semangat, rasa bertanggung jawab, dan mengabdikan kepada negeri adalah kehormatan sebagai warga negara Indonesia.

1. Dasar Hukum Bela Negara Menurut Undang-Undang

Indonesia mengatur secara tegas dan jelas terkait keharusan membela negara bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Ketetapan tersebut tertera dalam Undang-Undang sebagai bentuk konstitusional dari bela negara, dasar hukum, dan pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara berkebangsaan yang merupakan implementasi dari bela negara. Kewajiban berbela negara tertuang dalam dasar hukum dan peraturan berikut:

- 1) Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) disebutkan jika ikut serta dalam kegiatan pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia.
- 2) Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1) disebutkan jika upaya mempertahankan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara Indonesia dan dalam ayat (2) disebutkan jika kekuatan utama dalam mempertahankan keamanan negara Indonesia dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kekuatan pendukungnya dijalankan oleh rakyat.
- 3) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 68 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kewajiban warga negara Indonesia yaitu turut berkontribusi dalam membela negara.

- 4) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) disebutkan jika melakukan kegiatan pertahanan negara merupakan wujud dari usaha bela negara yang diwajibkan bagi warga negara Indonesia. Lalu dalam ayat (2) disebutkan jika bela negara melalui usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa lembaga:
- Lembaga Pendidikan dengan diajarkan Pendidikan Kewarganegaraan;
 - Lembaga Pertahanan dan Keamanan Negara dengan diajarkan Pelatihan Dasar Militer;
 - Tentara Nasional Indonesia untuk merekrut rakyat sebagai anggota prajurit baik sebagai prajurit cadangan maupun sebagai prajurit utama; dan
 - Melakukan pekerjaan sesuai profesi dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) huruf a, disebutkan jika sikap masyarakat yang mencintai Negara dan UUD 1945 yang diterapkan pada perilaku kehidupan sehari-hari adalah definisi dari Upaya Bela Negara.

2. Definisi Bela Negara

Bela Negara merupakan keterkaitan antara cita-cita Indonesia dan pengakuan keberadaan Indonesia terhadap negara lain. Pada naskah Pembukaan UUD 1945 menyebutkan jika cita-cita Negara Indonesia adalah mampu melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, mengajarkan pendidikan guna mencerdaskan masyarakat Indonesia, dan aktif berpartisipasi membantu negara lain agar tercipta keadilan dan perdamaian di dunia. Terbukti, keberadaan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat secara Internasional tanpa campur tangan negara lain dikarenakan bangsa Indonesia memiliki sifat tangguh dan gigih yang terpancar dari semangat Bela Negara dengan dilandasi nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. (Badan Kesbangpol Provinsi Banten, 2020).

Definisi dari Bela Negara menurut Badan Kesbangpol Provinsi Banten (2020) dapat diartikan sebagai:

- 1) Menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa cinta dan bangga menjadi warga negara Indonesia yang berlandaskan nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Menjalankan kewajiban dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari; dan
- 3) Melaksanakan bela negara dengan penuh semangat, rasa bertanggung jawab, dan mengabdikan kepada negeri adalah kehormatan sebagai warga negara Indonesia dan ketika diterapkan pada perilaku dan sikap sehari-hari maka hal tersebut berubah persepsi menjadi Upaya Bela Negara.

3. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Terdapat beberapa nilai dasar dari perilaku dan sikap semangat membela bela negara yang seharusnya ada di setiap warga negara, hal ini dikarenakan nilai-nilai tersebutlah yang mampu menggerakkan seseorang untuk membela negaranya. Berikut nilai-nilai dasar bela negara menurut Badan Kesbangpol Provinsi Banten (2020) di antaranya :

1) Cinta Tanah Air

Setiap warga negara Indonesia pasti memiliki rasa cinta terhadap tanah air sebagai tempat kelahiran dan meninggalkan banyak kenangan manis. Memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Pemahaman terkait nilai-nilai bela negara agar dapat menimbulkan rasa cinta tanah air dapat dilakukan dengan memahami hal berikut:

- a) Mempelajari sejarah perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan;
- b) Mengetahui kekayaan alam Indonesia dari sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain;
- c) Produk Indonesia yang berkualitas dihasilkan dari sumber daya manusia yang unggul; serta
- d) Letak geografis Indonesia sebagai jalur perdagangan di masa lalu dan keragaman flora dan faunanya.

Dengan memahami beberapa hal tentang Indonesia membuat kita menjadi bersyukur lahir di negeri yang indah ini.

2) Sadar Bernegara dan Berbangsa

Kesadaran berbangsa tercermin dengan selalu menjaga kerukunan antar masyarakat, persatuan dalam membangun Indonesia agar lebih maju lagi, dan kesatuan dalam keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia di mana pun ia berada. Kemudian kesadaran bernegara tercermin dengan menjunjung prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Nilai dalam konsepsi kebangsaan dapat memunculkan kesadaran bernegara dan berbangsa dilihat dari beberapa hal berikut:

- a) Kewaspadaan Nasional;
- b) Wawasan Nusantara;
- c) Dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif;
- d) Ketahanan Nasional.

Munculnya sikap membela negara dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dapat diupayakan melalui pemahaman konsep bangsa Indonesia. Potensi bangsa yaitu dapat berupa persatuan dan pertahanan nasional yang kokoh dan handal untuk menghadapi ancaman yang datang baik dari luar maupun dalam negeri.

3) Ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila

Pancasila dipilih sebagai ideologi yang paling cocok dan berhasil membawa Indonesia sampai sejauh ini. Setelah peristiwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan hampir terpecahnya bangsa Indonesia, namun karena masyarakat memahami arti bela negara, perpecahan tersebut tidak terjadi. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menjadi setia kepada negara Indonesia, faktor pengamalan pancasila bagi kehidupan meliputi:

- a) Pendisiplinan masyarakat;
- b) Pengembangan politik beretika;
- c) Sistem demokrasi; dan
- d) Menumbuhkan masyarakat taat hukum.

4) Jiwa Rela Berkorban demi Bangsa dan Negara

Sejak bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajahan, bukan hanya kekuatan militer yang dapat memenangkan perjuangan Indonesia, tetapi juga keberanian bangsa Indonesia untuk bersatu melawan bersama-sama. Aspek yang perlu dipahami untuk membangun rasa rela berkorban meliputi:

- a) Konsepsi jiwa;
- b) Memiliki nilai daya juang dan semangat yang tinggi;
- c) Sikap penuh tanggung jawab dan beretika;
- d) Bermoral baik dan konstitusi;
- e) Memiliki sikap mendahulukan akan kepentingan Bersama (nasional) di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Rasa percaya diri dapat timbul karena memiliki sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di mana bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat jika bersatu padu pada satu tujuan.

5) Memiliki Kemampuan Dasar Bela Negara

Dalam melakukan aksi bela negara melalui potensi dan kesiapan yang dimiliki dengan profesi dan kemampuannya pada lingkungan masing-masing maupun lingkungan publik yang memang diperlukan adanya peran dan upaya bela negara kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara. Setiap warga negara pada dasarnya mampu untuk membela negara dengan berlandaskan atas nilai dasar bela negara yang tercermin dari perspektif kemampuan diri yang dimiliki yaitu nilai-nilai kepercayaan diri, profesi dan lain-lain yang dikerahkan sebaik mungkin melalui berbagai bentuk tindakan baik yang sederhana hingga yang besar, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang datang untuk merusak nilai-nilai bela negara tersebut. Perilaku bela negara dapat dilakukan melalui aspek demografi, geografi, SDM dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan pertahanan keamanan. Dewasa ini dengan adanya perkembangan IPTEK dan globalisasi yang sangat aktif dan cepat, telah memberikan dampak terhadap berbagai bentuk AGHT yang semakin canggih serta kompleks. Oleh karena itu, sebagai wujud dari bela negara,

tentunya AGHT ini perlu diantisipasi oleh seluruh masyarakat untuk turut andil secara bersama-sama dalam upaya mengantisipasi dan mengatasinya. Diperlukan kesadaran bersama-sama terkait dengan berbagai bentuk AGHT agar upaya bela negara dapat berhasil optimal, sehingga dalam upaya bela negara dapat menjadi gerakan yang lebih efektif secara nasional.

Adapun dalam memahami berbagai bentuk AGHT yang berada pada berbagai keadaan terutama di sekitar lingkungan, maka diperlukan kajian sederhana, hal tersebut dapat dilakukan seperti memperhatikan potensi yang dimiliki disekitar kita salah satunya yaitu kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, dan terkait dengan ancaman faktual maupun ancaman potensial, sehingga terdapat kesamaan sudut pandang dalam aksi bela negara sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Pada dasarnya suatu aksi bela negara yang berlandaskan pemahaman yang sama terkait mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT, hal tersebut dapat menjadikan adanya potensi untuk memunculkan gerakan nasional bela negara dan berguna dalam pengoptimalan dalam membangun ketahanan nasional dan mendorong suksesnya pembangunan nasional.

6) Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Dalam upaya mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur merupakan ambisi bangsa yang mulia, diperlukan upaya dan semangat yang tinggi dan tulus atas nama bela negara demi dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Sikap dan tekad yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Pada dasarnya bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, berdaulat dan berkeadilan, juga berjuang untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan serta mendambakan perdamaian dunia. Berbagai upaya akan dikerahkan terutama menggerakkan generasi-generasi penerus bangsa

untuk memiliki pandangan terbuka terhadap perannya untuk membela negara. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang generasi mudanya bergerak dengan pikiran yang sama dan memiliki rasa persatuan dan solidaritas sehingga akan tumbuh rasa senasib dan sepenanggungan untuk secara bersama-sama memajukan bangsa.

4. Tujuan dan Fungsi Bela Negara

Menurut Dewan Ketahanan Nasional (2018) terdapat beberapa tujuan bela Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Dapat melestarikan budaya bangsa yang beraneka ragam agar tidak hilang ditelan zaman.
- 3) Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara demi mengharumkan nama bangsa dan sebagai wujud cinta tanah air.
- 5) Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara di mata dunia.

Selain kelima tujuan tersebut, terdapat fungsi dari bela negara bela negara menurut Dewan Ketahanan Nasional (2018), di antaranya:

- 1) Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- 2) Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara.
- 4) Bela negara merupakan panggilan sejarah dan tanda nyata bahwa kita menghargai pahlawan yang telah berjuang di era penjajahan.

5. Manfaat Bela Negara

Dewan Ketahanan Nasional (2018) dalam website resminya wantannas.go.id juga menyebutkan terkait beberapa manfaat yang didapatkan dari bela Negara di antaranya:

- 1) Bermanfaat untuk membentuk pribadi dengan sikap disiplin terhadap waktu, aktivitas sehari-hari, dan pengaturan dalam kegiatan lainnya.

- 2) Bermanfaat untuk membentuk jiwa kebersamaan dan rasa solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
- 3) Bela negara dapat membentuk mental dan fisik yang tangguh.
- 4) Bela negara juga dapat menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan menumbuhkan rasa Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri dan posisi masing-masing.
- 5) Bela negara mampu membentuk jiwa pemimpin dalam hal kepemimpinan terhadap diri sendiri maupun pemimpin dalam suatu kelompok.
- 6) Bela negara dapat membentuk keimanan serta ketaqwaan terhadap agama yang dianut oleh seseorang karena sesuai dengan nilai Pancasila.
- 7) Bela negara dapat membentuk pribadi yang berbakti kepada kedua orang tua, juga bangsa, dan Agama.
- 8) Bela negara dapat melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
- 9) Bela negara yang dilakukan dengan sepenuh hati dapat menghilangkan sikap negatif seperti pemalas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin.
- 10) Bela negara juga bermanfaat untuk membentuk perilaku yang jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli terhadap sesama.

6. AGHT dalam Bela Negara

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam daya tarik mulai dari kepemilikan wilayah yang terdiri dari beribu pulau yang di dalamnya terdapat beraneka ragam kekayaan sumber daya baik sumber daya hayati maupun hewani. Indonesia juga merupakan negara maritim yang memiliki wilayah lautan yang luas dan dianugerahi berjuta jenis ikan. Kekayaan Indonesia inilah yang menjadi pemantik bagi negara lain untuk menguasai sebagian wilayah, kekayaan sumber daya alam, bahkan menguasai dari sisi politik. Bentuk penguasaan inilah yang bisa tercipta dalam bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bisa datang dari dalam maupun luar Indonesia. Adanya berbagai jenis ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depannya, yaitu adanya rintangan dalam pengelolaan heterogenitas, tantangan dalam

kompetisi *free trade*, dan tekanan integrasi ekonomi secara regional, sampai pada ancaman dari sisi maritim Indonesia. Tidak hanya ancaman, terdapat pula tantangan dalam hal penguasaan energi dan pangan, kemudian tantangan dalam kondisi kemiskinan, keterbelakangan, sampai ketimpangan.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dikatakan bahwa bela negara menyangkut segala sektor kehidupan dengan rencana aksi terkait sektor pertahanan keamanan hingga sosial budaya. Di dalam Inpres tersebut juga terdapat penegasan terkait yang rinci terkait pentingnya bela negara yang harus diterapkan dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang mulai dari ancaman pada ranah pertahanan keamanan, ancaman dalam pengelolaan kemajemukan, hingga tantangan dalam mengatasi kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat, hal ini dilakukan demi mendirikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kehadiran Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 juga merupakan penegasan kebijakan bahwa bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing (Badan Kesbangpol Provinsi Banten, 2020)

Dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara, kita tentu tidak boleh hanya berpatokan pada bidang pertahanan dan keamanan, wilayah, dan politik saja, akan tetapi juga melingkupi dalam berbagai bidang kehidupan nasional, yang mencakupi hubungan internasional antara Indonesia dengan negara lain, menjaga keutuhan ideologi bangsa, penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, stabilitas ekonomi, sosial budaya, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, hingga IPTEK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Upaya Bela Negara adalah bentuk kesadaran segenap Bangsa dan Warga Negara Indonesia melalui jiwa, kewajiban, dan kehormatan setiap warga negara untuk menghadapi segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku (Badan Kesbangpol Provinsi Banten, 2020).

7. Kepemimpinan dalam Bela Negara

Kepemimpinan adalah sikap maupun tindakan seseorang yang mencerminkan jiwa penuh tanggung jawab dan memiliki pengaruh untuk mengayomi diri sendiri dan orang lain ketika melakukan kegiatan sehari-

hari. Kepemimpinan dalam bela negara merupakan konsep yang berlandaskan atas sikap teladan dalam menginterpretasi diri dari nilai bela negara yang ada yaitu rasa kepada negeri, rela berkorban jika dibutuhkan, kesadaran bernegara dan berbangsa, serta meyakini bahwa Pancasila merupakan pedoman atau ideologi di Indonesia. Nilai-nilai dari bela negara dapat ditunjukkan sebagai warga negara yang taat hukum, hal tersebut yang menentukan kualitas akan kepemimpinan seseorang. Keteladanan mengacu kepada sifat dalam membentuk kualitas kepemimpinan bela negara tersebut, walaupun tidak hanya dengan keteladanan saja tetapi dengan atribut yang lain juga sebagai tanda bahwa jiwa kepemimpinan tersebut telah dibentuk. Newell, (tanpa tahun: 318) menyebutkan bahwa karakter lah yang menjadi faktor penentu pembentuk jiwa kepemimpinan pada Presiden Amerika saat itu, *“character trumps brains – or at least formal education”*. Karakter seseorang lebih menentukan jiwa kepemimpinan dan pendidikan formal seseorang menjadi acuan seseorang berhasil menjadi pemimpin (Badan Kesbangpol Provinsi Banten, 2020).

Seorang pemimpin yang memiliki etika dan integritas moral yang baik dapat menjadi teladan dalam kepemimpinan bela negara. Integritas moral merupakan kebenaran moral yang mendasar yang dipraktekkan melalui hubungan antara ucapan, pikiran, dan tindakan yang tidak mudah tergoyahkan. Menurut Becker (1998) integritas adalah *“is commitment in action to a morally justifiable set of principles and values”*. Dapat diartikan jika integritas merupakan tindakan prinsip dan nilai moral yang konsisten dilakukan untuk membentuk tujuan yang benar. Para anggota kelompok menjadikan pemimpin yang memiliki pendirian yang kuat terhadap tindakan yang dilakukan sebagai teladan mereka, dengan itu misi dan tujuan organisasi dapat dicapai melalui keteladanan pemimpinnya. Sama halnya dengan Becker, Bertens (2007:4) juga menjelaskan tentang integritas. Baginya, integritas adalah tindakan anggota kelompok dalam mengatur aktivitas sehari-hari sebuah prinsip atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perbuatannya yang berpedoman pada nilai moral atau prinsip. Dalam melakukan suatu tindakan, nilai dasar yang menjadi patokan suatu kelompok adalah perpaduan antara nilai ideologi, agama, dan budaya

yang dijadikan sebuah pedoman. Dengan demikian, empat ciri-ciri yang ditampilkan oleh pemimpin berintegritas adalah:

- 1) Memegang prinsip secara kukuh;
- 2) Memegang teguh nilai-nilai moral
- 3) Menjadi contoh yang baik bagi pengikutnya; dan
- 4) Memperjuangkan tujuan organisasinya tanpa mengenal batas.

Dalam perbedaan prinsip dan nilai serta bervariasinya kebudayaan yang berada di masyarakat menyebabkan sifat integritas tersebut dapat bervariasi pula. Sehingga, diharapkan integritas moral dapat memegang kukuh prinsip moral secara umum tanpa adanya intervensi akibat situasi maupun kondisi yang berusaha untuk menggoyahkan prinsip moral dan etika yang sedang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang tidak memiliki integritas dalam kehidupan akan mengutamakan kepentingan pribadi, mudah terbujuk oleh tipuan yang menyesatkan dirinya, dan selalu berputus asa. Berubahnya transformasi politik dan kepemimpinan nasional berimplikasi pada perubahan struktur, kultur, dan praktik perpolitikan. Sistem pemikiran serta perilaku masyarakat pun akan terkena dampak dari perubahan tersebut. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan penggalian konsep, prinsip, dan aktualisasi kepemimpinan bela negara seperti pada masa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pihak asing yang ingin menguasai Indonesia dengan cara mempersatukan kekuatan seluruh bangsa yang merupakan cikal bakal terbentuknya bela negara pada diri setiap warga negara Indonesia (Badan Kesbangpol Provinsi Banten, 2020).

Makna konseptual penyelenggaraan bela negara dapat ditelusuri secara historis, yuridis, dan sosiologis. Secara historis, peran kepemimpinan dalam bela negara dapat dilihat dengan mengkaji sejarah panjang perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperoleh dengan adanya pengorbanan harta, jiwa dan raga dapat dicapai atas dasar cinta tanah air dan bangsa untuk mencapai Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dari segi yuridis, penyelenggaraan bela negara dapat dipahami sebagai pemutakhiran bela negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan hukum lainnya. Memahami bela negara berimplikasi dengan adanya perluasan orientasi kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri bukanlah berorientasi jangka pendek, partisan atau sektoral, tetapi berbentuk kontribusi fungsional warga negara kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan secara sosiologis kepemimpinan bela negara merupakan kontekstualisasi praktik dari nilai-nilai pengalaman bela negara yang selaras dengan perkembangan masyarakat (Badan Kesbangpol Provinsi Banten, 2020).

Dalam menghadapi waktu, nilai dasar tidak boleh berubah selama tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Contoh nyatanya dapat ditemukan pada saat Sumpah Pemuda. Seperti diketahui, Sumpah Pemuda lahir dari janji pemuda yang berlangsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nyatanya, banyak aktivis muda yang tidak bisa berbahasa Indonesia ini. Bahkan ketua sidang, Soegondo, tidak tepat dalam berbahasa Indonesia. Tokoh lain yang tidak bisa berbahasa Indonesia saat itu ialah Sri Soendari (adik Dr. Soetomo). Namun kecintaannya pada Indonesia membuat Sri Soendari rajin belajar, sehingga dua bulan kemudian saat menyampaikan pidato di Kongres Perempuan Indonesia pada Desember 1928, Sri Soendari sudah mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik (Yudi, Latif : 2014). Sebagai pemimpin gerakan perempuan Indonesia, Sri Soendari ingin memobilisasi aktivis perempuan dengan memberi contoh. Dalam konteks mikro, beberapa aktivis mahasiswa menunjukkan kemandiriannya dengan mendanai kegiatan kemahasiswaannya melalui penggalangan dana yang jujur, seperti kantin kejujuran. Di mana mereka menjual makanan dan pembeli mengambil sendiri makanan yang mereka beli serta pembeli juga menaruh uang mereka di tempat yang sudah disediakan. Selain untuk memenuhi kebutuhan organisasi, Dana Usaha (danus) tersebut mulai berkembang karena dipicu oleh kekhawatiran mereka akan maraknya praktik ketidakjujuran dan tergerusnya nilai independensi. Meskipun konteks kepemimpinan telah berubah, nilai-nilai inti yang mendasari kepemimpinan bela negara pun tidak berubah. Penyelenggaraan bela negara berlandaskan pada integritas moral dan etika, yang dapat menjadikan seorang pemimpin tampil sebagai panutan (Badan Kesbangpol Provinsi Banten, 2020).

8. Bentuk Implementasi Bela Negara

Beberapa contoh implementasi bela negara menurut Dewan Ketahanan Nasional (2018) di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kesadaran diri untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah negara lain mengakui budaya Indonesia sebagai miliknya. Melestarikan budaya yang ada dapat dilakukan dengan berbagai cara selain menjaga dan melestarikan agar tidak punah dan direbut negara lain, dapat dengan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia Internasional dengan berbagai kegiatan seperti pameran dan pentas seni.
- 2) Bela negara bagi pelajar, dapat diwujudkan dengan sikap rajin belajar. Sehingga nantinya akan menciptakan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu bersaing, dan pandai menyaring berbagai macam budaya atau pengaruh yang berasal dari pihak asing yang tidak cocok dengan jati diri bangsa. Selain itu pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi yang mampu bertindak secara cerdas dalam menerima informasi, artinya dapat memilah secara baik dan tidak mudah menerima berita bohong (*hoax*) yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam negeri maupun datang dari luar negeri.
- 3) Memiliki sikap patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi dari rasa cinta tanah air dan bela negara. Karena dengan adanya ketaatan pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Masyarakat yang patuh hukum akan membentuk pelaksanaan hukum yang bersih, artinya bersifat adil dan tidak memihak.
- 4) Meninggalkan korupsi, korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lainnya demi mendapatkan kesejahteraan pribadi atau golongan tertentu. Korupsi yang merajalela tidak hanya merugikan sesama masyarakat, juga merugikan negara. Suatu negara yang terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi akan membuat negara lain enggan untuk membuat kerja sama dengan negara tersebut karena adanya krisis kepercayaan, sehingga eksistensi

negara di kancah dunia pun akan mudah diruntuhkan hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang memiliki tujuan untuk mempertahankan kedudukan Indonesia untuk berpartisipasi dalam dunia Internasional. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Tindakan menghindari korupsi tidak hanya dilakukan oleh seorang petinggi atau pemimpin saja, masyarakat seharusnya dapat mengimplementasikan tindakan-tindakan anti korupsi bahkan dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menjadi budaya korupsi.

9. Bela Negara dalam Bidang Pendidikan

Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan merupakan wadah pembekalan ilmu pengetahuan, dan merupakan ladang untuk uji kompetensi melalui pelatihan-pelatihan bersifat praktek, selain itu pendidikan juga merupakan tempat untuk pembentukan karakter, kepribadian, dan kebudayaan dalam bertindak bagi seluruh generasi dalam suatu negara. Generasi muda selaku modal sosial (*social capital*) diharapkan dapat memainkan peran strategis guna mendukung terciptanya kehidupan bangsa dan negara yang aman dan tentram, tentunya harus memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara (Septiana, 2020). Bertolak belakang dengan peran generasi muda yang seharusnya, saat ini golongan pemuda justru berada dalam kondisi yang memperhatikan, di mana tidak sedikit pemuda di Indonesia yang bertindak mengabaikan hak dan kewajibannya dalam membela negara.

Menurut Suseno, F.M. (2010) dalam Septiana (2020), mengungkapkan pendapatnya terkait dengan nasionalisme Indonesia. Menurutnya ancaman yang kini melanda generasi muda saat ini terbagi menjadi dua jenis yaitu antara lain :

- 1) Situasi di mana pemuda Indonesia terpengaruh ke dalam budaya hedonis konsumerisme, yang membuat generasi muda terlena dalam mengejar status sosialnya dan hanya menghambur-hamburkan uang, selain itu generasi muda saat ini juga enggan ikut andil dalam kehidupan bangsa, alias golongan putih (netral) atau apatis hal ini

tentu bukan hal baik karena jika generasi muda tidak ikut andil dalam urusan kenegaraan maka nantinya tidak akan ada penerus bangsa yang peduli dengan negaranya sendiri.

- 2) Situasi dimana mereka mengadopsi ajaran-ajaran radikal-ekstremis. Ajaran-ajaran radikal-ekstremis yang dimaksud adalah fanatisme yang berlebihan pada suatu pandangan. Sikap fanatik ini bisa berupa sifat etnisitas maupun primordialisme dalam taraf yang berlebihan. Akibatnya, dapat menyimpulkan berbagai hal negatif lainnya seperti tawuran antarsuporter sepakbola, tawuran antar pelajar. (Septiana, 2020).

Tindakan negatif yang dilakukan oleh sebagian pemuda tersebut mengindikasikan bahwa kini sudah banyak generasi muda yang mengabaikan peran dan kewajibannya dalam bela negara. Kurangnya kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan senantiasa menjunjung nilai-nilai nasionalisme merupakan penyebab hal ini semakin merajalela (Septiana, 2020). Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan strategis demi menumbuhkembangkan kesadaran bagi warga negara terutama generasi muda ini, salah satunya adalah melalui pendidikan. Sebagai salah satu langkah formal yang ditempuh oleh pemerintah, melalui jalur pendidikan dilakukan berbagai serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan kurikulum yang telah ditetapkan (Septiana, 2020).

Pendidikan diselenggarakan dalam berbagai tingkatan satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar seperti SD/MI/Sederajat, pendidikan menengah pertama seperti SMP/MTS/Sederajat, pendidikan menengah atas yakni SMA/SMK/MA/Sederajat, dan pendidikan tinggi. Sarana yang paling efektif untuk mentransformasikan nilai-nilai (*value transform*) sosial kultural bangsa Indonesia adalah melalui pendidikan, dengan landasan filosofis keilmuan yang sistematis dan terarah kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai langkah konkret untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut, dalam satuan pendidikan dikembangkan berbagai disiplin ilmu dalam bentuk mata pelajaran bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia (Septiana, 2020).

Menurut Kementerian Pertahanan (2016), pendidikan wadah yang paling tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai bela negara melalui proses transmisi kebudayaan. Di masa pendidikan positivisme yang lampau, siswa diposisikan sebagai pihak yang menerima pelajaran yang sudah baku dari guru atau otoritas pendidikan secara utuh. Siswa menjadi sulit untuk aktif dan mandiri karena keadaan pembelajaran yang terbatas. Pada masa pendidikan konstruktif saat ini, pendekatan pendidikan bela negara telah berubah. Sumber informasi tidak lagi terbatas pada apa yang diberikan para pengajar, artinya para siswa dapat dengan bebas mengakses berbagai jenis informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber informasi tersebut dapat melalui internet, yang mungkin sebelumnya tidak diperhatikan oleh pengajar. Adapun dampak positifnya adalah para siswa dapat belajar dengan aktif dan cerdas, bahkan mungkin mereka akan memperoleh informasi yang lebih kaya daripada gurunya. Selain dampak positif, namun ada pula dampak negatif dari globalisasi teknologi.

Fakta bahwa mendapatkan informasi bagi para pelajar ini memang benar menambah wawasan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mendapat informasi yang luas karena internet membuat ilmu pengetahuan menjadi tak terbatas artinya kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dari negara manapun. Oleh karena itu, banyak gagasan baru yang berasal dari luar negeri, yang mungkin saja bertentangan atau tidak sesuai dengan materi yang dipelajari di sekolah. Generasi muda saat ini cenderung lebih sadar akan dunia global dibandingkan dengan sadar akan nasionalisme negaranya sendiri, bahkan bisa cenderung lebih mengagumi budaya negara lain sehingga menghilangkan rasa cinta tanah air yang merupakan salah satu dasar dari sikap kesadaran siswa untuk bela negara. Menurut Kementerian Pertahanan (2016), sebagai konsekuensi dari hal tersebut, pemerintah membutuhkan strategi pendidikan tentang kesadaran kebangsaan yang jauh lebih baru. Strategi baru ini seharusnya dapat mengakomodasikan berbagai perubahan baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global. Strategi pendidikan yang kognitif nampaknya harus dikaji kembali karena hanya *output* yang akan dihasilkan hanyalah “pengetahuan” tentang kebangsaan. Dibutuhkan pendekatan terkait pendidikan perilaku dan tindakan yang harus diposisikan prioritas, artinya tidak hanya

mementingkan pembekalan ilmu belaka melainkan juga berfokus pada pembentukan sikap dan perilaku yang mampu mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. FAKTOR PENGHAMBAT BELA NEGARA DI DUNIA PENDIDIKAN

Melalui pendidikan kesadaran akan bela negara seharusnya dapat bertumbuh dalam diri setiap individu, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah sebagai tempat penerus generasi bangsa ini untuk mendapatkan ilmu dan termotivasi untuk memiliki rasa cinta tanah air dan rasa bangga menjadi seorang berkebangsaan Indonesia. Adapun motivasi pada setiap warga negara untuk dapat turut andil dalam membela tanah air dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti melalui pengalaman sejarah perjuangan terdahulu oleh para pahlawan, mempelajari keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, mengetahui kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu melalui dunia pendidikan ilmu terkait hal tersebut akan didapatkan oleh masyarakat. Peran pendidikan sangat penting dalam upaya menumbuhkan sikap bela negara terhadap masyarakat di Indonesia, di mana pendidikan merupakan salah satu instrumen dalam memupuk dan membangun kepribadian berbangsa, memperkuat identitas nasional, dan sebagai pondasi untuk jati diri berbangsa (Kadi & Awwaliyah, 2017).

Seiring berkembangnya zaman melalui proses berjalannya waktu hingga saat ini ternyata masih terdapat banyaknya ancaman terhadap bangsa ini di mana bukan hanya ancaman senjata saja akan tetapi rasa khawatir akan jaminan kehidupan sehari-hari, kemiskinan, ketertinggalan antara satu daerah dengan daerah lain sehingga masih adanya ketimpangan baik dalam hal pendidikan, sosial, ekonomi maupun yang lainnya, masalah kesehatan, terbatasnya jumlah lapangan kerja, tindakan tidak etis para penguasa, banyaknya kasus kriminalitas, isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), aksi radikalisme dan terorisme, maraknya penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan disintegrasi atau perpecahan nasional serta penghambat masa depan generasi muda. Oleh karena itu, melalui rasa semangat juang

bela negara adanya berbagai ancaman tersebut dapat teratasi, karena memiliki rasa cinta tanah air dan menjunjung tinggi bangsa, tentunya salah satu cara untuk dapat membangun bela negara tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan sebagai pondasi dalam berbangsa dan bernegara selain itu juga pendidikan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting dan modal dasar dalam upaya kemajuan bangsa. Kondisi di mana masih terdapat kesenjangan dalam pendidikan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu permasalahan masih rendahnya kualitas pendidikan. Kesenjangan pendidikan tersebut terjadi di berbagai hal yaitu seperti pendidikan sumber daya tenaga pendidik yang tidak dapat berlangsung dengan efektif dan sarana prasarana (Nasution, 2014).

Permasalahan mutu pendidikan, di mana berdasarkan komponen eksternal terdiri dari belum memadainya ketersediaan tenaga kependidikan baik secara kuantitas, kualitas, dan juga kesejahteraannya, kemudian terkait dengan sarana dan prasarana belajar yang belum memadai atau belum optimal dalam penyediaannya, adapun pendanaan untuk pendidikan yang belum dapat menunjang dalam peningkatan mutu pembelajaran, selain itu proses selama berlangsungnya pembelajaran masih belum efektif dan efisien (Suryana, 2020). Adapun kondisi pendidikan di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Sekolah Berdasarkan Tingkat Sekolah Tiap Provinsi, Tahun 2019/2020

PROVINSI	Tingkat Sekolah			
	SD	SMP	SMA	SMK
Aceh	3429	1171	532	217
Sumatera Utara	9775	2625	1088	1000
Sumatera Barat	4233	827	332	216
Riau	3727	1196	449	299
Jambi	2446	679	235	178
Sumatera Selatan	4685	1361	594	305

Bengkulu	1388	427	143	104
Lampung	4729	1381	503	482
Kep. Bangka Belitung	816	215	70	58
Kep. Riau	962	299	449	113
Dki Jakarta	2526	1135	505	589
Jawa Barat	19718	5448	1663	2943
Jawa Tengah	19010	3357	867	1588
Di Yogyakarta	1844	443	163	220
Jawa Timur	19285	4784	1542	2118
Banten	4634	1501	571	731
Bali	2452	422	161	172
Nusa Tenggara Barat	3223	958	333	325
Nusa Tenggara Timur	5147	1741	553	292
Kalimantan Barat	4426	1323	441	223
Kalimantan Tengah	2643	836	240	137
Kalimantan Selatan	2935	614	195	125
Kalimantan Timur	1899	657	227	222
Kalimantan Utara	478	180	61	29
Sulawesi Utara	2236	724	224	187

PROVINSI	Tingkat Sekolah			
	SD	SMP	SMA	SMK
Sulawesi Tengah	2907	847	224	187
Sulawesi Selatan	6465	1680	579	441
Sulawesi Tenggara	2320	765	297	162
Gorontalo	944	338	66	57
Sulawesi Barat	1329	373	88	137
Maluku	1791	658	282	113
Maluku Utara	1313	493	208	139

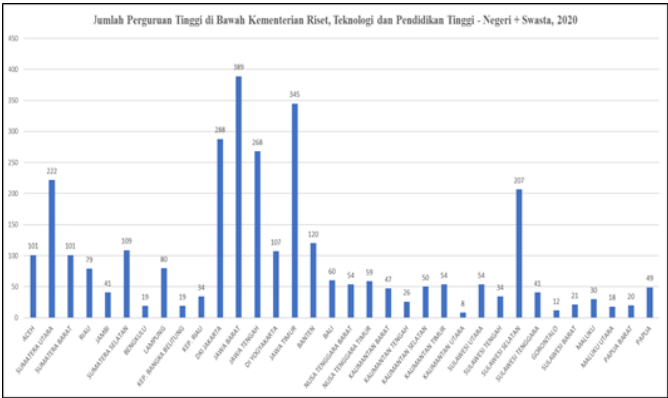
Papua Barat	1071	310	122	54
Papua	2586	709	238	138
Indonesia	149435	40559	13944	14301

Sumber: Data Statistik Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan(2019/2020).

Berdasarkan data persebaran jumlah sekolah berdasarkan tingkat sekolah menurut provinsi menunjukkan bahwa jumlah sekolah dengan tingkat sekolah dasar terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 19.781 sekolah, kemudian Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 19.285 sekolah, dan Jawa Tengah dengan jumlah 19010 sekolah. Adapun provinsi dengan jumlah sekolah paling sedikit di antara 33 provinsi lainnya di Indonesia yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 478 sekolah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah 816 sekolah, dan Provinsi Gorontalo dengan jumlah 944 sekolah. Kemudian pada tingkat SMP provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 5.344 sekolah, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 4.784 sekolah, dan Jawa Tengah dengan jumlah 3.347 sekolah. Adapun provinsi dengan jumlah SMP paling sedikit yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 180 sekolah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 215 sekolah, dan Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah 299 sekolah. Selanjutnya pada tingkat SMA, provinsi yang memiliki jumlah sekolah terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 1.663 sekolah, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 1.542, dan Sumatera Utara sebanyak 1.088 sekolah. Adapun provinsi dengan jumlah SMA paling sedikit yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 61 sekolah, Provinsi Gorontalo sebanyak 66 sekolah, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 70 sekolah. Selanjutnya, untuk tingkat SMK, provinsi dengan jumlah sekolah tertinggi yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 2.943 sekolah, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 2.118, dan Sumatera Utara sebanyak 1.000 sekolah. Adapun provinsi dengan jumlah SMK terendah yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 29 sekolah, Provinsi Gorontalo sebanyak 57 sekolah, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah 58 sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat pada setiap tingkat pendidikan mulai dari SD hingga SMA/SMK merupakan provinsi dengan jumlah sekolah tertinggi. Kemudian provinsi dengan jumlah sekolah terendah yaitu pada Provinsi Kalimantan Utara. Adanya ketimpangan jumlah sekolah pada setiap provinsi dapat terlihat pada data tersebut, di mana terdapat beberapa provinsi yang memiliki jumlah sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK yang cukup terbilang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya seperti di Pulau Jawa, sebagaimana yang diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian, pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan sosial ekonomi, sehingga hal ini yang menjadi pendukung banyaknya jumlah sekolah yang ada di Pulau Jawa khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selain itu terdapat pula data mengenai persebaran Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia berdasarkan provinsi berikut adalah data terkait:

Grafik 4. 1 Jumlah Perguruan Tinggi, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi, 2020

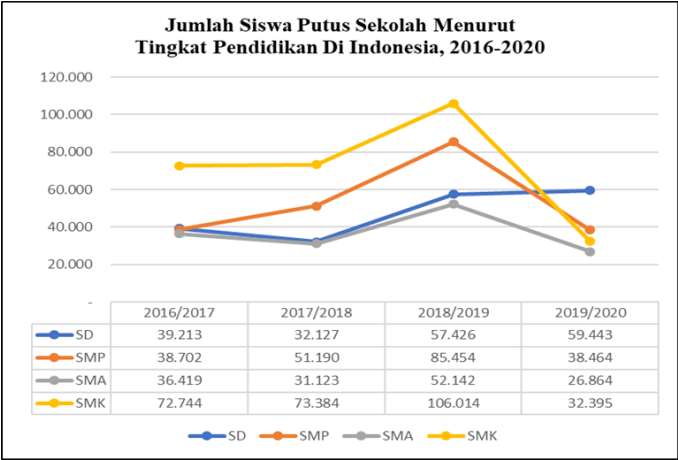


Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa persebaran jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta dengan jumlah terbanyak yaitu berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 389 perguruan tinggi dan paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Utara yaitu hanya sebanyak 8 (delapan) perguruan tinggi. Selain itu berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa adanya ketimpangan terkait dengan persebaran jumlah perguruan tinggi di mana Pulau Jawa merupakan pulau terbanyak jumlah perguruan tingginya dibandingkan dengan pulau-pulau lain, hal ini sama dengan kondisi persebaran jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK.

Oleh karena itu, ketimpangan dalam jumlah sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi gambaran secara umum terkait dengan masih adanya masalah ketimpangan dalam bidang pendidikan di Indonesia.

Grafik 4. 2 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di Indonesia Tahun 2016-2020

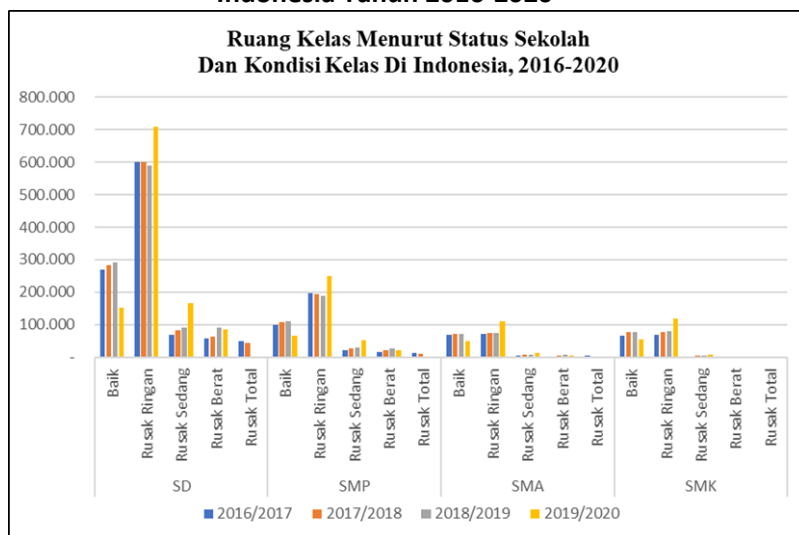


Sumber: Data Statistik Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan(2016-2020).

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMK merupakan yang tertinggi di mana memiliki rata-rata dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 71.134 siswa SMK yang putus sekolah. Selain itu tingkat SMP menjadi posisi kedua yaitu sebesar 54.453 siswa SMP putus sekolah. Kemudian untuk jenjang SMA yaitu sebesar 36.637 siswa SMA putus sekolah, dan terendah yaitu pada jenjang

SD yaitu sebesar 47.052 siswa SD yang putus sekolah. Siswa SMK merupakan siswa yang memang dipersiapkan dalam dunia kerja karena mengutamakan praktik vokasi sehingga banyak dari lulusan SMK yang sudah memiliki keahlian di bidangnya. Tentunya hal tersebut dapat menjadi permasalahan apabila tidak dapat menyelesaikan sekolahnya di jenjang SMK maka akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Bukan hanya pada tingkat SMK, namun pada tingkat SD hingga SMA dapat menjadi permasalahan ketika para siswa tidak dapat menyelesaikan sekolahnya atau putus sekolah di mana akan berdampak terhadap pekerjaannya yang kemudian dapat menjadi permasalahan ekonomi hingga masalah sosial sehingga hal ini dapat menghambat peran siswa dalam bela negara.

Grafik 4. 3 Ruang Kelas Menurut Status Sekolah Dan Kondisi Kelas Di Indonesia Tahun 2016-2020



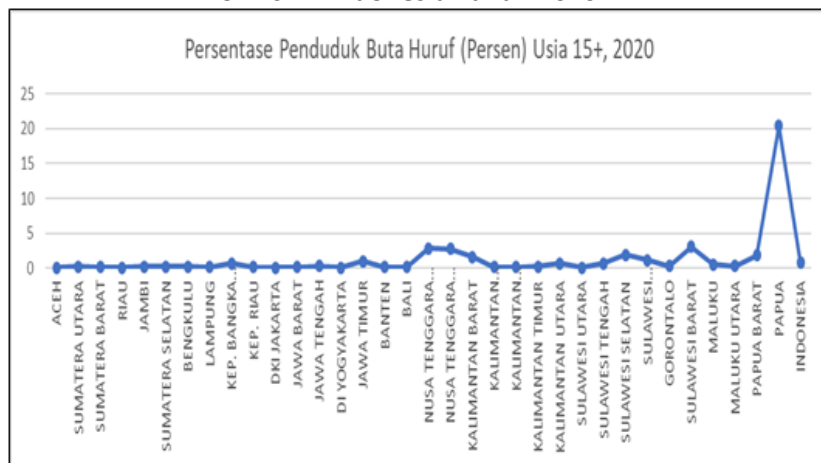
Sumber: Data Statistik Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (2016-2020).

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa ruang kelas dengan kondisi rusak ringan tertinggi berada pada tingkat SD, di mana pada tahun 2019/2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 122.085 jumlah sekolah SD yang mengalami rusak ringan, kemudian tingkat SMP menjadi posisi kedua dan pada tahun

2019/2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat juga yaitu sebanyak 59.082 jumlah sekolah SMP yang mengalami kerusakan. Adapun terjadi peningkatan angka kerusakan ringan ruang kelas pada tingkat SMA dan SMK pada tahun 2019/2020 yang masing-masing sebanyak 35.052 dan 40.136 jumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan. Selain itu, kondisi ruang kelas baik mengalami penurunan baik pada tingkat SD hingga SMA dan SMK pada tahun 2019/2020 mengalami penurunan bersamaan dengan peningkatan ruang kelas dengan kerusakan ringan. Adapun ruang kelas dengan kondisi rusak berat yang mengalami peningkatan hanya pada tingkat sekolah SD pada tahun 2019/2020 dibandingkan tahun sebelumnya dan untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK mengalami penurunan angka kondisi ruang kelas yang rusak berat. Selain itu untuk kondisi ruang kelas dengan rusak total untuk semua tingkat pendidikan mengalami penurunan yang sangat pesat pada tahun 2019/2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan terkait data yang di publish oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, maka perlu diperhatikan adanya peningkatan kondisi kelas dengan kerusakan ringan pada tingkat pendidikan mulai dari SD hingga SMA dan SMK untuk dapat segera mendapat perbaikan, sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya ruang kelas dengan kondisi baik akan dapat membantu mendorong perubahan dalam kualitas fasilitas pendidikan yang nantinya dapat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan akan pendidikan terhadap para siswa dan siswi agar dapat menuntut ilmu dengan fasilitas yang memadai. Adanya perbaikan dalam fasilitas pendidikan juga diharapkan dapat mendorong rasa semangat para siswa dan siswi untuk dapat belajar dengan suasana dan kondisi yang layak, sehingga hal ini dapat sebagai upaya dalam penanaman jiwa bela negara.

Grafik 4. 4 Persentase Penduduk Buta Huruf Usia 15+ Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2020



Sumber: Data Statistik Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (2016-2020).

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan di Indonesia berdasarkan proposi buta huruf usia 15 tahun ke atas. Data menunjukkan bahwa tingkat buta huruf usia 15 tahun ke atas tertinggi berada pada Provinsi Papua yaitu sebesar 20.38%, kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 3.08%, Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 2.82%, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 2.73%. Sedangkan Provinsi Aceh dan D.I. Yogyakarta memiliki angka buta huruf usia 15 tahun ke atas yang paling rendah yaitu masing-masing sebesar 0.07% dan 0.06%. Tentunya angka menunjukkan sangat terlihat perbedaan dengan gap yang sangat jauh.

Permasalahan terkait buta huruf ini, perlu dilakukan upaya untuk menurunkan angka buta huruf ini, terutama pada provinsi-provinsi yang memiliki tingkat buta huruf tertinggi. Hal ini dilakukan agar dapat menurunkan angka kesenjangan pula dalam pendidikan. Upaya untuk menurunkan angka buta huruf ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan, yang tentunya harus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, karena setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap

jiwa bela negara yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pada usia 15 tahun ke atas yang masih harus menempuh pendidikan.

Penjelasan di atas merupakan beberapa permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia, di mana hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap sikap bela negara pada setiap individu khususnya para pelajar sebagai penerus generasi bangsa. Sehingga dengan adanya berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia maka akan menjadi permasalahan bela negara, yang mana lemahnya pendidikan akan mempengaruhi penurunan sikap bela negara. Melalui pendidikan para masyarakat akan belajar terkait dengan cara berbangsa dan bernegara tentunya dengan menjadi manusia yang bermoral dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam lemahnya jiwa bela negara hal tersebut dapat terjadi karena tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Adapun berbagai permasalahan dalam bela negara di Indonesia, yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Kasus *Bullying* Pelajar

Menurut Kemenpa dalam website resminya www.kemennpppa.go.id dijelaskan terkait definisi *Bullying* itu sendiri. *Bullying* merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja baik oleh satu orang maupun sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, perilaku tersebut bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Terdapat banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual, akan tetapi dalam hal ini dibatasi dalam konteks *school bullying*. Dalam website resmi Kemenpa juga dijelaskan terkait *School Bullying* menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) dalam (Masdin, 2013) mendefinisikan *school bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa/siswi lainnya yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Berdasarkan data pada PISA 2018 Results (Volume III): *What School Life Means for Students' Lives*, Indonesia menempati posisi ke 5 (lima) tertinggi dengan Persentase siswa yang melaporkan menjadi korban dari jenis apapun tindakan intimidasi setidaknya beberapa kali sebulan dari 42 negara dengan angka 41% , tentunya hal ini dapat menjadi contoh dari

permasalahan dalam sikap bela negara, di mana perilaku intimidasi merupakan bentuk perilaku yang tidak mencerminkan sikap bela negara. Tindakan intimidasi merupakan perilaku yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila, di mana seharusnya melalui pendidikan para pelajar dapat memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Berikut adalah data PISA 2018 *Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives* :

Tabel 4. 2 Snapshot of School Climate (Cuplikan Iklim Sekolah)

	Percentage of students who reported being victims of any type of bullying act at least a few times a month	Difference between frequently and not frequently bullied students who reported feeling sometimes or always sad, after accounting for student and school characteristics	Percentage of students who agreed or strongly agreed or strongly that it is a wrong thing to join in bullying	Difference in the index of sense of belonging between advantaged and disadvantaged students	Difference in the percentage of student's parents who discussed their child's progress with a teacher on their own initiative between advantaged and disadvantaged school
	%	%dif.	%	Dif.	%dif.
Albania	25	7	86	0.36	13
Argentina	32	18	79	0.41	4
Baku (Azerbaijan)	36	2	76	0.09	-2
Belarus	19	17	76	0.18	11
Bosnia and Herzegovina	25	13	86	0.19	5

na					
Brazil	29	12	83	0.30	12
Brunei Darussalam	50	8	87	0.10	14
B-S-J-Z (China)	18	10	96	0.29	17
Bulgaria	34	16	77	0.33	18
Costa Rica	24	18	86	0.26	16
Croatia	18	16	89	0.14	2
Cyprus	34	12	79	0.15	9
Dominican Republic	44	12	74	0.33	15
Georgia	24	15	80	0.24	4
Hong Kong (China)	29	10	91	0.13	19
Indonesia	41	4	57	0.07	22
Jordan	38	6	70	0.27	16
Kazakhstan	32	10	72	0.17	5
Kosovo	32	9	76	0.22	17
Lebanon	m	m	m	m	8
Macao (China)	27	18	93	0.19	6
Malaysia	36	13	84	0.16	7

	Percentage of students who reported being victims of any type of bullying act at least a few times a month	Difference between frequently and not frequently bullied students who reported feeling sometimes or always sad, after accounting for student and	Percentage of students who agreed or strongly agreed or strongly that it is a wrong thing to join in bullying	Difference in the index of sense of belonging between advantaged and disadvantaged students	Difference in the percentage of student's parents who discussed their child's progress with a teacher on their own initiative between advantaged
--	--	--	---	---	--

		school characteristics			and disadvantages school
	%	%dif.	%	Dif.	%dif.
Moldova	24	13	74	0.33	5
Montenegro	25	16	83	0.11	7
Morocco	44	9	67	0.27	10
North Macedonia	m	m	m	m	m
Panama	33	10	74	0.27	3
Peru	22	13	81	0.25	12
Philippines	65	6	79	0.21	9
Qatar	33	13	79	0.24	26
Romania	34	17	75	0.34	12
Russia	37	17	84	0.16	11

Saudi Arabia	3 0	12	7 1	0.32	14
Serbia	2 6	20	8 3	0.22	15
Singapore	2 6	m	9 6	0.23	21
Chinese Taipei	1 3	20	9 2	0.23	17
Thailand	2 7	8	7 2	0.20	11
Ukraine	2 2	18	7 8	0.26	17
United Arab Emirates	3 1	17	7 7	0.16	8
Uruguay	2 6	14	8 4	0.52	0
Viet Nam	2 7	m	8 2	0.07	10

Sumber: OECD PISA Results(2018).

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku *Bullying* menurut (Ariesto, 2009) dalam (Zakiyah, Humaedi, & Santoso, 2017) yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Keluarga

Faktor keluarga dalam membentuk karakter anak sangat penting. Banyak dari mereka para pelaku *bullying* memiliki permasalahan dalam keluarganya, seperti misalnya orang tua yang menghukum anak secara berlebihan, atau situasi serta kondisi di rumah yang tidak baik seperti agresi, permusuhan, hingga stres. Keluarga merupakan tempat anak akan mengamati, mempelajari, hingga menirukan konflik-konflik yang terjadi pada orang tua terutama tindak kekerasan yang pada akhirnya dapat membentuk perilaku *bullying* anak ketika berada di luar rumah dan melampiaskan terhadap teman-temannya.

2) Faktor Sekolah

Faktor sekolah juga menjadi sangat penting dalam membentuk karakter anak selain melalui peran keluarga. Adapun terdapat

beberapa sekolah yang mungkin sering kali mengabaikan adanya perilaku *bullying*. Oleh sebab itu, perilaku *bullying* menjadi berkembang di lingkungan sekolah dan hal tersebut sangat berdampak negatif bagi para siswa.

3) Faktor Kelompok Teman Sebaya

Adanya pengaruh baik positif maupun negatif di kalangan kelompok teman sebaya juga dapat menjadi pembentuk karakter anak. Perilaku *bullying* ini sebagai salah satu contoh faktor negatif adanya pengaruh dari kelompok teman sebaya. Adanya interaksi dalam sekolah maupun dengan teman di sekitar rumah anak tersebut, sering kali mendorong adanya perilaku *bullying*. Terdapat beberapa anak melakukan *bullying* karena ingin berusaha untuk membuktikan bahwa mereka dapat bergabung dengan kelompok tertentu yang dianggap kuat dan dapat memperlakukan orang lain atau kelompok lain dengan semena-mena.

4) Faktor Kondisi Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dapat memberi pengaruh yang berasal dari eksternal terhadap perilaku anak. Sering kali faktor lingkungan sosial ini menjadi penyebab timbulnya perilaku *bullying*, di mana terdapat faktor kemiskinan yang dapat menyebabkan tindakan *bullying*. Sebagai contoh yaitu adanya pemalakan antar siswa.

5) Faktor Tayangan Televisi Dan Media Cetak

Faktor tayangan televisi dan media cetak juga menjadi sangat rentan sebagai salah satu pembentuk perilaku *bullying*. Adanya tayangan-tayangan baik di televisi maupun di media cetak yang menampilkan pola perilaku *bullying* sehingga hal ini dapat menyebabkan anak menirukan hal serupa.

2. Kasus Kekerasan Antar Pelajar

Kasus kekerasan antar pelajar sering kali terjadi hingga saat ini yaitu seperti tawuran antar pelajar dan kekerasan dengan bentuk *bullying*. Menurut Rais (1887) dalam (Amani, Nainggolan, Yudhani, Dhawy, & Bororoh, 2015).menyebutkan bahwa tawuran merupakan bentuk perkelahian yang dilakukan oleh antar pelajar di mana perbuatan tersebut sangat tercela yang dilakukan oleh baik seorang maupun kelompok terhadap pelajar lainnya. Tawuran merupakan sebuah kegiatan dalam

berinteraksi yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak serta orang lain, antar pihak tersebut melakukan kekerasan dengan menyakiti satu sama lain secara fisik baik tanpa alat bantuan maupun dengan alat bantuan.

Tabel 4. 3 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Data Di atas

Kasus Perlindungan Anak	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Korban Tawuran Pelajar	55	57	56	73	9
Anak Pelaku Tawuran Pelajar	76	74	88	84	7
Anak Korban Kekerasan diSekolah (Bullying)	122	129	107	46	76
Anak Pelaku Kekerasan diSekolah (Bullying)	131	116	127	51	12

Sumber: KPAI (2020).

Berdasarkan data di atas dapat menunjukkan bahwa adanya pengaduan kasus anak berdasarkan klaster pendidikan. Anak sebagai pelaku tawuran pelajar tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2 kasus pengaduan, kemudian pada tahun 2018 meningkat kembali yaitu sebanyak 14 kasus dan mengalami penurunan kembali hingga tahun 2020 tercatat terdapat 7 kasus pengaduan tentunya tahun tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Adapun anak sebagai korban tawuran pelajar yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2019. Selain itu maraknya kasus *bullying* di sekolah juga sangat memprihatinkan dapat terlihat bahwa kasus anak pelaku *bullying* lebih banyak jika dibandingkan dengan anak pelaku tawuran, di mana pada tahun 2018 terjadi

peningkatan sebanyak 11 kasus pengaduan kepada KPAI. Tercatat sebanyak 202 anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat aksi tawuran selama rentang dua tahun terakhir, di mana terdapat 74 anak sebagai pemilik senjata tajam (Hendrian, 2018). Banyaknya kasus tawuran dan *bullying* yang terjadi di Indonesia dapat menjadi salah satu contoh adanya perilaku tidak bermoral yang dilakukan oleh para pelajar, perilaku tersebut sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kasus dalam kekerasan antar pelajar ini dapat menjadi salah satu contoh adanya penyimpangan dalam bela negara, di mana seharusnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini harus adanya integrasi satu sama lain sehingga dengan adanya kasus-kasus seperti tawuran pelajar dan *bullying* ini dapat menjadi pemicu kondisi disintegrasi sosial.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi perilaku kekerasan antar pelajar yaitu tawuran. Terdapat dua kategori yang menjadi faktor tersebut yaitu faktor internal yang berupa faktor dari segi psikologis dan faktor eksternal, berikut adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya tawuran antar pelajar (Basri, 2015):

1) Krisis identitas

Faktor krisis identitas ini dapat ditunjukkan dengan ketidakmampuan para pelajar sebagai remaja selama proses pencarian identitas dirinya. Proses tersebut dapat berupa pengalaman terhadap nilai yang nantinya akan memberikan warna dan berdampak bagi kepribadiannya. Apabila orang tersebut tidak mampu untuk menginternalisasi nilai positif ke dalam dirinya dan juga tidak mampu untuk mengidentifikasi figur yang ideal maka hal tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya penyimpangan dalam berperilaku. Selama menjalani kesehariannya para remaja (pelajar) akan dipengaruhi oleh orang dewasa yaitu orang tua, guru, maupun lingkungan sekitarnya di mana melalui aturan normatif yang mengekang kebebasannya. Para remaja tersebut sering kali dituntut untuk memahami segala bentuk tatanan yang baru dalam hidup mereka daripada diberikan kebebasan dalam berpikir kritis atas tatanan tersebut. Para remaja akan mengalami keterancaman eksistensial yaitu adanya keberadaan mereka tidak diakui sebagai selakunya manusia yang sedang beranjak dewasa dan merasa menjadi kunci kesalahan di mata orang dewasa. Kondisi

tersebut yang dapat menyebabkan krisis identitas di mana para remaja tidak memiliki peran di antara orang dewasa.

2) Kontrol diri yang lemah

Banyaknya remaja yang kurang mampu untuk mengendalikan diri nya, oleh sebab itu menjadi sulit untuk menunjukkan sikap serta perilaku yang adaptif sesuai dengan pengetahuan atau tidak dapat terintegrasi dengan baik. Adanya ketidakstabilan dalam mengendalikan emosi maka para remaja menjadi lebih mudah marah, prustasi, dan bahkan tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya, hal tersebut yang menyebabkan para remaja sering kali melarikan diri dan menyalahkan orang lain dalam menghadapi masalahnya. Kebanyakan para remaja hanya ingin cara instan atau singkat dalam memecahkan permasalahan, yaitu salah satunya melalui tawuran.

3) Tidak mampu melakukan penyesuaian diri

Para remaja dalam hal ini pelajar yang sering kali melakukan tawuran pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks yaitu pandangan yang beraneka ragam, ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, para remaja sering kali lebih tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah tanpa berpikir terlebih dahulu dampak yang akan terjadi.

3. Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di kalangan Pelajar/Mahasiswa

Selain kasus-kasus kekerasan antar pelajar, adapun ancaman terhadap generasi penerus bangsa yaitu penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil Indonesia Drugs Report 2019 disebutkan bahwa angka prevalensi pengguna narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 3.2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang pengguna narkoba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aminah & Athori, 2019) narkoba atau narkoba menjadi sebuah ancaman yang besar bagi ketahanan NKRI dan berefek buruk bagi generasi muda milenial yaitu anak-anak muda dan memiliki rentang usia 15-35 tahun. Efek dari banyaknya remaja yang masuk dalam lingkaran narkoba ini akan membuat kelangsungan negara dalam upaya menjadi negara yang makmur dan sejahtera akan terhambat dan sulit dicapai. Terlebih penanganan dari bahaya narkoba ini masih ditugaskan dan ditekankan pada BNN. Di mana

dalam pelaksanaannya ini BNN masih menggunakan model ceramah dan sosialisasi sehingga hal ini menunjukkan dalam pelaksanaannya ini belum sistemik, terstruktur dan masif. Menjaga pertahanan negara merupakan tugas bagi seluruh masyarakat. Perlu adanya kewaspadaan yang tinggi kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat. Kewaspadaan nasional merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk bisa mendeteksi, mengantisipasi, dan melakukan aksi pencegahan dari berbagai sifat dan bentuk ancaman terhadap NKRI.

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba. Menurut (BNN, 2019) narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis di mana dapat menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan daya rangsang. Sementara pengertian narkoba menurut UU narkoba pasal 1 ayat 1 ialah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta bisa menyebabkan efek kecanduan.

Narkotika berdasarkan undang-undang tentang narkotika terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan satu ini memiliki tingkat bahaya yang tinggi jika dikonsumsi, hal ini disebabkan memiliki risiko kecanduan yang tinggi. Adapun kegunaan dari narkotika golongan satu ini hanya dapat dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh dari narkotika golongan satu ini adalah ganja, opium, heroin, jicing, katinin, ekstasi/MDMA dan tanaman kokain.

2) Narkotika Golongan 2

Narkotika golongan dua ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan, namun narkotika ini bisa dimanfaatkan di bidang kedokteran. Penggunaan narkotika golongan dua di bidang kedokteran ini tidak bisa digunakan sembarangan, karena ini harus sesuai dengan resep dokter terlebih ini digunakan sebagai pilihan terakhir. Adapun jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa macam di antara narkotika golongan dua ini yaitu morfin, petidin, fentanyl dan metadon.

3) Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan tiga ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan serta untuk terapi. Contoh dari narkotika golongan tiga ini adalah kodein, etylmorfin, nikokodina, buprenorfin, propiram, polkodina, dan lain sebagainya.

Dampak dari adanya penyalahgunaan narkoba sangatlah buruk bagi setiap pemakainya. Maraknya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat menjadi permasalahan yang sangat meresahkan. Ajakan pemerintah dalam mengkampanyekan dan melarang penggunaan narkoba sangat diperlukan. Menurut (BNN, 2019) bahaya dari penyalahgunaan narkoba di antaranya ialah:

1) Dehidrasi

Penggunaan narkotika bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit dalam tubuh berkurang, akibatnya badan pun kekurangan cairan. Jika ini terjadi terus menerus, maka ini bisa menyebabkan tubuh menjadi kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan sesak pada bagian dada. Di mana jika ini terjadi jangka panjang akan menyebabkan kerusakan otak.

2) Halusinasi

Penggunaan narkoba seperti ganja bisa menyebabkan efek terjadinya halusinasi. Jika dosis yang masuk dalam tubuh berlebih maka bisa menyebabkan muntah, rasa takut yang berlebih, mual, serta gangguan kecemasan. Jika terjadi dalam waktu yang lama bisa menyebabkan gangguan mental, kecemasan terus-menerus, dan depresi.

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran

Penggunaan narkoba secara berlebihan akan membuat tubuh menjadi terlalu rileks sehingga akan membuat kesadaran menurun drastis. Dengan hilangnya kesadaran tersebut bisa membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku, dan parahnya lagi bisa membuat terjadinya kehilangan ingatan.

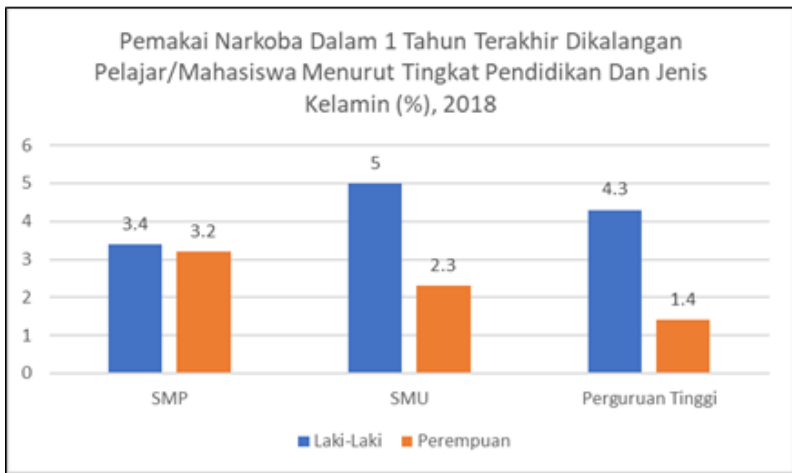
4) Gangguan Kualitas Hidup

Penggunaan narkoba tentunya akan mengganggu kualitas hidup seseorang, seperti kehilangan konsentrasi saat bekerja, mengalami kesulitan *finansial*, hingga bisa menyebabkan orang tersebut masuk ke jeruji besi.

5) Kematian

Penggunaan narkoba dengan dosis yang tinggi bisa menyebabkan seseorang tersebut overdosis. Penggunaan narkoba seperti sabu-sabu, opium, dan kokain bisa membuat tubuh mengalami kejang-kejang dan jika di biarkan begitu saja akan menyebabkan kematian.

Grafik 4. 5. Pemakai Narkoba Dalam 1 Tahun Terakhir Di Kalangan Pelajar/Mahasiswa Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin (%) Tahun 2018



Sumber : Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba(2018).

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pemakai narkoba dalam setahun terakhir terbanyak pada kalangan pelajar tingkat SMU baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian pada jenis kelamin laki-laki tingkat perguruan tinggi menempati posisi kedua terbanyak setelah tingkat SMU sebagai pemakai narkoba dalam setahun terakhir, dan tingkat pendidikan SMP menjadi pemakai narkoba dalam setahun terakhir sebagai yang

paling rendah di antara ketiga jenjang pendidikan. Adapun pemakai narkoba dalam setahun oleh perempuan posisi kedua terbanyak setelah tingkat SMU yaitu pada tingkat SMP dan posisi terendah yaitu pada tingkat perguruan tinggi.

Tabel 4. 4 Jumlah Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
TNI/Polri	31
PNS	63
Pelajar/Mahasiswa	84
wa	6
Swasta	1,442
Tidak Bekerja	75
	2
Jumlah	3,134

Sumber : Deputi Bidang Rehabilitasi (2019).

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah penyalah guna narkoba berdasarkan pekerjaan di mana pelajar/mahasiswa menempati posisi kedua terbanyak setelah swasta yaitu sebesar 846 jiwa dari 3.134 jiwa atau sebesar 27% dari jumlah penyalahgunaan narkoba. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan karena pelajar/mahasiswa merupakan penerus generasi bangsa. Adapun swasta menjadi pihak terbanyak sebagai penyalahguna narkoba, yang kemudian diikuti oleh tidak bekerja, PNS, dan TNI/Polri. Banyaknya jumlah penyalahguna narkoba pada pelajar/mahasiswa merupakan permasalahan yang besar bagi Indonesia, diketahui bahwa dengan segala bentuk penyalahgunaan narkoba maka akan berdampak bagi rusaknya moral anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, ketika moral tersebut sudah rusak maka dapat menjadi penghambat dalam menumbuhkan jiwa bela negara. Salah satu upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa selain dari faktor keluarga yaitu faktor pendidikan

sebagai pondasi untuk menghindari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, tentunya melalui doktrin-doktrin bahaya akan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba menurut (Libertus Jehani dan Antoro, 2006) dalam (Amanda, Humaedi, & Santoso, 2017) dimana dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut:

1) Faktor internal, dapat disebabkan oleh:

- a) Faktor kepribadian, adanya kepribadian seseorang yang labil, negatif, dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain maka rentan terhadap terjerumusnya seseorang tersebut untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.
- b) Faktor keluarga, adanya keluarga yang memiliki hubungan tidak harmonis yaitu seperti *broken home* maka hal ini dapat menyebabkan keputusan serta prustasi sehingga rentan untuk melakukan perbuatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba.
- c) Faktor ekonomi, adanya kesulitan dalam mencari suatu pekerjaan ini dapat menimbulkan keinginan untuk menjadi seorang pengedar atau bahkan bandar narkoba.

2) Faktor eksternal, disebabkan oleh:

- a) Faktor pergaulan, adanya pergaulan dalam teman sebaya juga memiliki pengaruh terhadap rentan terjadinya penyalahgunaan narkoba, terutama untuk mengikuti teman-temannya untuk menggunakan narkoba dan mencoba-coba untuk melakukannya.
- b) Faktor sosial/masyarakat, apabila lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang positif yaitu terkontrol dan organisasi yang baik maka dapat menjadi pencegahan dalam upaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi apabila lingkungan sekitarnya membawa dampak negatif yaitu lingkungan masyarakat yang apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar maka hal ini dapat memicu munculnya penyalahgunaan narkoba.

4. Kasus Radikalisme Di Kalangan Milenial

Selain itu terdapat ancaman lain selain kekerasan antar pelajar dan penyalahgunaan narkoba di mana kasus-kasus radikalisme juga menjadi ancaman bagi generasi bangsa Indonesia. Menurut (Roger Scurton, 2013) dalam (Saihu & Marsiti, 2019) yang dimaksud radikalisme merupakan mengakarnya ide-ide politik dan doktrin-doktrin yang mendasar di mana dikembangkan dengan menentang *status quo*. Selain itu menurut (Muhammad Tholchah Hasan, 2016) dalam (Saihu & Marsiti, 2019) mengatakan bahwa radikalisme merupakan bentuk paham di mana adanya keyakinan atas ideologi tinggi serta fanatik dan juga selalu berjuang untuk dapat merubah atau menggantikan tatanan nilai maupun *status quo* yang telah mapan maupun pada sistem yang sedang berlangsung, para kelompok radikalisme ini berupaya untuk mengganti tatanan nilai dengan yang baru di mana sesuai dengan apa yang diyakini mereka, namun radikalisme ini suatu hal yang kompleksitas di mana kehadirannya ditentukan karena ada faktor seperti ekonomi, politik, dan pemahaman ajaran dalam agama. Terdapat contoh kasus adanya aksi radikalisme yang diketahui sebagai pelajar/mahasiswa yaitu terjadi pada 13 November 2019 di Kota Medan di mana pelaku merupakan kelahiran tahun 1995. Selain itu terdapat survey yang dilakukan oleh Alvara Research Center di mana survei tersebut menemukan bahwa terdapat sebagian milenial yaitu generasi kelahiran 1980 akhir hingga awal 1990 an di mana para milenial tersebut setuju bahwa konsep khilafah sebagai bentuk negara. Survey tersebut dilakukan terhadap sejumlah mahasiswa dan pelajar SMA, di mana masing-masing sebanyak 1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di Indonesia. Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa terdapat 17.8 persen mahasiswa dan 18.4 persen pelajar setuju dengan bentuk negara dengan konsep khilafah. Adanya paparan konservatisme dan radikalisme pada kalangan kaum milenial tentunya terdapat peran konsumsi internet yang sangat tinggi (Malik, Hartawan, & Wardan, 2020).

Menurut hasil penelitian (Azca, 2013) dalam (Widyaningsih, Sumiyem, & Kuntarto, 2017) terdapat tiga faktor yang dapat menjadi terjadinya fenomena radikalisme di kalangan pemuda, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya dinamika dalam kondisi sosial politik pada transisi di fase awal menuju demokrasi yang membuka struktur kesempatan politik yang baru di mana tengah terjadinya gejolak dan ketidakpastian.
- 2) Adanya transformasi dalam gerakan radikalisme islam yang sebagiannya mempunyai genealogi di awal kemerdekaan.
- 3) Kondisi di mana terdapat tingkat pengangguran yang tinggi pada kalangan pemuda di Indonesia.

Para pemuda yang sedang mengalami masa-masa krisis akan identitas jati diri dapat berdampak pada kerentanan yang tinggi akan pengaruh serta ajakan radikalisme dengan menggunakan nama agama. Adanya masa transisi tersebut akan terjadi pembukaan kognitif yaitu adanya proses dalam lingkup mikro- sosiologi di mana para pemuda akan didekatkan pada penerimaan gagasan baru yang radikal. Hal tersebut telah dibuktikan berdasarkan data statistik yang menunjukkan bahwa terjadinya aksi bom bunuh diri dan pelaku teror ataupun mereka yang berjihad ke Suriah dominan dilakukan oleh kalangan pemuda. Paham radikalisme ini marak terjadi di kalangan pemuda terutama pada lingkungan sekolah hingga kampus seperti halnya terjadi di Kabupaten Banyumas yang merupakan daerah rawan akan persebaran paham radikalisme, di mana dilakukan melalui kegiatan di sekolah atau kampus melalui ekstrakurikuler agama. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satunya yang memiliki pendukung dari kalangan pelajar hingga mahasiswa di Kabupaten Banyumas, di mana penyebaran paham radikalisme tersebut dilakukan secara rutin melakukan kegiatan keagamaan serta memberikan dukungan melalui sponsor untuk menggerakkan kegiatan tersebut sehingga banyak dari pemuda yang merasa simpati akan hal tersebut. (Widyaningsih, Sumiyem, & Kuntarto, 2017).

E. MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA DI DUNIA PENDIDIKAN

Pendidikan bela negara merupakan hal penting karena telah menjadi kebutuhan legal yang ditetapkan oleh aturan yang ada. Secara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (3) dikatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan

dan keamanan negara”, dalam pasal 30 ayat (1 dan 2) juga dijelaskan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. TNI dan POLRI menjalankan usaha untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara sebagai kekuatan utama dan warga negara sebagai kekuatan pendukung yang membantunya. Selain itu dalam Undang-Undang 1995 No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1 dan 2) dinyatakan (1) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi” (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016)

Sikap bela negara merupakan kekuatan Negara Indonesia sebagai proses untuk pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Dalam (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018) menjelaskan bahwa kesadaran akan bela negara dapat membangun sikap dan perilaku yang sesuai perjuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam pengimplementasiannya dengan itu pemuda sebagai penerus bangsa sangat penting untuk ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih dalam.

Kondisi saat ini di Indonesia sendiri sangat memprihatinkan banyak perdebatan yang saling memecahkan baik antar individu, antar suku, maupun antar agama. Seperti saat menggunakan sosial media banyak yang menyebarkan kebencian, berkata tidak baik, menyebarkan berita palsu serta berita yang bersifat SARA. Hal tersebut terjadi dikarenakan rasa intoleran terhadap hal yang tidak sama dengan yang diyakininya, seharusnya seperti yang diketahui bahwa dalam hidup sikap toleransi akan perbedaan harus dijunjung tinggi untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup bersama yang memiliki berbagai macam perbedaan. Sikap toleransi di Indonesia sendiri sebagai negara Bhineka Tunggal Ika yang memiliki berbagai macam suku dan agama sangat penting dijunjung untuk tidak

terciptanya perdebatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Dengan memiliki toleransi yang tinggi dan menjaga keharmonisan merupakan salah satu cara dalam bela negara untuk kehidupan sehari-hari.

Saat pandemi *covid-19* ini melanda juga menambahkan dampak buruk khususnya kepada sektor pendidikan di mana para pelajar dan mahasiswa saat ini belajar menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap kemampuan dari pelajar untuk menuntut ilmu dikarenakan segala keterbatasan yang ada membuat guru tidak bisa memberikan pelajaran dan ilmu sebaik saat tatap muka langsung serta kemampuan pelajar untuk memahami pelajaran juga menjadi tidak maksimal. Beberapa kasus keadaan sosial-ekonomi juga menjadi penyebab terdapat kesenjangan dan kemampuan siswa dalam belajar. Keluarga pelajar dengan kemampuan kurang dan tidak memiliki fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi capaian belajarnya. Selain itu juga terdapat keluarga yang tidak memperdulikan anaknya sehingga tidak mengikuti pelajaran dengan baik atau bahkan sama sekali tidak mengikuti pelajaran. Hal-hal tersebut dapat mengakibatkan pelajar tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelajar untuk menuntut ilmu dan kewajibannya sebagai warga negara untuk bela negara sesuai dengan profesinya.

a. Bela Negara di Kalangan Generasi Muda

Kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa harus memahami dan menjalankan akan nilai-nilai nasionalisme, dengan itu maka semangat memperjuangkan bangsa dan menjaga keamanan dan pertahanan keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan sungguh hati. Dalam sejarah bangsa Indonesia peran pemuda sangat penting di berbagai macam peristiwa penting yang ada seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan peristiwa besar lainnya. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia merupakan aset strategis dan berharga yang harus di didik, dilatih dan dibentuk pola pikir serta tindakannya agar ke depannya membangun negara menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan generasi muda saat ini sudah tidak mempertahankan dan menjalankan nilai-nilai ideologi yang ada dikarenakan pengaruh ideologi luar seperti liberalisme. Pola pikir dan perilaku dari generasi muda juga telah berubah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Pengetahuan akan kebudayaan dan sejarah Indonesia juga sangat minim diketahui oleh generasi muda sekarang. Hal-hal tersebut membuat banyak generasi muda yang melakukan kenakalan remaja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama yang ada seperti menggunakan narkoba, pergaulan bebas dan seks pranikah. (PUSPEN, 2016)

Permasalahan tersebut muncul akibat pengaruh kehidupan bebas yang ada di generasi muda saat ini. Pelanggaran nilai-nilai dan norma agama saat ini juga telah dianggap biasa dan dimaklumi. Tetapi hal tersebut sangat berdampak negatif bagi remaja tersebut dan orang-orang di sekitarnya. Penggunaan narkoba dapat merusak seseorang, jika generasi muda kita sudah terpengaruh akan hal tersebut maka tidak ada lagi yang dapat membangun negara ini dikarenakan generasi muda lah yang diharapkan dapat membuat perubahan dan membangun negara ini lebih baik lagi. Pergaulan bebas dan seks pranikah selain dapat menimbulkan tingkat aborsi yang tinggi dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat menularkan penyakit kelamin seperti HIV yang dapat merusak generasi bangsa sama halnya dengan narkoba. Jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera terselesaikan dan dapat dihilangkan maka generasi muda saat ini akan rusak. Kewajiban mereka untuk memperjuangkan dan menjaga bangsa ini akan tidak terpenuhi. Negara ini pun akan semakin terpuruk dan hancur dikarenakan generasi mudanya yang rusak.

b. Pendidikan Bela Negara

Pendidikan bela negara merupakan hal penting yang harus ditanamkan secara dini kepada semua orang tanpa terkecuali. Dengan itu masyarakat Indonesia dapat memahami dan mengetahui pentingnya akan bela negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Sehingga permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan dapat dihindari. Pendidikan bela negara harus diajarkan secara berkelanjutan hingga dewasa nanti dan memiliki kesinambungan antara nilai-nilai persatuan,

kesatuan, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dapat terjaga dengan baik, kuat dan kokoh. (Suabgyo, 2014).

Pendidikan bela negara dapat diajarkan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga Perguruan tinggi. Sekolah-sekolah yang ada saat ini juga telah memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan bela negara seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Sejarah dan mata pelajaran lainnya kepada kurikulum yang dipelajarinya. Di tingkat perguruan tinggi juga sudah banyak universitas yang memasukan mata kuliah seperti di jenjang sekolah yang berkaitan dengan bela negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut juga dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan bela negara seperti TNI, POLRI dan PEMDA untuk memberikan pembelajaran tambahan akan pentingnya pendidikan bela negara ini.

Tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan momen penting untuk menanamkan pentingnya bela negara. Di usia tersebut karakter dan jati diri sedang dibangun dengan itu memberikan pendidikan bela negara menjadi penting agar remaja tersebut tumbuh menjadi seseorang yang memiliki kemampuan dan mengetahui tentang pentingnya bela negara. Jika hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Indonesia mereka dapat menyaring dan tidak terpengaruh akan hal-hal negatif lainnya.

Metode pembelajaran yang interaktif harus menjadi hal penting yang diperhatikan saat memberikan pembelajaran akan bela negara. Dengan memberikan pembelajaran dengan lebih komunikatif dan menarik membuat ilmu yang disampaikan juga cenderung lebih cepat dipahami dan memudahkan saat pengimplementasiannya. Memanfaatkan teknologi yang ada saat ini juga bisa menjadi salah satu cara agar pembelajaran tidak membosankan. Dengan menampilkan video yang menarik dan berkaitan dengan nilai-nilai bela negara.

Pendidikan akan sejarah Indonesia juga menjadi hal penting yang harus diajarkan kepada para pelajar. Dengan itu maka pelajar dapat mengetahui perjuangan para pahlawan dan masyarakat saat itu untuk bisa bebas dari penjajahan yang ada dan merasakan kehidupan merdeka saat ini. Hal tersebut dapat menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Mengenalkan budaya di Indonesia juga menjadi hal yang penting juga

dikarenakan kita sebagai negara Bhineka Tunggal Ika dengan berbagai macam suku dan ras yang berbeda-beda. Dengan berbagai macam suku dan ras maka kebiasaan dan norma yang ada di setiap sukunya berbeda pula. Untuk itu agar tercapai kedamaian dan tidak adanya perdebatan akibat perbedaan suku tersebut maka perlu dijunjung tinggi sikap toleransi antar sesama, selain itu lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok juga dapat menjadi salah satu cara agar tidak terjadinya perpecahan.

Oleh karena itu, pendidikan bela negara menjadi hal penting agar tumbuhnya nilai nasionalisme terhadap generasi muda saat ini dan cinta akan negara. Dengan memberikan pendidikan bela negara yang baik maka saat pengimplementasiannya juga dapat menghasilkan hal baik juga untuk menjaga nilai-nilai ideologi yang ada. Menciptakan pertahanan dan keamanan negara juga menjadi hal penting yang harus diajarkan saat dini agar sikap toleransi dan menjaga keharmonisan dapat timbul di kehidupan sehari-hari.

c. Meningkatkan Kesadaran Bela Negara bagi di Dunia Pendidikan

Meningkatkan kesadaran akan bela negara tidak bisa hanya dari luar tetapi harus dari dalam diri sendiri tersebut terlebih dahulu. Dalam dunia pendidikan terdapat guru dan dosen sebagai pengajar atau pendidik dan murid sebagai pelajar yang menuntut ilmu. Untuk meningkatkan kesadaran bela negara harus mengetahui apa itu bela negara. Bagaimana sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Kesadaran bela negara itu menjadi kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Arti dari bela negara itu sendiri sangat luas, mulai dari hal kecil yaitu memiliki hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata di medan perang dengan musuh bersenjata. Ancaman yang ada tidak hanya terhadap musuh yang bersenjata atau secara militer tetapi non-militer juga sering terjadi apalagi terhadap sesama seperti memicu terjadinya perpecahan antar individu ataupun kelompok. Pembodohan generasi

muda dengan narkoba atau obat-obatan terlarang juga merupakan ancaman non-militer yang sangat berbahaya dan harus segera diatasi. Unsur dasar dalam melakukan bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Dalam melakukan bela negara tidak semuanya harus terjun ke medan perang tetapi melakukan kegiatan sesuai profesi dengan sungguh-sungguh yang memiliki pengaruh terhadap sesama dan negara juga merupakan bela negara. Guru atau dosen sebagai pendidik dapat melakukan bela negara dengan cara mengajarkan pentingnya bela negara ataupun pelajaran lainnya kepada siswa dan mahasiswa agar mereka menjadi pandai dan memiliki wawasan yang luas untuk dapat mengimplementasikan ilmunya pada kehidupan sehari-hari dan berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut juga sudah termasuk kepada bela negara. Selain itu, guru atau dosen dapat melakukan pengabdian ke masyarakat sekitar baik di sekitar tempat tinggal atau sekolah dan universitas. Pengabdian yang dilakukan bisa berupa apa saja, seperti menghasilkan penelitian yang dapat berguna sebagai bahan pembelajaran atau hal lainnya.

Sedangkan sebagai pelajar banyak sekali kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan yang sudah termasuk dalam langkah bela negara seperti belajar dengan sungguh-sungguh sudah termasuk ke dalam bela negara. Mematuhi segala aturan dan tata tertib yang ada di sekolah dengan tertib juga sudah termasuk bela negara. Melaksanakan upacara dengan khidmat di tiap hari senin dan hari-hari besar nasional lainnya merupakan salah satu bela negara yang dapat dilakukan pelajar, guru atau dosen dan para pengurus yang ada di sekolah atau universitas.

Mengikuti berbagai macam lomba akademik baik di tingkat sekolah, daerah, nasional maupun internasional merupakan hal yang dapat dilakukan pelajar untuk berkontribusi bagi negara. Sebagai pelajar dengan menjadi generasi muda yang pintar dan pandai merupakan hal penting yang harus dilakukan karena nantinya negara ini akan dibangun dan diatur oleh generasi muda saat ini. Dengan itu sebagai generasi muda kita harus

membangun negara ini menjadi lebih baik dan maju saat kepemimpinan kita nanti.

Selain itu tetap menjaga ideologi negara yaitu Pancasila dan tidak terpengaruh akan ideologi lain merupakan langkah bela negara yang baik. Pengaruh ideologi lain memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat terutama para remaja yang masih mencari jati diri dan lebih ingin tahu. Dengan kehidupan yang cenderung lebih bebas dan tidak terlalu diatur oleh agama seperti di Indonesia yaitu agama Islam sebagai agama mayoritas, segala hal dapat dilakukan dengan biasa dan dimaklumi. Seperti menggunakan narkoba, minuman beralkohol, dan pergaulan bebas yang tidak terkontrol.

Dengan menjauhi hal-hal tersebut sudah merupakan bela negara dengan menjaga diri sendiri dan menjaga orang-orang disekitar untuk tidak terpengaruh negatif maupun dirugikan.

Jika generasi muda kita nanti rusak karena kebebasan dalam hidup akibat pengaruh ideologi lain maka negara ini tidak akan menjadi lebih baik saat kepemimpinan kita nanti, justru dikhawatirkan akan terbalik. Dengan itu, ideologi kita yaitu Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita dapat teratur dengan baik.

d. Alternatif Meningkatkan Kesadaran Bela Negara

Dengan keadaan Indonesia yang masyarakatnya kurang akan sikap bela negara maka sangat penting dan menjadi prioritas untuk melakukan upaya peningkatan bela negara di tengah masyarakat agar tidak mudah tersulut konflik dan terprovokasi untuk melakukan aksi separatisme, radikalisme dan terorisme. Setiap berbicara bela negara di Indonesia, maka akan mengingatkan kita akan aksi separatisme dan konflik-konflik yang timbul di Indonesia mulai dari agama, terorisme, dan konsep jihad sampai konflik antar suku. Hal tersebut harus dihapuskan dan dilupakan agar masyarakat Indonesia dapat terus hidup dengan perasaan aman dan damai tanpa adanya konflik-konflik. Selain itu, wilayah Indonesia dengan berbagai macam suku, ras dan agama membuat wilayahnya menjadi rentan akan konflik dikarenakan banyaknya perbedaan di dalamnya dikarenakan jika konflik-konflik tersebut terjadi maka dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan yang ada di Indonesia.

Untuk meningkatkan bela negara di masyarakat Indonesia dapat melakukannya dengan cara membuat kebijakan yang komprehensif, holistik, dan integralistik. (Suabgyo, 2014). Dalam membuat kebijakan juga harus berdasarkan keinginan dan kebutuhan yang ada di masyarakat dengan itu hubungan dan komunikasi antar pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat harus terjalin dengan baik agar kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat tercapai dan menciptakan kebijakan yang baik dan sesuai. Bela negara yang rendah harus diupayakan untuk ditingkatkan sehingga akan menjadi modal dasar dalam membentengi diri dari pusaran konflik dan mengakselerasi proses pembangunan daerah.

Alternatif lain untuk meningkatkan kesadaran bela negara dalam dunia pendidikan dari berbagai aspek dapat dijalankan dan ditingkatkan dalam upayanya (Suabgyo, 2014). Seperti dalam aspek ideologi, meningkatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di tengah masyarakat terutama terhadap tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kepada suatu kelompok, dengan itu maka anggota kelompok lainnya juga dapat memahami dan menjalankannya. Hal lain yang dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan yang ada di berbagai lembaga pendidikan mulai dari pendidikan berbasis agama ataupun pendidikan umum, yaitu mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dengan menambahkan mata pelajaran yang berbasis dari empat pilar kebangsaan seperti Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam aspek politik, membuat brosur, pamflet, dan berbagai media lain terutama konten di media sosial yang sekarang lebih banyak digunakan yang isinya tentang sejarah Indonesia dalam bingkai NKRI untuk dibagikan kepada seluruh siswa di lembaga pendidikan sehingga dapat memahami sejarah Indonesia secara benar. Hal lain yang dilakukan adalah mendorong pemerintah pusat ataupun daerah untuk selalu turun ke tengah masyarakat melakukan dialog dan diskusi dengan elemen masyarakat tentang pentingnya nasionalisme, patriotisme dan bahaya terorisme. Selain itu dapat melakukan pemberdayaan akan resolusi konflik dengan lebih memahami kearifan lokal yang ada, adat istiadat dan nilai-

nilai lokal di tengah masyarakat dalam memfilter potensi konflik sosial yang terjadi dan dapat mencegahnya.

Aspek ekonomi, menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat dan para pelajar sehingga akan melahirkan industri kreatif berbasis kearifan lokal. Dengan itu maka para pelajar saat terjun setelah lulus sekolah tidak hanya mencari pekerjaan tetapi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lainnya. Sedangkan aspek sosial budaya, memberdayakan forum keagamaan, forum adat, dan forum budaya antar masyarakat guna mencegah potensi konflik sosial. Meningkatkan akses masyarakat dalam sektor pendidikan dan kesehatan sehingga terwujud kehidupan sosial masyarakat yang layak dan menjadikan negara Indonesia ini aman dan damai tidak terdapat konflik yang dapat memecahkan belahkan bangsa ini.

Serta aspek terakhir yang penting adalah aspek pertahanan dan keamanan, dengan menggerakkan kegiatan pramuka, menwa, karang taruna, serta berbagai kegiatan lainnya di tengah masyarakat, khususnya generasi muda untuk meningkatkan bela negara. Dengan itu dari sejak dini generasi muda sudah diajarkan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bela negara, walaupun hanya dalam kegiatan kecil dan sehari-hari di tengah masyarakat yang selanjutnya dapat melakukan hal besar bagi negara.



PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

BAB 5: PERAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DALAM DUNIA
PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

BAB 5

PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

A. KONSEP BELA NEGARA

Letak geografis Indonesia yang strategis memiliki potensi ancaman yang semakin kompleks. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini makin bersifat multidimensional seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi, atas dasar itu, seluruh bangsa Indonesia harus mampu mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan campur tangan dari dalam dan luar negeri. Perlu memahami pentingnya kesadaran bela negara. Berkaitan dengan itu, peran aktif seluruh bangsa Indonesia juga diperlukan agar kita dapat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesadaran bela negara mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 mengatur bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pekerjaan pertahanan negara”. setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam kerja pertahanan dan keamanan negara. Untuk melaksanakan tugas UUD 1945 perlu dijabarkan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk rencana atau kegiatan tertentu.

Kewajiban bela negara tidak hanya dilakukan oleh militer, tetapi juga oleh mereka yang tergolong non-militer, terutama dalam menanggapi ancaman non-militer, seperti yang memiliki kemampuan untuk merugikan atau berdampak pada ancaman, kedaulatan nasional, keutuhan wilayah

nasional dan keamanan seluruh bangsa. Bela negara adalah konsep patriotik individu, kelompok, atau seluruh komponen negara yang dirumuskan oleh legislatif dan pejabat suatu negara untuk mempertahankan eksistensi negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara. Ini adalah wujud kecintaan masyarakat terhadap tanah air yang memberi mereka kehidupan. Ini karena seseorang lahir, tumbuh, dan bekerja keras untuk mencari nafkah. Secara fisik bela negara diartikan sebagai upaya melawan serangan fisik atau agresi oleh semua pihak yang mengancam kelangsungan hidup negara, sedangkan secara non fisik konsep ini diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan negara dan negara. negara melalui pendidikan, moralitas, masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang membentuk negara (Kementerian Pertahanan, 2017).

Dalam melaksanakan pertahanan negara, warga negara dapat melakukannya secara fisik dan non fisik. Pertahanan fisik negara meliputi perjuangan mengangkat senjata ketika negara asing menyerang kedaulatan negara. Pertahanan negara yang tidak terlihat adalah segala upaya untuk menjaga negara dan kedaulatannya melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian cinta dan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta upaya menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Selain itu, pertahanan negara dapat dicapai dengan berperan aktif dalam pencapaian kemajuan bangsa dan negara. Landasan konsep patriotisme adalah adanya dinas militer. Tema konsep ini adalah militer atau alutsista lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari wajib militer atau wajib militer (UPNV JATIM, 2014).

Pertanyaan yang sering muncul di benak setiap orang adalah “Mengapa bela negara?” Jawabannya sederhana saja, karena negara sebagai unit politik masyarakat memiliki peran yang sangat besar dan penting bagi setiap warga negara dalam rangka pembangunan manusia dan bangsa. Peran dan fungsi. Dalam konteks ini, semua negara di dunia telah melakukan dan melaksanakan tiga tugas utama, yaitu:

- a. Melindungi semua penduduk di wilayahnya dari:
 - Semua ancaman dari dalam dan luar negeri.
 - Ancaman penyakit dan/atau segala bentuk bahaya lainnya, termasuk bencana alam, bahaya lalu lintas, terorisme, narkoba, ideologi berbahaya, dll.
- b. mendukung atau secara langsung memberikan berbagai layanan bagi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan budaya, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, fasilitas komunikasi dan berbagai layanan sosial lainnya. Negara juga berupaya meningkatkan kemampuan warga negara untuk setidaknya keluar dari kemiskinan dan ketergantungan ekonomi.
- c. menyediakan sistem peradilan yang menjamin keadilan dasar hubungan sosial, menjadi arbitrer yang adil dari satu pihak dalam konflik sosial.

Beberapa negara (seperti Israel, Iran) dan Singapura memberlakukan wajib militer pada warga negara yang memenuhi syarat (kecuali mereka dibebaskan karena beberapa alasan seperti hambatan fisik, mental atau agama). Sebuah negara dengan sukarelawan yang sepenuhnya termiliterisasi biasanya tidak membutuhkan layanan sukarela dari warganya kecuali jika menghadapi krisis rekrutmen selama masa perang. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, pelatihan militer diadakan untuk negara tersebut, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukan operasi ini sebagai individu atau sebagai anggota resimen (seperti tentara teritorial Inggris). Dalam beberapa kasus, milisi dapat menjadi bagian dari cadangan militer, seperti Garda Nasional Amerika Serikat. Di negara lain, seperti Republik Cina (Taiwan), Republik Korea dan Israel, wajib selama beberapa tahun setelah menyelesaikan layanan nasional. Cadangan militer berbeda dengan cadangan, kadang-kadang disebut cadangan militer, cadangan adalah sekelompok atau unit personel militer yang tidak berjanji untuk berperang dengan komandan sehingga mereka dapat menghadapi keadaan yang tidak terduga dan memperkuat pertahanan negara (Dewan Ketahanan Nasional, 2018).

Bela negara Indonesia adalah sikap dan perilaku warga negara yang penuh cinta kasih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembentukan bangsa dan proses kelangsungan hidup negara secara keseluruhan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ikut serta Untuk membela negara, syarat-syarat bela negara diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan mengabdikan kepada negara, kesediaan berkorban untuk membela negara. Pertahanan negara berkisar dari yang paling halus hingga yang paling kejam. Mulailah dengan hubungan yang baik dengan rekan-rekan kita, dan bekerja sama untuk melawan ancaman nyata dari musuh bersenjata. Ini termasuk mengambil tindakan dan melakukan yang terbaik untuk negara dan negara.

Di Indonesia, tata cara pertahanan negara secara formal telah diatur dalam undang-undang. Beberapa di antaranya telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 30. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bela negara adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Pemenuhan tugas bela negara adalah seluruh warga negara yang menunjukkan kesediaan untuk mengabdikan pada tanah air dan bangsa, serta merupakan bukti dan proses pengorbanan kesadaran bela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri begitu luas, dari yang halus hingga yang tidak bisa dipahami. Di antaranya, dari awal menjalin hubungan baik dengan orang lain, hingga proses kerja sama, apakah kita benar-benar bisa menghadapi ancaman eksternal. Hal ini merupakan bukti kesadaran nasionalis yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku warga negara sebagai warga negara. Dalam konsep bela negara terdapat falsafah bagaimana harus bertindak dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsa.

Dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa & bernegara, yakin akan pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa & negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara di antaranya yaitu: Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional, Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat, Undang-Undang No.20 tahun

1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, Tap MPR No.VI.

Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI, Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI, Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3, Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

Dalam proses pemahaman masyarakat dan pemersatu konsep bela negara, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan mengubah lagu “Mars Bela Negara”. Mars diubah oleh musisi nasionalis Indonesia, Dharma Oratmangun. Dalam rangka menjaga kesadaran bela negara, maka dibuatlah momen untuk memperingatinya, yaitu tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai hari bela negara. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 (Kementerian Pertahanan, 2017).

Tujuan dari persatuan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita luhur tersebut berlandaskan pada ideologi dan falsafah Panchasila sebagai bangsa dan negara serta UUD 1945. Tujuan tersebut di atas didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Berbagai upaya pembangunan di lapangan. Upaya yang paling mendasar adalah menemukan dan menerapkan cara yang paling efektif untuk menggugah warga negara untuk ikut serta dalam bela negara. Oleh karena itu, pendidikan kesadaran bela negara memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya serta bela negara dan potensinya secara utuh.

Adapun selain melalui pendidikan, upaya membangun kesadaran bela negara dapat dilakukan dengan pemberian motivasi dalam berbagai bentuk dan cara. Motivasi memiliki kekuatannya sendiri untuk mempengaruhi sikap dan mentalitas warga. Jenis motivasi ini juga dapat terjadi secara spontan di antara penduduk, karena mereka telah melihat kapasitas negara dalam realisasi misi rakyat dan telah melihat dan

menganggap bahwa negara bermanfaat bagi kehidupan mereka. Tanpa negara mereka tidak akan dapat berkembang. Kapasitas dan kepentingan negara tercermin dalam inisiatif negara untuk memenuhi beragam kebutuhan mereka, untuk mendirikan berbagai fasilitas untuk memfasilitasi mereka untuk mencapai kemakmuran, melindungi mereka dari menciptakan berbagai ancaman dan kebebasan, kesetaraan, keadilan dan persatuan. Menyaksikan semua itu, mereka bangkit membela semangat negara, baik dalam damai maupun perang, mereka tidak punya alasan untuk gagal memenuhi hak dan kewajiban membela negara.

Ada beberapa perspektif alasan negara yang harus dipertahankan oleh warga negaranya, yaitu:

- a. Berdasarkan teori dan tujuan nasional. Alasan ini terkait erat dengan tujuan akhir negara, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi orang-orang. Dengan kata lain, pembentukan negara adalah untuk mewujudkan warga negara, untuk mewujudkan ideal dengan negara itu, semua warga negara rela mempertahankan negara mereka, karena itu untuk dirinya sendiri dan lainnya. Berdasarkan pemikiran rasional. Pertahanan negara merupakan faktor penting dalam jaminan kelangsungan hidup negara. Tanpa pertahanan diri, suatu negara tidak dapat mempertahankan keberadaannya.
- b. Kontrak sosial Bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bertekad untuk memelihara dan mempertahankan independensi dan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Konstitusi tahun 1945.
- c. Pertimbangan moral, kemerdekaan adalah hak untuk semua bangsa dan karenanya kolonialisme tentang dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.
- d. Termasuk ketentuan hukum yang meliputi:
 - UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3): “Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara”;
 - UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) “Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat

Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung”;

- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B “Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”; dan
- UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (2)“Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi”.

Semua warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dapat memainkan peran aktif dalam mempertahankan negara. Baik masyarakat militer maupun masyarakat sipil adalah sumber daya manusia yang paling penting dalam sistem pertahanan negara itu, yaitu pembelaan negara dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan menempatkan TNI dan Polri sebagai komponen utama, dan personel sebagai bagian pendukung. Untuk mengakhiri kontroversi yang terjadi, pemerintah harus segera menyusun “Rancangan Undang-Undang Pendukung Logistik Pertahanan Nasional” yang akan menjadi payung yang sah untuk memobilisasi pertahanan negara. Selain itu, wacana pertahanan harus dipertahankan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan universal. Prinsip demokrasi mengharuskan setiap tindakan yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan pertahanan negara harus sejalan dengan keinginan rakyat dan diakui oleh Republik Demokratik Rakyat. Prinsip HAM mensyaratkan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh melanggar HAM dengan alasan apapun. Prinsip kesejahteraan universal berarti bahwa kegiatan ini tidak akan membuat susah masyarakat. Jika rencana pertahanan negara dijalankan, perlu disertai dengan rencana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. DEFINISI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

Society dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin *socius society* yang berarti teman. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab syarakah yang berarti partisipasi dan partisipasi. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bergaul dengan baik, dan dalam istilah ilmiah, mereka saling mempengaruhi. Sebuah unit manusia dapat memiliki infrastruktur, di mana warganya dapat berkomunikasi satu sama lain. Definisi lain adalah bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat yang berkesinambungan dan dibatasi oleh rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat dengan empat ciri, yaitu: (1) Interaksi antar warga; (2) Adat istiadat; (3) Kesenambungan waktu; (4) Memantapkan rasa identitas yang kuat dari seluruh warga negara.

Masyarakat menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut (Koentjaraningrat, 2009) :

- Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat sebagai jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat sebagai tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.
- Karl Marx mengartikan masyarakat sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.
- Max Weber mendefinisikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- Adam Smith, mengatakan bahwa masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, fungsi yang berbeda, yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu mereka yang merasa perlu untuk hidup berkelompok. Berdasarkan hal ini, aspek sosial digabungkan dengan kepentingan pribadi sosial, dan kepentingan ini didasarkan pada pemahaman tentang kehidupan manusia dalam masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari bagian masyarakat. Dalam hal ini pendidikan merupakan upaya untuk memajukan dan mengembangkan potensi masyarakat, dalam hal ini peserta didik, agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Dampak dari jenis pendidikan ini pada masyarakat pada dasarnya tergantung pada derajat dan kualitas produk pendidikan. Semakin tinggi prestasi akademik maka semakin stabil kualitasnya dan kemampuan memeras talenta berkualitas niscaya akan berdampak sangat positif bagi masyarakat (Fuad, 2011).

Pendidikan dan masyarakat saling terkait, dan pembangunan pendidikan membutuhkan peran serta semua sektor masyarakat yang selalu berkepentingan dengan dampak pendidikan dan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah subjek atau subjek pendidikan. Tanpa kesadaran masyarakat akan pendidikan, negara tidak akan berkembang. Kita mengandalkan orang dan negara lain yang jauh lebih maju dari kita. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pendidikan sangat penting. Untuk pembangunan yang berpengaruh, daerah atau negara itu sendiri, melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama dalam kehidupan mereka.

Dari sudut pandang pendidikan, masyarakat adalah sekelompok banyak orang dengan karakteristik berbeda yang belum pernah mengenyam pendidikan tinggi. Kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan anggotanya. Semakin baik pendidikan anggota, semakin baik kualitas seluruh masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah lingkungan rumah dan lingkungan sekolah estafet. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan tidak begitu jelas, begitu pula tanggung jawab pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah. Hal ini disebabkan oleh faktor waktu, hubungan, sifat dan aspek sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan tetap berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Peran masyarakat antara lain mendukung terselenggaranya pendidikan nasional dan menciptakan suasana yang dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non pemerintah (sosial).

Jelas bahwa bela negara itu penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Pendidikan di dalamnya juga merupakan rencana penting untuk dilaksanakan. Jika keduanya berjalan lancar, maka secara bersamaan akan menghasilkan manfaat dalam membangun ketangguhan negara untuk merespon dinamika ancaman yang kompleks dan mencapai ketahanan nasional. Bela negara juga merupakan modal sosial bagi negara untuk membangun negara yang lebih maju, dengan kepribadian dan budaya yang sejajar dengan negara maju lainnya dalam peradaban dunia. Pertahanan negara dan pendidikan telah menjadi kekuatan bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan sumber daya manusia sosial. Konsep dan rencana yang diperlukan untuk bela negara dan pendidikan yang efektif diperlukan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan perlindungan nasional merupakan pendidikan wajib. Hal ini sejalan dengan kenyataan empiris bahwa Indonesia berada di persimpangan kepentingan global. Realitas empiris ini diperlukan bagi Indonesia untuk mengubah arah sistem pertahanannya dan mendukung kepentingan masa depan, terutama terkait dengan potensi ancaman di masa depan.

Sangat penting untuk membangun karakter negara dengan meningkatkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia dan kemampuannya untuk melindungi negara. Untuk itu, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pertahanan negara dan penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berbudaya. Bela negara mempersiapkan manusia setidaknya-tidaknya berwawasan, berwatak, dan berintegritas agar dapat berkontribusi bagi kemajuan dan keutuhan NKRI. Pengembangan sumber daya manusia yang kredibel tentunya akan mempengaruhi kualitas sikap dan tindakan positif dalam mengelola negara dan sumber daya nasionalnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dengan kesadaran membangun negara yang lebih

baik, Anda akan menginspirasi semangat bersama dan mencapai kejayaan Indonesia.

Saatnya mengharumkan nama Indonesia, menjadi lebih bermartabat, meraih prestasi kelas dunia di berbagai bidang, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan mulia, dan berkolaborasi dengan negara lain untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Semangat kolektif dan sikap inovasi juga harus terus dipupuk agar putra-putri bangsa Indonesia dapat menciptakan penemuan-penemuan baru dan orang lain dapat menilai Indonesia sebagai negara yang berdaya saing. Bagian ini adalah tindakan sebenarnya dari rencana pertahanan negara.

C. DEFINISI DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA

Dalam arti luas, pemerintahan merujuk pada segala bentuk kegiatan atau kegiatan penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ negara yang mempunyai hak atau hak untuk menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Dalam arti sempit, pemerintahan berarti kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi administrasi, dan hanya dalam hal ini dilakukan oleh presiden, menteri birokrasi terendah (C.S.T, 2000).

Pemerintah dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan pengelola negara. Secara umum, pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang berhak mengatur suatu negara. Kata pemerintah dalam istilah Belanda disebut *overheid* atau *gouvernement*, atau *de autoriteiten*. Dalam bahasa Inggris disebut *government* atau *the authorities*. Menurut KBBI, pemerintah adalah suatu sistem yang menjalankan kekuasaan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian darinya. Pengertian lain dalam KBBI adalah bahwa pemerintah adalah lembaga tertinggi yang mengatur suatu negara (misalnya kabinet adalah pemerintah).

Beberapa ilmuwan telah mendefinisikan arti pemerintahan itu sendiri. Ilmuwan dan pakar hukum Belanda Ernst Utrecht (Ernst Utrecht) menyatakan bahwa pemerintah memiliki tiga pengertian, yaitu:

- Pemerintahan luas mencakup lembaga legislatif, administratif, dan yudikatif, termasuk semua lembaga yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan umum.

- Pemerintah dalam arti gabungan lembaga negara tertinggi atau lembaga negara tertinggi yang mengelola wilayah suatu negara. Misalnya: Presiden, Raja atau Sultan.
- Pemerintah dan para menternya dalam arti Kepala Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri) sebagai badan eksekutif disebut Dewan Menteri atau Kabinet.

Ilmuwan lain, GS Diponolo, membagi konsep pemerintahan menjadi dua jenis dalam bukunya “Ilmu Kebangsaan” (1975), yaitu *government* dalam arti luas dan *government* dalam arti sempit. Dalam arti luas, pemerintah adalah seluruh badan penyelenggara negara beserta seluruh organisasinya, seluruh bagian, dan seluruh pejabatnya. Mereka menjalankan tugas negara, dari pusat hingga daerah terpencil. Termasuk lembaga swasta atau perorangan yang mengelola pemerintahan secara komisioner. Dalam arti sempit, pemerintah adalah organisasi manajemen yang terdiri dari satu atau beberapa orang, yang memainkan peran utama dan menentukan dalam tugas-tugas nasional. Singkatnya, pemerintah adalah kepala negara dan menteri yang biasa disebut kabinet (Putri, 2019).

Dalam hal pendidikan, ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 (UU) Tahun 2014 oleh pemerintah daerah. Kekuasaan pemerintah pusat berkurang dan kekuasaan pemerintah daerah meningkat. Hal ini tercermin dari alokasi dan alokasi anggaran pendidikan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pendidikan merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih khusus lagi, menurut undang-undang, masalah pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal (PAUDNI) dan pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Setelah itu, urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan luar biasa menjadi kewenangan pemerintah negara bagian (Kemdikbud, 2018).

Sebagai penyelenggara pendidikan publik, Pemerintah berhak membimbing, membimbing, mendukung, dan memantau penyelenggaraan pendidikan serta berkewajiban memberikan diskriminasi yang berkualitas kepada seluruh warga negara. Pemerintah dan

pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan dana untuk pendidikan semua warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun. Tidak hanya itu, peluang bagi orang tua/warga dan kelompok masyarakat masih besar. (Astawa, 2017). Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi negara karena merupakan sumber ilmu dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Saya mengajar baik di dalam maupun di luar kampus. Tujuan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh warga negara adalah meningkatkan sumber daya manusia dari dalam dan luar Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka peningkatan sumber daya manusia perlu ditingkatkan pada tingkat yang sesuai, namun dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang ada, pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan pendidikan, karena pendidikan yang baik dan benar akan mendukung sumber daya manusia Indonesia. Dalam keadaan seperti itu, peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan mengambil banyak bentuk, antara lain:

- Peran sebagai PNS. Pemerintah adalah pelayan masyarakat pendidikan, yaitu pemerintah melayani kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Pemerintah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menjadikan pembangunan pendidikan setiap masyarakat menjadi lebih baik.
- Peran sebagai fasilitator. Pemerintah bertindak sebagai promotor, yaitu pemerintah bertindak sebagai penyedia tempat atau penyedia fasilitas pendidikan. Dengan peran ini, pemerintah harus dapat berintegrasi dengan masyarakat, mendengarkan tuntutan masyarakat terhadap fasilitas sekolah yang ada, dan benar-benar memverifikasi keaslian keluhan masyarakat tentang kurangnya fasilitas atau perlunya perbaikan.
- Peran pendamping. Selain tugas pokok pemerintah sebagai PNS, juga memiliki tanggung jawab sebagai rekan sejawat dalam dunia pendidikan. Dapat membantu masyarakat dan menerima pengaduan masyarakat tentang pendidikan, sehingga masyarakat merasa selalu ada pihak pemerintah yang membantu mereka menyelesaikan pengaduan pendidikan di daerahnya masing-masing. Masyarakat

akhirnya merasa bahwa peran pemerintah begitu nyata, karena selalu berputar di sekitar masyarakat itu sendiri.

- Peran sebagai penyandang dana. Pemerintah bertindak sebagai penyandang dana, yaitu pemerintah memberikan bantuan dana kepada sekolah yang membutuhkan dan dana bagi siswa yang membutuhkan.
- Peran sebagai mitra. Pemerintah berperan sebagai partner disini, yaitu pemerintah menjadi partner kerja sama antara sekolah dengan masyarakat. Ketika pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan, maka harus dapat memahami dan memahami kondisi pendidikan di setiap daerah, sehingga tidak ada lagi unsur-unsur yang dipaksakan pemerintah di kemudian hari. Atas dasar ini, setiap keputusan mengenai kebijakan pendidikan dapat didiskusikan dengan sekolah dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman saat menentukan kebijakan baru.

D. SEJARAH PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA DI INDONESIA

Pendidikan telah ada di Indonesia sejak tahun 1901, saat Belanda menduduki Indonesia. Pada saat itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Tujuannya adalah sebagai bentuk upaya dari kebijakan Politik Etis yang mereka terapkan. Tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda (Indonesia). Sistem yang mereka perkenalkan yaitu sebagai berikut:

- sekolah dasar bagi orang Eropa, *Europeesche Lagere School*
- sekolah dasar bagi pribumi *Meer Uitgebreid, Hollandsch Inlandsche School* (HIS)
- sekolah menengah pertama, *Lager Onderwijs* (MULO)
- sekolah menengah atas, *Algemeene Middelbare School* (AMS)

Sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di semua provinsi di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang yang bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak

(TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Hal lain yang juga menjadi perhatian panitia ini adalah terkait rencana pelajaran, organisasi pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran. Setelah beberapa bulan bekerja, panitia ini mengusulkan beberapa pokok saran kepada pemerintah, di antaranya yaitu:

1. secara mendasar, pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah
2. mengenai pengajaran, diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan seksama,
3. mengenai pengajaran tinggi disarankan agar diadakan seluas-luasnya,
4. disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri,
5. kewajiban bersekolah, panitia menyarankan agar wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun.

Setelah pemerintah menerima saran-saran tersebut, disusunlah struktur dan sistem pendidikan baru. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, dan diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial (Adryamarthanino, 2021).

Kurikulum Indonesia telah diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang sebelum kemerdekaan Indonesia, namun setelah Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia telah beberapa kali berubah di antaranya yakni:

- 1) 1) Kurikulum di Indonesia mengalami tiga kali perubahan pada masa Orde Lama. Periode pertama, penetapan kurikulum ditetapkan tahun 1947, berlaku hingga tahun 1949. Periode kedua, diterapkan pada 1952 hingga 1960. Periode ketiga, kurikulum ditetapkan pada 1960 hingga 1964. Kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno pada masa Orde Lama.
- 2) Pada masa Orde Baru, tujuan kurikulum pendidikan adalah untuk memperkuat pembangunan negara dan ideologi Pancasila. Pada masa ini, telah terjadi empat kali pergantian kebijakan kurikulum. Secara berurutan, nama kurikulumnya adalah Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994.

- 3) Pada masa Reformasi telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali, yakni Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013. Tingkatan sekolah bagi masyarakat Indonesia juga terbagi menjadi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia juga menetapkan wajib belajar bagi rakyatnya yaitu selama 12 tahun (Adryamarthanino, 2021).

Pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan manusia, bahkan manusia akan menjadi manusia karena pendidikan. Oleh karena itu, kemajuan suatu masyarakat sangat bergantung pada pendidikan mereka. Dalam hal ini perlu diselenggarakan pendidikan nasional, karena pendidikan nasional akan selalu menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai patriotik. Tujuan pendidikan nasional adalah menjadi bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan sekaligus menjadi seorang nasionalis yang berjiwa besar dan penuh percaya diri. Nilai-nilai patriotik yang tertanam dalam jangka panjang akan menciptakan masyarakat yang memiliki rasa bela negara (Berantas, 2015).

Kesadaran bela negara sangat diperlukan, dan setiap warga negara Indonesia wajib memilikinya sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban bela negara. Kesadaran bela negara adalah modal dasar dan kekuatan negara. Pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia bahkan manusia itu akan menjadi manusia karena pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dan pertahanan negara Indonesia juga mulai terlihat. Dalam sejarah Indonesia, Bukit Tinggi pernah menjadi pusat kendali pemerintahan militer Sumatera bahkan Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan Pangdam ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Toyo Hirano. Saat itu, kota ini berganti nama menjadi Bukit tinggi Si Yaku Sho, dan wilayahnya diperluas hingga mencakup desa-desa sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba dan Bukit Batabuah.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Surat Keputusan No. 391 yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera pada tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera, dan Gubernur Provinsi Sumatera Teku Mohamed Hassan. Kota Bukittinggi dijadikan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk oleh Belanda sebagai ibu kota Indonesia setelah jatuhnya Yogyakarta. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara dan kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006 (Kementerian Pertahanan, 2017).

Dalam dasar hukum yang sudah diatur oleh pemerintah, Bela Negara menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang Undang Dasar Tahun 1945,
 - Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
 - Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”
- b. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - Pendidikan kewarganegaraan;
 - Pengabdian sesuai dengan profesi.
 - Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan

Upaya bela negara sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1. 3 Tahun 2002 harus dilaksanakan dalam rangka membudayakan rasa bela negara, sebagai wujud realisasi warga negara Indonesia yang memahami dan menghayati serta yakin dalam memenuhi

hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia berharap memiliki peradaban yang unggul, berakhlak mulia, dan bermartabat. Jika masyarakat dan negara kita juga merupakan masyarakat dan negara yang baik (*good society and country*), perdamaian, keadilan dan kemakmuran, maka peradaban seperti itu dapat terwujud, seperti yang diharapkan oleh pendiri (*founding father*) dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, UUD 1945 memberikan landasan dan arah bagi pembangunan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara. Muatan pertahanan negara yang terkandung dalam UUD 1945 meliputi pandangan bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan hidup, tujuan negara, sistem pertahanan negara, dan peran serta warga negara. Hal ini merefleksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Pandangan bangsa Indonesia mengenai perang dan damai sudah sangat jelas (Berantas, 2015).

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pertahanan menyangkut berbagai persoalan yang terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh semua jenjang pendidikan. Kurikulum harus mengikuti kaidah penulisan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kursus ini juga membutuhkan kualifikasi untuk memenuhi standar pendidikan nasional. Secara teoritis, ada dua jenis metode yang digunakan untuk membentuk program pendidikan tinggi: model seri dan model paralel. Metode seri diwakili oleh adanya mata kuliah dengan keterampilan yang sama di setiap semester. Pada saat yang sama, mode paralel memanifestasikan dirinya sebagai penyelesaian keterampilan lengkap dalam satu semester, sehingga mata kuliah di semester lain tidak akuisisi terus menerus. Kedua pendekatan ini berfokus pada bagaimana melaksanakan kegiatan perkuliahan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

Sikap bela negara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia didasarkan pada empat kerangka pemikiran, di antaranya yaitu:

1. Pancasila sebagai dasar atau landasan ideal. Pancasila adalah dasar negara dan harus digunakan untuk berpikir dan bertindak untuk kepentingan negara Indonesia.

2. Awal dari alinea keempat UUD 1945, yang menyatakan tujuan negara. Hal ini dinyatakan dalam pasal 30 alinea kedua bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela dan membela negara. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pertahanan negara.
3. Wawasan nusantara sebagai landasan visional.
4. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional.

Sikap bela negara tidak terbatas pada apakah warga negara Indonesia mampu berperang atau menjadi anggota militer. Apapun pekerjaan mereka, di mana pun mereka berada, apapun usaha yang mereka lakukan, mereka berharap seluruh masyarakat menjadi bagian dari kegiatan bela negara. Oleh karena itu, mata kuliah bela negara yang dibentuk oleh pendidikan di semua jenjang harus didasarkan pada jurusan atau proyek pembelajaran yang diminati semua orang di masyarakat (Direktorat Pengkajian Bidang Pertahanan dan Keamanan).

E. PENTINGNYA PENDIDIKAN DAN BELA NEGARA DALAM KEHIDUPAN

Pendidikan dan bela negara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting yang wajib diterima oleh semua orang. Pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan juga dapat membuat seseorang menjadi lebih berwawasan dan tidak terkunci dalam pikirannya sendiri. Saat ini, kebanyakan orang berpikir mengenyam pendidikan merupakan cara guna menggapai keberhasilan duniawi semata, padahal pendidikan tak hanya dapat membantu membuat seseorang terbuka pikirannya mengenai kehidupan duniawi tetapi juga seluruh aspek kehidupan. Pendidikan membuat orang dapat berpikir, membedakan antara hak dan kewajiban, menghargai orang lain serta dapat menjadi tolak ukur berkualitasnya suatu bangsa.

Dunia saat ini telah memasuki zaman serba canggih, di mana semua hal yang berkaitan dengan kehidupan dikaitkan dengan teknologi. Bagi orang awam yang buta akan teknologi pasti itu semua terasa sulit. Sebenarnya hal itu akan terasa mudah jika seseorang berkeinginan untuk

terus belajar, berkeinginan untuk selalu mengenyam pendidikan serta berkeinginan untuk meng-*upgrade* diri. Sebagai contoh, seseorang yang ingin melamar pekerjaan pasti harus memiliki latar belakang pendidikan yang jelas. Pendidikan yang dilaksanakan orang tersebut akan menjadi tolak ukur suatu perusahaan untuk mempekerjakannya. Semakin tinggi pendidikan yang ia miliki maka semakin yakin pula perusahaan tersebut untuk menerimanya sebagai seorang karyawan. Semakin tingginya pendidikan seseorang maka akan dinilai semakin berkualitas seseorang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan adalah hal utama yang harus dimiliki oleh semua orang. Adapun hal lain yang menjadi alasan pendidikan itu penting adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dapat membuat seseorang memiliki kehidupan yang stabil dan terarah

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, guna mendapatkan suatu pekerjaan tentunya kita harus memiliki pendidikan yang baik. Jelas bahwa ketika kita memiliki pendidikan yang baik, akan membuat kita mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih mapan dan terarah. Dikatakan demikian karena pendidikan dapat membuat seseorang memiliki wawasan yang luas sehingga dapat menempatkan dan menjadikan kita berada di posisi yang sebelumnya tak pernah terpikirkan dan membuat hidup jadi lebih terarah serta memiliki tujuan.

2. Pendidikan dapat membuka potensi lapangan pekerjaan

Dari penjelasan sebelumnya, sebuah perusahaan yang akan menerima dan mempekerjakan seorang karyawan akan melihat kualitas sang pelamar kerja dari latar pendidikannya terlebih dahulu. Bila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, ia akan memiliki potensi yang sangat luas untuk mencari lapangan pekerjaan yang cocok untuk dirinya mengingat kualifikasi yang ia miliki mumpuni dari segi pendidikan. Seseorang yang berpendidikan memiliki kreativitas yang lebih baik dari orang yang tak berpendidikan dan hal ini dapat menyesuaikan dirinya serta siap untuk bekerja sesuai basisnya.

3. Pendidikan dapat membantu seseorang untuk memperbaiki pola dirinya

Pendidikan akan membuat seseorang berpikir lebih terbuka dan berwawasan luas. Hal itu dikarenakan ia telah banyak belajar hal yang tak diketahui bahkan tak pernah terpikirkan sebelumnya. Pendidikan juga dapat membuat seseorang dapat mandiri secara finansial maupun aspek yang lainnya, sehingga dapat membuat pola kehidupan seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

4. Pendidikan dapat membuat seseorang mudah untuk menempatkan diri

Pendidikan akan membuat seseorang membedakan sesuatu. Dengan begitu seseorang dapat lebih mengetahui mana hak setara kewajibannya. Selain itu orang yang berpendidikan akan lebih mudah menghargai dan menghormati orang lain. Dengan begitu, jika seseorang yang berpendidikan ditempatkan pada suatu kondisi atau lingkungan yang belum ia pernah alami sebelumnya, akan membuat mereka mudah beradaptasi.

Pendidikan juga penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hal itu akan menjadi tolak ukur suatu bangsa. Berbicara soal pendidikan yang dapat menjadi tolak ukur suatu bangsa, setiap bangsa memiliki ribuan bahkan jutaan warga negara. Warga negara tersebut merupakan aset dari aspek sumber daya manusia yang dapat membangun serta memajukan suatu negara. Berkualitas dan majunya suatu negara juga ditentukan oleh sumber daya manusianya yang memiliki kualitas yang baik, dari segi intelektual, spiritual maupun *skill*. Tentu hal tersebut dapat dimiliki melalui pendidikan. Untuk itu, tentunya setiap negara memiliki intervensi masing-masing dalam bidang pendidikan untuk membuat warganya menjadi berkualitas, karena seseorang warga negara yang berkualitas mampu bersaing dengan bangsa lain yang mana dapat menjadi tolak ukur pula oleh suatu negara. (Nurkhibatulloh, 2019)

Pendidikan yang dimiliki oleh seorang warga negara dapat membuat citra akan bangsanya menjadi lebih baik dan ternilai di mata dunia. Dikatakan demikian karena seorang warga negara yang berpendidikan serta berprestasi kancah dunia akan membuat sebuah negara dinilai

berkualitas. Seseorang yang berhasil mencetak prestasi di kancah dunia merupakan salah satu bentuk perilaku bela negara. Seperti yang diketahui, bela negara merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Hal itu termuat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*. Selain itu dijelaskan pula dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan suatu wujud kecintaan seorang warga negara terhadap negaranya dan merupakan bakti kepada bangsanya.

Bela negara dalam diri seorang warga negara dapat ditanamkan serta dapat diwujudkan melalui pendidikan bela negara. Hal itu dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Sangat penting bagi setiap warga negara khususnya anak muda sebagai generasi penerus suatu bangsa mengenyam pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang diketahui, jika melihat kondisi Indonesia saat ini cukup miris karena budaya asli Indonesia mulai terkikis dan terbunuh oleh budaya barat. Hal itu dapat dilihat dari pergaulan anak muda yang sebagian besar sudah mengikuti *trend* budaya barat. Dapat disimpulkan pula bahwa sangat sedikit sekali anak Indonesia yang bangga akan budaya Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi dasar mengapa pentingnya pendidikan bela negara bagi warga negara khususnya anak muda.

Sikap bela negara merupakan kekuatan negara Indonesia dalam proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar proses pencapaian tujuan tersebut dapat berkembang sesuai dengan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dipahami ketahanan bangsa sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Kita perlu menyadari bahwa kita perlu melindungi negara kita, memiliki sikap dan tindakan yang sesuai untuk perjuangan kita, mencintai negara kita, dan rela berkorban untuk negara dan negara kita. Kita perlu menanamkan sikap defensif di negara dan cinta pemuda untuk negara. Karena merupakan sumber daya manusia, titik sentral potensi negara untuk melakukan pembangunan, untuk mengatasi segala jenis ancaman yang ada (Az-Zahro, 2020).

Pemerintah Indonesia tentunya juga telah melakukan upaya guna menanamkan pentingnya bela negara dalam diri generasi muda Indonesia. Upaya yang dilakukan ialah salah satu program baru yang saat ini sedang digalakkan yaitu Komponen Cadangan (KomCad). KomCad merupakan suatu program pendidikan militer yang dapat diikuti oleh seorang mahasiswa di seluruh Indonesia dalam mempersiapkan komponen komponen tambahan dari segi militer. Seorang mahasiswa yang mengikuti program KomCad akan mendapatkan pendidikan militer selama beberapa bulan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara pada diri anak muda, dan dari hal itu pula diketahui bahwa bela negara sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dan terhindar dari berbagai ancaman yang ada. (Briantika, 2020)

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menyebut Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama, yang tak lain adalah TNI. Komponen Cadangan atau selanjutnya disebut dengan Komcad yang mana kegiatan tersebut diikuti kurang lebih selama 6 bulan. Usai pelatihan tersebut dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, para masyarakat yang telah mengikuti KomCad akan siap bertempur. KomCad menjadi salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan sistem pertahanan yang bersifat semesta, juga dalam hal ini melibatkan seluruh sumber daya nasional.

F. DATA SERTA PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang sangat *concern* dalam dunia pendidikan. Hal itu terbukti bahwa Indonesia menerapkan kebijakan 12 tahun wajib belajar bagi seluruh warga negaranya. Banyak sekolah negeri yang didirikan guna membantu setiap warga negara dapat mengenyam pendidikan secara penuh selama 12 tahun. Dalam kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia yang tak dapat menerima pendidikan secara penuh akibat keterbatasan ekonomi maupun hal lainnya. Hal itu membuat data sumber daya Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan

masih terbilang buruk. Berdasarkan *Programme of International Student Assesment (PISA)*, posisi Indonesia tertinggal dari Malaysia dan Brunei. Indonesia mendapatkan angka 371 dalam hal membaca, 379 untuk matematika dan 396 terkait dengan ilmu pengetahuan dan membuat Indonesia berada di posisi 66 dari 70 negara.

U.S. News & World Report telah merangkum sistem pendidikan terbiak di seluruh dunia melalui survei global tahun 2021 berbasis persepsi yang mana dinilai melalui tiga aspek yaitu dari sistem pendidikan, kemauan seseorang untuk kuliah di negara tersebut dan kualitas negara tersebut. Dalam survei tersebut Indonesia menempati posisi ke 55 dari 73 negara yang diikutsertakan dalam survei yang mana hal itu merupakan hal yang baik dari tahun sebelumnya yang pada saat itu Indonesia menempati satu urutan di bawahnya (Nur, 2021).

Grafik 5. 1 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Usia Tahun 2018-2020 di Indonesia (dalam persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020, diolah

Berdasarkan grafik 1, dilihat dalam angka diketahui bahwa persentase penduduk buta huruf di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pada rentang usia 15+ dan 45+ sedangkan pada usia 15-44 mengalami penurunan di tahun 2019 kemudian meningkat di tahun 2020. Pada penduduk berusia 15+ penduduk buta huruf di tahun 2018 sebesar 4,34 persen, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4,1 persen kemudian di tahun 2020

mengalami penurunan kembali menjadi 4 persen. Pada penduduk rentang usia 15-44 tahun, di tahun 2018 diketahui penduduk buta huruf sebesar 0,86 persen, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,76 persen, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,8 persen. Pada penduduk dengan usia 45+ yang mengalami buta huruf, pada tahun 2018 diketahui sebesar 10,6 persen, kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 9,92 persen, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 9,46persen. Angka tersebut menjelaskan bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Indonesia dari aspek penduduk yang mengalami buta huruf.

Kondisi pendidikan di Indonesia tentunya tak luput dari permasalahan. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi permasalahan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Adapun penjelasan terkait masalah pendidikan di Indonesia sebagai berikut:

1. Dana

Ketika membahas soal dana, rasanya hal tersebut merupakan permasalahan yang tak luput dari segala bidang, terkhusus pendidikan. Permasalahan terkait dana sebagian besar dialami oleh peserta didik yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Menurut survei yang dilakukan oleh HSBC, Indonesia termasuk ke dalam 15 negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia di mana menempati urutan ke 13. Walaupun telah ditetapkan kebijakan 12 tahun wajib belajar untuk mengatasi permasalahan pendidikan terkait dana tetapi nyatanya hal itu bukan sebuah solusi yang tepat. Dikatakan demikian karena hingga saat ini pengalokasian dana pendidikan di Indonesia terbilang belum merata. Salah satu penyebabnya ialah tidak adanya ketentuan dan kepastian dari pihak Kementerian Dalam Negeri atas anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pendidikan murni dari pendapatan asli daerah (PAD) di luar transfer dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK). Kemudian hal ini terjadi juga karena terdapat oknum pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap DAK pendidikan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling utama dalam menunjang keberlangsungan suatu kegiatan belajar mengajar, tetapi hal

tersebut yang saat ini masih menjadi permasalahan di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana yang tidak merata di seluruh daerah masih terjadi. Ketimpangan fasilitas pendidikan pun masih terjadi antara kota dan desa. Hal tersebut sangat terlihat apalagi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang diketahui fasilitas pendidikannya kurang memadai baik dari segi bangunan, listrik, maupun sarana prasarana penunjang pendidikan lainnya.

3. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan, yaitu tenaga pendidik. Menurut data UNESCO *dalam Global Education Monitoring (GEM)* kualitas tenaga pendidik di Indonesia berada di peringkat 14 dari 14 negara berkembang di dunia. Guru memiliki peran yang sangat penting kontribusinya dalam dunia pendidikan. Melalui para guru, tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan SDM dalam dunia pendidikan ialah terdapat guru yang saat ini belum cakap dalam penggunaan teknologi. Padahal teknologi merupakan salah satu penunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Seperti kondisi saat ini di situasi pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya, peran guru sangatlah penting guna menunjang pembelajaran jarak jauh. Solusi seperti permasalahan di atas sebenarnya mudah didapatkan apabila dilakukan pelatihan maupun pengembangan, peningkatan profesionalisme serta peningkatan kesejahteraan guru.

Berbagai solusi tentunya sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut mulai dari kebijakan guna pemerataan alokasi dana pendidikan, pemerataan pembangunan sarana prasarana hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik. Upaya tersebut terbukti telah membuahkan hasil dari berbagai bidang yang dijangkau oleh pendidikan.

Grafik 5. 2. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2020 di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021, Diolah

Berdasarkan grafik 2 di atas, dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 3 tahun terakhir. Angka melek huruf pada penduduk laki laki pada tahun 2018 sebesar 99,72 persen, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 99,78 persen dan masih bertahan di besaran yang sama di tahun 2020, sedangkan pada penduduk perempuan pada tahun 2018 sebesar 99,7 persen, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 99,75, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 99,78 persen. Angka Melek Huruf laki laki cenderung selalu lebih tinggi dari perempuan hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah pendidikan yang bisa didapatkan khususnya di beberapa daerah dan mayoritasnya adalah ibu rumah tangga.

Grafik 5. 3. Proporsi Sekolah dengan Akses Listrik dan Komputer Tahun 2016 -2018 di Indonesia (dalam persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021, Diolah

Berdasarkan grafik 4 di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini merupakan bukti dari upaya pemerintah dalam pemerataan pendistribusian sarana dan prasarana pendidik di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan memiliki kemajuan dalam berbagai aspek, hal ini diharapkan dapat menjadi langkah baik yang dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Pendidikan sebagai proses melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas tidak terlepas dari berbagai masalah. Terlebih di Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terbagi menjadi daerah-daerah kecil sehingga menjadi suatu tantangan dalam pemerataan pendidikan itu sendiri. Adapun permasalahan dalam pendidikan secara langsung dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti televisi, HP, dan lain sebagainya. Dengan hal tersebut, pemerintah perlu ekstra memerhatikan hal-hal mengenai pendidikan karena seharusnya seluruh anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut sesuai amanat dalam UUD 1945, pada alinea ke 4 yang salah satunya berbunyi "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa", dengan demikian pendidikan merupakan faktor utama dalam kehidupan. Tanpa pendidikan maka generasi penerus sulit untuk melanjutkan dan memajukan bangsa.

Kemajuan pendidikan itu sendiri juga harus dibarengi dengan pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini, dengan semakin meningkatnya pendidikan di Indonesia maka perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan seperti efektivitas, efisiensi dan standarisasi, serta penyempurnaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah. Tidak hanya berdasarkan pengetahuan pemerintah. Kualitas pendidikan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan itu sendiri, tetapi juga oleh lingkungan sekitar. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan, seperti guru, pengolah sekolah, masyarakat, siswa, dan terutama pemerintah terlibat sebagai pembuat kebijakan.

Solusi dari masalah pendidikan di Indonesia adalah dengan merubah sistem pendidikan dengan mendidik siswa dan mengarahkan mereka untuk lebih kreatif dalam beraktivitas, dan pemerintah juga memiliki masalah pendidikan, terutama dengan membuat perencanaan yang harus segera diselesaikan. Membuat kurikulum yang berfokus pada potensi

siswa, disesuaikan dengan situasi siswa. Pemerintah serta masyarakat harus membantu meningkatkan kesadaran tentang pemerintah mempelajari pengetahuan penting dan mengawasi kegiatan pendidikan di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan sumber daya manusia, dan memungkinkan cita-cita negara terus berlanjut di dunia internasional.

G. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Pendidikan merupakan hak segala manusia untuk dapat mendapatkannya. Pendidikan juga merupakan hal yang penting yang semestinya di kapasitas oleh negara. Indonesia telah mewujudkan hal tersebut. Berbagai kebijakan telah diciptakan agar seluruh warga negara Indonesia dapat memperoleh akses pendidikan minimal selama 12 tahun. Tak hanya itu, bantuan dari pemerintah juga telah disediakan hingga perguruan tinggi, yang termuat dalam suatu program. Adapun beberapa kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia guna memfasilitasi warga negaranya agar dapat mendapatkan pendidikan yang layak antara lain:

1. Program Wajib Belajar 12 tahun

Program Wajib Belajar 12 tahun adalah suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang mana merupakan kelanjutan dari program 9 tahun wajib belajar. Program ini termuat dalam UU No.80 Tahun 2013. Program ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan dari program sebelumnya dan untuk memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada seluruh penduduk Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan. Adapun bentuk implementasi dari program ini ialah digratiskannya pendidikan selama 12 tahun di sekolah-sekolah negeri milik pemerintah. Tanpa dipungut biaya sumbangan biaya pendidikan, program ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas di masa yang akan datang. Sudah ditetapkan sejak tahun 2012, program ini masih berjalan hingga saat ini.

Kebijakan ini telah diterapkan di seluruh Indonesia, tetapi belum berjalan dengan sempurna. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini, antara lain:

- 1) Minimnya dana alokasi pendidikan,
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat akan sebuah pendidikan,

- 3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan
- 4) Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan tersedia di daerah.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya agar program tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan cara mengusahakan pengalokasian dana pendidikan secara merata hingga ke daerah serta mengadakan sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat akan pentingnya pendidikan.

2. Program Indonesia Pintar

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 terkait dengan pendidikan tinggi, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan distribusi keterjangkauan dan adil dalam memperoleh pendidikan tinggi dan pendidikan yang relevan untuk kepentingan masyarakat untuk kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk meningkatkan akses dan peluang untuk belajar di universitas dan mempersiapkan orang-orang yang cerdas dan tajam Indonesia. Berdasarkan hal ini, pengejaran pemerintah selalu untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia yang kurang mampu, terutama mereka yang memiliki prestasi akan terus mempelajari sampai tingkat konferensi melalui program Indonesia yang cerdas (PIP). PIP adalah program pengecoran bidikmisi. PIP adalah alat dalam bentuk uang tunai, memperluas akses dan peluang belajar dari pemerintah untuk membiayai siswa dan siswa keluarga yang rentan miskin atau miskin. Ini adalah dasar untuk komitmen pemerintah untuk mengakses sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk pendidikan tinggi untuk seluruh komunitas. Menurut Permendikbud No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia yang cerdas, PIP bertujuan untuk menerima siswa di universitas termasuk para penyandang disabilitas dengan prioritas tujuan Gubernur Ayam, keluarga miskin / miskin dan / atau dengan pertimbangan spesial, deklarasi serius, Papua dan Papua dan Papua Barat dan 3T dan TKI) dan siswa terkena dampak bencana, konflik sosial, atau kondisi khusus.

Melalui PIP di tahun 2020, pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan untuk 200.000 siswa yang menerima universitas termasuk para penyandang cacat dalam bentuk kartu Indonesia yang cerdas atau universitas mafen sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya pendidikan tinggi. Konferensi KIP akan memastikan keberlanjutan konferensi yang bertugas memberikan pelepasan level masuk di universitas dan biaya bulanan untuk siswa yang hidup dengan persyaratan ekonomi dan akademik. Pada tahun 2021, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Puslaptik kembali ke bantuan untuk menyalurkan hingga lebih dari 200 ribu penerima mahasiswa ayam baru melanjutkan pendidikan, selain melanjutkan penyebaran konferensi ayam baru dalam garansi IR dan bidikmisi ke depan sampai periode studi lengkap.

H. PENDIDIKAN DAN KONDISI BELA NEGARA DI INDONESIA

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha fokus untuk memajukan pendidikan bagi warga negaranya. Hal ini dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan nantinya akan berguna di kemudian hari baik untuk kehidupannya sendiri maupun bagi negaranya. Sektor pendidikan menjadi sektor terpenting karena di dalamnya mencakup proses pembelajaran yang diharapkan bisa berjalan efisien dan efektif agar tercipta sistem pendidikan yang baik. Indonesia sendiri memiliki sistem pendidikan nasional beserta program-program unggulannya.

Salah satu program pendidikan yang diusung pemerintah Indonesia adalah wajib belajar 12 tahun. Program tersebut mencakup enam tahun jenjang sekolah dasar, tiga tahun jenjang sekolah menengah pertama, dan tiga tahun jenjang sekolah menengah atas. Harapannya dengan adanya program wajib belajar 12 tahun maka seluruh warga Indonesia dapat menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas baik dalam sekolah umum maupun sekolah kejuruan. Terdapat tiga instansi yang membawahi jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, di antaranya yaitu:

- 1) Jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Semua jenjang pendidikan berbasis agama mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi oleh Kementerian Agama; dan
- 3) Pendidikan tinggi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Sejarah mencatat proses panjang mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Dari proses yang panjang itulah tercipta keunggulan-keunggulan dari setiap sistem pendidikan yang pernah diterapkan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa berkembang semakin baik dan majunya sistem pendidikan di Indonesia, walaupun tidak dapat dipungkiri masih saja terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan tersebut. Berikut merupakan sistem pendidikan yang sudah pernah diterapkan pemerintah Indonesia, yakni:

- 1) Sistem pendidikan terbuka, di mana peningkatan kreativitas, inovasi hingga kemampuan bekerja sama yakni antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain menjadi fokus dalam pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran dalam sistem pendidikan terbuka adalah dengan melatih para peserta didik untuk bertanggung jawab dan mandiri serta berinisiatif dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Para peserta didik juga secara aktif dan mandiri dapat memilih waktu, tempat, materi hingga cara belajar yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi beberapa pilihan oleh pihak sekolah.
- 2) Sistem edukasi beragam, di mana sistem pendidikan dibuat dengan menyesuaikan keberagaman dan kekayaan Indonesia. Keberagaman yang dimaksud adalah keanekaragaman budaya dan bahasa di Indonesia sehingga terciptanya tiga jenis sistem pembelajaran yaitu secara informal, formal, dan nonformal.
- 3) Sistem pendidikan dengan orientasi nilai, di mana orientasi nilai yang dimaksud adalah dalam hal pendidikan karakter di antaranya nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, dan tenggang rasa. Sistem pendidikan dengan orientasi nilai ini diberikan sejak jenjang pendidikan tingkat dasar. Biasanya materi dalam pendidikan karakter yang berorientasi nilai ini ada dalam pelajaran seperti PKN dalam

jenjang pendidikan tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tingkat atas dan juga Bela Negara dalam jenjang pendidikan tingkat tinggi.

- 4) Sistem pendidikan efisien dalam pengaturan waktu, di mana dalam proses pembelajaran atau biasa dikenal dengan istilah KBM atau kegiatan belajar mengajar di sekolah memerhatikan pengelolaan waktu yang cermat. Hal ini dilakukan agar para peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Dengan pengelolaan waktu tersebut juga akan memberikan manfaat kepada para peserta didik yakni mudahnya penyerapan materi karena efektif dan efisien waktu yang diberikan. Harapannya dengan begini maka para peserta didik akan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu.
- 5) Sistem pendidikan sesuai perubahan zaman, di mana sistem pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi dan situasi sekitar. Indonesia selalu berubah dari masa ke masa sehingga dilakukan penyesuaian pada sistem pendidikannya. Salah satu yang dilakukan adalah dengan pergantian kurikulum dari yang sebelumnya KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 kemudian disempurnakan dan direvisi menjadi Kurikulum 2013. Pergantian kurikulum tersebut juga membantu dalam memperbaiki sarana dan prasarana serta membantu dalam mengevaluasi tenaga pengajar (Mutu Institute, 2021).

Sejarah singkat sistem pendidikan di atas mengindikasikan bahwa terdapat banyak hal yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan yang sudah ada saat ini. Hal ini perlu dilakukan agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas dalam menciptakan *output* pendidikan yang berguna bagi negara. Pembinaan karakter positif, pemberian pengetahuan akademis, dan pembimbingan keterampilan peserta didik menjadi tujuan dari sistem pendidikan ini. Pihak- pihak terkait juga ikut berperan serta dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dalam menyukseskan program wajib belajar Pemerintah Indonesia dengan memberikan bantuan pendidikan kepada warga yang kurang mampu seperti KJP yang diberikan oleh Provinsi DKI Jakarta dan program kesejahteraan yang diberikan oleh Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Diharapkan dengan program penyokong tersebut maka pendidikan di Indonesia bisa dirasakan oleh setiap warga negaranya , selain itu juga dapat menciptakan SDM yang berkualitas sehingga sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik di kemudian hari.

Sistem pendidikan di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Salah satunya adalah sudah hampir dua tahun terakhir pandemi covid-19 terjadi sehingga ikut memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada sistem pendidikan dalam negeri. Proses pembelajaran yang biasa dilakukan dengan tatap muka di sekolah, mau tidak mau harus dilakukan secara daring. Proses pembelajaran melalui daring ini sangat memerlukan bantuan teknologi terkini seperti *gadget* baik *smartphone* maupun komputer jinjing dan jaringan internet yang memadai. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi para peserta didik di pedalaman yang sulit akses internet dan tidak memiliki *gadget* tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka kondisi pandemi ini menjadi tantangan bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan untuk memberikan akses yang merata dalam hal pemerataan jaringan internet dan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Peralihan aktivitas yang semula dilakukan secara langsung menjadi aktivitas serba daring menjadikan pandemi covid-19 memiliki dampak positif tersendiri. Mayoritas aktivitas yang dilakukan secara daring menyebabkan setiap orang mau tidak mau untuk melek teknologi. Tak terkecuali dengan para peserta didik yang dalam kegiatan pembelajaran perlu sekali untuk mempelajari teknologi secara mandiri agar tidak tertinggal oleh keadaan zaman yang semakin maju. Bantuan teknologi dalam proses pembelajaran terkini tetap tidak bisa menggantikan peran tenaga pengajar seperti guru dan dosen serta para peserta didik yang lain. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran dengan interaksi secara langsung dapat menjadikan waktu pembelajaran efektif dan efisien oleh setiap peserta didik dalam menyerap setiap pelajaran.

Kreativitas para peserta didik dalam penggunaan teknologi menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersebut dapat menjadikan para peserta didik menjadi lebih kompeten dalam penggunaan teknologi yang baik di abad ke-21 ini. Peserta didik diharapkan dapat menjadi pembelajar

mandiri sebagai *output* dari pendidikan. Dengan proses pembelajaran yang sebagian besar sudah dilakukan secara daring juga dapat menjadi kebiasaan melek teknologi yang baik. Para peserta didik juga mampu menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran walaupun dengan kondisi yang terbatas, namun tetap menurunkan semangat mereka untuk bekerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Dalam jenjang pendidikan tinggi, para pemangku kebijakan merespons cepat peralihan kegiatan pembelajaran daring ini dengan mengeluarkan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan program MBKM ini para mahasiswa diberikan kesempatan mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studinya, sehingga para mahasiswa memiliki pengalaman belajar yang lebih luas. Permata Sakti, Mengajar Dari Rumah atau MDR, KKN Tematik, dan relawan pengendalian covid-19 atau RECON merupakan program-program yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam masa pandemi dua tahun terakhir. Seluruh mahasiswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat mengikuti program-program tersebut (Kemdikbud, 2020).

Sistem pendidikan di Indonesia, yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran, juga tidak terlepas dari Pancasila sebagai landasan ideologi dasar. Hal ini dikarenakan pancasila memiliki sifat yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum bagi seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia. Kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia juga menjadi penting untuk terus berpedoman pada landasan tersebut. Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sangat berkaitan dengan kondisi negara, di mana saat semua warga negara memiliki perilaku yang taat pada aturan dan juga rukun antara satu dengan yang lainnya maka kondisi negara akan menjadi aman dan kondusif. Dengan kondisi negara yang aman tentu saja memudahkan setiap warga negara dalam beraktivitas, namun kondisi negara yang tidak aman seperti mendapat ancaman dari pihak luar ataupun adanya konfrontasi antar warganya maka akan menjadi kondisi yang menyulitkan. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan menjadi salah satu cara dalam memberikan pembelajaran tentang kondisi negara dan ancaman serta tantangan yang akan muncul di kemudian hari.

Pembelajaran mengenai kondisi negara dan etika dalam berperilaku dengan berpedoman pada Pancasila sudah diberikan sejak jenjang pendidikan dasar yakni sekolah dasar dalam mata pelajaran PKN atau biasa lebih dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan yang sudah ditanamkan dan diperkenalkan sejak dini maka keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan segenap bangsa akan terjaga dalam waktu jangka panjang. Hal ini tentu berdampak pada kuatnya fundamental ketahanan nasional sehingga akan memperkecil kerentanan ancaman, keamanan, dan kenyamanan bangsa Indonesia di kemudian hari. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini juga ada sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, walaupun istilah yang lazim digunakan menjadi pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara disini menjadi kebutuhan legal bagi setiap warga negara seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

- 1) UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 tertulis tegas bahwa *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*.
- 2) UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”*
- 3) UUD 1945 Pasal 30 ayat 2 juga dijelaskan bahwa *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*
- 4) UU No.. 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 juga menyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”*
- 5) UU No. 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dijelaskan secara tertulis bahwa *“Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud Ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan Pengabdian sesuai dengan profesi”*

Pada peraturan perundang-undangan di atas mengenai bela negara bagi para warga Indonesia maka sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan, perlu untuk menyadari pentingnya bela negara tersebut. Bela negara di sini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan masyarakat atau warga negara Indonesia menjadi subjek pertahanan negara yang bersifat semesta. Kekuatan negara pun dapat terwujud jika sikap bela negara bisa dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia.

Peserta didik sebagai pelajar dapat mewujudkan sikap bela negaranya dengan berperilaku dan memiliki sikap yang menunjukkan mencintai tanah air, perjuangan, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Bela negara menjadi pembelajaran yang sangat penting dalam proses kegiatan mengajar karena perannya dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Hal ini dikarenakan pembelajaran tersebut dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air sejak sedini mungkin sehingga kecintaan mereka terhadap negara Indonesia sudah tertanam lebih kuat. Titik pusat potensi negara dalam menghadapi setiap ancaman yakni ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam ada pada sumber daya manusia yakni para penerus bangsa yang ikut dalam proses pembelajaran dalam pendidikan. Alasannya adalah para penerus bangsa tersebut dapat bertindak lebih cerdas karena pembelajaran dalam pendidikanlah yang sudah melatihnya untuk mengatasi maupun menghadapi ancaman yang tiba-tiba saja datang.

Peran warga negara atau masyarakat memang penting dalam setiap perwujudan bela negaranya, namun tidak akan menjadi manfaat yang optimal apabila tidak didukung oleh pihak-pihak terkait. Atas alasan tersebut, program pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN yang diusung Kementerian Pertahanan menjadi salah satu wadah warga negara Indonesia dalam mewujudkan bela negaranya. Program PKBN tersebut dirancang hingga beberapa tahun ke depan yakni hingga tahun 2040 yang memuat acuan atau pedoman dalam membangun karakter bela negara. Kesepahaman dan kesamaan pola pikir serta tindakan dalam mewujudkan kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia diharapkan dapat terwujud pada tahun 2045, dalam menyambut seratus tahun Indonesia merdeka (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).

Sudah ada programnya dan sudah ada warga negaranya maka keduanya dapat bersinergi bersatu agar tujuan akhir yang dituju dapat berhasil di kemudian hari. Menyuarakan semangat bela negara, menyatukan langkah, dan, menyuarakan cinta tanah air serta ikut serta dalam program tersebut dapat menjadi langkah yang baik mewujudkan kesadaran bela negara. Program yang diusung Kementerian Pertahanan tersebut merupakan program prioritas berskala nasional yang terdapat dalam Nawa Cita. Memperteguh kebhinekaan, membentuk karakter bangsa, membangun jiwa bangsa dan memperkuat restorasi sosial merupakan hal-hal yang terdapat dalam Program Nawa Cita. Nilai patriotisme, nilai nasionalisme, cinta tanah air dan bela negaralah perlu ada dalam orientasi pemikiran setiap warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan orientasi pemikiran tersebut dapat menjadi senjata paling jitu jika negara Indonesia dihadapkan pada keadaan nyata yang mengancam ketahanan dan pertahanan negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).

Untuk menyukseskan program PKBN maka dibentuklah program pendukung lainnya yakni pembentukan kader bela negara. Program pembentukan kader bela negara merupakan kerja sama antara kementerian atau lembaga terkait dengan Kementerian Pertahanan dalam mempersiapkan warga negara Indonesia menghadapi ancaman baik ancaman non militer maupun ancaman militer. Nantinya, di tingkat Kabupaten atau Kota dan Provinsi akan ada kader bela negara yang menyebarkan nilai-nilai bela negara. Dalam hal ini kader bela negara juga dapat disebut sebagai *agent of change* baik dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Kader bela negara dibentuk dengan tujuan sebagai berikut (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016):

- 1) Menyelenggarakan PKBN berskala nasional;
- 2) Membentuk dan membina kader bela negara baik pada wilayah rawan konflik maupun pada wilayah perbatasan antar negara;
- 3) Mewujudkan keterlibatan organisasi pemuda, organisasi masyarakat serta komponen bangsa lainnya;
- 4) Menghadapi bencana baik yang data dari skala kecil maupun skala besar dengan menggalang solidaritas;

- 5) Menumbuhkan sikap dan membangun kualitas kebersamaan antar masyarakat; dan
- 6) Mengurangi potensi konflik baik antar kelompok masyarakat maupun antar individu masyarakat.

Dengan dibentuknya kader bela negara, diharapkan semua komponen bangsa dapat berperan aktif. Dalam program awalnya, pembentukan kader bela negara ini diarahkan menjadi pembina bela negara maupun pelatih yang nantinya akan membentuk kader-kader bela negara lainnya. Pelatih atau pembina kader bela negara tersebut akan membentuk kader bela negara mulai dari jenjang pendidikan terendah yakni jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Dengan pembentukan kader bela negara di sektor pendidikan diharapkan akan lebih menumbuhkembangkan sikap kecintaan terhadap bangsa guna menjaga keselamatan bangsa dan negara. Program ini diwujudkan dalam bentuk disiplin pribadi, disiplin kelompok dan disiplin nasional bukan dengan mengangkat senjata, sehingga pembentukan kader bela negara ini bukan merupakan wajib militer. Perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara disiapkan dalam program PKBN dan program kader bela negara ini (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).

I. SINERGITAS DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN MEWUJUDKAN BELA NEGARA

Pembangunan kualitas pendidikan suatu negara harus dilakukan secara bersama-sama. Bersinergi antara pihak yang satu dengan yang lainnya yakni tidak hanya dari pihak pemerintah dan para pendidik saja, namun juga peran serta aktif masyarakat perlu dilibatkan di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas ada peran penting di tangan masyarakat. Jika masyarakat tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagaimana pula dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas, karena masyarakat menjadi target atau pelaku dalam proses pendidikan yang ada akhirnya menciptakan SDM yang handal. Faktanya, masyarakat menyerahkan sepenuhnya pendidikan hanya pada para tenaga pengajar. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap pentingnya peran masyarakat dalam dunia pendidikan secara global.

Kesepahaman visi semua *stakeholder* dan sinergitas antar semua komponen pendidikan dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Adapun komponen pendidikan yang dimaksud yaitu peserta didik sebagai *input*, sarana dan prasarana sebagai *tools* yang digunakan, dan juga metode pembelajaran sebagai *proccess*-nya. Dari sinergitas yang diciptakan melalui komponen-komponennya saja akan menciptakan sistem pendidikan yang memiliki *output* berupa kualitas hasil lulusan yang baik dan mumpuni. Di samping itu, untuk memperlancar pencapaian tujuan tersebut diperlukan orientasi pemikiran yang sevisi dan bersinergi aktivitasnya antara kepala sekolah, guru, wali murid dan juga peserta didik.

Dalam hal ini wali murid menjadi simbol yang mewakili masyarakat sangat diperlukan peran aktifnya untuk memajukan pendidikan. Peran yang dimaksud di sini adalah adanya cara pandang yang lebih baik mengenai pendidikan sehingga semua masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan pendidikan. Hal yang tidak mudah untuk mengerjakan itu semua, namun hal tersebut perlu dimulai dari sekarang agar masyarakat memiliki keterlibatan, kepedulian dan berperan aktif dalam dunia pendidikan. Adapun peran masyarakat dalam yang dapat dilakukan di antaranya yaitu:

1. Masyarakat menggunakan jasa pelayanan pendidikan yang tersedia. Dalam hal ini, masyarakat memanfaatkan jasa sekolah sebagai salah satu fasilitas pendidikan yang digunakan untuk mendidik anak-anak mereka.
2. Kontribusi dana, bahan, dan tenaga dapat diberikan masyarakat. Dalam hal ini, mereka berpartisipasi dalam pembangunan fisik dan perawatan sekolah agar fasilitas pendidikan yang sudah didapatkan dapat digunakan terjaga dengan baik.
3. Masyarakat dapat berperan secara pasif. Dalam hal ini, masyarakat menyetujui apa yang diputuskan oleh komite sekolah ataupun pihak sekolah. Contohnya saja saat pihak sekolah memutuskan untuk diadakan pembayaran iuran untuk peningkatan fasilitas sekolah maka

wali murid dari peserta didik menerima keputusan tersebut dan mematuhi.

4. Masyarakat berperan melalui konsultasi. Dalam hal ini, masyarakat sebagai wali murid dapat berkonsultasi tentang pembelajaran yang diterima anaknya. Masyarakat juga dapat memberikan saran atau kritik ke pihak sekolah dengan mendatangi langsung sekolahnya.
5. Masyarakat berperan dalam pelayanan. Dalam hal ini, masyarakat sebagai wali murid ikut terlibat dalam kegiatan sekolah. Contohnya saat sekolah memiliki kegiatan keagamaan, pramuka maupun *study tour* maka wali murid sebagai masyarakat di sini ikut membantunya.
6. Masyarakat dapat berperan sebagai pelaksana kegiatan. Saat sekolah meminta wali murid/masyarakat lainnya guna memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan lain sebagainya maka ia hadir sebagai pembicaranya. Berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya juga dapat dilakukan masyarakat. Hal ini tentu akan mempermudah pendataan fasilitas pendidikan dalam hal mempertimbangkan jumlah guru, ketersediaan sarana dan prasarana yang ada dan sebagainya.
7. Masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan. Bila terdapat pembahasan mengenai masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis maka masyarakat sebagai wali murid di sini dapat terlibat dan ikut dalam proses pengambilan keputusannya demi mengembangkan dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di kemudian hari.

Dalam proses pembangunan pendidikan tidak boleh ada dominasi salah satu pihak saja. Hal ini dikarenakan saat suatu program pembangunan didominasi hanya dari pihak pemerintah maka masyarakat hanya sebagai objek saluran mempercepat program-program mereka sehingga peran masyarakat menjadi lebih sempit dan sedikit lingkupnya. Untuk itu peran masyarakat di dalam pendidikan harus menjadi subjek yang berperan aktif agar dapat memaknai bahwa pendidikan bukan hanya sekadar kewajiban tetapi juga merupakan hak institusional dan juga hak perseorangan anggota masyarakat.

Proses sosialisasi pendidikan merupakan tanggung jawab wali murid sebagai orang tua dari peserta didik dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan. Tanggung jawab tersebut mungkin merenggang pada saat ini, namun tidak pernah lepas dari masyarakat. Hal ini dikarenakan sudah berkembang dengan dominannya pemikiran pembangunan terpusat. Pemikiran tersebut sudah menggeser peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, upaya pemulihan serta pengembalian tanggung jawab rakyat terhadap pengembangan pendidikan perlu dilakukan segera baik pada skala mikro maupun skala makro.

Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan adalah masyarakat harus diikutsertakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi bidang pendidikan. Mulai dari program pembelajaran sekolah hingga kegiatan non ekstrakurikuler hingga pembelian perlengkapan sekolah. Hal ini untuk menciptakan ruang yang besar bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dan bekerja dengan lancar untuk mencapai tujuan mereka. Demikian pula forum dan lembaga non sekolah lainnya perlu memiliki ruang yang cukup luas untuk berpartisipasi agar tanggung jawab pembangunan pendidikan tidak terfokus pada lembaga itu sendiri, terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. .. Partisipasi yang luas dapat diciptakan dengan menyelaraskan kebutuhan setiap daerah atau komunitas di mana individu dan lembaga berada. Jika kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dari pemegang polis dan pengelola pendidikan untuk menyebarkan peran dan kekuasaannya dalam menyikapi kontribusi partisipasi masyarakat.

Masyarakat, termasuk orang tua dan kelompok masyarakat lainnya, harus termotivasi dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Hal tersebut akan menjadi salah satu wujud tanggung jawab masyarakat dalam menciptakan *output* yang baik sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di samping masyarakat, peran pemerintah dan lembaga pendidikan juga menjadi amat penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Keduanya memiliki tanggung jawab penting untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini juga tertulis dalam UU Sisdiknas tahun 2003 bahwa "*Pemerintah serta*

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan serta kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat perlu dijamin oleh pemerintah. Pemerintah perlu menyusun suatu mekanisme tertentu agar masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal pada pengembangan pendidikan di Indonesia. Pengembangan pendidikan bertujuan guna meningkatkan kualitas SDM. Berdasarkan hal tersebut maka meningkatkan kesadaran pentingnya menimba ilmu di dalam dunia pendidikan sangat diperlukan dan hal ini sudah dicanangkan oleh pihak pemerintah mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga ke jenjang pendidikan tinggi.

Peningkatan sumber daya manusia diperlukan supaya setiap masyarakat Indonesia mempunyai pendidikan yang layak, mampu berbagi kemampuan yang diperolehnya agar berguna bagi negara, dan juga dapat bersaing dengan pekerja lain dari luar negeri. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi melimpahnya sumber daya alam tersebut tidak dibarengi dengan mampunya sumber daya manusia yang dapat mengolahnya. Dalam situasi saat ini, banyak sumber daya alam yang dikelola oleh orang asing, tetapi orang Indonesia hanya mendapatkan sebagian kecil dari manfaat pengolahan. Ini merupakan tamparan bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai agar sumber daya alam yang ada dapat dikelola dan diolah, serta mencegah agar tidak habis dan hanya pemangku kepentingan asing yang dapat terus menerus mengelolanya.

Sarana pendidikan, sekolah sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan, hendaknya memuat materi ajar bela negara. Meningkatkan kesadaran cinta tanah air dan melindunginya membutuhkan kesadaran bela negara yang lebih besar melalui pendidikan di semua jenjang pendidikan. Sebagai industri kelas satu, pendidikan diharapkan tidak hanya menghasilkan manusia yang berilmu tetapi juga memiliki kepribadian. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan janji untuk mengatasi penurunan semangat bela negara. Kesadaran bela negara bukanlah bawaan lahir.

Kesadaran bela negara perlu ditingkatkan melalui program penyadaran untuk melindungi bangsa. Pelaksanaan pembinaan dari tingkat dasar bela negara hingga sarjana dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bela diri, penanaman akhlak mulia, optimalisasi kurikulum pendidikan, dan bela nama. Memperkuat sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah dengan menerapkan metode dan materi untuk meningkatkan kesadaran pertahanan negara (Kolonel Laut (Kh) Dr. Dwi Hartono, 2020).

J. CONTOH KASUS

Sejak tahun lalu sebuah kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satunya terkait Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM). Dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 14 ayat 5 tercantum sembilan program di dalamnya, salah satunya adalah pelatihan militer. Program pelatihan militer ini berhasil menarik perhatian berbagai kalangan. Dalam hal ini, banyak masukan maupun kritik yang disuarakan terkait proses pelaksanaan serta kejelasan program.



Gambar 5. 1 Berita Terkait Program Bela Negara
Sumber: detikNews, 2021

Terdapat pendapat dari beberapa mahasiswa mengenai program tersebut. “Program pendidikan militer tidak sesuai dengan situasi saat ini. Program tersebut juga bertentangan dengan Program Kampus Merdeka yang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu kondisi apa yang menyebabkan sampai dikeluarkan program tersebut? Karena gagasan ini dari Kementerian Pertahanan bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga muncul gaya militeristik di dalamnya. Gaya militeristik sering sekali menjadi solusi atas permasalahan cinta tanah air dan mengapa bisa terjadi ” Pernyataan tersebut diutarakan Riezal, mahasiswa Universitas Padjajaran.

Pendapat lainnya diungkapkan Randy, mahasiswa FKM Universitas Indonesia (UI), tidak setuju dengan adanya program tersebut. Rasa cinta tanah air belum tentu dapat ditumbuhkan dalam program tersebut karena ada cara lainnya seperti diskusi atau yang lainnya. Lain halnya dengan Elsa Christina, mahasiswa UI, juga menanyakan keterkaitan perihal militeristik dengan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa (Chatherine, 2020).

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa program pendidikan militer dalam komponen cadangan (komcad) berbeda dengan wajib militer. Menurutnya, sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada NKRI dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan pengertian dari bela negara. Berdasarkan hal tersebut, bela negara harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Di samping itu, terdapat komponen untuk melapis dan menggandakan kekuatan TNI dalam menghadapi ancaman militer ada pada komponen cadangan yang merupakan cadangan militer, sehingga perlu pelatihan militer. Ia juga jelas mengatakan bahwa tidaklah wajib mengikuti program komponen cadangan tersebut karena bukan program untuk kampus.

Program Bela Negara akan terus digalakkan Kementerian Pertahanan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terutama milenial untuk bangga sebagai orang Indonesia. Di sisi lain juga agar cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya, bukan hanya inovatif dan kreatif saja untuk para milenial. Bergabung dalam komponen cadangan juga

merupakan wujud bela negara berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 (Sihombing, 2020).

ANALISA KASUS: PENTINGKAH PENDIDIKAN MILITER?

Pendidikan militer di berbagai negara digunakan dengan maksud yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi negara-negara tersebut. Contohnya saja di Korea Utara dan Singapura. Pendidikan militer di Korea Utara untuk basis pertahanan negara, sementara itu pendidikan militer di Singapura untuk melindungi negaranya karena jumlah masyarakatnya yang sedikit. Penerapan pendidikan militer pada dasarnya dilakukan untuk optimalisasi kekuatan seluruh warga negara apabila terjadi peperangan atau ancaman lainnya maka seluruh warga negara ikut serta di dalamnya. Indonesia sendiri dengan jumlah masyarakatnya yang banyak juga memiliki sumber daya Tentara Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut TNI, juga banyak jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut pendidikan militer di Indonesia perlu dipertimbangkan kembali urgensinya. Di samping itu juga keadaan Indonesia yang bisa dikatakan masih dalam keadaan damai juga perlu menjadi pertimbangan mengapa pendidikan militer itu dirasa penting untuk dilakukan. Mungkin alangkah lebih tepatnya bila mengoptimalkan pembinaan-pelatihan yang ada pada Tentara Nasional Indonesia dan juga membuat program keamanan yang dapat dilakukan seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dibandingkan melaksanakan pendidikan militer.

Terkait bela negara, sebaiknya tidak hanya melihat dari perspektif militerisasi. Pada dasarnya terdapat banyak cara dalam upaya bela negara. Contoh di antaranya yaitu: (1) Ilmuwan menggunakan sumber penelitiannya untuk menciptakan manfaat besar bagi warga negara; (2) Guru dapat memberikan pengetahuan yang membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan (3) Insinyur dapat merancang gaya arsitektur yang sesuai dengan budaya atau karakter negara Indonesia. Mereka semua memainkan perannya masing-masing dalam membela negara. Apalagi dibandingkan dengan kekuatan militer, kreativitas warga negara lebih besar pengaruhnya terhadap pembangunan negara sehingga optimalisasi kreativitas setiap warga negara harus didorong sedemikian

rupa. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan mental kreativitas setiap warga negara sehingga dapat membentuk karya yang dapat ditampilkan secara global.

Ada perasaan khawatir bahwa pendidikan militer dapat menjadi ancaman balik bagi bangsa Indonesia. Bila masyarakat sipil dibekali dengan kemampuan militerisasi, bukan tidak mungkin mereka dapat menyalahgunakan kemampuan itu sebagai upaya penganiayaan atau kejahatan. Tentu saja penyelesaian masalah menggunakan kekerasan menjadi pilihan yang utama karena didukung dengan kemampuan yang sudah diajarkan dalam pendidikan militer. Hal inilah yang mengakibatkan perlu ditinjau lebih lanjut lagi apakah pendidikan militer dalam komponen cadangan perlu benar-benar dilakukan atau tidak dilakukan. Walau kenyataannya program tersebut sudah terealisasi, maka perlu buat dievaluasi dan difokuskan apa yang menjadi *output* dari pendidikan ini. Bila nantinya berdampak buruk dan tidak berjalan efektif mungkin keberlanjutan program ini mampu ditinjau kembali.

ANALISA KASUS: RELEVANKAH PROGRAM PENDIDIKAN MILITER MASUK DALAM DUNIA PENDIDIKAN?

Negara dengan kepulauan terbesar dan jumlah penduduk ratusan juta seperti Indonesia seharusnya memiliki sistem pertahanan yang kuat. Karena dengan sistem tersebut dapat menahan dan menghalau berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, bela negara itu menjadi penting dan wajib dilakukan, namun tidak mesti dengan cara yang militeristik. Apabila dalam suatu jenjang pendidikan ingin mengedepankan kembali jiwa bela negara, mungkin dapat dilakukan dengan memodifikasi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan agar tidak hanya teori tatap muka saja yang diajarkan di kelas. Dapat pula dikombinasikan dengan pendidikan di luar kelas tetapi bukan berbentuk pendidikan militer yang hanya berfokus pada fisik dalam menghadapi ancaman yang ada.

Saat ini, ancaman terhadap bangsa tidak hanya serangan militer, tetapi juga ekonomi, ideologi, wabah penyakit, dan dunia maya. Untuk itu, program pertahanan tidak serta merta dilaksanakan secara fisik, tetapi juga dengan menciptakan generasi tangguh yang rela membela negara melalui keahliannya. Nilai kesadaran mahasiswa untuk hidup berbangsa dan bernegara serta kerelaan berkorban dan mendirikan bangsa untuk bangsa merupakan tujuan melindungi bangsa itu sendiri. Jika semua berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan generasi muda tangguh yang siap bela negara dalam banyak hal dan dalam spektrum yang luas.

Program pendidikan militer ini perlu konsep, target hingga materi program yang detail dan jelas. Hal ini menunjukkan sangat amat perlu mematangkan program tersebut sebelum akhirnya benar-benar dilaksanakan. Tujuannya adalah agar program tersebut benar-benar dapat membangkitkan semangat bela negara dan agar nantinya dari program tersebut tidak berbalik menjadi berbahaya bagi negara.

DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF

Dalam setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki dua sisi baik positif maupun negatif, namun dalam hal ini dengan adanya kebijakan tersebut si pembuat kebijakan akan mempertimbangkan cara tepat untuk meminimalisir atau bahkan agar dampak negatifnya tidak terjadi. Dampak positif dan dampak negatif terkait pendidikan militer dalam dunia pendidikan pun dijelaskan lebih rinci yaitu sebagai berikut.

Dampak Positif

1. Indonesia akan memiliki warga negara yang siap tempur

Dalam hal ini, kesiapan tempur dipahami dalam dua arti yakni, mengangkat senjata dan menghadapi tantangan hidup. Dengan latihan dan pendidikan militer, bangsa Indonesia setidaknya akan memahami ilmu-ilmu dasar pertempuran, pertempuran, kekuatan militer pihak lain seperti negara lain, gerakan separatis, teroris, penculik, dll. Pertanyaan apakah senjata api akan mencapai tujuannya tergantung pada pengalaman dan kebiasaan, tetapi masyarakat umum setidaknya tahu cara menggunakan senjata api.

Pengambilan keputusan untuk bereaksi atas serangan bersenjata seperti agresi militer yang mengancam keamanan negara tidak lagi terhambat. Hal ini dikarenakan semua masyarakat memiliki bekal itu dan negara tidak lagi meragukan kekuatan militer tersebut.

Masyarakat juga akan terlatih dan terdidik menghadapi kerasnya hidup. Terdapat pemikiran bahwa hidup tidak selamanya di atas dan mudah untuk dijalani serta bila terdapat banyak permasalahan tidak boleh putus harapan. Hal ini dikarenakan seluruh tindakan yang menekan manusia hingga batas kemanusiaanya akan mengajarkan dan melatih seseorang untuk siap tempur ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup dan menghargai sekecil apapun yang dimilikinya.

2. Indonesia kembali menjadi Macan Asia

Pamor Indonesia yang dulu menjadi lambang negara-negara Asia Afrika, kembali muncul karena warganya siap menghadapi segala ancaman. Jika ada negara lain di Indonesia yang ingin menimbulkan

masalah, mereka akan berpikir ulang. Menyatakan kepemilikan Reog Ponorogo, menempati blok Ambalat, memainkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahkan memindahkan tanda perbatasan Kalimantan mungkin memerlukan pertimbangan yang cermat dari Malaysia. Hal ini dikarenakan mereka seperti mereka butuh berulang-ulang memprediksi resikonya apabila benar-benar terjadi konfrontasi militer dengan Indonesia.

3. Masyarakat Indonesia yang manja dan tidak tahan banting akan berkurang

Zaman yang semakin canggih sangat memudahkan masyarakat Indonesia dengan hal-hal instan yang dilakukan. Hal ini tentunya akan menurunkan sifat etos kerja mereka dan malah meningkatkan sifat manja dan tahan bantingnya, terutama anak-anak mudanya. Sifat manja sejak dini seperti ketika bayi dimanja, ketika SD diantar-jemput menggunakan kendaraan beroda empat dan menggunakan telepon seluler yang canggih. Ketika SMP difasilitasi sepeda roda dua agar tidak kelelahan untuk pergi ke sekolah. Ketika SMA dibeli mobil supaya tidak kepanasan di jalan. Hingga ketika menjadi mahasiswa saat pengenalan kampus menangis dan melapor ke Komnas HAM, padahal hanya digertak sekali dan penyebabnya karena yang bersangkutan datang terlambat.

Bahkan sehabis sarjana diberikan pekerjaan secara cuma-cuma baik mungkin oleh perusahaan orang tuanya, keluarga, ataupun koleganya. Kalaupun ingin mencari, hanya menginginkan yang mudah, menggunakan “amplop” atau memanfaatkan jabatan orang dekat. Ketika ingin makan pergi ke restoran *fastfood* atau hanya dengan *delivery service*, baju kotor dibawa ke binatu, tugas hanya salin tempel dari google, hingga sampai ingin kurus bukan berolahraga tetapi menggunakan sedot lemak, pil pelangsing, teh galian singset, atau salep pembakar lemak. Kemanjaan- kemanjaan ini bertahap akan berkurang jikalau manusia Indonesia mencicipi bagaimana kerasnya pendidikan militer. Hal ini dikarenakan seperti tentara yang sudah mengikuti pendidikan militer tak terlihat ada yang mempunyai perilaku manja. tak terlihat tentara yang menangis karena kecapekan

atau kepanasan. Hal itu ditimbulkan karena selama bertahun-tahun mereka dilatih sedemikian rupa untuk menghilangkan sifat manja.

4. Pendidikan bagi Pemuda-Pemudi Indonesia

Perilaku disiplin, cinta dan bangga akan negaranya, peduli sesamanya yakni berjiwa korsa ataupun tidak apatis, menghormati orang lain terutama yang lebih tua, bersahaja dan tidak hedonis, serta sifat dan sikap baik lain lainnya dapat tercipta melalui pendidikan ini.

Dampak Negatif

1. Kekerasan sering terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari gejolak yang ditimbulkan oleh peperangan di berbagai suku di Indonesia. Selain itu, hampir setiap budaya lokal Indonesia memiliki banyak variasi senjata tradisional. Ada juga banyak kasus pertempuran di berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda. Bahkan dalam dunia pendidikan, banyak siswa yang lebih memilih kekerasan daripada debat ilmiah. Dalam keadaan seperti ini, bukan tidak mungkin latihan militer yang diperoleh dapat digunakan sebagai konfigurasi untuk unjuk kekuatan. Saya merasa baik karena saya dilatih di tentara, jadi semuanya dilakukan dengan kekuatan fisik.
2. Perluasan anggaran di bidang pertahanan dan keamanan. Berbulan-bulan pendidikan dan latihan militer memakan biaya banyak, dan tentunya memiliki anggaran. Lubang korupsi bisa disalahgunakan, naiknya biaya pembelian seragam, suap dari anak manja yang tidak mau mengikuti pelatihan militer, dan celah lainnya juga bisa berdampak negatif bagi negara.
3. Khawatir akan muncul sebuah organisasi baru, angkatan kesekian setelah Tentara Nasional Indonesia AD, AL, dan AU. Kondisi negara Indonesia saat ini yang memiliki banyak partai politik, organisasi rakyat, LSM, organisasi keagamaan, serta organisasi-organisasi lain sudah sangat mengkhawatirkan keberadaannya bila anggota organisasi ini yang sudah mengecap pendidikan militer akan memakai kepandaianya untuk membentuk sayap militer bagi masing-masing organisasinya. Bila masing-masing organisasi memiliki kekuatan militernya masing-masing pasti akan digunakan untuk membela

organisasinya. Hal ini tentunya merugikan Indonesia karena kondisi yang semula damai akan menjadi perpecahan dan sangat membahayakan kedaulatan serta keamanan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Dr. Ir. Zainal, MS, Djoko Poernomo, Sip, MM, Dra. Endang Iryanti, MM, Dr. Lukman Arif, M.Si. (2014). Buku Ajar: Pendidikan Bela Negara. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Retrieved from: <https://www.upnjatim.ac.id/images/upnjatim/documents/Buku%20Ajar%20Bela%20Negara.pdf>
- Abidin, Z., Poernomo, D., Iryanti, E., & Arif, L. (2014). *Buku Ajar Pendidikan Bela Negara*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Adryamarthanino, V. (2021, 08 17). *Stori*. Retrieved from <https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/17/100000979/perkembangan-sejarah-pendidikan-di-indonesia?page=all>
- Ali, M. (2019). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. PT Sandiarta Sukses.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat*, 129-389; Volume 4, Nomor 2.
- Amani, Z., Nainggolan, W., Yudhani, E., Dhawy, A., & Bororoh, I. N. (2015). Ibrahim-Kun: Penanggulangan Tawuran Melalui Pelatihan Peningkatan Kecerdasan Emosi Pada Remaja Laki-Laki Berbasis Keteladanan Terhadap Nabi Ibrahim (Studi Pendahuluan) . *Seminar Nasional Psikologis UMS* (ss. 39-51). Surakarta: Centre For Islamic Indigenous Psychology.
- Aminah, S., & Athori, A. (2019). Pengembangan RPP P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Mahasiswa Sebagai Wujud Bela Negara Bagi Generasi Muda Milenial Di Universitas Islam Kadiri Kediri. *Jurnal PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*.
- Ardela, F. (2019). *Apa Bedanya Pendidikan Formal, Non-formal, dan Pendidikan Informal?* Retrieved from finansialku.com: <https://www.finansialku.com/pendidikan->

formal/

- Ariani, M. N., & Juliannisa, I. A. (2021). Analisis Indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. *Jurnal Dinamika ekonomi dan Bisnis*.
- Astawa, I. N. (2017). Memahami Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Kemajuan Muru Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu* , 197-205.
- Az Zahro, A. (2020, Maret 18). *Edukasi; Pentingnya Pendidikan Bela Negara Khususnya Anak Muda sebagai Generasi Penerus Bangsa*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/artikelbelanegara/5e719e70097f367578597082/penting-nya-pendidikan-bela-negara-oleh-warga-negara-khususnya-anak-muda-sebagai-generasi-penerus-bangsa>
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. *Bela Negara* (Electronic Book). Retrieved from: <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/upload/link/E-BOOK-BELA-NEGARA.pdf>
- Badan Kesbangpol Provinsi Banten. (2020). *Bela Negara*. Badan Kesbangpol Provinsi Banten.
- Berantas, S. d. (2015). UPAYA BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN SEJARAH . *Jurnal Pertahanan* , 43.
- BNN. (2019). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Retrieved from bnn.go.id: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Briantika, A. (2020). Pendidikan dan bela negara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting yang wajib diterima oleh semua orang. Pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan j.
- Brush, K. (2016, July 10). *StudentCaffe*. Retrieved from StudentCaffe Blog: <http://blog.studentcaffe.com/humanitarian-project-students/>

- C, B. D., Amelia, A., Hasanah, U., & Rahman, H. (2020). Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 28-38.
- C.S.T, K. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RinekaCipta.
- Cahyadin , M., Sutomo, & Ratwianingsih, L. (2017). INDUSTRI PERDAGANGAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KINERJA. *JIEP-Vol. 17, No 2, November* , 78-88.
- Chaterine, R. N. (2020, Agustus 19). *Pendidikan Militer untuk Mahasiswa Dinilai Kontradiktif dengan Kampus Merdeka*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5139694/pendidikan-militer-untuk-mahasiswa-dinilai-kontradiktif-dengan-kampus-merdeka/2>
- Darmadi, H. (2018). *Jenis-Jenis Pendidikan*. Retrieved from <http://hamiddarmadi.blogspot.com:> <http://hamiddarmadi.blogspot.com/2018/07/jenis-jenis-pendidikan.html>
- Departemen Pertahanan RI. (2006). *Tatanan Dasar Bela Negara*. Jakarta: Direktorat Jenderal. Dewan Ketahanan Nasional. (2018). *Implementasi Bela Negara*. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Nasional RI. (den 19 Oktober 2018). *wantannas.go.id*. Retrieved from *Bela Negara : Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Bela Negara*: <https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/#> den 10 September 2021
- Dewi, D. A. (2017). Membangun Karakter Kebangsaan Generasi Muda Bangsa Melalui Integrasi Pendidikan Formal, Informal, dan Nonformal. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Buana Perjuangan Karawang*. Retrieved from <http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/CIVICS/article/view/267>
- Digdiyo, E. (2018). Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media. *Jurnal pancasila dan Kewarganegaraan; ISSN 2527-7057 (online) ISSN 2549-2683 (Printed)*, 46.

- Direktorat Pengkajian Bidang Pertahanan dan Keamanan. (n.d.).
- Dirjen Pothan Dephan RI. (2006). *Tataran Dasar Bela Negara*. Dephan RI, Jakarta.
- Dirjen Pothan Dephan RI. (2007). *Pendidikan Kesadaran Bela Negara: Pedoman bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan*. Dephan RI, Jakarta.
- Dwiastono, R. (2020, Agustus 26). *Program Bela Negara Masuk Kampus, Antara Militerisasi Sipil Dan Hak Warga Negara*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/program-bela-negara-masuk-kampus-antara-militerisasi-sipil-dan-hak-warga-negara/5558180.html>
- Ermaya Suradinata. (2005). *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Suara Bebas, Jakarta. Kemhan, Ditjen Strahan
- Fadli, Rijal M., & Kumalasari D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Jurnal Agasty*, 9 (2), 157-171.
- Fauzan, T.N. (2021, Maret 21). *Bentuk-Bentuk Bela Negara Beserta Penjelasan dan Contohnya*. Retrieved from bola.com: <https://www.bola.com/ragam/read/4518150/bentuk-bentuk-bela-negara-beserta-penjelasan-dan-contohnya>.
- FKUI. (2006, Juni 27). *SEJARAH SINGKAT FKUI*. Retrieved from Wayback Machine: <https://web.archive.org/web/20060827135143/http://www.fk.ui.ac.id/Indonesia/frame/FKUI/sejarah.html>
- Fuad, K. (2011, Maret 29). *Sosial Budaya*. Retrieved from https://www.kompasiana.com/careberos_21/5500a0da813311491bfa7b41/peranan-masyarakat-dalam-pendidikan
- Gischa, Serafica. (2021). Sikap Cinta Tanah Air dan Cara Menanamkannya. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/15/152832869/sikap-cinta-tanah-air-dan-cara-menanamkannya?page=all>
- Gredinand, D. (2017). Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Darat*.
- Habe, H., & Ahiruddin. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains*:

- Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*. Retrieved from <http://jurnal.saburai.id/index.php/manajemen/article/view/48/41>
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan dan Kebijakan Politik, Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi. *Jurnal Agastya*, 6(1).
- Haryati, S. (2009). Peran Pendidikan Dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Bangsa. *Jurnal Penelitian Inovasi*, 31(1), 24-43.
- Hendrian, D. (den 8 September 2018). KPAI: 2020 Anak Tawuran Dalam Dua Tahun. *Publikasi Utama*.
- Herawati, N. I. (2016). Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/eduhumaniora/article/view/2755/1795>
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 22, No. 1, April 2020*, 65- 71.
- Heru sofyan, shidiq fajar, Sumardi, & Umamah, N. (2014). Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1900-1942. Universitas Jember.
- Hidayat, Arief & Nurbaity. (2018). *Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran: Sejarah Pembentukan dan Penerapannya (1950-1955)*. Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 507-521.
- Hudaidah, S. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968- 1998). *Jurnal Humanitas*, 1(1). 9.
- Humas UPNVJ. (2021, April 29). *Berita UPNVJ*. Retrieved from UPN "Veteran Jakarta: <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2021/04/launching-pelatihan-dasar-kemiliteran-komponen-cadangan-bela-negara-indonesia.html>
- Inanna, I. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa yang Bermoral. *JEKPEND" Jurnal Ekonomi dan Pendidikan"*, 1(1), 27-33.

- Indrawati, B. (2020). JKI39Tantangan Dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI) Edisi Khusus*No. 1(Juli2020), 39-48.
- IPB University. (2019, Juny 21). *IPB University Sends 2,555 Students to 29 Districts/Cities toPerform Community Service*. Retrieved from IPB.ac.id:<https://ipb.ac.id/news/index/2019/6/ipb-university-sends-2-555-students-to-29-districts-cities-to-perform-community-service/dc1c407d550e81eb2fd94622c74dd182>
- Istiarsono, Z. (2016). Tantangan Pendidikan Dalam Era Globalisasi: Kajian Teoretik, *JurnalIntelegensia*, 1(2), 19-24.
- Jamaludin, U., Damanhuri, Setiawan, D., & Raharjo. (2017). *Pendidikan KewarganegaraanUntuk Perguruan Tinggi*. Jawa: BKS-PTN Barat.
- Kabul Santoso dkk, (2005). *Pembangunan Moral Bangsa*, PT. Java Pustaka Media,Surabaya.
- Kadi, T., & Awwaliyah, R. (2017). Inovasi Pendidikan : Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 144-155; Volume 01 Nomor 02.
- Kemdikbud. (2018, November 23). *Berbagi Kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Retrieved from [https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan- antara-pemerintah-pusat-dan-daerah](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah)
- Kemdikbud. (2020, Oktober 28). *Tantangan Dunia Pendidikan di Masa Pandemi*. Retrieved from <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/tantangan-dunia-pendidikan-di- masa-pandemi/>
- Kemenhan. (2017). *Sejarah Bela Negara*. Retrieved from Kementrian Pertahanan Republik Indonesia: <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela -negara>.
- Kemenhan. (2018, Oktober 30). *Publikasi Kementrian Pertahanan Republik Indonesia*.Retrieved from Kementrian Pertahanan Republik Indonesia: <https://www.kemhan.go.id/2018/10/30/upn-veteran-sebagai-universitas-pionir-bela- negara.html>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021).

- Tentang Kami: Kampus Merdeka*. Retrieved from Kampus Merdeka: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/latar-belakang>
- Kementerian Pertahanan. (2016). *Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan*. i T. R. WIRA, *BELA NEGARA EDISI KHUSUS 2016* (ss. 1-85). Jakarta, Indonesia: Puskom Publik Kemhan.
- Kementerian Pertahanan. (2017). *Bela Negara, Sejarah Bela Negara*. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016, Maret 31). *Pentingnya Pendidikan Kesadaran Bela Negara Bagi Seluruh Bangsa Indonesia Untuk Menangkal Ancaman*. Retrieved from <https://www.kemhan.go.id/badiklat/2016/04/02/pentingnya-pendidikan-kesadaran-bela-negara-bagi-seluruh-bangsa-indonesia-untuk-menangkal-ancaman.html>
- Kementrian PPN/Bappenas. (2017, 22 Mei). *Siaran Pers: Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan Dan Pendidikan*. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/files/9215>.
- Kesbangpol. (2018). *E-Book Bela Negara*. Retrieved from kesbangpol.bantenprov.go.id:https://kesbangpol.bantenprov.go.id/upload/link/E-BOOK-BELA-NEGARA.pdf.
- Khalid, I. (2021, Januari 13). *Ilmu Sosbud & Agama; Peran Mahasiswa dalam Upaya Bela Negara*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/idhamkhalid9748/5ffea5db8ede484c0f79a9b2/peran-mahasiswa-dalam-upaya-bela-negara>
- Khamis, M. (2021, 12 April). *Pandangan dan Tantangan Pendidikan Indonesia*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qrqnuu483/pandangan-dan-tantangan-pendidikan-indonesia>
- Khasanah, D. A., Pramudibyanto, H., & Widuroyeki, B. (2020). *Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Sinestesia, Vol. 10, No. 1, April 2020*, 41-49.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Kolonel Inf. Arief Wahyu. (n.d.). *Kementerian Pertahanan*.

- Retrieved from https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/migrasi/admin/PENATAAN%20KOMPONEN%20CADANGAN%20DALAM%20SISTEM_majalah.pdf
- Kolonel Laut (Kh) Dr. Dwi Hartono, S. M. (2020). Fenomena Kesadaran Bela Negara di Era Digital dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas R*, 15-34.
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Governance*, 2(1).
- Lewis, C. T. (1966). *A Latin Dictionary*, Oxford. Clarendon Press.
- LP3M. (n.d.). *Info KKN Tematik*. Retrieved from LP3M IKIP Maumere : <http://lp3m.ikipmumaumere.ac.id/kknp/>
- Malik, A., Hartawan, B., & Wardan, I. W. (2020). *Teropong Potensi Radikalisme 2020*. Kabupaten Bogor: Pusat Media Damai.
- Marcia L., C. (1997). *Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition*. New Haven: Yale Univ. Pr.
- Masdin. (2013). Fenomena Bullying Dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 73-83; Volume 6 Nomor 2.
- Maxwell, J. C. (1995). *Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda*. Alih Bahasa oleh Anton Adiwiyoto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Mukhadis, A. (2013). Sosok Manusia Indonesia Unggul dan Berkarakter dalam Bidang Teknologi Sebagai Tuntutan Hidup di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 115-136.
- Munirah. (2015). Sistem Pendidikan di Indonesia: Antara Keinginan dan Realita. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam Auladuna*, 2(2).
- Mutu Institute. (2021, Juni 3). *Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pendidikan di Indonesia*. Retrieved from <https://mutuinstitute.com/post/sistem-pendidikan-indonesia-kelebihan-dan-kekurangan/>
- Muzammil, As'ad. (2016). Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru, *Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2).
- Nahak, Hildigardis. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol 5, No. 1 Tahun 2019. DOI: [//doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76](https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76).

- Nani. (2017, Oktober 09). *5 Makna Bela Negara Bagi Masyarakat Indonesia*.
- Nasution, S. (2011). Strategi Pendidikan Belanda Pada Masa Kolonial di Indonesia. *Ihya Al- Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(2), 254–258.
- Nasution, E. (2014). Problematika Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Media*, 1-10; Volume 8 Nomor 1.
- Ningsih, R. (2020). Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dengan Melaksanakan Pendidikan Menengah Universal dan Pendidikan Vokasi. *Jurnal Revolusi Indonesia*.
- Normina, N. (2018). Pendidikan Dalam Kebudayaan. *ITTIHAD*, 15(28), 17-28.
- Nugroho, F. T. (2021). Bentuk-Bentuk Bela Negara Beserta Penjelasan dan Contohnya. Retrieved from: <https://www.bola.com/ragam/read/4518150/bentuk-bentuk-bela-negara-beserta-penjelasan-dan-contohnya>
- Nur. (2021, Agustus 09). *5 Negara ASEAN dengan Sistem Pendidikan Terbaik Tahun 2021*. Retrieved from https://rri.co.id/takengon/aktual/pendidikan/1144444/5-negara-asean-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-tahun-2021?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
- Nur'insyani, S.R., Dinie, A. (2021). Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai; ISSN 2614-3097 (Online) ISSN 2614-6754 (Printed)*.
- Nurkhibatulloh, B. (2019). Pentingnya Pendidikan dalam Kehidupan.
- Nurwahyuni, K., & Hudaidah, H. (2021). Sejarah Sistem Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa. *Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2).
- OED, O. (2021, September 2). *Oxford: Oxford University Press*. Retrieved from Oxford English Dictionary: [oed.com](https://www.oed.com)
- Pengenalan Lingkungan dan Budaya Akademik Universitas Nasional. (2021). Bela Negara Perguruan Tinggi. Retrieved from: <https://www.unas.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/BELA->

- Poesponegoro dan Marwati Djoened. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Prayudi, G., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901- 1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20–34. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/290559825.pdf>
- Purba, J. T. H. (2018). Pendidikan Nusantara pada Masa Portugis dan VOC. Retrieved from <https://historical577.wordpress.com/2018/04/06/pendidikan-nusantara-pada-masa-portugis-dan-voc/>
- Putri, A. S. (2019, 1209). *Skola*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pendidikan-pemerintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda?page=all>
- Putri, Leni. (2018). Unsur-Unsur Negara. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/501902463/Leni-Putri-Ilmunya-Negara-pdf>
- Quigley, M. (2017, October 4). *The classroom*. Retrieved from the classroom: <https://www.theclassroom.com/what-are-humanitarian-projects-12083264.html>
- Rahayu, M., Farida, R., & Apriana, R. (2019). Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa. *Epigram Vol. 16 No. 2*, 178.
- Rahmat, P. S. (2016). Peran Pendidikan Dalam Membentuk Generasi Berkarakter Pancasila. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 3(2).
- Retnahayati, N. (2019). Peran Pendidikan Terhadap Ekonomi Digital di Indonesia Tahun 2016. *Media Trend*, 14(1), 120-127. doi:<https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i1.4502>
- Saihu, & Marsiti. (2019). Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 23-54; Volume 1 Nomor 1.
- Salsabila, U. H., Sari, L. I., Lathif, K. H., Lestari, A. P., & Ayuning, A. (2020). Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Vol. 17 No. 2*, 188-

198.

- Sekretariat GTK. (2020). *Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi*. Indonesia: GTK Kemdikbud.
- Sekretariat Guru dan Tenaga Kependidikan. (2020, September 3). *Kebijakan Kemendikbud di Masa Pandemi*. Retrieved from Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan: <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi>
- Septiana, T. (2020). Pembelajaran bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membina semangat nasionalisme mahasiswa STKIP PGRI Kota Sukabumi. *SOSIO RELIGI: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 31 – 44.
- , (2020). Pembelajaran bela negara dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membina semangat nasionalisme mahasiswa STKIP PGRI Kota Sukabumi. *Jurnal Kajian Pendidikan Umum Vol. 18 No. 2*, 32-33.
- Setiawan, H., Aji, S. M., & Aziz, A. (2020). Tiga Tantangan Guru Masa Depan Sekolah Dasar Inklusif. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(2), 241-251. <http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v3i4.458>
- Sholikhah, B. (2020). *Mahfud MD*. *Republika.Co.Id*. Retrieved from: <https://republika.co.id/berita/qgo45l428/mahfud-md-bela-negara-bukan-hanya-hak-tapi-kewajiban>
- Sihombing, R. F. (2020, September 02). *Wamenhan Jelaskan Perbedaan Pendidikan Bela Negara dengan Komcad*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5156734/wamenhan-jelaskan-perbedaan-pendidikan-bela-negara-dengan-komcad>
- Siregar, E. (2016). Kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengenai pendidikan bagi kaum bangsawan di Indonesia tahun 1900-1920. *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, 3(1).
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). *Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(3), 436–456. Jakarta
- Solihah, Bahiyyah. (2015). Konsep Cinta Tanah Air Perspektif Ath-Thahthawi dan Relevansinya dengan Pendidikan Indonesia. Retrieved from

- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30188/1/BAHIYYAH%20SOLIHAH-FITK.pdf>
- Suabgyo, A. (2014). *Bela Negara : Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, Aman, Kumalasari, D., Sutopo & Nuryanto, A. (2017). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132304482/lainlain/buku-peta-jalan-pendidikan-indonesia.pdf>
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29–39. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Supandji, B. S. (2012). *Bangga Indonesia: Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air*. Grasindo.
- Supardan, Dadang. (2008). Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis. *Jurnal GENERASI KAMPUS*, 1(2).
- Suryana. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Edukasi*.
- Susanti, A. (2016, 14 September). *Tantangan Pendidikan Masa Depan*. Retrieved from <https://edukasi.okezone.com/read/2016/09/14/65/1488883/tantangan-pendidikan-di-masa-depan>
- Sutaryo, dkk., (2011). *Sistem Pendidikan Nasional untuk Membangun Peradaban Bangsa Indonesia yang Dijiwai Nilai-nilai Pancasila*. Edisi Revisi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Suyitno, I. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal. *Jurnal pendidikan karakter*, (1).
- Syahrudin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. *In Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*, 5 (9).
- Syahbudin, R. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa yang bermoral. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 17(2), 161-170.

- Tjandrawina, R. R. (2016). Industri 4.0: Revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi. *Jurnal Medicinus*, 29(1), Edisi April.
- University of Washington. (n.d.). *My COE; Resources for Current Students*. Retrieved from University of Washington; My COE: <https://education.uw.edu/sites/default/files/mycoe/current/docs/Independent%20Study.pdf>
- UPNV JATIM. (2014). *Pendidikan Bela Negara*. Jawa Timur.
- VentureWell. (2019, August 20). *Entrepreneurship Activities on Campus: Helping Students Leverage the Power of an Ecosystem*. Retrieved from VentureWell: <https://venturewell.org/entrepreneurship-activities-ecosystem/>
- WANTANNAS RI. (2017, September 24). *Publikasi; Sesjen Wantannas: Peran Mahasiswa Dalam Bela Negara Adalah Bagian Dari Menjaga Ketahanan Nasional*. Retrieved from wantannas.go.id: <https://www.wantannas.go.id/2017/09/24/sesjen-wantannas-peran-mahasiswa-dalam-bela-negara-adalah-bagian-dari-menjaga-ketahanan-nasional/>
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi Dalam Pendidikan dan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 207-215.
- Widiastuti. (2018). Konsep Cinta Tanah Air di Kalangan Mahasiswa. Retrieved from <http://repository.unsada.ac.id/1330/1/CINTA%20TANAH%20AIR%20DAN%20BANGSA%20DI%20KALANGAN%20MAHASISWA%20%28STUDI%20PUSAT%20TAKA%29.pdf>
- Widyaningsih, R., Sumiyem, & Kuntarto. (2017). Kerentanan Radikalisme Agama Di Kalangan Anak Muda. *Jurnal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1553-1562.
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, 1(26), 263-278
- Wiranata, P., Safitri, S., & Sair, A. (2018). Perkembangan Pendidikan Di

Palembang Pada Tahun 1942-1950. *Jurnal Sriksetra*.

Yunus, S. (2020, 2 Mei). *Potret Pendidikan Indonesia, Siapa Yang Harus Berbenah*. Retrieved from <https://kumparan.com/syarif-yunus/potret-pendidikan-indonesia-siapa-yang-harus-berbenah>.

Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian Prosiding Penelitian&Pengabdian Masyarakat*, 129-389; Volume 4, Nomor 2.

Zulfikar, M. F., Dinie, A.P. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal PEKAN Vol. 6 No. 1 Edisi April 2021*.

PROFIL PENULIS

Indri Arrafi Juliannisa.,S.E.,M.E



Penulis lahir di Bandarlampung, 13 Juli 1993, berprofesi sebagai dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2017. Menyelesaikan studi sarjana pada tahun 2015 di Universitas Lampung dan menyelesaikan studi magister tahun 2017 di Universitas Padjadjaran. Memiliki jabatan fungsional sebagai lektor, dan memiliki kepakaran menulis dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan dan ekonomi publik, adapun ID *google scholar* adalah: 5Oq3oekAAAAJ, dan ID SINTA adalah: 6197779. Memiliki hoby menonton film gender action, horror dan comedy, dan juga berprofesi sebagai editor jurnal di Faklutas Ekonomi dan Bisnis (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2021.

Tri Rizki Handayani Suganda



Penulis lahir di Jakarta, 27 Januari 2000, saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester akhir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Menyelesaikan studi SMP di SMP Negeri 106 Jakarta pada 2015 dan SMA di SMA Negeri 104 Jakarta pada 2018. Memiliki hobi membaca novel, menonton film, dan mendengarkan musik. Memiliki pengalaman sebagai Kadiv. Acara di Karang Taruna rt.006/ 09 Cijantung pada 2018-2019, mengikuti kompetisi matematika pada tahun 2017 sebagai salah satu perwakilan SMA Negeri 104 Jakarta dan mengikuti kompetisi matematika dan ilmu pengetahuan sosial pada tahun 2014 sebagai salah satu perwakilan SMP Negeri 106 Jakarta serta memenangkan juara 1 dalam lomba membuat cerpen di SMP Negeri 106 Jakarta.

Rahmi



Penulis lahir di Jakarta, 24 Agustus 1999. Penulis tinggal di Jalan Cipinang, Ciracas, Jakarta Timur. Anak ketiga dari pasangan ayah Ahmad Bajora dan ibu Sakdiah. Penulis memulai pendidikan formal di TK Islam Bustanul Athfal dan melanjutkan pendidikan di SDN 03 Kelapa Dua Wetan selama 6 tahun.

Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMPIT Fathan Mubina Jawa Barat dan MAN 2 Jakarta. Selama menempuh pendidikan formal di SDN 03 Kelapa Dua Wetan penulis meraih nilai ujian nasional matematika terbaik. Di SMPIT Fathan Mubina, penulis selalu mengikuti lomba cerdas cermat setiap tahun yang diadakan dalam sekolah. Saat menempuh pendidikan di MAN 2 Jakarta, penulis meraih predikat siswa terbaik di jurusan bahasa. Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan mendalami program studi S1 Ekonomi Pembangunan.

Maulana Riyan Fadillah



Penulis lahir di Pemalang, 7 Agustus 2000. Penulis tinggal di Jalan Duren Tiga Barat VI, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Penulis menamatkan pendidikan sekolah dasar di SDN Duren Tiga 07. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 124 Jakarta

serta sekolah menengah kejuruan di SMKN 8 Jakarta jurusan Akuntansi. Saat menempuh pendidikan di SMKN 8 Jakarta, penulis meraih nilai 100 pada ujian nasional matematika. Selain itu, penulis juga telah mengikuti Uji Sertifikasi Profesi Akuntansi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta dengan mendalami program studi S1 Ekonomi Pembangunan.

Diah Ambarwati



Penulis lahir di Jakarta, 20 oktober 1999, saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester akhir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, menyelesaikan studi SMP di SMP YWKA II Jakarta pada tahun 2014, dan SMA DI SMA Negeri 45 Jakarta pada tahun 2017, memiliki hobi memasak dan mendengarkan musik. Penulis memiliki pengalaman sebagai anggota departemen pendidikan dan pelatihan Tax Center UPNVJ pada tahun 2019. Penulis juga memiliki pengalaman sebagai ketua public relation dalam kegiatan company visit Tax Center UPNVJ tahun 2019, serta pengalaman sebagai Laison Officer (LO) pada acara seminar nasional Tax Center UPNVJ 2020 dan acara kompetisi ekonomi FEB UPNVJ 2020. Selama menempuh dan menamatkan pendidikan formal di SMAN 45 Jakarta penulis menjadi peraih nilai ujian nasional mata pelajaran ekonomi tertinggi di lingkungan sekolah. Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta program studi S1 Ekonomi Pembangunan.

Rifky Ramadhani



Penulis lahir di Jakarta, tanggal 24 November 2000. Saat ini berstatus sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 74 Jakarta dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 7 Jakarta. Berpengalaman dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa

Ekonomi Pembangunan (HIMAE) selama 1 periode yaitu pada tahun 2021 dengan jabatan tertinggi sebagai Kepala Divisi Konten Digital. Memiliki hobi, mendengarkan musik dan mendesain dengan menggunakan software adobe. Memiliki minat dibidang digital marketing seperti e-commerce dan mempunyai salah satu toko fashion wanita di e-commerce.

Pangesti Sekar Jati



Penulis lahir di Jakarta tanggal 24 Juli 2000. Saat ini berstatus sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) sejak tahun 2018. Jenjang pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 29 Jakarta dan pendidikan menengah atas di tempuh di SMA Negeri 74 Jakarta. Berpengalaman dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMAEP) dua periode yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jabatan tertinggi sebagai Ketua Divisi Hubungan Masyarakat, lalu pada tahun 2021 bergabung sebagai anggota Dewan Pengawas HIMAEP. Telah lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi Tenaga Pemasaran Operasional pada tahun 2021, serta telah mengikuti berbagai macam kursus secara daring antara lain; kursus Manajemen Risiko di Sertifikasiku, *Intro to International Marketing*, dan *International Marketing Entry and Execution* di Coursera dengan professor dari Yonsei University.

Siti Mar'atus Sholekhah



Penulis lahir di Lampung tanggal 17 Januari 2000. Saat ini berstatus sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 226 Jakarta dan

menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 66 Jakarta. Berpengalaman dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMAEP) selama dua periode yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jabatan tertinggi sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Telah lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi Tenaga Pemasaran Operasional pada tahun 2021. Memiliki minat di bidang *digital marketing* serta dalam bidang pendidikan.

Dimas Bagus Mahasinul Akbar



Penulis lahir di Depok, 29 April 2000, saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Arrahmaniyah Depok dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Depok. Memiliki hobi berolahraga seperti badminton, basket dan bermain sepak bola.

Helmy Haliansah



Penulis lahir di Depok, 07 Mei 1999, saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Tugu Ibu 1 Depok dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS YAPEMRI Depok. Pengalaman berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan periode 2020/ 2021 dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Kajian Ekonomi dan komunitas GenBI

Jakarta dengan jabatan staff di departemen kewirausahaan. Memiliki hobi Bersepeda.

Rizfan Bahardiansyah Novitriaji



Penulis lahir di Jakarta, 12 November 2000, saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 229 Jakarta dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA

Negeri 16 Jakarta. Berpengalaman dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dua periode yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jabatan tertinggi sebagai Kepala Divisi Desan dan Publikasi. Memiliki hobi di bidang seni seperti bermain dan mendengarkan musik, membuat dan menonton video, serta hobi di bidang otomotif.

Attifah Meita Rahmah



Penulis lahir di Bantul, 4 Mei 1999, saat ini berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Jakarta dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di

Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta. Berpengalaman dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dua periode yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jabatan tertinggi sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan. Memiliki hobi dalam bidang fotografi dan musik.

Charia Roswita



Penulis lahir di Kuningan Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1999. Saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan pendidikan di SMAN 54 Jakarta Timur pada tahun 2017. Memiliki hobi mendengarkan musik, menonton film, dan melukis.

Chika Chairunnisa



Penulis lahir di Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Februari 2001. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan pendidikan di SMAN 96 Jakarta Barat pada tahun 2018. Memiliki hobi memasak dan menonton film.

Hikmah Nurain



Penulis lahir di Depok, 25 September 1999, saat ini berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 10 Depok dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 12 Depok. Berpengalaman dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dua periode yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jabatan tertinggi sebagai Kepala Departemen Sosial

Kesejahteraan. Memiliki hobi melukis aliran naturalisme dan mendengarkan musik.

Nadhifa Ramadanisa



Penulis lahir di Jakarta, 09 Desember 2000, saat ini berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Negeri 32 Jakarta dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 63 Jakarta. Berpengalaman dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMAEP) UPN Veteran Jakarta Periode Tahun 2019 sebagai Staf Divisi Minat dan Bakat, Periode 2020 sebagai Bendagara 2, dan Periode 2021 sebagai Bendahara Umum.

Eka Yulia Ningsih



Penulis lahir di Tangerang, 24 Juli 2000, saat ini berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 110 Jakarta dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 43 Jakarta. Berpengalaman dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPN Veteran Jakarta Periode Tahun 2020 dengan jabatan sebagai Staf Direktorat Ekonomi Kreatif, juga pada organisasi Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul UPN Veteran Jakarta Periode Tahun 2020 dengan jabatan sebagai Koordinator Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menggali informasi melalui membaca suatu buku atau novel serta terjun langsung dalam suatu project instansi atau bisnis menjadi kegemaran hingga saat ini.

Reihana Anisa



Penulis lahir di Jakarta, 04 Januari 2000. Saat ini berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 117 Jakarta dan menyelesaikan studi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 50 Jakarta. Berpengalaman dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMAEP) UPN Veteran Jakarta Periode Tahun 2019 sebagai staf divisi humas, kemudian pada tahun 2020 melanjutkan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPN Veteran Jakarta sebagai staf divisi humas dan pada tahun 2021 melanjutkan organisasi di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMAEP) UPN Veteran Jakarta sebagai wakil ketua himpunan.



PENDIDIKAN & BELA NEGARA

Konsep yang dikembangkan oleh lembaga legislatif dan pejabat tinggi nasional tentang patriotisme semua komponen seseorang, kelompok, atau negara adalah untuk melindungi negara. Bela negara ada untuk menjaga eksistensi negara. Bela negara Indonesia berimplikasi sebagai wujud dari sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada satu negara berdasarkan UUD 1945. Hal itu dapat terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara. Penting untuk menanamkan bela negara dan pendidikan sebagai dasar sikap dan tindakan bangsa Indonesia. Bela negara dan pendidikan menjadi sinergitas yang sulit dipisahkan dalam tujuan pembangunan sumber daya manusia dalam masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan dalam negara berhak memberikan bimbingan arahan atau pengawasan serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata.

Indonesia telah melalui jalan yang panjang dalam dunia pendidikan, mulai dari zaman dimana masih dijajah oleh bangsa Eropa hingga saat ini yang masih terlaksana dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya sepanjang berjalannya pendidikan di Indonesia terdapat kendala maupun permasalahan yang muncul mulai dari SDM, sarana dan prasarana maupun dari segi pendanaan. Guna mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan diantaranya Program Indonesia Pintar hingga 12 Tahun Wajib Belajar. Selain itu beberapa sistem pendidikan di Indonesia pun telah ditetapkan yang bertujuan untuk membentuk karakter positif, memberikan pengetahuan baru yang bersifat akademis, dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki sejak dini.



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-5811-82-6

